

**MERAWAT
KEMERDEKAAN
PERS
DENGAN
OBJEKTIVITAS**



DEWANPERS

MERAWAT KEMERDEKAAN PERS DENGAN OBJEKTIVITAS

Tim Pengarah & Penanggung Jawab:

Yosep Adi Prasetyo, Ahmad Djauhar, Nezar Patria, Anthonius Jimmy Silalahi, Ratna Komala, Imam Wahyudi, Hendry CH. Bangun, Sinyo Harry Sarundajang, Reva Deddy Utama

Tim Penulis:

Rahmon Amri, Martha Warta Silaban, Dian Yuliasuti, Sepsha Dewi
Restian, Moch Nunung Kurniawan, Kurniawan Hari, Abdul Malik, Fadjar Adrianto, Hamzah Ali

Tim Editor:

Christiana Chelsia Chan, Wawan Agus Prasetyo

ISBN: 973–602–8721–33–2

Cetakan Pertama, Desember 2017

Hak Cipta pada DEWAN PERS

Sekretariat Dewan Pers:

Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8
Jl. Kebon Sirih No. 32 – 34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874–75, 77
Faks. (021) 3452030
www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id
sekretariat@dewanpers.or.id
pengaduan@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Facebook: Dewan Pers

Hak cipta dilindungi undang–undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	III
KATA PENGANTAR	V
DEKLARASI JAKARTA	IX
SAMBUTAN WPFD 2017	XXI
PENDAHULUAN	XXXV
BAB I JURNALISME BERKUALITAS: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL, DAMAI, DAN INKLUSIF	1
BAB II KESELAMATAN WARTAWAN DAN PENANGGULANGAN IMPUNITAS	21
BAB III MELEK MEDIA DAN INFORMASI: PERLAWANAN ATAS UJARAN KEBENCIAN, MISINFORMASI, DAN POLARISASI JARINGAN	47
BAB IV MEMUPUK KESETARAAN GENDER DAN INKLUSIVITAS MELALUI INOVASI MEDIA	65
BAB V INDEPENDENSI MEDIA DAN UPAYA MELAWAN EKSTREMISME BERKEKERASAN	85
BAB VI KEMERDEKAAN PERS DI ASIA TENGGARA: ARAH GERAK MAJU	103
BAB VII LIPUTAN MEDIA DAN PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENGUNGSIS DAN MIGRAN	119

BAB VIII	JURNALISME INVESTIGASI: PERSPEKTIF ASIA TENGGARA	145
BAB IX	DAMPAK BERITA PALSU DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP JURNALISME.....	163
BAB X	PELIPUTAN RAWAN KONFLIK	179
BAB XI	MENANGKAP KETIDAKADILAN MELALUI LENSA	195
BAB XII	MEMASTIKAN KEBEBASAN ARTISTIK: TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK	219
BAB XIII	RENCANA AKSI PBB UNTUK KESELAMATAN WARTAWAN: ISU IMPUNITAS DAN DAMPAKNYA DI ASIA TENGGARA	235
BAB XIV	MENILAI UNIVERSALITAS INTERNET	255

LAMPIRAN

1.	PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN	275
2.	UN PLAN OF ACTION ON THE SAFETY OF JOURNALISTS AND THE ISSUE OF IMPUNITY	282
3.	GALERI FOTO.....	296



KATA PENGANTAR

KETUA DEWAN PERS YOSEP ADI PRASETYO

Saya menyambut baik peringatan World Press Freedom Day (WPDFD) 2017 kali ini yang dilakukan di Jakarta. Pemilihan Jakarta sebagai lokasi acara adalah sebuah pilihan yang tepat. Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Jakarta adalah tempat yang ideal untuk membicarakan tentang kemerdekaan pers dan membahas tren baru media yang sedang berkembang saat ini. Tempat ini adalah simbol dari ibukota salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang telah berhasil melakukan proses transisi demokrasi. Masyarakat negeri ini menggunakan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan partisipasi sosial dan politik.

Dunia tampak semakin kecil. Batas sebuah negara kini telah menjadi kian kabur. Individu dan kelompok di berbagai negara menjadi lebih mudah untuk saling berinteraksi. Terjadi keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antar individu di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan

bentuk-bentuk interaksi lain. Masalah sekelompok orang di suatu daerah akan menjadi masalah bersama-sama. Masalah ini kerap meningkat menjadi masalah dunia bila terkait dengan lingkungan dan demokrasi. Bukan tak mungkin kemudian justru menjadi krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain.

Peran pers saat ini begitu penting dan berdampak pada semua bidang kehidupan manusia, terutama dalam mendorong munculnya sebuah pemerintahan yang baik, ikut menjaga perdamaian dunia dan peradaban manusia. Oleh karena itu, semestinya tak ada penguasa yang boleh menghambat kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.

Kemerdekaan pers harus mencakup dua hal, yaitu, *pertama*, struktur (*freedom from*) dimana tidak ada sensor, jurnalis bebas dari tekanan, media bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. *Kedua*, *performance (freedom to)*, yaitu bahwa kemerdekaan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya, apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.

WPFDD lahir sebagai keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1993 yang menyatakan bahwa tanggal 3 Mei adalah Hari Kemerdekaan Pers Dunia. Tujuan WPFDD adalah untuk merayakan prinsip-prinsip dasar kemerdekaan pers, mengevaluasi pelaksanaan kemerdekaan pers di seluruh dunia, dan memberikan penghormatan pada jurnalis yang kehilangan nyawa atau dihukum karena menjalankan profesi mereka. WPFDD juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan

pers dan mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka untuk menghormati dan menegakkan hak kebebasan ekspresi sesuai Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Pada setiap penyelenggaraan WPFDD, UNESCO memberikan Penghargaan Kemerdekaan Pers Dunia Guillermo Cano kepada individu, organisasi atau institusi yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa kepada pembelaan dan atau promosi kemerdekaan pers. Penghargaan tersebut dinamakan untuk menghormati Guillermo Cano Isaza, seorang jurnalis Kolombia yang dibunuh di depan kantor surat kabarnya, *El Espectador*, di Bogotá, pada 17 Desember 1986.

Acara WPFDD 2017 merupakan acara yang unik, untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden RI menghadiri acara yang sama pada hari yang bersamaan. Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara secara resmi pada pagi hari, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada *gala dinner* setelah DG UNESCO Irina Bokova mengumumkan pemenang Penghargaan Guillermo Cano 2017, yakni Dawit Isaak.

Lebih penting dari itu semua, tanpa kerja sama dan dukungan dari semua kementerian dan lembaga serta tujuh organisasi konstituen Dewan Pers, tak mungkin penyelenggaraan WPFDD 2017 ini akan berhasil, apalagi dikatakan sukses. Peserta internasional sejumlah hampir 600 orang hadir mewakili 93 negara, peserta nasional sejumlah hampir 900 orang dari 34 provinsi. Dari seluruh sesi diskusi yang berlangsung mulai dari tanggal 1-4 Mei 2017 terlaksana kurang lebih 33 sesi dengan kontribusi pemikiran dari 100 orang narasumber internasional dan 50 narasumber nasional.

Dewan Pers Indonesia berharap World Press Freedom Day 2017 yang mengambil topik “Critical Minds for Critical Times: Media’s

Role in Advancing Peaceful, Just and Inclusive Societies” bukan hanya berguna bagi masa depan jurnalisme dan media, tapi juga memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan perdamaian dan terwujudnya masyarakat yang inklusif serta memahami prinsip-prinsip keberagaman. Semoga WPFDD tahun ini bukan sekadar berbagi pengalaman dan mengevaluasi pelaksanaan kemerdekaan pers di berbagai negara, tapi juga menjadi tempat kita untuk saling bertukar pengalaman jurnalistik dalam menghadapi kemajuan teknologi berikut tantangan dan kendala yang ada.

Untuk itu, atas nama Dewan Pers, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan WPFDD 2017 sejak persiapan hingga pelaksanaannya. Terutama kami sampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya, Kementerian Luar Negeri beserta jajarannya (khususnya KBRI di Paris), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya.

Terima kasih juga kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Juga pihak perguruan tinggi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), dan Hong Kong Baptist University.

Semoga Deklarasi Jakarta yang dihasilkan WPFDD 2017 ini dan buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak yang mungkin berminat melakukan telaah pustaka atau bahkan akan menjadi penyelenggara kegiatan serupa di masa mendatang.



Deklarasi Jakarta Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017

“Pikiran Kritis untuk Masa Kritis: Peran media dalam memajukan masyarakat yang damai, adil dan inklusif”

Kami, peserta Konferensi Hari Kebebasan Pers Sedunia UNESCO, yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, 1-4 Mei 2017,

1. **Menimbang** kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers sebagai landasan demokrasi yang berfungsi dengan baik, yang menjaga, melindungi dan mempromosikan seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental lainnya;
2. **Mengingat** Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengemukakan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”;
3. **Mengingat** lebih lanjut mengenai Resolusi 38 C/53 yang telah diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO 2015 tentang konsep Universalitas Internet yang mengacu pada empat prinsip dasar

yang perlu diwujudkan dalam norma evolusi yang luas dari dimensi universal internet. Prinsipprinsip ini adalah: (i) bahwa internet berbasis hak asasi manusia (ii) terbuka, (iii) dapat dijangkau oleh semua orang, dan (iv) dikelola dengan partisipasi multipihak;

4. **Mengingat** pula Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang melindungi hak setiap orang terhadap kebebasan memiliki dan mengemukakan pendapat dan hak mencari informasi.
5. **Menekankan** hubungan antara media yang bebas dan pembangunan, sebagaimana dikemukakan dalam Deklarasi Windhoek 1991, sebuah landasan bagi peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (WPFDD) internasional;
6. **Menekankan** pula hubungan saling menguatkan antara kebebasan mengemukakan pendapat dan seluruh hak dan kebebasan lainnya, termasuk kebebasan berpikir, kebebasan nurani, serta kebebasan beragama, akademis dan artistik;
7. **Menyambut** Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) 2030 dan pengakuannya atas kontribusi kebebasan informasi dan kebebasan fundamental bagi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang baik;
8. **Mengakui** bahwa media, baik daring maupun luring, dapat menjadi pendorong dari semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG);
9. **Memperhatikan** terutama SDG 16 yang bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang adil, damai dan inklusif, dan **membangkitkan** sasaran SDG 16.10, yang bertujuan untuk “memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”;
10. **Menyambut** setiap tindakan yang menyoroti isu-isu ini lebih jauh pada tanggal 28 September, yaitu Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi;

- Pada tanggal 3 Mei, Hari Kebebasan Pers Dunia, dan pada tanggal 2 November, yaitu Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas untuk Kejahatan terhadap Wartawan;
11. **Menyoroti** pentingnya jurnalisme bebas dan independen untuk pencapaian SDG 16 serta potensi media sebagai katalisator perdamaian, dialog dan saling pengertian;
 12. **Menyadari** peran yang saling menguatkan antara supremasi hukum dan peradilan yang independen, disertai mekanisme partisipatif yang kuat dan media yang bebas dan independen sebagai dasar fundamental demokrasi;
 13. **Mengakui** bahwa masih diperlukan langkah-langkah untuk mencapai kesetaraan gender dalam dan melalui media;
 14. **Menggarisbawahi** masih terus relevannya kebebasan mengemukakan pendapat, dialog antar budaya, saling memahami dan inklusi sosial dari Rencana Aksi Rabat tentang larangan advokasi/segala bentuk tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar bangsa, ras atau agama yang terdiri atas menghasut untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (“Rencana Rabat”);
 15. **Memperhatikan** meningkatnya peran warga sebagai komunikator berita mengingat penggunaan teknologi telekomunikasi bergerak dan menekankan pentingnya hak untuk berkumpul dan bertukar secara bebas daring untuk pengumpulan data berbasis massa dan pertukaran informasi;
 16. **Mengamati** bagaimana proliferasi informasi palsu dan fenomena “gelembung media social” dapat memolarisasi debat publik, menyesatkan keseluruhan segmen masyarakat dan melemahkan jurnalisme yang profesional;
 17. **Memperhatikan** dengan kekhawatiran meningkatnya kecenderungan untuk menutup jaringan internet yang melemahkan kepercayaan warga negara, hak kebebasan mengemukakan pendapat, termasuk kebebasan pers, dan hak

- untuk mengakses informasi;
18. **Mengamati** dengan kekhawatiran kecenderungan global untuk secara tidak proporsional membatasi kebebasan mengemukakan pendapat atas nama keamanan nasional dan perang melawan terorisme, dan juga melalui penggunaan undang-undang dan aparat keamanan negara yang tidak proporsional;
 19. **Menekankan** pentingnya jurnalisme berkualitas tinggi yang memenuhi kepentingan publik, untuk kehidupan sipil dan politik yang demokratis, termasuk jurnalisme investigatif, menghormati standar profesional dan etika dan menikmati perlindungan terhadap kerahasiaan narasumber, dan menyadari bahwa jurnalisme semacam itu mewakili kebaikan publik untuk semua Anggota masyarakat;
 20. **Menghargai** pentingnya menghormati kerahasiaan komunikasi sebagai prasyarat untuk jurnalisme independen, dan perlindungan terhadap wartawan dan narasumbernya;
 21. **Menekankan** pentingnya literasi media dan informasi, termasuk literasi digital dan privasi, dalam pengembangan pemikiran kritis mengenai penggunaan dan produksi media;
 22. **Menghormati** wartawan dan pekerja media yang berkontribusi terhadap kebebasan pers melalui pekerjaan dan komitmen mereka, seringkali berisiko terhadap keselamatan dan keamanan pribadi mereka;
 23. **Mengutuk** segala bentuk kekerasan, agresi dan intimidasi terhadap wartawan dan mengenali khususnya ancaman tertentu yang secara spesifik dihadapi oleh wartawan perempuan, seperti pelecehan seksual;
 24. **Menyadari** perlunya pendekatan internasional multipihak untuk meraih kesuksesan dalam mengakhiri kekerasan terhadap wartawan dan menangani masalah impunitas atas kejahatan yang dilakukan terhadap wartawan;

25. **Menyambut** upaya multipihak yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk meningkatkan perlindungan jurnalis dan menangani masalah kekebalan hukum melalui pelaksanaan Rencana Aksi PBB mengenai Keselamatan Wartawan dan ‘su Impunitas (“Rencana PBB”); dan
26. **Menyadari** bahwa internet adalah media yang ampuh untuk mengekspresikan diri yang memudahkan kemampuan penggunaannya untuk berbicara dengan bebas dan untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu kami:

Menyeru setiap Negara Anggota UNESCO untuk:

27. **Menyadari**, bahwa dalam hal komitmen mereka terhadap standar hak asasi manusia internasional, relevansi media yang bebas, independen dan pluralistik dalam memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan masyarakat yang damai, adil dan inklusif;
28. **Menciptakan** lingkungan hukum, politik dan kelembagaan yang memungkinkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berpikir dan kebebasan hati nurani, dipromosikan dan dilindungi;
29. **Menyadari** pentingnya agenda kerja yang layak, seperti yang tercantum dalam SDG 8, dalam menciptakan lingkungan dimana wartawan dapat beroperasi bebas dari korupsi, kemiskinan dan ketakutan, dan untuk mengembangkan solidaritas profesional dan hak sosial dan profesional mereka;
30. **Menimbang** untuk menjadikan perbuatan yang dengan sengaja melakukan menghambat atau menghalangi pelaksanaan kebebasan media yang sah sebagai tindak pidana;
31. **Mendukung** pengembangan jurnalisme berkualitas, jurnalisme investigatif dan media bebas sebagai barang publik

yang mampu memberikan informasi yang berkualitas dan menciptakan ruang bagi debat publik yang sehat, tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan;

32. **Meningkatkan** kemampuan dan akuntabilitas polisi, jaksa dan hakim untuk memenuhi tugas negara untuk memastikan penyelidikan, penuntutan dan penghukuman yang efektif dan independen terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap wartawan dalam pelaksanaan pekerjaan mereka;
33. **Melaksanakan** Rencana PBB dan memastikan bahwa upaya nasional dalam hal ini mencakup perlindungan jurnalis, pencegahan kekerasan terhadap media dan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan ini;
34. **Menyadari** legitimasi penggunaan teknologi enkripsi dan anonimisasi;
35. **Mempromosikan** pluralisme media, termasuk dengan mencegah konsentrasi kepemilikan media yang berlebihan, memastikan keragaman debat publik dan inklusivitas dalam lanskap media, dan mempromosikan representasi yang adil dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan;
36. **Menyelaraskan** pandangan dengan Rencana Rabat saat mempertimbangkan langkah-langkah peraturan untuk menghadapi perkataan yang membenci, terutama yang berkaitan dengan masalah nasional, ras dan agama;
37. **Meningkatkan** inisiatif literasi media dan informasi untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan mendorong pemikiran yang kritis;
38. **Meratifikasi** dan melaksanakan Konvensi 2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya, yang berkomitmen untuk menciptakan, menyebarkan, dan menikmati keberagaman ekspresi budaya;

39. **Mendorong** internet yang inklusif dan mempromosikan akses universal ke internet, berdasarkan empat prinsip dasar Universalitas Internet: Hak Asasi Manusia, Keterbukaan, Keterjangkauan dan Partisipasi multipihak;
40. **Menahan** diri dari menutup jaringan internet dan tindakan lain yang terlalu membatasi kebebasan mengemukakan pendapat dan akses terhadap informasi secara daring, seperti teknik penyaringan atau pemblokiran yang tidak proporsional;
41. **Menyesuaikan** undang-undang, peraturan dan kebijakan mereka dengan standar internasional tentang kebebasan mengemukakan pendapat dan meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap standar tersebut di antara pejabat publik;
42. **Sepenuhnya** melaksanakan resolusi dan kesepakatan mengenai perlindungan terhadap wartawan dan penghormatan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, Dewan Keamanan dan UNESCO, dan oleh organisasi hak asasi manusia regional;
43. **Memahami** Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan kesempatan yang diberikannya untuk masa depan pembangunan manusia dan mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan arus bebas informasi pemerintah kepada publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tertarik untuk mengembangkan, mengadopsi dan menerapkan akses kepada hukum informasi.

Menyeru UNESCO untuk:

44. **Mempromosikan** penguatan lebih lanjut dari kerangka hukum, kelembagaan dan sosial internasional yang menangani kekerasan terhadap wartawan dan impunitas atas kejahatan semacam itu, dan mempromosikan implementasi penuh dari

- ketentuan dan struktur yang ada yang menangani masalah ini;
45. **Mendukung** terciptanya mekanisme nasional dan regional yang mempromosikan keselamatan jurnalis dan menangani impunitas;
 46. **Mempromosikan** pengambilan Rencana PBB oleh pemangku kepentingan lokal dan bekerja untuk penguatannya, berdasarkan kesimpulan Konsultasi Multi-Pihak mengenai Penguatan Rencana Aksi PBB untuk Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas yang akan berlangsung pada 29 Juni 2017 di Jenewa, Swiss (“Konsultasi Multi-Pihak”);
 47. **Meningkatkan** kolaborasinya dengan insitusi akademis dan institusi sejenis lainnya untuk meningkatkan penelitian dan pemahaman tentang isu kebebasan mengemukakan pendapat dan perkembangan media, termasuk dengan memanfaatkan Jaringan Penelitian Keselamatan Jurnalisme untuk menjangkau institusi dan peneliti yang lebih luas;
 48. **Mendukung** kapasitas media untuk mempraktikkan jurnalisme profesional yang dapat mempromosikan pendidikan, dialog dan saling pengertian publik;
 49. **Mempromosikan** diskusi publik untuk menemukan alternatif untuk melawan proliferasi konten yang dipalsukan dan fenomena “gelembung media sosial”;
 50. **Lebih jauh meningkatkan** berbagai inisiatif program Literasi Media and Informasi;
 51. **Mempromosikan** kemampuan dan teknik untuk memungkinkan jurnalis memastikan kerahasiaan pekerjaan mereka, termasuk melalui enkripsi;
 52. **Meningkatkan** berbagai upaya inklusivitas dan kesetaraan gender di media melalui diseminasi dan promosi Indikator Sensitif Gender untuk Media;
 53. **Mempromosikan** kebebasan artistik sebagai landasan kebebasan mengemukakan pendapat dan sebagai landasan demokrasi partisipatoris, dan mendukung kreasi artistik dan

menjamin akses terhadap kehidupan budaya bagi semua anggota masyarakat;

54. **Terus menyoroti** pentingnya kebebasan mengemukakan pendapat dan akses publik terhadap informasi;
55. **Memperkuat** kapasitasnya untuk memantau indikator keselannatan wartawan dan akses terhadap informasi dalam konteks SDG;
56. **Mempromosikan** penerapan kebijakan terkait internet yang dipandu oleh prinsip-prinsip Universalitas Internasional untuk pencapaian suatu Masyarakat Berpengetahuan yang inklusif untuk semua.

Menyeru wartawan, media, praktisi media sosial dan perantara internet untuk:

57. **Menghadirkan** jurnalisme berdasarkan kepentingan publik yang andal, baik daring maupun luring, yang pada gilirannya dapat berperan sebagai informasi yang dapat digunakan bersama untuk memungkinkan terciptanya saling pengertian dan dialog antarbudaya;
58. **Mendorong** jurnalisme yang peka terhadap konflik, khususnya saat melaporkan dari zona konflik bersenjata, termasuk dengan memberikan laporan profesional dan inklusif yang dapat mendukung dialog dan rekonsiliasi;
59. **Meningkatkan** inklusi media dengan memberi suara kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili dan rentan di masyarakat, dan menghindari terlalu banyak mewakili segmen elit atau dominan dari populasi, serta melaporkan berdasarkan prasangka dan diskriminasi;
60. **Menangani** ketidaksetaraan yang terus-menerus berdasarkan gender baik dalam konten media maupun pengoperasian media;

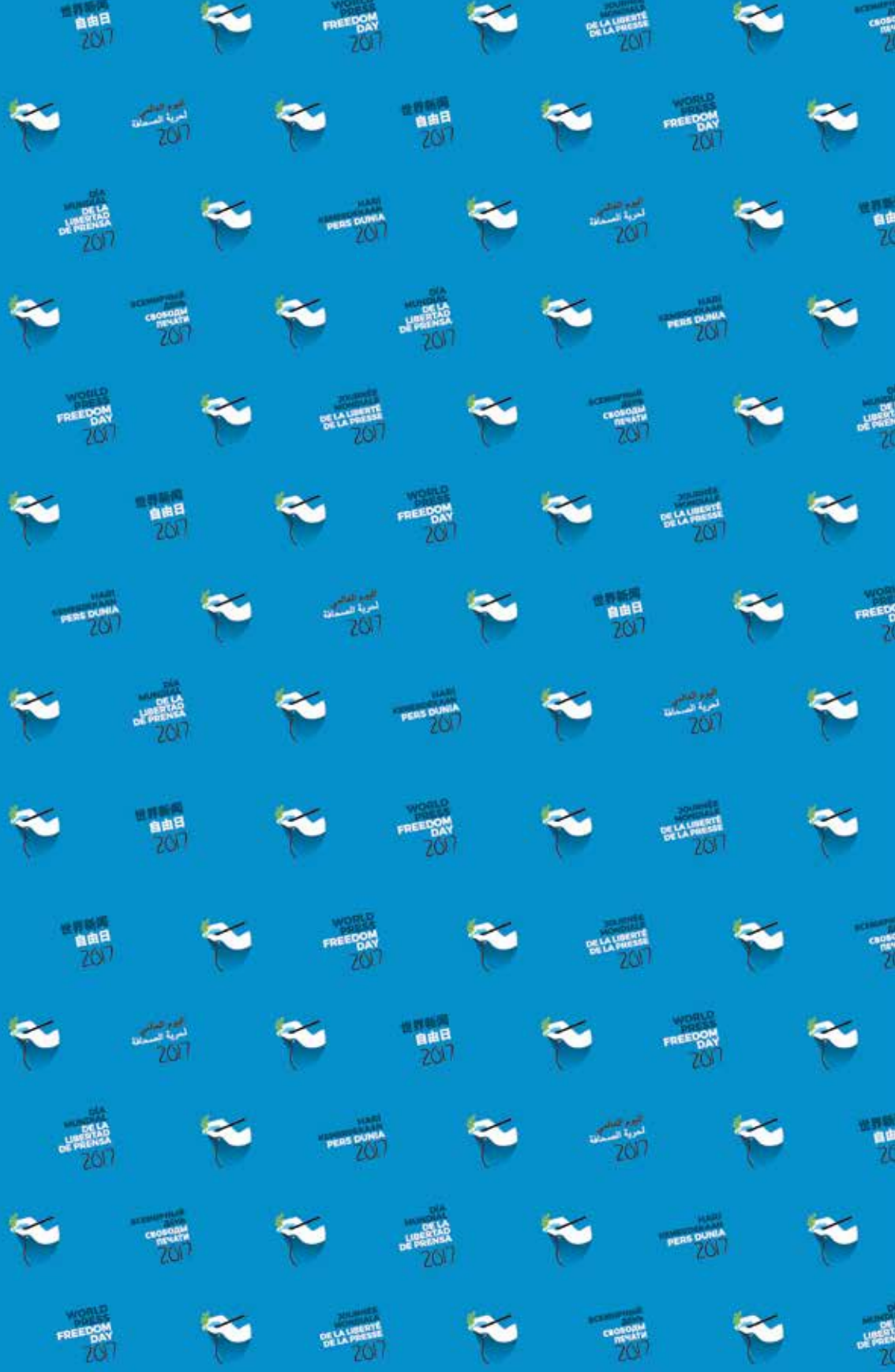
61. **Memastikan** bahwa pelaporan didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi, dan dengan mempromosikan berbagai inisiatif literasi media dan informasi, untuk melawan proliferasi berita yang dipalsukan;
62. **Merujuk** pada panduan Rencana Rabat dan Pasal 20 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menetapkan prinsip-prinsip untuk melindungi kebebasan mengemukakan pendapat sambil membahas isu mengenai hate speech ungkapan kebencian;
63. **Meningkatkan** kesadaran tentang Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas untuk Kejahatan terhadap Wartawan pada tanggal 2 November, dan berpartisipasi dalam Rencana PBB dengan tindakan pelengkap atau bersama sesuai dengan pendekatan bersama dan multi pihak;
64. **Melaksanakan** langkah preventif keselamatan fisik dan psikologis, memperhatikan masalah gender dan keamanan digital, serta menerapkan mekanisme respons krisis yang efektif untuk menjamin kesejahteraan wartawan dan pekerja media yang terpapar ancaman;
65. **Mengetahui** Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan peluang yang diberikannya untuk masa depan pembangunan manusia.

Menyeru masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis yang terkait untuk:

66. **Memberikan** pendampingan untuk mendukung usaha bersama dan keterlibatan semua pemangku kepentingan menuju pencapaian SDG dan mempromosikan pengakuan atas kontribusi ini melalui media bebas, pluralis dan independen;
67. **Mendukung** upaya untuk mempromosikan kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan hak untuk mengakses informasi, termasuk melalui dukungan terhadap

- inisiatif di tingkat nasional, regional dan internasional;
68. **Berkolaborasi** dengan upaya internasional yang relevan untuk meningkatkan keselamatan jurnalis, seperti Rencana PBB dan Konsultasi Multi-Pihak yang akan datang;
 69. **Menyoroti** pentingnya perlindungan kerahasiaan narasumber jurnalis di era digital;
 70. **Memberikan** pendampingan demi kebijakan internet yang berbasis hak asasi manusia, keterbukaan, keterjangkauan dan keterlibatan multipihak;
 71. **Melaksanakan** kegiatan untuk memajukan kebijakan, program dan penelitian mengenai literasi media dan informasi;
 72. **Memantau** perilaku, usulan dan tindakan otoritas publik, perantara internet dan badan multilateral yang mempengaruhi kebebasan mengemukakan pendapat, apabila didalamnya mengandung hal-hal membahayakan dan menyarankan alternatif yang memajukan kebebasan mengemukakan pendapat dan akses terhadap informasi;
 73. **Meningkatkan** pembahasan mengenai dan kegiatan untuk pelaksanaan sasaran SDG 16.10, yang bertujuan untuk “memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”; dan
 74. **Mendukung** keterlibatan profesional di bidang hukum dalam rangka memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan media.

Diadopsi pada tanggal 4 Mei 2017 di Jakarta, Indonesia





SAMBUTAN WPFD 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, selamat malam dan selamat datang di Indonesia, rumah jurnalisisme yang paling bebas dan paling berenergi tinggi di dunia. Ketika krisis keuangan Asia tahun 1997 melanda Indonesia, situasinya sangat serius. Perekonomian kita turun sebesar minus lima belas persen (-15%) hanya dalam satu tahun. Masyarakat kita menjadi bingung, masa depan kita menjadi tidak pasti, namun lahir dari krisis itulah yang membuat Indonesia menjadi masyarakat yang kuat dan dinamis. Demokrasi, ekonomi berorientasi pasar, dan yang terpenting adalah kebebasan politik termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997, ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 300%. Kami memiliki tidak kurang dari, pergantian kekuasaan yang damai dalam 20 tahun terakhir.

Studi global menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling optimis di dunia. Saya ingin mengatakan kepada Anda anggota pers nasional kita dan kepada Anda anggota pers internasional, kami tidak bisa melakukan ini tanpa kalian. Sekali lagi, kami tidak bisa melakukan ini tanpa kalian. Sejak era reformasi di akhir tahun 1990an, pers yang bebas dan energik dan berenergi, telah memainkan peran penting dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas pemerintah dan karena itu memerangi korupsi dan dalam menjaga agar semua orang terhibur. Demokrasi itu dinamis dan Anda, teman-teman kami di media membuat demokrasi semakin dinamis.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jurnalisme dunia saat ini mungkin menghadapi tantangan terbesar dalam satu generasi. Hoax, berita palsu, ujaran kebencian, yang kita lihat. Semakin maju penduduk tetapi masih banyak jurnalis dan penulis menghadapi penganiayaan di banyak belahan dunia. Setiap kali kita menghadapi tantangan seperti itu, banyak komentator yang mengatakan bahwa dunia akan segera berakhir. Kepada mereka saya berkata: “Anda terlalu muda untuk mengingat. Kami akan mengatasinya. Kami telah melakukannya sebelumnya dan kami akan melakukannya lagi.”

Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat atas pemenang Guillermo Cano Prize malam ini, Ibu Bethel, dan kepada Anda semua dan kepada kita semua selamat hari kebebasan pers yang sangat membahagiakan. Terima kasih, terima kasih banyak.

Wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SAMBUTAN WPFD 2017

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M. JUSUF KALLA

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.*

Pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada kita semua atas berlangsungnya acara “*World Freedom Day*” hari ini. Dan berterima kasih, bahwa Indonesia menjadi tempat untuk memperingati dan juga meneguhkan posisi kita, mendukung kuat pandangan kita, perlunya suatu negara menjaga kebebasan pers yang baik, yang bertanggung jawab untuk kemajuan negara dan bangsa itu sendiri. Kita mengetahui perkembangan di dunia ini, khususnya juga di Indonesia. Pada masa lalu, 20 (dua puluh) tahun lalu kita mengetahui, bahwa media di Indonesia, pers di Indonesia hal yang selalu mendapat perhatian, pengawasan dan begitu banyak ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mencerminkan media yang kritis dan memberikan kritik kepada pemerintah.

Namun, setelah reformasi tahun 1998 hal itu berubah drastis. Pada zaman reformasi ada 3 (tiga) hal yang berupa pokok di Indonesia ini. Pertama demokrasi, kebebasan berpendapat, sistem nasional yang sangat demokratis, kemudian sistem pemerintahan yang otonomi, dan salah satu syarat daripada demokrasi dan otonomi itu adalah kebebasan pers. Karena itulah, 3 (tiga) serangkai suatu perubahan yang sangat di negeri ini 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sehingga Indonesia menjadi suatu negara di mana kebebasan pers itu sangat dihargai dan itu juga dilindungi dalam Undang-undang Dasar dalam hal hak asasi manusia (HAM) salah satu ialah hak untuk berpendapat. Itulah menjadi bagian yang sangat penting kenapa kebebasan pers di Indonesia sangat fundamental, sangat penting untuk kita semua, untuk menjaga berlangsungnya hal-hal yang penting ini. Begitu juga Undang-undang yang mengatur tentang kebebasan pers itu yang sangat penting, dan sangat jelas bagaimana fungsinya dia yang terbuka dan bebas itu dalam kerangka kemajuan nasional.

Memang banyak mempertanyakan bagaimana Indonesia, di mana Indonesia dan negara yang mayoritas berpenduduk Islam, tetapi sekaligus dapat menjalankan demokrasi dan juga tentu kebebasan pers secara bersamaan. Banyak negara di dunia ini tidak bisa menyatukan tiga hal tersebut, tetapi Indonesia dapat menyatukan demokrasi, otonomi, dan kebebasan pers secara bersamaan. Hal itulah tentu kita berterima kasih kepada seluruh media. Tentu hal ini menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat besar. Kalau sebelumnya media membutuhkan izin berbagai macam izin, izin terbit, izin cetak, dan sebagainya. Sekarang ini untuk menerbitkan suatu media tidak perlu izin-izin seperti itu lagi. Tentu akibatnya di Indonesia ada kurang lebih 2.000 media cetak.

Begitu juga radio yang izin hanya izin frekuensi, yang menyebabkan ada 1.100 radio di Indonesia. Ada 394 atau hampir 400 TV, baik TV

nasional, TV-TV di daerah sampai di kota kecil semua berkembang dengan baik yang menyebabkan sebenarnya suatu ekspresi yang berkembang di negeri ini, disamping tentu 43 (empat puluh tiga) ribu media online yang setiap hari dapat di lihat di gadget masing-masing. Inilah menyebabkan di Indonesia dapat menjalankan kebebasan pers ini secara efektif, akibat tadi 3 (tiga) hal, yaitu dasarnya demokrasi, kemudian juga berkembangnya pandangan-pandangan, berkembangnya industri media itu sendiri dalam negeri yang dilindungi baik oleh konstitusi juga oleh Undang-undang yang berlaku.

Namun tentu kebebasan itu bukan hanya untuk kebebasan, tetapi kebebasan untuk bagaimana memajukan negeri ini. Memang kita sadari, bahwa kebebasan pers itu tentu mempunyai tanggung jawab, tetapi bukan lagi tanggung jawab kepada hukuman atau sensor, tetapi tanggung jawab kepada etika dan aturan internal masing-masing media. Inilah yang kita harapkan, bahwa bagaimana hal ini menjadi bagian yang fundamental dan kita juga mengharapkan di dunia ini tentu kebebasan pers juga mempertimbangkan beberapa hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam kebebasan berpendapat, bahwa diatas kebebasan itu ada keadilan, kemudian ada damai, ada perdamaian, karena apabila media bebas, tetapi tidak ada perdamaian menimbulkan konflik tentu media harus bertanggung jawab akan itu. Begitu juga menimbulkan ketidakadilan kepada bangsa ini atau apabila ada ketidakadilan, ada konflik media harus berbuat lebih baik untuk menjalankan, membela atau meluruskan hal-hal yang perlu menjadinya terjaminnya keadilan dan perdamaian suatu negara dan juga kemajuannya negara. Apalagi dengan teknologi pada dewasa ini, sehingga batas-batas negara, batas-batas informasi sudah melampaui batas-batas negara sangat jauhnya, tidak lagi batas negara dalam mendapat informasi dan berpendapat.

Memang juga ada perkembangan dalam setiap demokrasi dan juga setiap perkembangan suatu negara sesuai dengan teknologi. Ada penafsiran informasinya masih lewat kaset yang di kirim dari luar. Di China melalui fax, tetapi apa yang terjadi di Timur Tengah semuanya akibat *Facebook* artinya adalah teknologi dalam media mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia ini secara keseluruhan, baik yang positif juga yang negatif. Tentu hal tersebut harus lah kita lihat bagaimana media memberikan sumbangan dalam politik, dan dalam ekonomi pembangunan yang berkelanjutan *sistem flexibility*. Dan bagaimana media memberikan informasi, sehingga kemiskinan bisa kita atasi. Bagaimana media memberikan informasi, sehingga kita melihat di mana kesenjangan itu terjadi. Semua itu akan memberikan manfaat, bahwa media yang terbuka, media yang bebas memberikan andil dalam kemajuan suatu negara. itulah harapan kita semuanya.

Tentu kebebasan ini bukan segala-galanya, tetapi manfaat kebebasan ini harus jelas untuk masyarakat kita semuanya. Dan minggu lalu baru saja kita meresmikan JAWARAH (Jaringan Wartawan Anti Hoax), karena kebebasan berpendapat dengan media dan dengan teknologi yang sangat terbuka dan sangat tinggi bisa menimbulkan juga hal-hal yang negatif. Apabila kita tidak melaksanakan internal sensor masing-masing. Di Indonesia sensor itu tidak ada, tetapi yang kita harapkan ialah media mensensor dirinya demi persatuan, demi demokrasi, dan demi juga keadilan suatu bangsa itu. Karena itulah, apabila tidak dijalankan itu, maka kepercayaan kepada media sendiri akan berkurang, karena media yang baik apalagi media yang *mainstream* harus lah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Suatu objek kepercayaan hanya ditimbulk dari objektivitas, kecepatan, dan hasil daripada kebebasan itu sendiri. Karena itulah, banyak hal yang tentu mencakup apa yang kita bicarakan. Kalau kita berbicara kebebasan darimana, kebebasan dari sensor, kebebasan dari izin-izin, kebebasan dari dependensi,

tetapi kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk perdamaian, untuk keadilan, menghilangkan konflik, dan sebagainya. Itulah yang sangat penting dan direnungkan bersama-sama oleh kita semua di sini, oleh media ini. Karena itulah, saya mengharapkan sekali lagi agar media memaksimalkan manfaat daripada kebebasan dan teknologi yang ada untuk kebaikan kita semuanya. Pemerintah di mana saja butuh kritik dan butuh suatu pandangan yang kritis. Kritis dan kritik, karena hanya lah 2 (dua) hal tersebut. Negara tidak dapat terjaga arahnya tanpa kritik, tanpa kritik daripada medianya yang mewakili pandangan masyarakat, maka media juga tidak memberikan manfaat yang besar atas kebebasan tersebut.

Tetapi negara tanpa pandangan-pandangan kritis tidak juga dapat menjalankan misi kenegaraannya, yaitu pemerintahnya yang baik dan adil. Karena itulah, harapan pada hari ini adalah bagaimana semua ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga tentu untuk menjaga semua itu, pemerintah menjamin keselamatan, menjamin tidak adanya intervensi kepada media, tetapi media juga tentu harus bersikap objektif bagaimana menjalankan pemerintahan tersebut.

Jadi artinya adalah kita saling menjaga, masyarakat menjaga adanya kebebasan itu, tetapi media juga menjaga objektivitasnya, sehingga menjaga keutuhan masyarakat. Itulah harapan kita semuanya, semoga hari kebebasan pers hari ini yang diperingati secara universal, “*World Press Freedom Day*” itu menjadi bagian daripada suatu tekad kita untuk menjadikan pers itu bermanfaat kepada kita semuanya, dengan kebebasan yang tentunya penuh dengan etika dan juga tanggung jawab.

Terima Kasih.

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.



SAMBUTAN WPFD 2017

DIREKTUR JENDERAL UNESCO IRINA BOKOVA

Pikiran Kritis untuk Masa Kritis – demikian tema Hari Kemerdekaan Pers Dunia 2017.

“Hanya independensi, karakter, obyektivitas dan pertimbangan mantap wartawan dan media dapat mengatasi badai-badai buruk dunia baru yang mengancam kebebasan memperoleh informasi di mana-mana.”

Guillermo Cano Isaza, seorang wartawan Kolombia dibunuh pada 1986, menulis kata-kata ini dua tahun sebelum kematiannya dan kata-kata itu masih berkumandang dewasa ini, 33 tahun kemudian, selagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Pers Dunia dan peringatan ke-20 Hadiah Kemerdekaan Pers Dunia Guillermo Cano/UNESCO.

Dalam menghadapi sebuah krisis jatidiri audiens, jurnalisme berdiri di depan cakrawala di mana tantangan-tantangan lama berlebur dengan ancaman-ancaman baru. Usaha media sedang digoncangkan sampai ke titik dalam dengan bangkitnya jejaring digital dan media sosial. Wartawan warga sedang menarik garis baru batas-batas jurnalisme. Akuntabilitas dan kredibilitas media

sedang dipertanyakan. Dalam jaringan, kekaburan sudah terlihat antara iklan dan bahan redaksional, dan kita lihat aktor-aktor swasta mengemuka selaku perantara kunci, dilengkapi dengan bentuk-bentuk baru 'sensor swasta'. Tantangan-tantangan ini berlebur dengan transformasi lebih mendalam yang berpengaruh pada masyarakat. Kata unggul tahun 2016 Kamus Oxford adalah "post-truth" ("pascakebenaran"). Digabung dengan konsep "fake news" ("berita bohong"), pertanyaan-pertanyaan muncul, pertanyaan mana mengarah ke jantung jurnalisme bebas, independen dan profesional.

Semua ini datang pada masa ketika media bebas, independen dan pluralistis menjadi begitu penting untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki perorangan, memperkokoh tata pemerintahan baik dan penegakan hukum, dan mengantar maju Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 –khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16, membangun masyarakat adil, damai dan inklusif. Media hendaknya tidak menjadi sumber informasi terpercaya saja –hendaknya ia juga menjadi panggung bagi aneka suara dan memobilisasi kekuatan-kekuatan baru bagi toleransi dan dialog.

Taruhannya sudah jelas. Kita memerlukan jurnalisme asli, kritis, dan memakai riset berkedalaman, dipandu kaidah-kaidah profesional dan etika tinggi dan pendidikan media berkualitas – digabung dengan audiens yang memiliki ketrampilan tepat melek media dan informasi.

UNESCO mempelopori upaya ini di seluruh dunia, mulai dengan membela keselamatan wartawan. Sudah terlalu sering tindak pembunuhan menjadi bentuk sensor paling tragis –102 wartawan mengorbankan jiwa mereka pada 2016. Hal ini tak dapat diterima

dan memperlemah masyarakat secara keseluruhan. Karena inilah UNESCO menjadi ujung tombak *Rencana Aksi PBB Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas* bersama para mitra di seluruh dunia.

Pikiran kritis untuk masa kritis. Hari ini saya memanggil semua orang untuk mempertajam pikiran mereka untuk membela kemerdekaan-kemerdekaan yang esensial bagi keadilan dan perdamaian—inilah pesan UNESCO bagi Hari Kemerdekaan Pers Dunia 2017.



SAMBUTAN WPFD 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA RUDIANTARA

Hari ini merupakan hari terakhir rangkaian acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017. Atas nama Pemerintah Indonesia dan Dewan Pers, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan partisipasi Anda semua dalam acara ini di Jakarta.

Peringatan ini memiliki arti khusus bagi Indonesia, mengingat proses demokratisasi yang telah dimulai sejak tahun 1998. Melalui serangkaian gangguan politik dan ekonomi yang berat, kekerasan bersenjata di daerah, bencana alam, dan ketegangan antar ras dan agama, Indonesia telah menjadi negara yang demokratis.

Kami telah mengalami secara langsung bahwa kebebasan pers memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Dalam 17 tahun terakhir, Indonesia telah mendapatkan banyak hal positif dari kebebasan pers—khususnya mengenai bagaimana pers dapat menyampaikan kritik dan menyediakan ruang untuk berbagai pendapat, yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Itulah alasan mengapa kami sangat antusias menjadi tuan rumah peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017.

Kami begitu ingin berbagi dan belajar dari Anda, tentang pengalaman kami sendiri dalam menumbuhkan kebebasan pers dan menyelesaikan banyak tantangan bagi pers dan tanggung jawabnya dalam membangun bangsa. Penghargaan Guillermo Cano, tradisi tahunan WPF (World Press Freedom Day/Hari Kebebasan Pers Sedunia), akan terus mengingatkan kita akan perlunya pers yang bebas, pers yang tanpa rasa takut melaporkan informasi yang jujur dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kami telah terlibat dalam sejumlah diskusi mengenai tema-tema penting dan kontemporer. Mulai dari bagaimana teknologi informasi telah mengubah lanskap industri media menjadi bagaimana kita bisa menghilangkan kesenjangan literasi di dunia digital ini. Di sisi lain, kami juga memiliki kekhawatiran yang sama bahwa teknologi informasi juga mempunyai sisi gelapnya; yaitu bisa digunakan untuk menyebarkan kebencian dan berita palsu, yang mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat kita.

Dalam WPF 2017 ini, kita dapat memusatkan perhatian membahas mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG), terutama untuk mencapai SDG nomor 16, mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif, serta bagaimana kita dapat melawan gelembung media sosial keduanya adalah isu utama yang tercermin dalam Deklarasi Jakarta yang kita buat.

Kami menyadari bahwa kita perlu kembali pada komunikasi publik yang sehat, dan mendukung jurnalisme berkualitas yang menjadi cahaya di tengah gelombang informasi yang beraneka ragam.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, dengan bahagia saya mencatat bahwa WPF tahun ini terus memelihara masa depan jurnalisme. Youth News Room, yang dikelola oleh Universitas Multimedia Nusantara, memperlihatkan bagaimana anak muda

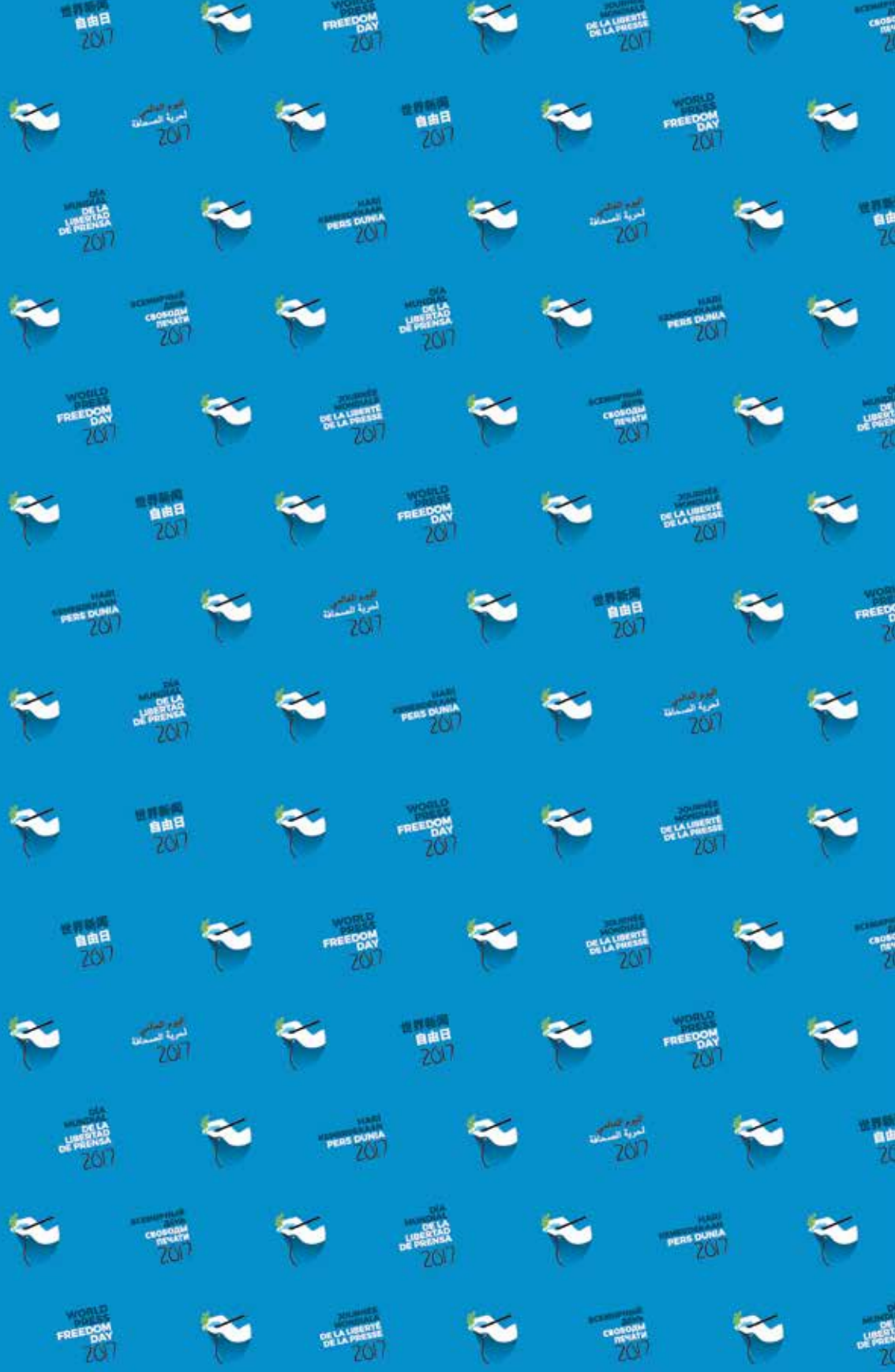
memainkan peran yang semakin penting dalam membuat dan menyebarkan berita. Youth News Room tersebut, menurut pandangan saya, tidak hanya berhasil dalam menyebarkan berita tentang acara kita ini, tetapi juga mengukuhkan keyakinan kita akan masa depan jurnalistik, serta masa depan demokrasi.

Saya menyampaikan terima kasih kepada UNESCO atas kerja samanya dengan Indonesia untuk menjadi tuan rumah WPFD tahun ini. Terima kasih juga saya juga sampaikan kepada Dewan Pers Indonesia. Kepada semua lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, para pembicara dan moderator, rapporteurs dan Anda semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini saya ucapkan: terima kasih.

Sebagai penutup pidato saya, izinkan saya menginformasikan kepada Anda mengenai hiburan yang ditampilkan semalam, setelah acara pembukaan. Seperti telah Anda saksikan, tadi malam kita disajikan penampilan ‘angklung’, alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, yang merupakan karya Mang-Udjo, seorang maestro angklung yang terkenal di dunia. Angklung juga masuk dalam daftar perwakilan warisan budaya tak-benda umat manusia UNESCO.

Selain untuk menghibur, penampilan angklung bertujuan mengajak kita semua untuk memahami filosofi musik angklung: bahwa setiap orang yang memainkan alat musik tersebut berperan penting dalam terciptanya orkestra yang anggun dan harmonis. Saya berharap orkestra angklung yang kita tampilkan tadi malam bisa membangkitkan semangat yang sama dalam diri kita yaitu bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Dengan demikian, saya mengucapkan selamat berpisah, dan sampai jumpa pada kesempatan lain di Indonesia.

Terima kasih.



PENDAHULUAN

Mei 2014, Dewan Pers Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Bagir Manan sebagai Ketua dan Margiono sebagai Wakil Ketua menugaskan Anggota Dewan Pers Indonesia antara lain Nezar Patria, Jimmy Silalahi, Yosef Adi Prasetyo, Imam Wahyudi dan Bambang Harymurti (Wakil Ketua Dewan Pers periode sebelumnya) menghadiri kegiatan peringatan World Press Freedom Day (WPF) atau Hari Kemerdekaan Pers Dunia di Paris, Perancis pada 3 Mei 2014. Pada penugasan itu, perwakilan Dewan Pers Indonesia berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Freedom of Expression and Media Development UNESCO Guy Berger.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Dewan Pers Indonesia menyampaikan kepada pihak UNESCO mengenai ketertarikan segenap komponen pers Indonesia agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah peringatan WPF pada tahun berikutnya. Dewan Pers Indonesia mendorong UNESCO supaya dapat mempertimbangkan menawarkan kemitraan sebagai tuan rumah penyelenggaraan

WPFd kepada pemerintah Indonesia. Bermitra dengan pemerintah Indonesia karena sifat kerja sama dengan UNESCO adalah government-to-government (G to G).

Namun, pihak UNESCO saat itu menjawab bahwa pada 2015 Latvia telah dipersiapkan menjadi tuan rumah peringatan WPFd 2015 dan pada tahun berikutnya Finlandia telah bersedia menjadi tuan rumah WPFd 2016. Oleh sebab itu, UNESCO menawarkan Indonesia dapat menjadi tuan rumah pada 2017. Setiba kembali di Tanah Air, tawaran itu disampaikan kepada Ketua Dewan Pers Indonesia dan dibicarakan kepada konstituen bersama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) yang dipimpin oleh tokoh pendidikan Prof. Arief Rachman sebagai Ketua Pelaksana Harian. KNIU kemudian menyampaikan hasil pembicaraan Paris tersebut kepada Ketua Umum KNIU yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan pada waktu itu. Ketua Umum KNIU menanggapi positif rencana Indonesia menjadi tuan rumah WPFd sebagaimana disampaikan KNIU pada pelaporan rapat bersama Desember 2014.

Selanjutnya, UNESCO menawarkan kerja sama kepada pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, untuk menjadi tuan rumah bersama WPFd 2017 di Indonesia. Secara formal, Deputi Direktur Jenderal UNESCO Getachaw Engida menyampaikan surat nomor: Cl/FEM/FOE/5/2015/1332 Tanggal 25 Februari 2015 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI tentang Penawaran kepada Indonesia untuk Menjadi Tuan Rumah Kegiatan World Press Freedom Day Tahun 2017. Menanggapi surat itu, atas nama pemerintah Indonesia, Menkominfo Rudiantara memberikan jawaban menerima penawaran UNESCO tersebut. Secara formal, kesediaan pemerintah Indonesia tersebut dituangkan dalam surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 264/M.KOMINFO/

KS.02.05/03/2015 Tanggal 25 Maret 2015 tentang Penerimaan sebagai Co-Host WPFDD 2017.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menindak lanjuti dengan menyampaikan surat kepada Ketua Dewan Pers Indonesia melalui surat No. 37/KOMINFO/DJIKP/KS.02.05/01/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Penyelenggaraan WPFDD 2017. Sekretariat Dewan Pers Indonesia diminta untuk melakukan persiapan, perencanaan, dan perhitungan pembiayaan kegiatan WPFDD 2017.

Kementerian Kominfo RI kemudian bersepakat dengan UNESCO untuk bersama-sama menandatangani *Host Country Agreement* mengenai penyelenggaraan acara WPFDD 2017 pada 1-4 Mei di Jakarta. *Host Country Agreement* adalah instrumen hukum utama yang menjadi payung bagi penggunaan APBN RI oleh Sekretariat Dewan Pers, Kemenkominfo RI.

Dewan Pers Indonesia juga melibatkan partisipasi segenap komponen pers Indonesia. Dari waktu ke waktu Dewan Pers Indonesia melakukan konsultasi antara lain dengan asosiasi jurnalis dan asosiasi perusahaan pers, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLI), dan Lembaga Pers Dr Soetomo Indonesia (LPDS) untuk mencari format bentuk kegiatan partisipasi atau kontribusi komponen pers Indonesia dalam rangkaian acara WPFDD 2017.

Akhirnya, disepakati bersama UNESCO, bahwa konstituen pers Indonesia dapat merayakan WPFDD 2017 dalam bentuk acara jalan

pagi bersama, diskusi kajian pers Indonesia, dan pameran foto seiring dengan berlangsungnya konferensi internasional WPFID 2017. Dengan demikian, seluruh konstituen pers nasional mendapatkan waktu dan ruang bagi pers nasional di perhelatan WPFID 2017 guna menyampaikan informasi aktual mengenai kondisi pers di Indonesia. Tidak hanya membahas mengenai kemerdekaan pers, melainkan juga tentang kebebasan berekspresi (*freedom of expression*).

Selain itu, Dewan Pers Indonesia juga mendorong UNESCO untuk memberikan waktu dan ruang bagi para tokoh pers nasional agar dapat menjadi narasumber dalam konferensi internasional WPFID 2017. Indonesia memiliki tokoh pers yang berpengetahuan luas dan berkualifikasi baik di berbagai topik yang dibahas dalam konferensi internasional WPFID 2017 sehingga dapat diusulkan menjadi pembicara bersama-sama pembicara internasional lain atau sebagai moderator.

Dewan Pers Indonesia juga merekomendasikan Universitas Multimedia Nusantara sebagai pelaksana tuan rumah Youth Newsroom selama acara WPFID 2017 berlangsung yang penjangkanya telah berlangsung selama dua tahun sebelumnya. Sebagai catatan, perguruan tinggi nasional belum berkesempatan, dari segi waktu dan biaya, untuk dapat menjadi tuan rumah pelaksana kegiatan *academic conference* di dalam rangkaian acara WPFID 2017 sehingga digantikan oleh perguruan tinggi negara lain. Sementara itu, untuk pelaksana kegiatan Media Center, ditangani oleh Kemenkominfo dan LKBN Antara.

Ada sejumlah dimensi yang dapat diungkapkan dari besarnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia untuk dapat menghelat WPFID 2017 di Indonesia.

DIMENSI DEMOKRASI

Perkembangan demokrasi di suatu negara dapat dinilai dari perkembangan pers dan media di negara tersebut. Negara demokrasi memberikan jaminan kebebasan berekspresi bagi warganya termasuk media. Berangkat dari lahirnya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, kehidupan pers di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik. Pers sebagai pilar keempat demokrasi menjadi sarana kontrol dan penyeimbang perkembangan demokrasi di luar tatanan institusi formal eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan WPF 2017 menjadi bukti kepercayaan dunia, yang dalam hal ini diwakili oleh UNESCO, kepada Indonesia sebagai promotor perkembangan demokrasi di kawasan Asia maupun dunia.

Bagi publik Indonesia, baik kalangan pers, pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, penyelenggaraan WPF 2017 di Indonesia merupakan sarana evaluasi dan literasi pentingnya keberadaan media yang sehat dalam rangka mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DIMENSI SOSIAL

Sebagai bagian dari negara dengan perkembangan demokrasi yang makin baik, penyelenggaraan WPF 2017 di Indonesia dapat menjadi momentum peningkatan kredibilitas serta pembangunan mental seluruh elemen bangsa Indonesia baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

Khusus bagi perkembangan pers di Indonesia, penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan mampu menjadi motor perbaikan kinerja pers ditengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu fungsi pers sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan konsep

ke sembilan program Nawacita, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Pers yang sehat menjadi sarana dialog dan pertukaran intelektual atas berbagai dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

DIMENSI EKONOMI

Penyelenggaraan WPF 2017 melibatkan lebih kurang 100 negara anggota UNESCO, yang terdiri dari kalangan jurnalis, duta besar, lembaga donor di tingkat internasional. Di tingkat nasional, kegiatan ini melibatkan sejumlah besar perusahaan pers di Indonesia, Kementerian dan lembaga terkait, serta stakeholder pers lainnya. Dengan berkumpulnya berbagai kategori undangan, WPF 2017 diharapkan mampu menjadi bagian dari peluang Indonesia dalam mempromosikan berbagai potensi yang dapat disampaikan kepada negara asing maupun kepada sektor swasta nasional sebagai calon investor. Peluang yang terbuka antara lain dari sisi sektor pariwisata. Indonesia mempunyai peluang untuk mengkampanyekan industri pariwisata sesuai dengan program nasional, yakni mendukung pencapaian target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019.

Forum-forum yang dirancang dalam rangkaian kegiatan WPF 2017 dapat menjadi sarana pertemuan langsung dengan kalangan internasional guna membahas potensi investasi dalam negeri, meliputi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, industri kreatif dan sebagainya, dengan media internasional dalam rangka mendukung penguatan nasional di kancah internasional. Termasuk dalam kerangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah diterapkan pada akhir 2015.

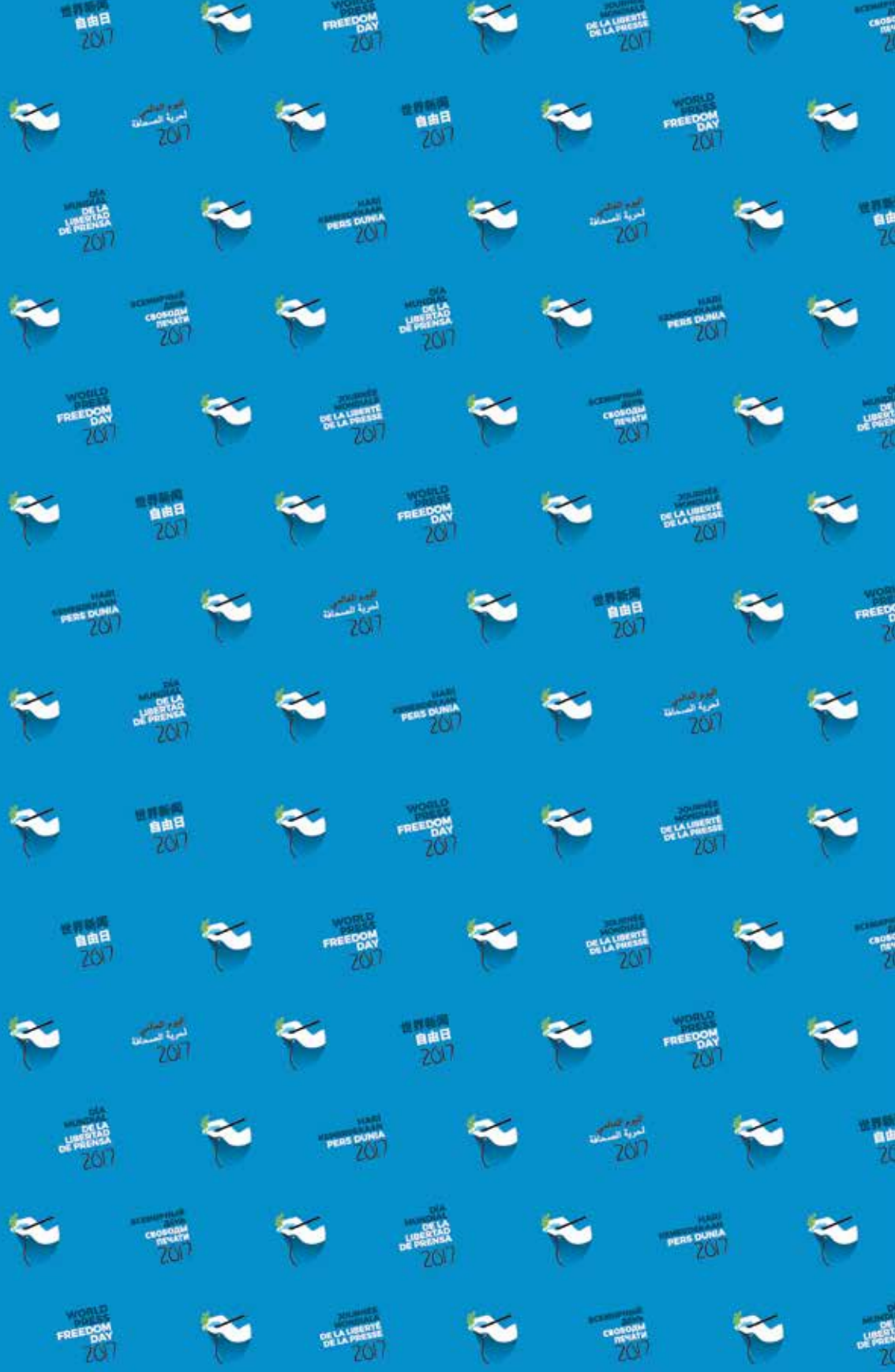
DIMENSI POLITIK

Sebagai negara dengan tingkat keragaman yang tinggi, jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang beragam dan luas, kesemua hal itu menjadikan Indonesia sebagai pelaku politik yang strategis, baik di kawasan Asia Tenggara, Asia, maupun dunia. Kehadiran para perwakilan jurnalis internasional di Indonesia tentu menjadi peluang yang baik dalam mengkampanyekan potensi dan strategi politik Indonesia di kancah dunia. WPF 2017 menjadi etalase perkembangan politik demokrasi Indonesia melalui media masa.

DIMENSI KEAMANAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralisme yang tinggi. Oleh sebab itu, dimensi keamanan menjadi bagian penting dalam kaitan perlindungan terhadap warga negara maupun hubungan dengan negara lain. Sebagai negara yang memperhatikan terjaganya stabilitas keamanan, Indonesia telah mempunyai perangkat dan prasarana yang memadai. Akan tetapi, tidak cukup dengan hal itu saja. Kampanye menjaga stabilitas keamanan juga merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia mencapai standar keamanan berskala dunia.

Oleh karena itu, keberadaan para jurnalis asing selama mengikuti kegiatan WPF 2017 diharapkan mampu memberikan gambaran kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang aman, baik dari sisi investasi maupun dari sisi pariwisata.



BAB I

JURNALISME BERKUALITAS: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL, DAMAI, DAN INKLUSIF



Cathy Wilcox/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Jurnalisme saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa berat, terutama menyusul semakin bertebarannya berita bohong di dunia, yang didorong oleh begitu aktifnya penggunaan internet dan media sosial di seluruh dunia. Internet bahkan digambarkan oleh wartawan harian *Financial Times*, John Lloyd, telah mengerdilkan media cetak atau surat kabar dan menjadi wahana arus besar informasi, fantasi, bocoran, teori konspirasi, serta kebencian.

Kenyataan ini semakin menyedihkan jika melihat bahwa media juga dihantam oleh tekanan hebat lainnya, seperti penurunan peminat, terkikisnya keuntungan, dan tingginya ketidakpercayaan publik kepadanya.

Namun, sesuai peribahasa, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Di balik tantangan, ada kesempatan. Tak kurang dari Jim Rutenberg, mantan koresponden harian *The New York Times*, bersikap optimistis bahwa nilai berita yang benar justru dapat meningkat dengan adanya ledakan berita bohong, sehingga jurnalisme asli, kritis, dan hasil telaah mendalam lebih dibutuhkan orang.

Jurnalisme berkualitas, itulah kata kuncinya. Ini dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tujuan global ke-16 dalam Sustainable Development Goals adalah menuju masyarakat yang adil, damai dan inklusif, dengan kebebasan mendasar dijamin oleh institusi negara yang bekerja secara efektif. Hal ini hanya mungkin terwujud dengan media yang bebas, independen, dan pluralistik. Dalam konteks ini, jurnalisme berkualitas menjadi suatu standar tersendiri karena ia memasok informasi yang dapat dipercaya untuk tata kelola dan pengambilan keputusan yang baik.

Namun, jurnalisme berkualitas membutuhkan biaya yang cukup mahal dan manfaat sosialnya tidak langsung terlihat, terutama oleh pemilik media yang motif politik dan bisnisnya sangat kuat. Tantangan keuangan yang disebabkan oleh krisis model bisnis tradisional biasanya menghambat suatu media untuk mencapai standar tertinggi profesi mereka.

Oleh sebab itu, dari sisi publik, harus ada advokasi ke masyarakat agar muncul kembali secara signifikan kebutuhan akan jurnalisme berkualitas, *in-depth*, dan tulisan yang didukung oleh riset yang mendalam. Hanya dengan itu, jurnalisme berkualitas mampu tumbuh dan berkontribusi untuk masyarakat yang adil, damai, dan inklusif.

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN GOOGLE

Berdasarkan pengalaman masa kecilnya, Richard Gingras, direktur Divisi Berita Google, menceritakan bahwa dia memahami, menjalani, dan menikmati kemerdekaan pers di Amerika sejak anak-anak karena ayahnya adalah orang yang membuat surat kabar kecil di Rhode Island, AS. Bahkan, waktu Gingras berusia 16 tahun, dia sendiri telah menerbitkan cerita olahraga yang digemari pembaca dan bekerja mengambil surat kabar begitu selesai dicetak sehingga pengalaman hidup sejak kecil ini berharga sekali bagi perjalanan kariernya di dunia percetakan, media cetak, dunia persatelitan, TV, dan internet.

Namun, dari keluarganya pula, Gingras belajar tentang kehati-hatian dalam berekspresi. Pada 1950-an, ayah mertuanya, Dalton Trumbo, seorang penulis skrip untuk Hollywood dan telah menghasilkan banyak sekali naskah film, seperti *Roman Holiday*, *Exodus*, *Spartacus*, dan beberapa film lainnya, harus berurusan dengan dunia politik.

Pada 1946, Trumbo diminta menghadap Kongres dan ditanya apakah pernah menjadi anggota partai komunis. Dia tidak mau menjawab pertanyaan itu karena ada *First Amendment* yang menyatakan bahwa pemerintah AS tidak mempunyai hak untuk menanyakan kepercayaan politik warganya, apapun itu. Namun, akibatnya fatal, Trumbo dianggap melawan Kongres dan kemudian dia harus masuk penjara selama 1 tahun dan kemudian di-*blacklist*. Selama 15 tahun, dia harus hidup dengan nama samaran dan hanya bisa menghasilkan uang sedikit.

Bagi Gingras, itu adalah peringatan bahwa kebebasan berpendapat kadang-kadang bisa berakibat seburuk itu, bahkan dalam lingkungan yang demokratis sekalipun. Belum lagi akses ke internet oleh pengguna *smartphone* yang semakin membesar dari 2,5 miliar saat ini dan diperkirakan melonjak menjadi 6 miliar dalam 3 tahun.

Konsumsi informasi dan berita tentu saja menjadi tak terbayangkan dengan adanya internet. Akan tetapi, internet tidak hanya meningkatkan volume media, tetapi juga mengubah hubungan dengan media. Setiap orang tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga produsen. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi jurnalis dan *publisher* pada saat yang sama. Media tidak hanya menjadi bagian kehidupan, tapi menjadi fondasi dari kehidupan yang amat penting. Hampir setiap orang hidup dalam media saat ini dengan segala konsekuensi kebebasan berekspresi di dalamnya.

Fake news atau berita bohong lantas menjadi salah satu yang tersebar dengan mudah dan cepat di internet. Namun selalu, berita bohong digunakan oleh pihak yang ingin merusak demokrasi atau menghancurkan jurnalisme berkualitas. Arti berita bohong bisa bervariasi bagi setiap orang, sehingga hal ini harus ditelaah secara mendalam. Misalnya saja, universitas ternama seperti Harvard dan

MIT melakukan penelitian dan melihat apa yang terjadi di seputar pemilihan Presiden di Amerika Serikat.

Mereka menemukan bahwa *fake news* bukan sesuatu yang paling banyak mempengaruhi, tetapi mereka melihat elemen lain, misalnya *partiality*, yakni ada suatu berita yang hanya sebagian saja yang tidak betul. Ini lebih buruk karena pembaca melihat bahwa ada bagian dari berita yang benar dan bisa dikonfirmasi.

Tujuan Google, ujar Gingras, tidak berubah, yaitu untuk mengorganisasi informasi di dunia sehingga bisa digunakan. Para pengguna bisa memanfaatkan informasi yang otoritatif dan relevan untuk menjawab keingintahuan mereka. Google melakukan hal ini dengan informasi yang dapat berubah setiap detik. Sebanyak 15% dari pencarian setiap harinya adalah untuk hal yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini menunjukkan betapa semuanya berubah dengan sangat cepat.

Dari awal, Google mencoba membangun sistem, menyempurnakan mesin pencarian untuk menghindari hal yang bersifat *deceptive*. Tetapi, solusinya tidak mudah, Google harus senantiasa bekerja terus, dan selalu akan berhadapan dengan orang jahat dan orang baik.

Di Google, ada pencarian di halaman *website* yang menyediakan informasi tidak akurat dan ofensif. Walaupun jumlahnya masih sangat kecil, 0,25%, namun ini mengecewakan, baik bagi pengguna Google maupun Google sendiri. Nilai kepercayaan dipertaruhkan dan tidak ada yang lebih penting dari sebuah kepercayaan.

Dunia telah berubah, orang menggunakan informasi secara berbeda-beda dan mereka menyampaikan opini dengan cara yang berbeda. Mereka berhadapan dengan institusi seperti pemerintah dan pers,

tetapi kepercayaan mereka terhadap institusi semakin terkikis. Sehingga harus ada yang melihat bagaimana memberikan ruang kepada media untuk menjawab semua hal ini. Ada banyak definisi mengenai jurnalisme. Salah satunya adalah jurnalisme harus memberikan instrumen dan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi warga yang benar, warga yang baik.

LUNTURNYA KEPERCAYAAN TERHADAP MEDIA

Gingras selanjutnya menyarankan untuk memberikan peranan kepada masyarakat sehingga bisa terlihat langkah apa saja yang dapat diambil secara berbeda. Misalnya saja, bagaimana tulisan jurnalistik bisa dikembangkan, sehingga dapat memenuhi pola baru konsumsi melalui *smartphone* dan peralatan sejenis di dunia media yang sesak dan sangat cepat perubahannya.

Salah satu model yang baru berkembang adalah *fact check community*. Tahun lalu Google meluncurkan *fact check* dalam Google News sebagai hasil kerja sama selama 2 tahun dengan komunitas *fact check*. Beberapa waktu lalu Google juga telah meluncurkan *fact check* di banyak negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Google menampilkan hasil *fact check* yang didapat komunitas *fact check*. Di dalamnya ada ringkasan informasi mengenai klaim tertentu, sumber klaim, dan hasil pemeriksaan faktanya oleh komunitas *fact check*. Dengan berkembangnya fasilitas *fact check* ini, Google ingin melihat nantinya *fact check* dapat dilakukan pada saat orang mencari informasi tertentu.

Gingras menggarisbawahi pentingnya kerangka kepercayaan. Menurut dia, sebenarnya prinsip jurnalisme yang berdasarkan fakta dapat didasarkan pada internet. Dengan begitu, pers dapat menghadapi kepercayaan publik yang semakin menurun terhadap jurnalisme.

Sekitar 2 tahun lalu, Gingras mengungkapkan, dia bekerja sama dengan jurnalis Sally Lehrman. Mereka menggarap sebuah proyek untuk membangun kembali kepercayaan publik. Sekarang lebih dari 80 organisasi media di seluruh dunia juga melakukan eksplorasi arsitektur jurnalisme untuk melihat apakah ada pendekatan baru sehingga nantinya peliputan berbasis fakta bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat dan membantu masyarakat membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi.

Proyek membangun kepercayaan tersebut memicu banyak pertanyaan, termasuk terkait dengan keahlian jurnalis. Masyarakat perlu melihat langsung seberapa dalam pengetahuan jurnalis terhadap isu yang diliputnya, sehingga nantinya mereka memahami keseluruhan pekerjaan para pencari berita, memahami proses editorial di balik suatu berita sehingga mereka bisa menjadi lebih percaya kepada media.

Kemudian apakah media dapat menyajikan petunjuk atau informasi yang lebih baik bagi pembacanya dalam membuat keputusan dibandingkan dengan seperti Academia atau Wikipedia? Dapatkah media membantu mesin pencari di internet untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan membuat hasil pencarian di mesin pencari menjadi lebih baik? Disinilah diperlukan solusi yang bersifat organik.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan data jurnalisme, Gingras mengajukan sejumlah pertanyaan. Misalnya, bagaimana orang dapat mengambil manfaat dari data jurnalisme? Apakah data ini dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang sangat besar antara cara masyarakat melihat dunia di sekitarnya dan realita yang dihadapi. Tidak susah untuk melihat mengapa *gap* ini muncul. Setiap hari tersiar kabar tentang serangan teroris, penculikan, dan kejahatan lainnya. Ini semuanya muncul dalam dunia modern. Pemberitaan muncul dan kadang-kadang proporsinya diambil lebih banyak oleh

media sosial dan *audience* menerjemahkannya menurut perspektif masing-masing dan menyampaikannya kepada komunitas mereka.

Bagaimana pers menangani masalah tersebut? Apakah ia bisa membangun *database* yang besar sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Apakah pers bisa menutup kesenjangan antara ketakutan yang rasional dan yang tidak rasional? Apakah pers bisa lebih jauh memberikan informasi yang didapatkan oleh wartawan sehingga orang bisa memiliki konteks yang luas? Berbagai pertanyaan ini perlu dijawab bersama-sama.

Menurut Gingras, masih banyak pertanyaan lain yang perlu dijawab. Apakah visualisasi data, bagan, grafik interaktif dapat menjadi obyek media utama yang mudah didapat dan dibagikan dalam bentuk video? Apakah bisa pers membangun semacam *dashboard* untuk masyarakat yang di dalamnya ada matriks kunci yang berisi hal yang paling penting untuk masyarakat? Misalnya tentang kualitas sekolah, indeks biaya hidup, data kriminalitas, indeks kualitas udara. Lalu, dapatkah institusi seperti Google bersama-sama dengan pers untuk menghasilkan semua informasi ini?

Dunia internet sekarang tidak hanya diisi oleh produksi konten, artikel, pesan, dan video, tetapi juga memiliki banyak sekali data publik yang dapat diubah menjadi pengetahuan, data pemerintah, data terlarang, bocoran data, dan hal lain yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan sebagai data. Selain itu, dalam beberapa tahun mendatang, akan ada 15 miliar perangkat teknologi yang terkoneksi dengan internet sehingga dapat memasok lebih banyak data untuk dianalisa dan dipergunakan. Ini perlu dimanfaatkan jurnalis untuk membantu masyarakat memahami bagaimana lingkungan masyarakat dan institusi yang ada berjalan.

Gingras optimistis mengenai masa depan pemberitaan media. Ada banyak sekali pekerjaan digital yang dilakukan dengan hasil yang impresif, perangkat dan kapabilitas jurnalistik yang ada perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ini adalah masa yang kritis karena, pengalaman pemberitaan baru perlu diciptakan, model bisnis baru perlu dikembangkan, tipe media baru perlu didefinisikan, kerangka jurnalisme baru perlu dieksplorasi. Semua hal itu dibutuhkan untuk mendorong masyarakat menjadi warga masyarakat yang lebih baik.

Gingras menekankan Google ingin menjalin kolaborasi dengan jurnalis, untuk melakukan eksperimen untuk menjawab tantangan baru ini. Salah satu upayanya adalah pemanfaatan fasilitas Google Lab yang ada di seluruh dunia yang telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 100.000 jurnalis di seluruh dunia pada 2016. Pelatihan ini memperkenalkan perangkat dan teknik jurnalistik terbaru.

Di Asia Pasifik sendiri, Google telah mengembangkan kelas pelatihan media, termasuk menggelar lokakarya untuk 100 jurnalis dan kemudian akan melatih 250 jurnalis Indonesia serta para *fact checker* dari seluruh dunia.

PERS DI ERA MEDIA SOSIAL

José Ramos-Horta, mantan Presiden Timor Leste dan penerima Nobel 1996, melihat ada perkembangan yang luar biasa di mana masyarakat di seluruh dunia telah mengenal media sosial dan media digital selama 20 tahun.

Terkait dengan perkembangan itu, Ramos-Horta secara pribadi menekankan bahwa dia lebih memilih jurnalisme yang tidak

bertanggungjawab ketimbang media yang tidak bebas. Pada masa lalu, dia atau siapa pun di masyarakat tidak setuju dengan artikel yang ditulis oleh wartawan yang datang ke negaranya selama 2-3 hari, lalu tiba-tiba menjadi seorang ahli dengan mempublikasikan berita yang tidak berimbang, berisi tuduhan yang tidak berdasar, kemudian mereka harus memohon dengan menulis surat sanggahan kepada editor media tersebut yang belum tentu memuatnya.

Namun dia sudah tidak ambil pusing lagi dengan hal itu karena sekarang dia bisa memanfaatkan laman Facebook miliknya untuk meng-*counter* berita tersebut dan boleh jadi Facebook lebih mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan dengan surat kabar yang memuat berita bermasalah itu. Dia pun menarik kesimpulan bahwa media sosial yang tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol mungkin lebih baik ketimbang media komersial mapan yang dikontrol oleh industri besar.

Menurut Ramos-Horta, produk jurnalistik berkualitas rendah di era media sosial juga bisa ditemukan di media *mainstream*. Di Inggris memang ada surat kabar berkualitas yakni *The Guardian*, tetapi di negara itu juga banyak media cetak yang kurang berkualitas. Di AS juga ada harian ternama *The New York Times*, tetapi di seantero negara itu juga ada surat kabar yang buruk.

Dengan demikian, Ramos-Horta melihat tidak ada perbedaan yang begitu mendasar dari media cetak berkualitas buruk di seluruh dunia dengan media digital yang melahirkan jurnalis dan komentator instan. Contoh kejahatan kemanusiaan yang paling buruk terjadi di masa modern, seperti di kawasan Balkan, Bosnia, dan Kosovo sebagian dikarenakan oleh media yang tidak independen, yakni media yang berkolaborasi dengan Milosevic untuk menyebarkan berita propaganda anti-Muslim, anti-Bosnia, dan anti-Kosovo.

Di Rwanda, hal serupa terjadi melalui radio komunitas, yang berkontribusi terhadap tragedi genosida di negara itu dan ini semua terjadi di zaman media sosial.

Elif Akgul, editor Kebebasan Bicara di portal berita *BIAnet.org*, sependapat dengan Ramos-Horta bahwa tulisan yang menyebar di media sosial memiliki potensi merusak yang sama besarnya dengan berita yang tidak akurat di media tradisional.

Secara positif, media sosial seperti Facebook dan Twitter, membuat setiap orang menjadi penulis cerita, dan juga menjadi jurnalis, serta mendemokratisasi informasi, tetapi sekaligus juga mendemokratisasi berita bohong secara lebih meluas dibandingkan dengan media tradisional.

Media tradisional, ujanya, seperti koran yang harus dibeli ke toko, jelas kalah dengan media sosial yang sudah ada di depan mata sejak orang memegang *smartphone*. Di media sosial, setiap orang bicara dengan teman di lingkaran pergaulannya, dan setiap temannya memiliki lingkaran pergaulan yang lain, sehingga informasi cepat sekali menyebar di media sosial. Inilah yang disebut viral, tuturnya.

Namun, bagi Peter Greste, wartawan lepas senior penerima berbagai penghargaan, revolusi digital memiliki implikasi yang lebih luas lagi, yakni krisis kepercayaan. Kehadirannya telah mengubah cara orang bekerja dan menghancurkan model bisnis yang ada.

Situasi menjadi bertambah runyam dengan semakin seringnya pemerintah menggunakan UU Keamanan Nasional sehingga semakin mempersempit ruang gerak jurnalis dan kemerdekaan pers. Ini memperburuk situasi krisis, walaupun tidak berarti tidak ada kesempatan untuk memperlambat lajunya.

Tentang beberapa persoalan kemerdekaan pers di era media sosial, Yosep Adi Prasetyo, ketua Dewan Pers Indonesia, menawarkan solusi. Dia menilai bahwa kemerdekaan pers itu menyangkut dua hal, yaitu struktur kebebasan dan bentuk dari kebebasan itu. Jurnalis Indonesia perlu memanfaatkan kebebasan dan kemandirian itu dengan tidak mengambil informasi apapun dari media sosial. Jurnalis harus melakukan pengecekan, verifikasi sebelum bisa menggunakan materi yang ada di media sosial untuk bahan berita.

Dia melanjutkan, jurnalis dapat menggunakan atau mendapatkan informasi dari media sosial, tapi pada saat mereka ingin membuatnya menjadi berita, maka mereka harus melakukan verifikasi. Dewan Pers Indonesia ingin memotong lingkaran setan dengan menyingkirkan sumber pembuat *hoax* sehingga tidak dapat dipergunakan lagi di dalam media sosial atau tv, berita, radio, atau media *mainstream*.

Sementara itu, Farhana Haque Rahman, Dirjen Inter Press Service, tidak sependapat dengan Ramos-Horta bahwa publikasi berita menjadi semakin mudah saat ini. Sekarang semua orang dapat menerbitkan berita, tapi tetap sulit bagi mereka untuk menjual informasi kepada media *mainstream*. Dia melanjutkan bahwa media sekarang lebih terlihat sebagai alat penghibur, bahkan *reporting* pun bisa dilihat sebagai hiburan.

Isu media lainnya di era media sosial adalah di saat mempublikasikan berita itu mudah, jurnalis tetap sulit mendapatkan penghasilan yang layak. Akgul sependapat dengan hal tersebut, sembari menyebut bahwa di Turki, media dan jurnalis mesti berpihak apakah pro-pemerintah atau anti pemerintah, yang berdampak pada kepemilikan modal dan kualitas jurnalisme.

Apabila media memilih berpihak pada pemerintah, media bisa memiliki lisensi, hubungan yang kuat dengan otoritas dan kelangsungan hidup menjadi lebih terjamin. Namun jika memilih anti pemerintah, maka yang terjadi adalah jurnalis bekerja seperti *volunteer*, sulit untuk mendapatkan uang. Kepemilikan media ini menjadi isu yang sangat penting terkait dengan pemberian informasi dan juga ada isu monopoli informasi. Bahkan informasi yang diberikan kadang bisa berupa berita bohong.

Greste mencoba melihat dari sisi bagaimana media bisa menghasilkan jurnalisme yang berkualitas dan sekaligus pendapatan dari lingkungan digital yang ada, dan menggunakan teknologi untuk bertahan hidup. Pertanyaannya adalah apa sebetulnya yang diinginkan orang dari media, setelah itu barulah teknologi dan aturan hukumnya dibangun. Apabila tidak, jika orang hanya mempercayakan teknologi mengatur informasi, yang terjadi adalah kekacauan.

PERAN PERS UNTUK JURNALISME BERKUALITAS

Menurut Greste, media paling tidak dapat memainkan peran pengontrol dalam debat publik. Mereka dapat memfasilitasi debat dengan politisi atau pemimpin masyarakat. Dengan mengatakan bahwa masyarakat menginginkan berita yang kredibel, jurnalis dapat menggelar debat publik sehingga nantinya ada diskusi yang bukan bersifat sensasional saja, tapi memberikan informasi.

Berbeda dengan Greste, Ramos-Horta mengambil sudut pandang yang lain. Media itu harus membawa masyarakat menjadi semakin dekat dengan realita yang jauh di luar sana, realita yang tidak diketahui publik. Karena keberanian jurnalis publik dapat mengetahui dan merasakan dampak yang ditimbulkan oleh tragedi di Suriah, Yaman, dan Sudan Selatan.

Selain itu Ramos-Horta mengusulkan lebih banyak lagi cerita menarik yang patut diangkat oleh media yakni kisah mengenai tokoh yang melakukan hal yang baik di dunia ini, namun tidak muncul ke pemberitaan karena bukan tragedi. Sebetulnya kisah itu harus diceritakan karena bersifat inspiratif dan dapat membangun harapan publik.

Ramos-Horta mengambil contoh ketika dia menjadi ketua panel independen PBB untuk operasi perdamaian yang bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Dia menemukan sebuah kisah yang sangat menarik yang diterbitkan oleh *Huffington Post* di laporan halaman depannya.

Laporan itu adalah tentang seorang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun yang tinggal di Sudan Selatan. Nyakhat Pal, anak itu, menuntun ayahnya yang buta dan renta, Phal Dul, selama 4 jam melewati hutan dan daerah perang untuk mencapai sebuah pos kemanusiaan yang didirikan oleh UNICEF. Dia menjadi mata bagi ayahnya, menuntunnya dengan sebuah tongkat. Ini terjadi karena saudara laki-lakinya ikut berperang dan ibunya baru saja pergi untuk mencari salah satu dari mereka.

Bocah Nyakhat dan ayahnya berada di antara 4.000 orang yang muncul di desa Pagak untuk ikut antri mendapatkan bantuan dan pasokan yang dibawa oleh UNICEF dan World Food Program (WFP).

Kemudian ada seorang spesialis komunikasi UNICEF yang melihat anak kecil ini dan mewawancarainya. Gadis kecil itu pun berbicara mewakili ayahnya. Menurut Ramos-Horta, laporan mengenai orang yang membutuhkan bantuan seperti ini adalah sesuatu yang biasa, namun ia menjadi menyentuh setelah melihat cara seorang anak kecil berusia 3 tahun sedang berjuang dalam situasi yang berbahaya.

Dari kisah ini ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Ramos-Horta kepada setiap orang. Pertama adalah menyangkut kegagalan PBB untuk menjaga perdamaian di Sudan Selatan. Kedua, walaupun ini adalah sebuah kisah kegagalan, PBB pada akhirnya menyelamatkan Nyakhat Pal. Jika UNICEF tidak ada di sana, maka akan lebih banyak orang yang akan meninggal dunia. Tapi ini adalah kisah kemanusiaan yang memperoleh tempat di *Huffington Post*, tapi tidak di media Afrika.

Ramos-Horta menunjukkan dia mengambil berita tersebut dan menampilkannya di halaman Facebook-nya selama berbulan-bulan. Publik dapat melihat hal ini sebagai sebuah gambaran besar dan dibaca oleh lebih banyak orang ketimbang Facebook Donald Trump.

Dalam hal ini, dia berpesan kepada jurnalis bahwa ada banyak kisah inspiratif di Indonesia, Timor Leste, Thailand, dan Brazil, di mana pun. Kisah ini dapat memberikan edukasi dan informasi kepada publik.

Yosep Adi Prasetyo, yang biasa dipanggil Stanley, menambahkan bahwa partisipasi publik yang aktif pada zaman media sosial ini telah menambah maraknya pemberitaan, namun tugas utama dari jurnalisme adalah untuk menceritakan yang sebenarnya.

Kebenaran dalam jurnalisme bukan kebenaran yang absolut, tetapi yang fungsional. Ada ruang untuk koreksi. Komitmen utama dari jurnalisme adalah kepentingan publik, sedangkan kepentingan sendiri dan pemilik media harus berada di bawah kepentingan publik. Jadi, penting sekali untuk kembali memperkuat komitmen terhadap kode etik atau selalu merujuk pada kode etik jurnalistik.

Sependapat dengan Stanley, Akgul mengemukakan bahwa untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, jurnalis harus selalu memenuhi apa yang diperlukan oleh pembaca dan pemirsa. Jadi publik dalam hal ini berpartisipasi dalam pengumpulan informasi dan juga membentuk informasinya.

Jurnalis pada dasarnya hanya mengatakan yang sebenarnya atau setidaknya mengklaim bahwa mereka menceritakan yang sebenarnya, namun di era sekarang banyak orang yang menyebut jurnalis sebagai pembohong.

Media memiliki *audience* yang sangat menuntut jurnalisme yang berkualitas. Jadi jurnalis harus melihat *audience* bahwa jika mereka menginginkan informasi dan melihat kebenarannya maka mereka perlu belajar cara mengkonfirmasi.

Akgul menyayangkan ada banyak pendapat yang mengatakan agar jangan percaya kepada media. Itu ironis sekali. Proses konfirmasi juga memerlukan keterlibatan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan ingin tahu apa yang terjadi di seluruh dunia ini.

Jurnalis harus membuat kesepakatan bahwa kualitas jurnalisme dan kualitas jurnalis itu sangat diperlukan. Jurnalis perlu sepakat mengenai hal itu di level tertentu bahwa mereka bukanlah pembohong, mereka harus bisa dipercaya dan tidak menimbulkan bahaya.

Jadi bukan semata-mata bahwa berita buruk adalah berita yang baik. Publik sudah mendengar ada pengungsi Suriah yang memenangkan Olimpiade. Jadi pada waktu itu saat publik mendengar berita tersebut, maka publik membacanya dengan cara yang positif. Sebaliknya mereka mendengar cerita yang sangat jelek, misalnya, berita buruk yang menciptakan opini tertentu di media. Ada poin

penting lagi tentang jurnalis yang diutarakan oleh Rahman, yang terjadi di negara berkembang, atau untuk jurnalis yang melakukan liputan di negara Selatan, bahwa mereka tidak meliput atau melaporkan dengan nilai yang sama. Rahman mengambil contoh pemberitaan tentang penerima Hadiah Nobel Muhammad Yunus.

Ada banyak serangan terhadap jurnalis bukan karena mereka tahu ada sesuatu yang salah secara fundamental, tetapi karena kebanyakan dari mereka memicu kontroversi. Penerbitan berita kontroversial tidak terelakkan akan mengundang keterlibatan masyarakat madani.

Dia melanjutkan bahwa saat bekerja di PBB, dia melatih jurnalis untuk mengerti bahwa mikrokredit bukan hanya soal peminjaman uang. Ada *microfinance*, *microinsurance*, *savings*, dan lain-lain. Usai pelatihan itu, *reporting* berubah sedikit. Jurnalis menjadi lebih peduli untuk menampilkan fakta.

Greste menambahkan bahwa bicara soal kualitas, ada hal yang penting yang dipelajarinya di Mesir yakni jurnalis media *mainstream* bergabung bersama untuk satu tujuan. Dia mengambil contoh bahwa jurnalis yang bergabung tadi dapat memperjuangkan ratusan atau ribuan jurnalis yang dipenjarakan di seluruh dunia dan menjembatani kesenjangan yang ada antara media dan berbagai pemangku kepentingan.

Dia mengatakan banyak *freelancer* dan *stringer* lokal yang mengalami ketidaksetaraan, namun tidak mendapat tingkat *support* yang sama. Satu suara inilah yang harus dikembangkan. Misalnya jurnalis harus mendorong gerakan untuk jurnalisme di Turki, lalu membuat *hashtag* *#keepsavepeople* di Twitter sehingga ada banyak sekali impresi, bisa mencapai 3 miliar. Angka 3 miliar ini bisa membawa perubahan. Jadi jika jurnalis dapat menggunakan media sosial, teknologi baru yang tersedia, jurnalis dapat mencapai tujuan mereka.

Selain ketidaksetaraan dukungan, Stanley mengatakan bahwa jurnalisme independen harus terus diangkat. Media harus independen demikian pula jurnalis. Jurnalis adalah independensi dan independensi adalah jurnalis. Prinsip ini harus digaungkan dan dipegang oleh jurnalis. Independensi di sini maksudnya adalah pikiran mereka terlepas dari kepentingan pribadi, ras, gender, dan lain-lain. Jadi, *newsroom* atau redaksi harus lebih independen dari pemilik perusahaan media.

Meski demikian, Akgul menegaskan perlunya menyikapi jurnalisme independen ini dengan kritis. Menurutnya, jurnalisme yang objektif adalah alasan mengapa media kehilangan kepercayaan dari publik karena pemiliknya termotivasi oleh kepentingan politis atau bisnis tertentu. Jadi, itu adalah salah satu alasan media kehilangan kepercayaan dari *audience*.

Jurnalis hanya bicara mengenai 'oh, kita objektif', tapi realitanya jurnalis sering dianggap sebagai lawan. Karena tidak percaya dengan media *mainstream*, sebagian orang mulai menciptakan media sendiri dan menyebarkan berita mereka sendiri. Mereka tidak percaya dengan media *mainstream* karena dinilai tidak mempublikasikan fakta yang sebenarnya atau alasan lain.

Jadi, Akgul tidak percaya dengan objektivitas karena jurnalis tidak bisa objektif meskipun telah melihat dalam sudut 180 derajat. Kalau seorang jurnalis melaporkan sesuatu, dia harus melihat hal yang alamiah dari laporan tersebut. Dia memilih kata dan *frame* yang akan dibidik. Dia juga terkadang meninggalkan bagian penting dari *story*.

Greste setuju bahwa objektivitas memang menimbulkan masalah. Jadi tidak ada hal yang namanya objektivitas. Menurut dia, yang ada

adalah membuat orang percaya apakah mereka membaca kebenaran yang objektif. Menurut dia, jurnalis harus berargumentasi untuk bisa menciptakan keseimbangan dan akurasi. Selama jurnalis berpegang pada prinsip tersebut maka pekerjaan jurnalisisme telah dilakukan. Berdasarkan pengalamannya di Mesir, Greste menyakinkan bahwa dia dan kawan-kawannya mendapatkan banyak sekali dukungan karena orang mengetahui bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan integritas yang tinggi.

Kalau orang mulai ragu, mereka akan melihat apakah jurnalis itu bekerja dengan integritas. Begitu itu hilang, maka semuanya akan hilang. Jadi kepercayaan publik itu sangat penting. Kalau jurnalis berpura-pura objektif padahal tidak, dan mengklaim telah memberikan sesuatu yang lebih maka dia akan kehilangan kepercayaan.

Selain nilai yang disebut di atas, Akgul menambahkan satu poin tentang solidaritas jurnalis. Terkadang, menurut dia, jurnalis tidak terlalu memiliki solidaritas dengan koleganya, dan ini dapat memberikan dampak buruk terhadap profesi.

Menurut dia, sekarang ini isu di satu negara adalah isu dunia. Jurnalis di Turki dipenjara dan ini bukan hanya isu di negara itu saja, tapi menjadi isu dunia. Jadi jurnalis harus memiliki solidaritas. Melihat dari sudut pandang yang berbeda, Ramos-Horta mengajak jurnalis belajar dari pengalamannya.

Ramos-Horta mengatakan banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya, itu semua terjadi karena keberanian banyak orang yang bekerja di media *mainstream*, seperti *The Guardian*, *The Independent*, *The Observer*, *The Sydney Morning Herald*, dan *The New York Times*. Tapi, karena faktor biaya yang mahal, banyak

jurnalis tidak mau datang ke Timor Leste. Karena sangat mahal untuk melakukan peliputan berita di negara yang jauh maka mereka terpaksa meliput di Suriah atau Yaman saja.

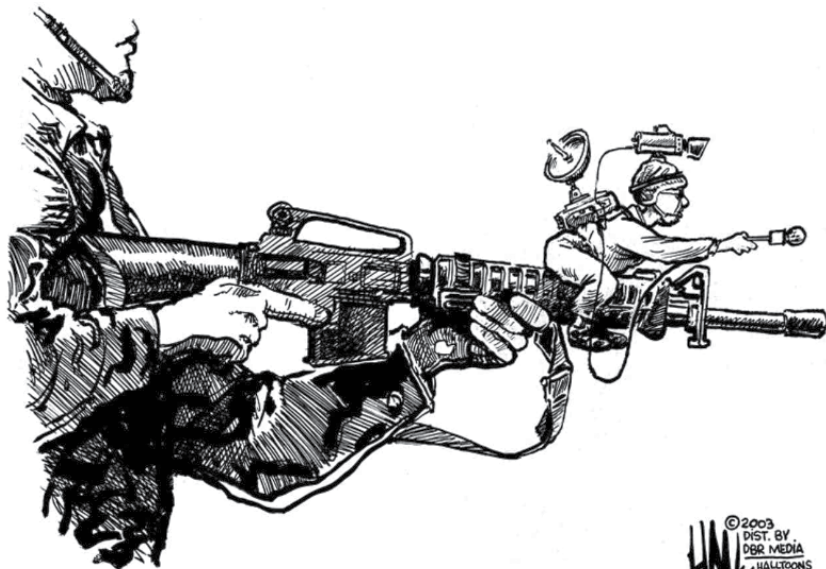
Menurut Ramos-Horta, dia tidak bicara mengenai bias atau keberpihakan, atau kurangnya profesionalisme, tapi mengenai liputan media *mainstream*. Di tengah kemunculan media sosial, orang awam tidak menyadari keberadaan media *mainstream* lagi karena mereka beralih ke Google dan Facebook. Ada juga materi berita yang sangat baik yang dipublikasikan oleh media sosial. Dia menegaskan bahwa situasi ini sebetulnya adalah evolusi yang positif.

Tentang solidaritas, Ramos-Horta, mengatakan solidaritas internasional diperlukan untuk memberikan semacam peluang yang lebih besar kepada jurnalis di negara berkembang untuk memperoleh pelatihan jurnalistik dalam upaya meningkatkan kompetensi mereka. Di negaranya, banyak sekali jurnalis yang miskin, tapi mereka sangat berdedikasi. Mereka mengkritisi pemerintah.

Sedangkan Stanley menegaskan bahwa jurnalis internasional memiliki solidaritas dengan jurnalis di Indonesia, misalnya dalam insiden terbunuhnya jurnalis negara ini. UNESCO meminta pemerintah Indonesia untuk memberi jawaban soal kasus pembunuhan Heriyanto, wartawan yang bekerja di Jawa Timur. Ini bentuk dari solidaritas internasional untuk komunitas jurnalis di Indonesia.

BAB II

KESELAMATAN WARTAWAN DAN PENANGGULANGAN IMPUNITAS



Hall/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Jumlah jurnalis yang tewas setiap tahun di seluruh dunia masih tinggi. Sementara ancaman terhadap kelangsungan hidup jurnalis di sejumlah kawasan sangat mencemaskan. Pada 2016, di kawasan konflik seperti Suriah, 14 jurnalis kehilangan nyawa. Serangan terhadap media dan jurnalis menyebar pula ke negara lain.

Keadaan bertambah runyam dengan semakin seringnya pelaku kejahatan terhadap jurnalis itu menikmati impunitas yang dibiarkan sebagaimana ditunjukkan dengan pelaporan tahunan negara anggota kepada Direktur Jenderal UNESCO. Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, tindakan pembunuhan terhadap jurnalis merupakan tragedi—sebanyak 102 jurnalis mengorbankan jiwa pada 2016. Hal ini tidak dapat diterima serta memperlemah masyarakat secara keseluruhan.

Isu impunitas, kebebasan dari hukuman, membiasakan swasensor di pihak jurnalis maupun narasumber mereka merugikan masyarakat luas karena menghalangi hak untuk memperoleh informasi. Berbagai upaya internasional dalam menangani isu keselamatan jurnalis seperti Resolusi 1738 Dewan Keamanan PBB tahun 2006 dan Resolusi 68/163 Majelis Umum tahun 2013 bisa jadi telah memperlambat situasi menjadi lebih parah, tetapi resolusi itu belum juga membuahkan hasil yang memadai mengingat jumlah jurnalis yang tidak berkurang, begitu pula tingkat impunitas yang dinikmati mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Sudah menjadi hal jelas bahwa pendekatan lebih terkoordinasi diperlukan untuk mengawal perjuangan yang efektif bagi keselamatan jurnalis. Perlindungan bagi jurnalis dalam bahaya dan pencegahan kekerasan terhadap media layaknya disertakan dengan penuntutan terhadap mereka yang melakukan kejahatan

terhadap jurnalis di dalam negeri. Hanya bilamana isu ini ditangani dengan efektif melalui pendekatan terkoordinasi oleh pemangku kepentingan media, maka keselamatan jurnalis bisa menjadi lebih terjamin.

LANGKAH MAJU DI SRI LANKA

Sebagai perwakilan pemerintah yang baru terpilih Sri Lanka, Karunarathna Paranawithana, Wakil Menteri di Kementerian Reformasi Parlemen dan Media Massa menyampaikan bahwa Sri Lanka mendukung perlawanan terhadap impunitas yang dihadapi oleh pekerja media karena negaranya sudah mencatat beberapa poin positif. Untuk menanggulangi krisis impunitas ini, masyarakat harus memiliki pemerintahan yang demokratis.

Pada 2015 masyarakat Sri Lanka mengalahkan rezim otoriter yang bercokol selama bertahun-tahun di negara ini. Sri Lanka saat itu sangat dikenal karena penindasan terhadap pers, antara lain melalui penculikan, pembunuhan, dan kejahatan lain.

Pemerintah berkuasa sekarang memprioritaskan terwujudnya keadilan bagi korban yang berjatuh di masa rezim sebelumnya. Paranawithana mengatakan pemerintah berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut Paranawithana, Sri Lanka telah mengadopsi undang-undang kebebasan untuk mendapatkan informasi dan menjadi negara terakhir di Asia Selatan yang mengadopsi legislasi ini. Negara ini juga mengenalkan program reformasi media terkait dengan standar pemberitaan, proporsi jurnalis dan implementasi reformasi media. Untuk menuju ke sana ada banyak hal yang tak diinginkan terjadi seperti banyaknya media yang di-*suspend*, dan

bahkan media terkemuka pun masih membutuhkan pembenahan dari waktu ke waktu. Kompetisi media juga menurun dan hal ini akan menciptakan budaya kekerasan lainnya.

Pemerintah harus memantau dari dekat media komersial dan kompetisi yang tidak adil. Para kompetitor akan melihat pola politik untuk mengangkat masalah kompetisi ini karena hal ini juga mengarah pada budaya kekerasan lainnya sehingga pemerintah sangat memperhatikan hal ini. Sri Lanka juga memiliki masyarakat madani yang kuat yang sebagian dapat digambarkan dari kemerdekaan pers yang dinikmatinya. Mereka mampu mengangkat isu ini kepada partai politik dan institusi lain yang berhubungan dengan politik. Dan ini terjadi di Sri Lanka.

Secara perlahan negara ini terus menerus bergerak maju untuk mencapai kemerdekaan pers. Pemerintah benar-benar bekerja sama dengan organisasi masyarakat madani.

KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DI RUSIA, BELANDA, DAN TURKI

Keprihatinan tentang kebebasan pers di Rusia masih cukup besar. Berdasarkan fakta, pemerintah masih memenjarakan jurnalis. Tanya Lokshina, Direktur Human Rights Watch Rusia menjelaskan seorang jurnalis dihukum penjara 2 tahun hanya karena telah melaporkan kekerasan yang dilakukan polisi. Militer juga menggagalkan beberapa acara dan ada koresponden lokal yang mengangkat peristiwa tersebut. Ini merupakan ironi karena kebebasan pers tidak berjalan di Rusia ketika dunia merayakan Hari Kemerdekaan Pers.

Kembali ke kasus hampir 10,5 tahun lalu. Seorang jurnalis terkenal Rusia, Anna Politkovskaya yang bekerja untuk *Novaya Gazeta*, koran independen di Rusia, tewas ditembak di apartemennya. Loskhina menghadiri pemakamannya bersama pejuang HAM dari Chechnya dan jurnalis independen di Rusia Selatan, Natasha Estemirova. Sekitar 2,5 tahun kemudian pada Juli 2009, Estemirova diculik dari apartemennya di Grozny, ibukota Chechnya, dan ditemukan tewas beberapa jam kemudian. Pembunuhan Politkovskaya tidak diinvestigasi secara efektif meskipun penembaknya ditemukan dan dipenjara. Masyarakat masih menunggu keadilan ditegakkan. Tidak ada investigasi yang efektif dan sangat jelas otoritas lokal di Chechnya seperti melupakannya.

Menurut Lokshina, otoritas juga terlibat dalam serangan dan impunitas. Setiap serangan terhadap impunitas selalu menghasilkan serangan balasan. Dilihat dari statistik di Rusia mulai 2016 hingga sekarang terdapat empat jurnalis tewas akibat serangan kekerasan atau pembunuhan. Hingga Juni lalu, sedikitnya 42 individu mengalami serangan fisik. Lanskap media di Rusia disebut benar-benar depresif.

Lembaga penyiaran di bawah kontrol negara dan menyangkut jumlah media cetak, ada ketakutan undang-undang baru yang dikeluarkan di negara itu akan membatasi kepemilikan media oleh asing di Rusia. Persentase pembatasan kepemilikan asing sekarang maksimal hanya 20% dari sebelumnya 50%. Kebijakan restriktif ini diduga akan berdampak pada independensi media di Rusia.

Negara secara literal memiliki beberapa media yang independen yakni radio dan televisi tapi tidak berfungsi secara normal. Ada tantangan di Rusia. *Novaya Gazeta* adalah salah satu koran independen yang menerbitkan laporan penting. Koran ini

mempublikasikan isu tentang gerakan anti-*gay* yang diorganisir di Rusia untuk melawan Chechnya. Selama ini banyak sekali, mencapai puluhan orang ditahan karena homoseksualitas atau karena memukuli korbannya di pusat penahanan tidak resmi.

Saat cerita ini diberitakan *Novaya Gazeta*, otoritas lokal menyangkalnya dan mengatakan berita ini bohong karena tidak boleh ada homoseksualitas di Chechnya. Jika memang ada dan diketahui oleh pemerintah lokal, keluarga para pelaku homoseksual akan ikut terdampak atau terbunuh. Pemerintah lokal di Chechnya melakukan penyiksaan, penculikan, dan kekerasan. Kremlin, menurut Lokshina, mencoba menekan otoritas lokal untuk melindungi kelompok yang menjadi korban.

Para jurnalis tidak mempunyai kebebasan menulis tentang konflik karena ancaman dari kelompok masyarakat dan pemerintah lokal dan tidak ada metode berdasarkan undang-undang yang bisa melindungi. Banyak jurnalis *Novaya Gazeta* yang menerima ancaman kemudian meninggalkan negara mereka.

Untuk mengadvokasi isu kemerdekaan pers, kurangnya keselamatan terhadap wartawan dan lingkungan seperti ini, Lokshina mengakui tidak mudah. Ini adalah hal yang menantang karena potensi di dalam negeri sangat terbatas. Tetapi dia dan timnya mencoba membicarakan hal ini dengan Ombudsman dan Dewan HAM yang bertanggung jawab kepada Presiden Federasi Rusia.

Dia mengatakan ada kesulitan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat lokal dan menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk hal ini. Pada saat yang sama, di Rusia mereka juga berbicara dengan PBB, OECD dan organisasi internasional yang ada di tingkat lokal. Menurut dia, meskipun Rusia dinilai otoriter, tapi dalam kasus

Novaya Gazeta dia sangat yakin dengan peran aktor internasional dalam membantu Rusia supaya tidak mentoleransi kekerasan terhadap jurnalis.

Menurut dia, jika semua aktor utama dan lembaga terkait berbicara satu suara maka akan ada kemajuan dalam investigasi kasus terbunuhnya Politkovskaya atau Estemirova. Lembaga internasional dan aktor pemerintah adalah kunci untuk bisa memulai investigasi dan meminta otoritas di Rusia untuk mendorong kemajuan proses ini.

Novaya Gazeta dan *Eco Moscow* adalah media independen di Rusia, tapi mereka bukan satu-satunya media independen. Ada banyak lainnya.

Ada banyak juga gerai media tapi dikontrol. Mereka menerbitkan laporan di internet dan undang-undang Rusia hanya memblokir situs yang mendukung ekstremisme dan terorisme saja. Soal kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi di selatan Ukraina dan belum diinvestigasi. Pemerintah Rusia tidak suka adanya kekerasan terhadap *Novaya Gazeta* bahkan mengutuknya, dan ini juga terlihat di Moldova dan Ukraina. Ada banyak sekali undang-undang yang membatasi gerakan jurnalis Rusia di Chechnya.

Lokshina menjelaskan tentang independensi gerai media di Rusia di mana jumlah media yang dikontrol pemerintah secara resmi memang sangat kecil. Tetapi pemerintah memiliki semua bentuk kontrol dan mengatur semua informasi yang disebarluaskan di negara itu. Ada beberapa badan pemerintah menjadi *shareholder* gerai media di Rusia. Sehingga media pun bisa dikontrol pemerintah. Terkait dengan internet, pengguna internet di Rusia banyak dan negara ini merupakan salah satu negara berkembang dalam hal

internet dan pemerintah sudah mengontrol media tradisional untuk alasan pertahanan atau alasan yang logis.

Pemerintah menekan penyebaran berita daring. Beberapa inisiatif perundang-undangan yang dikeluarkan parlemen membatasi konten internet, contohnya undang-undang untuk *blogger*. Otoritas mengharuskan *blogger* populer yang mencatat *hit* hingga 3.000 untuk bisa mendaftar ke komisi pemerintah dan juga ke gerai media. Pemerintah ingin *blogger* memiliki tanggung jawab tanggung jawab sama seperti gerai media dan mereka harus memverifikasi semua informasi yang mereka publikasikan. Pada saat yang sama, mereka tidak menikmati perlindungan yang sama seperti media tradisional. Bisa dikatakan, independensi media di Rusia tidak menggembirakan.

Soal kekerasan terhadap jurnalis, di Chechnya, pelaku kejahatan menculik orang yang mengkritik, mempermalukan mereka dan sebagainya. Ada banyak intervensi, yang sudah didokumentasikan dalam laporan tersebut sebagai tambahan dari isu lain yang membahas persekusi terhadap jurnalis dan kekerasan terhadap jurnalis lokal dan internasional.

Pernyataan Lokshina dikritik seorang jurnalis dari Azerbaijan yang mengatakan tidak adil jika dalam sebuah diskusi menuduh Rusia tanpa memberikan kesempatan kepada negara itu untuk memberikan jawaban. Jurnalis itu mengklaim tidak mewakili atau membela pemerintah manapun, bahkan pemerintah negaranya. Kedua pihak seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Berhubungan dengan kekerasan dan kebebasan pers, seorang *blogger* di Azerbaijan, Bulga Muhmaniseno dipenjara karena kasus penghinaan.

Komunitas pers setempat sedang mencoba membebaskannya secepat mungkin. *Blogger* ini sudah beberapa kali diingatkan untuk tidak menghina orang lain. Dia tidak memiliki pengalaman jurnalisme yang baik, dan tidak memiliki pendidikan yang layak. Lokshina dinilai hanya berbicara dari satu sisi saja dan diminta untuk mendengarkan mereka, mendengar pemerintah juga jika ingin adil.

Lokshina menjelaskan dia sudah bekerja sebagai peneliti selama 9 tahun dan dia beserta timnya saat bepergian terkait dengan pekerjaan pengawasan hak asasi manusia melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh jurnalis. Dia mewawancarai korban, saksi, dan mencari kebenaran yang ada jika memungkinkan. Dia juga mengambil risiko karena semua pekerjaan tersebut berisiko.

Semua pekerjaan tentu berisiko, tidak hanya jika melihat dari sisi siapa yang bersedia mengambil risiko profesi atau tidak, yang jelas risiko ini perlu dikelola.

Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah aktivis hak asasi manusia dan jurnalis yang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Ada kasus jurnalis yang dipukul, disiksa supaya mereka berhenti mencari kebenaran di dalam sebuah kisah. Jurnalis mungkin dapat disiksa dan bahkan dibunuh karena hal itu dan semua aktor internasional harus mengambil tindakan terkait dengan masalah itu dan membahas perkembangan investigasi dengan instansi pemerintah yang terkait. Jika tidak, tidak akan ada yang berubah.

PERLINDUNGAN WARTAWAN OLEH UNESCO

Duta HAM Belanda Kees van Baar mengatakan sebagai aktor dalam sistem internasional, negaranya dekat dengan PBB terkait dengan

isu keselamatan jurnalis. UNESCO telah mengontrak orang untuk isu tertentu. Ada banyak rencana aksi yang sudah dirumuskan dan hal ini cukup baik sebagai permulaan. Sekarang ada berita bagus, tindak lanjut dari laporan tentang hal yang sudah dilakukan meningkat hingga 65%. Ini penting untuk dilakukan dan harus dilakukan.

Pihak terkait juga sedang berusaha menyempurnakan upaya yang telah dilakukan dan ini berupa laporan yang serius dan telah dipastikan kebenarannya seperti jumlah kasus, sifat kasus, dan kerangka hukumnya. Semua orang dapat melihat apa yang telah dikerjakan di negara tertentu.

UNESCO bukan organisasi hak asasi manusia, namun kalau berhubungan dengan jurnalis maka perlindungan terhadap mereka menjadi isu hak asasi manusia. Kalau dilihat dari perspektif UNESCO maka seharusnya ada kerja sama di sini. Misalnya, PBB memiliki UNESCO, OECHR, dan Human Rights Council yang bekerja sama menangani isu hak asasi manusia. Sebagai jurnalis, mereka bukanlah pejuang hak asasi manusia tapi mereka sering dan tidak terelakkan berpartisipasi melakukan hal itu karena panggilan suara hati.

Ketika jurnalis melakukan pekerjaan dengan baik di sebuah negara, mereka menjadi pejuang hak asasi manusia. Jurnalis tidak memilih untuk menjadi seperti itu namun mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan tanpa sadar mereka kemudian menjadi pejuang hak asasi manusia. Ini merupakan isu yang istimewa.

Organisasi van Vaar memberikan pelatihan kepada jurnalis di wilayah konflik. Jurnalis juga mengetahui bagaimana menghadapi kekerasan dan melihat bagaimana caranya menggunakan data

digital. Dengan demikian, data lembaga mereka tidak sampai jatuh ke tangan pihak yang tidak semestinya. Misalnya, data ini akan dipakai untuk memburu narasumber, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap mereka. Ini adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan dari sisi jurnalis.

Sedangkan dari sisi perlindungan, kata dia, lembaganya mempunyai semacam organisasi pendukung misalnya *free press limited* dan ada relokasi sementara untuk jurnalis yang harus keluar dari kota atau negaranya. Di Belanda terdapat satu tempat yang disebut sebagai *shelter city*. Semua orang bisa datang ke negara ini beberapa bulan saja karena telah menulis artikel yang sangat kontroversial.

Selama perjalanan ke berbagai negara seperti Meksiko, Pakistan, dan Bangladesh, lembaga ini berusaha mendapatkan perhatian dan mendiskusikan dengan otoritas setempat. Misalnya berbicara dengan Menteri Kehakiman atau Menteri HAM dan meminta mereka untuk melaporkan kepada UNESCO, mendiskusikan kasus individual atau membuat mekanisme untuk melindungi jurnalis. Seperti di Meksiko, ada mekanisme yang tidak hanya melindungi jurnalis tapi juga aktivis HAM.

Kegiatan lain UNESCO adalah mencoba memastikan kerja sama dengan pemerintah berjalan dengan baik. Di Irak, misalnya, lembaga ini meminta pemerintah penguasa di Kurdistan, dan bersama kolega dari Uni Eropa menentukan titik fokus untuk melaporkan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan terhadap jurnalis. Di Meksiko, upaya melindungi jurnalis dan pegiat HAM perlu ditingkatkan. Harus ada tindak lanjut untuk melihat asal ancaman sebagai bagian dari pencegahan untuk ditangani. Jika tidak, maka ancaman ini akan terus berlanjut dan apalagi tidak ada tindakan terhadap pelakunya.

Bagi UNESCO, bukan kasus pembunuhan saja yang perlu diperhatikan tetapi upaya lain untuk menekan pers seperti intimidasi juga harus ditangani. Juga penanganan terhadap intimidasi dan pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan karena hal ini akan mempengaruhi kemerdekaan pers, mempengaruhi bagaimana negara berfungsi karena kasus ancaman, intimidasi dan pelecehan seksual membahayakan demokrasi.

Orang mendapatkan informasi dari pers yang bebas. Masyarakat informasi menuntut akuntabilitas negara untuk apa yang akan dilakukannya. Ketika jurnalis tidak dapat membuat mekanismenya, orang tidak akan dapat menyampaikan laporan secara bebas. Ini akan menjadi ganjalan bagi proses demokrasi. Diperlukan proses interaksi yang sehat antara masyarakat dan otoritas atau pemerintah.

Kondisi di Turki, menurut Erol Onderoglu, jurnalis dan perwakilan dari Reporters Without Borders, juga kurang menggembirakan. Negara ini bernegosiasi selama 15 tahun untuk bisa diterima sebagai anggota Uni Eropa. Proses ini sebetulnya sudah dinilai efektif beberapa waktu lalu. Namun kemudian pemerintah Turki mengakhiri proses demokratik dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Sejumlah langkah harus diambil dan telah berjalan selama hampir 9 bulan. Yang paling terkena dampak dari langkah pemerintah ini adalah organisasi masyarakat madani dan gerakan HAM karena pemerintah membidik mereka yang bertanggung jawab untuk apa yang tidak disukainya. Selain membungkam gerakan Kurdi dan partai sekuler, pemerintah Turki juga memberikan tekanan terhadap surat kabar dan media yang kritis.

Gerakan HAM Turki dikatakan cukup kehabisan energi melakukan advokasi di lapangan karena sudah melakukan hal yang sama selama

puluhan tahun. Banyak penderitaan di Turki yang disebabkan oleh kudeta militer. Onderoglu yang pernah ditahan selama 3 tahun ini mencontohkan mereka mencoba untuk tetap mengadvokasi tentang HAM.

Turki tidak pernah berhasil memperbaiki diri untuk menciptakan sesuatu sehingga ada kebebasan untuk berekspresi dan pemerintah berusaha menghindari kesalahan.

Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Turki berusaha membongkar gerakan dan organisasi sekuler HAM dan pemberlakuan keadaan darurat negara merupakan salah satu instrumen yang luar biasa yang dipakai oleh pemerintah. Reporters Without Borders perlu memastikan perlindungan terhadap 20% media Turki, karena 80% sudah dipengaruhi secara ideologi maupun finansial, dikontrol baik secara langsung atau tidak oleh pemerintah.

Pluralisme media menghadapi banyak masalah dan perjuangan di Turki juga berat karena ada hantaman di sektor peradilan. Reporters Without Border sudah banyak mengkritik UU atau adaptasi untuk menyesuaikan dengan sistem hukum Uni Eropa, Tetapi dengan kondisi darurat sekarang, jurnalis Turki harus tunduk kepada UU yang diberlakukan pemerintah, sementara banyak UU yang tidak menawarkan perbaikan yang layak. Contohnya jurnalis yang ditahan. Tidak ada penghargaan terhadap HAM dalam beberapa bulan terakhir karena pengadilan Turki tak bisa diandalkan dan konstitusi Turki tidak memberikan perlindungan.

Banyak sekali kegiatan seperti gerakan HAM yang meminta atau mengimbau para intelektual dan polisi untuk melindungi dan menjamin keselamatan jurnalis tersebut. *Website* Dewan Eropa misalnya, merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk

melaporkan keluhan terkait pelanggaran kebebasan berpendapat. Reporters Without Borders selama 2 tahun ini telah melakukan pelatihan jurnalistik untuk memberikan perlindungan terhadap konten. Pada saat yang sama, organisasi ini melaksanakan advokasi untuk menghentikan polarisasi politik yang juga sangat mempengaruhi lanskap media.

Sebelum negara dinyatakan darurat, Reporters Without Borders sudah berkontribusi dan organisasi ini juga akan menjalin dialog meski dinilai terlambat. Karena pemerintah telah melakukan intervensi terkait kepemilikan media dan strukturnya, juga mempengaruhi media *mainstream* yang ada maka tidak bisa dilakukan dialog dengan jurnalis yang dekat dengan pemerintah. Lembaga ini bisa berdialog dengan pihak berwenang dan pemerintah harus melepaskan jurnalis yang semula ditahan. Reporters Without Borders juga mengurus hal yang penting saat ini yakni kampanye untuk keselamatan jurnalis yang dilakukan oleh seorang aktivisnya.

Menurut dia, isu ini bukan isu HAM semata tetapi juga memerlukan keterlibatan tim penjaga perdamaian PBB. Karena ada dimensi secara langsung terkait dengan keadaan di lapangan. Seorang wakil khusus yang mempunyai mandat kuat untuk melindungi jurnalis harus dipilih untuk mewakili badan PBB dan sejauh ini terdapat lebih dari 200 LSM dan badan internasional yang mendukung inisiatif ini.

BELAJAR DARI AFGANISTAN

Keselamatan jurnalis di Afghanistan sebagaimana banyak diketahui adalah isu yang sangat penting. Manajer Operasi Afghanistan Journalist Safety Committee (AJSC) Ilias Alami menjelaskan mekanisme keselamatan para jurnalis di negaranya.

Saat itu muncul ide untuk membentuk mekanisme keselamatan jurnalis di Afghanistan. Pada saat yang sama banyak sekali organisasi masyarakat madani bekerja sama untuk isu advokasi media atau meleak media secara umum. Tetapi mereka tidak terkonsolidasi, dan ingin bekerja sendiri dengan pekerjaan masing-masing.

Dari sanalah kemudian Alami dengan lembaganya mencoba mengajak semua orang bekerja sama, mendorong semua organisasi advokasi bersama ke dalam satu *platform* dan mencoba melakukan upaya advokasi di luar ibukota Afghanistan, Kabul. Mereka membawa ide itu ke provinsi di mana banyak sekali jurnalis yang menghadapi masalah lebih buruk ketimbang jurnalis yang bekerja di Kabul. Ada basis media yang kuat di Kabul dengan kemampuan untuk berjuang mendapatkan hak mereka, namun tidak bagi gerai media yang kecil atau jurnalis lepas. Mereka menghadapi situasi yang sangat sulit.

Untuk mewujudkan hal itu perlu ada kehadiran lengkap pemangku kepentingan seperti pemerintah, asosiasi jurnalis, dan kelompok yang berpotensi mengancam keselamatan jurnalis. Pada 2009 terbentuklah AJSC dan organisasi ini membentuk semacam situs sukarela dan merekrut perwakilan dari setiap provinsi.

Dengan perwakilan yang siap untuk bekerja itu, mereka mempunyai titik perhatian di setiap provinsi untuk membantu mencatat semua kekerasan yang dialami oleh jurnalis di lapangan. Mereka mendata bentuk kekerasan, ancaman atau isu lain, sumber kekerasan, siapa pelakunya apakah terkait dengan pemerintah, pasukan keamanan, Taliban dan sebagainya. Setelah itu mereka mencoba masuk ke masyarakat di mana masalah itu mencuat. Awalnya dari tingkat provinsi, ternyata banyak sekali isu dan tantangan terbesarnya

justri berada di sana. Mereka kesulitan untuk mengumpulkan data, tetapi mereka terus berusaha.

Mereka juga melihat ada beberapa harapan dan mekanisme untuk keselamatan jurnalis meski pun cukup sulit untuk mengubah situasi secara drastis. Seperti dicontohkan ada kekerasan verbal dilakukan oleh pemerintah terhadap jurnalis di satu provinsi di bagian timur. Saat menemukan kasus ini, maka para aktivis di Kabul mengangkat kasus ini.

Di tingkat pemerintah, jika ada pejabat Kabul yang akan menelpon, mereka menugaskan koordinator untuk menghadapinya. Mekanisme lainnya, mereka merencanakan boikot untuk memuat berita tentang pemerintah. Jurnalis tidak bersalah karena hanya menjalankan tugas dan meminta informasi. Organisasi ini mengeluarkan pernyataan pers yang menyatakan mereka memboikot berita tentang pemerintah.

Beberapa jam kemudian pemerintah menanyakan hal itu dan meminta maaf atas kasus tersebut kepada jurnalis dan semua komunitas jurnalis. Menurut Alami, peristiwa itu membangkitkan harapan organisasi ini di tingkat provinsi dan mempermudah penentuan langkah berikutnya terkait dengan kasus tersebut. Inilah yang dilakukan AJSC di tingkat provinsi.

Alami menjelaskan kasus ini akan dikaji ulang oleh organisasi berbasis komunitas. Tetapi hal ini tidak cukup untuk kasus kekerasan verbal saja. Banyak sekali faktornya. Pemerintah melihat laporan organisasi ini menuding pihaknya sebagai pelaku utama ancaman atau kekerasan. Namun ada juga ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh kelompok garis keras.

Setelah kejadian itu, Taliban semakin mengancam media. Mereka menyerang sebuah media di Kabul dan itulah awal adanya kekerasan terhadap jurnalis yang datang dari kelompok garis keras, terutama dari Taliban. Tak kurang 13 jurnalis terbunuh pada 2016 dan tahun itu sangat berdarah, banyak sekali kantor media yang diserang secara langsung oleh kelompok garis keras.

Tentu saja hal ini menciptakan ketakutan di antara media dan jurnalis. Kejadian ini memang berlangsung beberapa waktu yang lalu tetapi AJSC sebelumnya telah memberikan advokasi kepada pemerintah. Jika pemerintah tidak mempunyai UU yang konkret, maka mereka tidak akan mampu menangani masalah kekerasan ini dan bisa melanjutkan pendekatan sistematis terhadap kekerasan tersebut.

AJSC bersama pemerintah dan organisasi advokasi, mulai menginisiasi pendirian Federasi Organisasi Media dan Jurnalis Afghanistan pada 2015. Terdapat 13 media dan sejumlah jurnalis yang bergabung dalam federasi advokasi ini. Federasi ini terbentuk dari upaya kolektif semua pihak yang menginginkan terjaminnya keselamatan jurnalis. Suara dari komunitas pers lebih mudah didengar secara kolektif. Mereka mendapatkan akses ke pegawai senior pemerintah.

Saat itu, ada banyak dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat termasuk dari Presiden dan pimpinan eksekutif. Mereka sangat pro media dan jurnalis. Sekarang masalahnya tidak lagi di tingkat pusat karena masih ada kesulitan untuk menembus pemerintah di tingkat yang lebih rendah, khususnya di tingkat provinsi. Tidak bisa langsung berubah tetapi setidaknya dimulai dulu dari tingkat yang lebih tinggi.

KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Manajer Program LBH Pers, Insany Syahbarwathy menyatakan Indonesia belum memiliki kemajuan dalam kemerdekaan pers. Saat ini terdapat delapan kasus terkait dengan media yang belum terselesaikan. Sejak reformasi 1998, Indonesia masih berusaha memperbaiki situasi agar media dapat berkembang dengan baik. Menurut dia, banyak yang berpikiran Indonesia memiliki kemerdekaan pers tapi itu tidak sepenuhnya benar mengingat aparat militer dan polisi sering menghalangi jurnalis menjalankan tugas mereka sesuai dengan *standard operating procedure* jurnalistik.

Dalam 10 tahun terakhir, menurut dia, sulit untuk mengatakan ada kemajuan. Memang dari sisi *rating* kemerdekaan pers, posisi Indonesia beranjak dari peringkat 134 ke 126, namun masih banyak hal yang menghambat. Dengan delapan kasus pembunuhan tersebut terlihat negara belum memberikan perlindungan secara penuh kepada jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Selain itu, perusahaan media juga tidak memberikan bekal pelatihan atau kepastian keselamatan jurnalis seperti peralatan atau perlengkapan yang cukup dalam melakukan peliputan di wilayah yang berbahaya.

Indonesia memiliki sejumlah wilayah konflik dan wilayah rawan bencana—di mana terjadi tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan kondisi tersebut mempersulit jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, di Indonesia juga mempunyai masalah anti-keragaman.

Ada juga masalah yang lain di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim dan fanatisme agama kemudian menjadi persoalan yang mengganggu. Juga hadirnya media partisan yang menjadi persoalan paling mendasar dalam keselamatan jurnalis akibat media yang tidak independen dan mengakibatkan jurnalis

mengalami kekerasan ketika bertugas. Syahbarwathy menyebut tak jarang jurnalis dipukuli atau dihalang-halangi saat meliput aksi demonstrasi karena dianggap bagian dari media partisan.

Menurut dia, jika media independen, maka jurnalis akan aman. Pengalaman menunjukkan, terutama setiap menjelang pemilihan umum, selalu ada media partisan yang muncul. Ini tentu saja mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tugas jurnalis dan media. Tentu saja soal kepercayaan ini menjadi masalah yang nyata.

Jurnalis yang bekerja secara profesional juga mempunyai masalah dengan orang yang mengaku sebagai jurnalis tetapi tidak mempunyai media dan atau jurnalis yang bekerja untuk kepentingan tertentu misalnya memeras untuk mendapatkan uang. Indonesia memang mempunyai Dewan Pers dan Undang-undang Pers. Tapi kenyataannya agak sulit untuk memberikan pelayanan di seluruh Indonesia.

Dewan Pers menerima 600 kasus yang diadukan dari masyarakat dan perorangan untuk masalah pencemaran nama baik atau defamasi. Tuduhan pencemaran nama baik ini sering dipakai untuk memenjarakan jurnalis. Seringkali mereka tidak melaporkan dugaan pencemaran nama baik kepada Dewan Pers tapi langsung ke polisi. Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik tetapi kemudian dengan mudah diseret ke pengadilan, ke penjara. Sementara komunitas pers meminta supaya jurnalis tidak dijerat dengan tuduhan defamasi atau tidak dijebloskan ke penjara, tidak dikriminalkan hanya karena bekerja untuk kepentingan publik.

Syahbarwathy berasal dari Maluku, sebuah provinsi kecil di Indonesia Timur. Pada 2010 terdapat dua kasus pembunuhan

jurnalis—satu terbunuh karena melakukan investigasi dan satu lainnya terbunuh karena konflik. Kedua kasus itu tidak terselesaikan. Indonesia sering dibanggakan karena dinilai sebagai negara demokrasi dengan tingkat keamanan yang baik. Padahal masih ada kekurangannya. Seringkali jurnalis berada dalam situasi yang terabaikan perlindungannya.

Di Papua, misalnya, jurnalis asing kesulitan masuk ke wilayah itu. Papua masih selalu menjadi persoalan utama Indonesia jika mengukur kemerdekaan pers di Indonesia. Jika Papua bisa terbuka, menerima jurnalis asing, maka Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara paling aman untuk jurnalis. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu.

Indonesia masih dalam proses merayakan kemerdekaan pers dan ketika dunia merayakan hari kemerdekaan pers, dua jurnalis Papua dipukuli. Korban telah melaporkan kasus kekerasan terhadap jurnalis ini kepada polisi. Sementara ada 190 negara datang ke Indonesia untuk berbicara tentang kemerdekaan pers, tapi masih ada jurnalis yang dipukuli di bagian timur Indonesia.

Untuk menyelesaikan masalah ini—yang tak hanya dialami di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia—berdasarkan pengalamannya, yang paling utama adalah memberikan pemahaman kepada semua pihak, semua *stakeholder* terutama kepada aparat pemerintah, militer maupun kepolisian untuk menjaga jurnalis saat melakukan tugas jurnalistik.

Di dalam Undang-undang Pers disebutkan jika jurnalis melakukan tugas jurnalistik karena profesi, dia tidak bisa dilukai atau dilaporkan ke polisi karena dia bekerja untuk kepentingan publik. Sayangnya,

yang diamanatkan UU ini sering dilanggar, hanya menjadi pajangan dan diabaikan. Jurnalis juga harus mampu melindungi diri sendiri. Ini berdasarkan pengalamannya meliput konflik hampir 15 tahun di wilayah itu.

Menurut Syahbarwathy, pernyataan yang dikeluarkan terkait dengan isu ini lebih bersifat diplomatis sedangkan realitanya di lapangan berbeda. Jurnalis harus jujur tidak mewakili negara dan agama tapi berpijak pada kode etik jurnalistik. Kebenarannya adalah apa yang terjadi di sini, mereka harus berkampanye kepada diri sendiri sebagai wartawan untuk keamanan mereka di wilayah konflik. Dia pernah meliput konflik atau tragedi antara orang Islam dan Kristen di Ambon, Maluku.

Syahbarwathy sebagai Muslim berusaha menjadi jurnalis yang baik dan profesional. Komunitas Islam dan Kristen terpisah saat itu. Dia dan yang lain belajar bahwa mereka harus menjadi jurnalis dan harus profesional, harus menciptakan perdamaian bagi masyarakat mereka sendiri. Yang menjadi masalah adalah pemerintah membuat semacam aturan, tetapi komitmennya dipertanyakan. Contohnya delapan kasus di atas itu tidak terselesaikan. Dia menilai pemerintah belum melakukan hal yang benar bagi kemerdekaan pers di negara demokratis seperti Indonesia.

Terkait dengan peliputan di wilayah konflik, dia tidak takut bicara apa yang terjadi di Indonesia karena memang demikian kenyataannya. Perempuan jurnalis pun juga tetap harus meliput. Mereka harus kuat secara fisik dan mental. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di wilayah konflik. Dia sebagai jurnalis televisi harus berada di garis depan, harus melindungi diri sendiri untuk tidak membuat orang marah dengan kehadirannya. Dia melakukan pekerjaannya sebagai

seorang profesional bukan karena latar belakang agamanya sebagai seorang Muslim atau daerah asal.

Menanggapi penjelasan yang disampaikan oleh Syahbarwathy, pejabat Kementerian Luar Negeri, Ade Safira, mempertanyakan delapan kasus yang belum terselesaikan itu karena, menurut dia, Indonesia sudah melakukan banyak kemajuan dalam hal perlindungan HAM selama era reformasi. Indonesia mempunyai Komnas HAM, Ombudsman, Dewan Pers, dan Undang-undang Pers.

Safira menepis anggapan pemerintah tidak melakukan sesuatu untuk kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Menurut dia, meskipun peraturan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan, peraturan adalah hal dasar yang dapat dipakai untuk membela diri. Aturan itu dapat digunakan untuk mengklaim apakah jurnalis memerlukan perlindungan atau tidak dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Pemerintah tidak bisa menghentikan jurnalis untuk mencari informasi yang mereka inginkan.

Pemerintah harus menyadari pihaknya memiliki kewajiban untuk melindungi jurnalis berdasarkan aturan yang ada. Dewan Pers menerima banyak laporan, mereka menyadari ada sumber yang terbatas. Dia membantah tidak ada kemerdekaan pers di Papua. Menurut dia, Indonesia sudah mempunyai ketentuan dan mekanisme untuk wartawan asing yang datang ke negara ini.

EMPAT ELEMEN UNTUK PERLINDUNGAN JURNALIS

Paranawithana berpendapat bahwa dalam kebebasan berbicara juga ada masalah profesionalisme. Dia mengemukakan isu terkait

dengan upaya menciptakan komisi standar media berita, yang bukan berasal dari institusi pemerintah tapi proses merangkul atau mengundang berbagai *stakeholder*.

Onderoglu juga menyampaikan pendapat tentang persepsi pemerintah Turki mengenai organisasi internasional. Dia menilai ada beberapa jenis undang-undang yang berkaitan dengan komitmen HAM di Turki. Namun Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang takut partainya kehilangan kursi di parlemen melancarkan kampanye yang mendeskreditkan organisasi internasional seperti Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) dan Parlemen Uni Eropa. Semua pihak terkejut mendengar Turki yang telah bekerja keras selama 15 tahun untuk mendapatkan keanggotaan Uni Eropa namun mendiskreditkan lembaga internasional hanya dalam waktu sehari saja.

Dia meyakini negara yang ingin mempertanyakan situasi Turki di PBB dan Uni Eropa bisa menerima Turki yang baru yang tidak ada hubungannya dengan isu HAM walaupun pemerintah jelas menantang apa yang tampak sebagai hak fundamental, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Menurut dia, sangat sulit untuk mengharapkan masukan dari organisasi masyarakat madani karena mereka sendiri dituduh berhubungan dengan kepentingan luar negeri. Mereka dituduh menjadi mata-mata negara Barat.

Tidak mudah bagi jurnalis untuk mengkritik peran pemerintah di Turki dengan pelaporan isu Panama Papers, di mana nama sejumlah investor ditemukan di sana. Sekarang, mengkritik korupsi dipandang sebagai hal yang tabu di Turki dan jurnalis sendiri dianggap sebagai profesi yang sangat jahat. Inilah perkembangan terkini yang terlihat di negara itu.

Asisten Direktur Jenderal untuk Informasi dan Komunikasi UNESCO, Frank La Rue, menambahkan bahwa semua pihak harus menyoroti topik ini karena adanya perhatian yang besar terhadap kekerasan terhadap jurnalis. Solusi yang cepat untuk masalah ini harus ditemukan. Ini bisa berupa kebijakan yang efektif dan harus melihat tren peningkatan penyiksaan dan pelecehan terkait dengan pekerjaan jurnalis. Harus ada solusi, misalnya, dari PBB bagaimana harus melindungi jurnalis, dan beberapa kebijakan sudah dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB di Jenewa, dan UNESCO.

Semuanya melakukan pekerjaan terkait dengan HAM dan penting kiranya melihat ada perhatian yang besar dan sudah disepakati oleh semua anggota PBB, Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa menyusun rencana yang efektif. Ada empat komponen penting yang diperlukan untuk memastikan jurnalis aman dalam pekerjaan mereka. Semua orang memiliki perbedaan dari sisi mekanisme yang akan mereka bangun. Tetapi beberapa komponen itu harus sama, paling tidak ia membuka peluang bagi keterlibatan banyak pemangku kepentingan. Menurut dia mekanisme yang menarik adalah yang ada di Afghanistan karena diusulkan oleh jurnalis dari Afghanistan sendiri.

Kolombia melakukan hal yang sama. Bagaimana asosiasi jurnalis bersama dengan masyarakat madani, aparat pemerintah di eksekutif, dan lembaga peradilan, mencoba melibatkan hakim dan institusi keamanan untuk bekerja sama membangun mekanisme ini.

Untuk memastikan keselamatan jurnalis harus ada dialog *multi-stakeholder* atau pemangku kepentingan, harus ada konsensus bahwa keselamatan ini penting dan juga memang harus ada

keinginan untuk membangun demokrasi dan mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SGD) 2030. Ini sudah dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan. Pembangunan yang baik hanya dapat dilakukan jika semua orang berpartisipasi di dalam perencanaannya. Ini adalah sesuatu yang penting untuk membangun demokrasi, mencapai tujuan nasional, tujuan pembangunan.

Keempat komponen ini yang *pertama* adalah kerangka hukum atau *legal framework*. Ini yang pertama harus ada, yang melindungi pers secara umum dan jurnalis secara khusus dengan konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Harus ada kebijakan mengenai pencegahan. Ini harus dimulai dari komitmen pimpinan pemerintah dan hal ini adalah semacam tantangan karena berkaitan dengan pembangunan kepercayaan.

Kadang-kadang banyak pemimpin negara yang mengatakan semua yang di dalam berita itu tidak betul. Jurnalisme tidak bisa hanya dilihat dari polarisasi jurnalis yang bagus atau yang jelek, kendati fakta menunjukkan beberapa jurnalis lebih bagus dibandingkan dengan koleganya. Tentu ada jurnalis yang lebih baik dari yang lain. Tapi bukan masalah kualitas ini jurnalis yang menjadi alasan mendapatkan keselamatan. Semua jurnalis, apakah baik atau buruk, harus dilindungi.

Yang *kedua* adalah masalah kebijakan, maksudnya harus ada pembangunan kapasitas untuk jurnalis dan lain-lain. Yang *ketiga* adalah mekanisme tanggapan yang harus dilakukan secara cepat, terutama dalam situasi darurat. Yang *keempat*, yang juga penting adalah penghapusan impunitas dari semua kasus. Semua kasus harus diinvestigasi. Tapi di sini juga ada masalah investigasi tidak dilakukan. Dia menemukan seorang jaksa mengatakan tidak bisa membuktikan tindak kekerasan karena faktanya mereka adalah

jurnalis atau terkait jurnalistik. Ini jelas buruk, sebuah kesalahan besar.

Jadi harus ada investigasi menyeluruh untuk setiap kasus kekerasan untuk mengungkap aktor yang sebenarnya dalam kasus itu. Akhir kata, penghapusan impunitas mungkin adalah elemen yang paling penting untuk keselamatan jurnalis.

BAB III

MELEK MEDIA DAN INFORMASI: PERLAWANAN ATAS UJARAN KEBENCIAN, MISINFORMASI, DAN POLARISASI JARINGAN



Cristina/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Zaman digital telah mendorong terjadinya transformasi komunikasi dan informasi secara besar-besaran. Era digital menyediakan perangkat bagi publik untuk menjadi produsen isi pesan. Seseorang dapat berbagi pendapat dan kreativitasnya dengan *audience* global dengan mudah. Kondisi itu membuat media digital mendemokratisasi kebebasan mendasar, yakni kebebasan informasi dan berekspresi.

Namun perkembangan positif ini mendatangkan serangkaian tantangan. Media digital telah memudahkan tersebarnya ujaran kebencian, berita bohong, dan propaganda. Situasi itu bahkan mengarah pada distorsi kebenaran, serta mencederai media dan masyarakat.

Melek media dan informasi merupakan cara efektif menandingi ujaran kebencian, misinformasi, dan polarisasi dalam jaringan. Memberdayakan konsumen media dengan pengetahuan dan peralatan yang tepat diperlukan agar mereka bisa menggunakan internet dengan bijak dan menafsirkan informasi secara kritis.

Melek media dan informasi membuat warga mampu membentuk pengetahuan dan pemahaman secara mandiri, ketimbang menerima informasi secara pasif. Hal ini membantu masyarakat dalam mengidentifikasi usaha manipulasi emosi yang berpihak pada kebencian dan intoleransi.

Dengan kemampuan menafsirkan informasi secara kritis dan mampu menyimak agenda di balik sebuah berita, maka pengguna media digital dapat mengenali orientasi ideologi dalam isi pesan media, apapun caranya.

Melek media dan informasi akan mendorong pengguna internet untuk mencari berita atau informasi yang berlawanan agar mereka

memperoleh pandangan yang komprehensif dan terhindar dari polarisasi.

UJARAN KEBENCIAN, BERITA BOHONG, DAN MISINFORMASI

Kepala Bidang Keamanan dan Masyarakat Asia Pasifik Facebook, Claire Deevy menjelaskan Facebook tidak memberikan ruang bagi ujaran kebencian. Pihaknya memiliki standar komunitas mengenai hal yang boleh dan tidak boleh disebarakan melalui Facebook.

Setiap kata yang diunggah di Facebook bisa dilaporkan apabila seseorang merasa kata tersebut melanggar standar komunitas. Baik ujaran kebencian terhadap ras, suku, gender, agama, disabilitas atau pun bentuk penyakit tertentu. Pihaknya kemudian langsung menutup akun tersebut apapun alasannya, tidak terkecuali insentif finansial.

Hal itu pula yang mendasari Deevy untuk bertugas di kawasan Asia Pasifik. Dia berperan membangun kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat untuk memahami isu yang ada di suatu negara. Facebook menggunakan teknologi untuk menghentikan penyebaran berita bohong melalui kemitraan dengan berbagai pihak karena yakin upaya pemberantasan ujaran kebencian atau misinformasi tidak bisa dilakukan sendiri.

Lebih lanjut Deevy mengatakan peran komunitas menjadi penting untuk meningkatkan kualitas Facebook. Ini bukan berarti melemparkan tanggung jawab Facebook kepada pemerintah dan masyarakat setempat. Pasalnya ada 1,8 miliar pengguna aktif Facebook setiap bulannya di seluruh dunia. Nilai budaya di Eropa Utara tentunya berbeda dengan di Indonesia. Hal yang dianggap menyerang oleh orang di suatu daerah boleh jadi dianggap tidak menjadi masalah bagi orang lain.

Misalkan, bagi seseorang menampilkan foto bayi di laman Facebook adalah menyenangkan, tetapi di tempat lain hal itu dianggap tidak menyenangkan.

Ini mendorong Facebook untuk mengembangkan produknya dengan berupaya menampung perbedaan pendapat. Setiap pengguna diberikan akses untuk memilih mana yang ingin mereka lihat dan mana yang tidak. Pihaknya mencoba menyebarkan pesan itu sebanyak mungkin.

Dalam hal ujaran kebencian, Facebook bermitra dengan Demos Research untuk mengadakan penelitian di tingkat akademis dalam upaya melihat jenis *counter hate speech* mana yang paling efektif. Apakah perlu Facebook mengatasinya dengan menggunakan kata-kata, video, gambar atau foto, mana yang lebih efektif dan bermakna karena dampaknya berbeda di setiap negara.

Ada dana sebesar US\$14 juta yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Facebook mengalokasikan dana itu untuk penelitian akademis dalam upaya menghadang penyebaran ujaran kebencian, misinformasi dan berita bohong. Facebook berusaha untuk melibatkan sebanyak mungkin pihak untuk mendapatkan penilaian yang paling akurat.

Di Indonesia, Facebook menjalankan program “Beda tetapi Satu”—terkait ujaran kebencian. Ini adalah program *hackathon*, selama 3 hari. Orang dari berbagai tempat di Indonesia disatukan di laboratorium. Mereka datang dengan membawa berbagai ide dan pemenang program tersebut menjalankan program *anti-hoax*. Mereka mengatasi atau memberantas ujaran kebencian dengan humor. Selama di laboratorium mereka didukung oleh mentor dan mendapatkan dana dari Facebook.

SENSOR MEDIA TERHADAP HOAX

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla dalam sambutannya di Hari Kemerdekaan Pers di Jakarta menyatakan pihaknya telah meresmikan JAWARAH, yakni Jaringan Wartawan Anti Hoax, sepekan sebelum pelaksanaan acara tersebut. Menurut dia, kebebasan berpendapat dengan media teknologi yang sangat terbuka dan tinggi bisa menimbulkan hal yang negatif jika wartawan tidak melaksanakan sensor internal.

Kalla mengharapkan media mensensor dirinya demi persatuan, demi demokrasi, dan demi keadilan bangsa. Karena apabila hal itu tidak dijalankan, maka kepercayaan terhadap media itu sendiri akan berkurang. Suatu objek kepercayaan dapat timbul dari konektivitas dan hasil dari kebebasan itu sendiri.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Indonesia, Rosarita Niken Widiastuti mengatakan pemerintah Indonesia tidak melakukan intervensi terhadap konten media. Tetapi Indonesia punya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), untuk memastikan agar informasi itu dapat disebarkan secara sehat dan profesional, serta dijaga oleh hukum.

Pemerintah berkewajiban untuk menghentikan atau memblokir konten negatif apabila dirasa konten tersebut tidak sesuai dengan UU yang ada. Misalkan ketika ada seseorang yang menciptakan informasi negatif untuk melawan atau merendahkan orang seperti menciptakan konten yang diskriminatif, rasis, intoleran, menghujat, hal yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat atau menciptakan perpecahan di negara.

Widiastuti mengatakan bahwa *hoax* yang berada di masyarakat bisa memecah belah bangsa. Karena informasi negatif atau ujaran kebencian itu saling menyerang. Menurut dia, tujuan penyebaran *hoax*, tidak hanya alasan ekonomi, tapi juga kadang memiliki alasan politik dan perang ideologi. Hal ini terlihat pada kampanye hitam di Pilkada Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, sebagai humas pemerintah, pihaknya selalu berusaha untuk membuat banyak konten positif yang disebarakan agar bisa mendamaikan dan juga untuk menenangkan masyarakat yang saling menyerang satu sama lain. Muncul ujaran rasisme, dan juga intoleransi.

Karena ada banyak fitnah yang diterima setiap harinya melalui media sosial, pihaknya juga bekerja sama dengan 80 universitas untuk membuat konten positif dan juga menghadirkan *genposting* (generasi *positive thinking*) untuk menghadapi *hoax* yang ada dan juga menjembatani kesenjangan yang besar. Selain itu, pihaknya mengundang para tokoh penting dan figur di masyarakat untuk memberikan testimoni agar mereka bisa menenangkan di dunia nyata dan di dunia maya.

UJARAN KEBENCIAN DAN MEDIA SOSIAL

Pelatih media digital Abdallah Alkafaween menuturkan ada dua level ujaran kebencian. *Pertama*, ujaran kebencian oleh individu di media sosial. *Kedua*, oleh media itu sendiri.

Alkafaween bercerita tentang situasi melek media dan melek digital di Yordania yang memiliki 200 situs berita. Yordania adalah negara kecil di Timur Tengah dengan jumlah penduduk sembilan juta jiwa dan pengguna Facebook sekitar lima juta jiwa. Artinya lebih dari

separuh penduduk negara itu menggunakan media sosial tersebut. Ujaran kebencian di Yordania, kata Alkafaween, ada yang berkaitan dengan pengungsi Suriah yang jumlahnya sekitar 1,5 juta orang. Ujaran kebencian itu muncul di situs berita maupun informasi yang diunggah di Facebook.

Dia menyebutkan juga misinformasi yang dilakukan jurnalis yang menyebutkan bahwa para pengungsi Suriah dapat bekerja di Yordania. Kenyataannya, kata Al-Kafaween, pengungsi yang jumlahnya mencapai 1,5 juta tersebut tidak bisa bekerja karena sudah banyak lapangan pekerjaan yang tutup di Yordania.

Pendiri dan Direktur Eksekutif Cambodian Center for Independent Media, Pa Nguon Teang menimpali dengan mengatakan bahwa ujaran kebencian menjadi sebuah masalah di Kamboja belakangan ini meskipun masyarakat luar menilai orang Kamboja sangat ramah dan sopan. Mereka menyapa “halo” kalau bertemu dengan orang asing.

Menurut dia, jumlah pengguna media sosial di Kamboja meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Seiring itu pula, muncul kekhawatiran akibat adanya berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi di dalamnya.

Berdasarkan studi dari Asia Foundation pada 2016, kata dia, ada tiga saluran yang digunakan masyarakat Kamboja untuk mendapatkan informasi: Facebook, televisi, dan radio. Hasil studi itu menunjukkan bahwa media sosial Facebook menempati urutan pertama, disusul televisi dan radio. Hal ini karena televisi, dan radio dikontrol oleh pemerintah, sedangkan lewat Facebook, pengguna lebih bebas berekspresi dan dalam hal mencari informasi.

Ujaran kebencian dan berita bohong, kata dia, juga bisa mendiskreditkan pengguna Facebook. Dan untuk melawan hal tersebut, ada satu organisasi yang disebut Cambodia United Network yang melakukan survei *online* terkait hal tersebut. Hasilnya menunjukkan sebanyak 70% dari mereka sangat khawatir mengenai berita bohong di Facebook. Dan oleh karena itu, literasi media dan informasi merupakan salah satu konsep yang dapat menjadi pendekatan terbaik untuk menyeimbangkan ataupun untuk mendapatkan nama baik dari pengguna Facebook.

Terkait misinformasi, pihaknya memberikan pelatihan melalui program di dunia maya seperti pelatihan cara mengidentifikasi informasi yang benar dan yang salah melalui verifikasi sumber berita dan kredibilitas penulisnya. Hal lainnya adalah melatih masyarakat atau wartawan terkait kredibilitas pada saat mereka mem-*posting* berita.

Di satu sisi, kata Manajer Proyek DW Akademie, Dennis Reineck, berita bohong adalah sesuatu yang sangat sulit diberantas karena ada masalah verifikasi. Jurnalis harus bersusah payah untuk bisa memverifikasi berita bohong dan terdapat berbagai macam situs untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Tapi pertanyaannya adalah apakah masyarakat biasa dapat melakukan hal tersebut?

Menanggapi hal itu, Deevy mengatakan Facebook sudah mengerjakan hal tersebut cukup lama, karena menyadari ada tiga hal yang menjadi alasan berita bohong itu muncul di media sosial.

Pertama, berita bohong yang didesain karena adanya motif ekonomi. Jadi digunakan untuk meraih banyak klik. Hal tersebut dilakukan seseorang hanya untuk mendapatkan perhatian audiens. Untuk mengatasi hal tersebut, Facebook sebisa mungkin menginterupsi.

Lalu bagaimana langkah Facebook untuk menghentikan insentif keuangan pelaku? Yakni melakukan pengujian kualitas terhadap orang-orang yang memasang iklan di Facebook.

Yang *kedua*, terkait penciptaan produk baru. Hal ini berkaitan dengan poin pertama tetapi intinya di sini adalah penggunaan algoritma dan berpikir bagaimana Facebook mengidentifikasi informasi yang sifatnya kabar bohong. Salah satu hal dilihat Facebook lihat adalah kalau orang menyebarkan hal tersebut sebelum mengklik artikel tersebut. Jadi mereka sebenarnya belum melihat artikelnya, hanya judul berita utama tapi mereka menyebarkannya.

Lalu yang *ketiga* adalah yang menjadi fokus Deevy yakni untuk membantu orang membuat keputusan yang terinformasikan. Jadi ada perbedaan antara mengharapkan orang untuk menjadi jurnalis atau bekerja dengan orang yang memahami apa yang mereka baca di media sosial.

Sehingga hal yang dilakukan adalah secepat mungkin bekerja sama dengan pihak sekolah—di mana internet sudah dikenal oleh anak-anak. Mereka diberitahu tentang bahaya berita bohong, berpikir kritis, dan tidak asal langsung menyebarkannya.

MELEK MEDIA DAN INFORMASI

Deevy menjelaskan bahwa perannya di Asia Pasifik adalah membangun kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat setempat, termasuk LSM, untuk mengatasi permasalahan ujaran kebencian, berita bohong, dan misinformasi.

Facebook bekerja sama dengan berbagai organisasi, memberikan dana kepada mereka yang bisa membangun program-program

integritas informasi. Facebook melakukannya secara *online* maupun *offline*. Adapun total pengguna Facebook di Indonesia setiap bulannya tercatat 90 juta orang.

Facebook melakukan kunjungan ke tujuh kota di Indonesia, selama 12 bulan. Di antara kota yang dikunjungi adalah Yogyakarta, Medan, Malang, Denpasar, dan Surabaya. Pihaknya bertemu dengan anak muda di sekolah dan universitas untuk membahas berbagai isu yang dihadapi di dunia maya. Mereka kemudian diharapkan dapat menentukan langkah bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga nantinya orang akan “Berpikir dulu sebelum bertindak”. Dan melalui program melek media, Facebook juga membuat suatu iklan layanan masyarakat tentang cara mengenali informasi palsu.

Ada pula program jurnalistik yang diselenggarakan dalam pekan Hari Kemerdekaan Pers 2017 di Jakarta. Facebook bekerja sama dengan jurnalis dan meminta umpan balik dari mereka mengenai apa yang perlu diperbaiki dan diubah.

Di Filipina, Facebook bekerja sama dengan sekolah. Di antaranya mengajarkan pemikiran kritis terhadap media sebagai bagian dari pendidikan utama di sekolah. Tanpa mengubah kurikulum, Facebook melihat peran guru dan membekali mereka dengan keterampilan melek media dan informasi sehingga mereka bisa menanggapi setiap permasalahan yang ada secara cepat. Selanjutnya Facebook berusaha untuk bersikap kreatif mendukung otoritas setempat.

Untuk Jepang dan Korea, kata Deevy, pihaknya sekarang berusaha melihat kesempatan bekerja sama dengan generasi yang lebih tua karena ada demografi yang semakin menua di negara tersebut.

Widiastuti menimpali bahwa pemerintah Indonesia juga telah merancang program pendidikan melek media yang dijadikan sebagai bagian dari kurikulum di sekolah untuk membantu mereka melawan berita palsu dan juga konten negatif lainnya.

Pemerintah juga bekerja sama dengan 80 universitas di seluruh Indonesia untuk mengangkat nilai-nilai utama dalam aktivitas media sosial masyarakat. Nilai-nilai itu disingkat dalam kata “READY”. R-nya itu adalah *responsible* atau bertanggung jawab. Jadi siapapun bertanggung jawab atas konten yang diunggah.

E berarti *empathy*, yaitu berempati atas konten yang diunggah di *online*. Di sini harus ada upaya untuk menjaga perasaan orang lain. A adalah *authenticity*. Ini untuk memastikan agar informasi yang ditampilkan konten yang diunggah orisinal. Kemudian D berarti *discernment*, yakni harus bersikap kritis, dapat mengevaluasi informasi atau konten yang disebarkan. Terakhir Y adalah untuk *integrity*, di mana orang harus melakukan hal yang tepat untuk menyampaikan hal yang benar.

Nilai-nilai utama itulah, kata Widiastuti yang menjadi bagian inti dari lokakarya yang diselenggarakan. Dan pihaknya mendukung para siswa dan juga para pemangku kepentingan lainnya untuk bisa menerapkan nilai-nilai utama ini dalam kegiatan media sosial mereka. Selain itu, tim Informasi Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia melaksanakan program konten positif bagi siswa sekolah. Pihaknya menyelenggarakan kompetisi *blogger* untuk mendorong mereka menciptakan lebih banyak lagi konten positif.

Sementara itu, untuk penegakan hukum, pihak kementerian juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum. Menurut UU

ITE, tidak hanya pembuat konten yang bertanggung jawab dan dapat dituntut secara hukum tapi yang menyebarkan dan yang membuat berita negatif itu menjadi viral juga dapat dipidana.

GAMBIA

Perwakilan Pemuda, Komite Koordinasi Komunikasi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Adama Lee Bah, menceritakan keterlibatannya dalam *platform* media sosial. Sebagai warga negara Gambia, dia mengatakan salah satu permasalahan rumit yang dihadapi sebagai generasi muda adalah soal budaya dan agama.

Budaya di negara itu mengisyaratkan jika orang tua mengatakan anaknya pemberani berarti anak itu dianggap kasar. Sebaliknya, jika anak penurut, artinya dia baik.

Lee Bah menggelar konferensi untuk anak perempuan di Gambia. Pihaknya pernah mengundang 600 anak perempuan dari seluruh penjuru negara itu untuk membahas isu pernikahan dini, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan.

Melalui proyek tersebut, Lee Bah yang di masa mudanya juga belajar pendidikan Islam, melibatkan juga ilmuwan Islam, pakar agama Islam untuk membahas isu tersebut. Sunat perempuan (*female genital mutilation*) termasuk materi yang didiskusikan.

Pakar agama Islam biasanya mengatakan: “Oh itu ajaran Islam, ini bagian dari budaya, kita harus lakukan”. Setiap perempuan harus menjadi orang yang penurut, dan suaranya tidak boleh tinggi.

Lalu mereka akan mengatakan kepada anak perempuan untuk mematuhi aturan tersebut dan mereka harus tunduk karena alasan budaya.

Di suatu waktu, Lee Bah menuturkan pernah berdebat dengan seorang imam dari Gambia. Lee Bah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk terbaik. Jadi mengapa manusia sekarang mengatakan perempuan harus disunat, harus dimutilasi supaya bisa menjadi makhluk yang lebih baik?

Kemudian dia berdiskusi dengan imam tersebut, melihat pembenaran (justifikasi) dari beberapa hal yang dirasa tidak tepat. Sehingga salah satu cara untuk mengatasi persoalan seperti ini adalah dengan mengeksposnya misalnya melalui

Langkah ini cukup efektif karena apapun yang ditulis orang di Facebook di masa lalu masih tersimpan di laman *platform* sosial media itu. Jadi, tulisan itu adalah bukti, termasuk ketika ada ancaman atau tekanan dari pihak luar terhadap seseorang.

Dia menuturkan melek media dan informasi menunjukkan bahwa setiap orang bisa melakukan sesuatu lewat media, ponsel pintar, dan berbagai wadah teknologi lainnya untuk mendidik generasi muda. Jadi ketika ada seseorang yang menyampaikan ujaran kebencian maka itu dapat direkam dengan ponsel pintar dan diunggah di media sosial.

Menurut dia, ketika seseorang mengunggah sesuatu ke media sosial seharusnya dia mempunyai tujuan yang positif. Teknologi diciptakan untuk sesuatu yang positif.

Bahkan saat ini ponsel orang tua dapat dikoneksikan dengan ponsel anak. Sehingga sepanjang hari, orang tua dapat memantau anaknya di mana dan kapan pun dengan bantuan navigasi dari ponsel. Jika terjadi gempa maka pencarian korban dapat dipermudah karena dukungan alat bantuan navigasi tersebut, artinya teknologi

membantu. Teknologi ada pro dan kontranya. Melek media pun demikian, namun dalam hal melek media lebih banyak pro daripada kontranya.

Dia mengatakan pihaknya mendapatkan pendanaan dari kedutaan besar AS dan juga dari Komisi Tinggi Inggris untuk melatih 40 jurnalis di Gambia terkait dengan melek media dan informasi pada 2014-2015. Peserta pelatihan diajarkan menggunakan ponsel pintar, misalnya untuk merekam informasi, mewawancarai orang-orang di lapangan sehingga tercipta berita yang otentik yang kemudian bisa disebarakan ke banyak orang.

Pelatihan itu menunjukkan manfaatnya ketika kubu oposisi memenangkan Pemilu Presiden Gambia. Presiden Yahya Abdul-Azis (1996-2017) menerima hasilnya tapi 5 hari kemudian dia menarik pernyataannya, “Oh, saya tidak setuju, saya tidak jadi setuju, saya tidak pernah mengatakan hal tersebut, saya tidak menerima hasil pemilu.”

Dia kemudian menghalangi semua orang yang berbicara di televisi nasional di negara itu. Televisi itu merupakan satu-satunya saluran bagi pemberitaan di Gambia. Program siaran untuk mengklarifikasi isu itu disensor oleh sang presiden.

Lalu jurnalis menggunakan ponsel pintar mereka untuk mewawancarai banyak orang, dan hasilnya diunggah di Facebook Live—sebagai media alternatif. Facebook Live sangat bermanfaat di Gambia, yang jumlah penduduknya hanya sekitar 2,5 juta jiwa. Dan rata-rata di antara mereka saling mengenal. Begitu informasi disebarakan, banyak orang yang menanggapi dengan serius.

YORDANIA

Adapun Alkafaween menuturkan jurnalis akan berpikir 100 kali sebelum menulis sesuatu baik dalam artikel maupun di media sosial. Alkafaween dan rekannya mengajarkan hal itu kepada siswa. Dia mengatakan kepada mereka bahwa jurnalis dan pengguna media sosial adalah orang yang berkuasa atas tulisan/informasi yang dibuatnya.

Menurut dia, dari lima juta pengguna Facebook di Yordania, tidak semuanya tahu cara menggunakan media sosial secara benar. Dan banyak juga yang tidak tahu cara yang aman ketika melakukan *browsing* di Facebook, misalnya, bagaimana mengamankan gambar atau foto keluarga.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengajari anak-anak melalui klub di sekolah (ekstrakurikuler) tentang mengakses dan menanggapi informasi dengan kritis, termasuk untuk isu publik, dan pembuatan konten. Alkafaween juga mengajari mereka cara menggunakan ponsel pintar untuk mengambil foto, membuat video, membuat pesan, dan juga berbagi pesan di media sosial.

Sejauh ini dia sudah melatih di delapan klub sekolah yang diikuti oleh sampai 25 peserta. Semula satu klub terdiri dari 15 anak, tapi kemudian berkembang menjadi 20-25 anak. Pihaknya mengajarkan teori dan praktik untuk menilai foto yang layak untuk diunggah, dan menguji informasi yang mereka terima apakah akurat atau tidak.

Hasilnya, sebenarnya anak-anak itu bisa mengatasi ujaran kebencian dengan melihat apa yang sedang terjadi karena mereka sudah mempelajari pesan yang muncul di media sosial dan *platform* lain. Mereka tahu bahwa pesan itu diciptakan seseorang sehingga dapat membuat mereka terpolarisasi atau mengikuti.

Hal lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan memberikan tips kepada mereka tentang penggunaan Facebook, mengelola email untuk melindungi informasi pribadi mereka. Mereka juga diajak melakukan penilaian sendiri dan menentukan informasi yang diperoleh benar atau tidak.

KAMBOJA

Pa Nguon Teang menyatakan organisasinya mendukung keterbukaan akses informasi dan menjaga kebebasan informasi. Lembaga itu merancang program multimedia '*Voice for Democracy*' dan memberikan pelatihan tentang jurnalisme warga kepada generasi muda.

Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan literasi media dan informasi, dia bekerja sama dengan Deutsche Welle (DW) Akademie, Jerman, sebagai penyandang dana program berdurasi 2 tahun itu. Melalui program itu, mereka melatih 20 siswa perempuan tentang melek media dan informasi.

Semua anak perempuan itu disertakan dalam pelatihan TOT (*training of trainers*). Kemudian puluhan anak itu memberikan pelatihan kepada teman-temannya di lingkungan masyarakat dan sekolah. Sejauh ini, proyek tersebut sudah melatih 500 siswa.

Kemudian timnya melakukan survei dan ditemukan hasil bahwa terdapat perubahan besar pada anak atau siswa yang sudah dilatih tersebut. Mereka banyak berubah, khususnya dalam hal persepsi. Sekarang mereka sudah mengetahui tujuan dari penggunaan Facebook.

Mereka juga memahami untuk berhati-hati dalam mengunggah apapun di Facebook karena *platform* media sosial ini bukan sekedar

hiburan, tapi dapat menjadi alat untuk perubahan karena sifatnya sebagai *platform* yang terbuka untuk publik.

Mereka juga memahami bahwa tidak semua informasi bisa dibagikan melalui Facebook. Dan dampak lainnya dari pelatihan ini, bukan hanya anak-anak yang berubah persepsinya tetapi juga orang tua mereka.

Perubahan lain yang terlihat adalah mereka menjadi tahu bahwa mereka boleh menyuarakan opini mengenai masyarakat melalui Facebook. Kemudian, Pa Nguon Teang mengirimkan pesan kepada Kementerian Pendidikan Kamboja tentang pentingnya pelatihan melek media tersebut.

Setelah berbulan-bulan berdiskusi dan pertemuan, Kementerian Pendidikan Kamboja memutuskan untuk mengintegrasikan melek media dan informasi ke dalam kurikulum pendidikan Kamboja. Sejak itu, sekitar 100.000 siswa kelas 12 telah dididik dalam hal melek media dan informasi.

Sementara itu, dia juga memberikan pelatihan melalui program *online* untuk mengidentifikasi misinformasi. Caranya adalah dengan memverifikasi sumber berita dan juga melihat kredibilitas penulisnya.

Menurut dia, cara terbaik untuk melatih masyarakat agar terhindar dari berita bohong dan misinformasi adalah dengan melatih mereka atau melibatkan jurnalis untuk mengajari bahwa kredibilitas mereka dipertaruhkan ketika mengunggah satu berita ke situs atau media sosial tertentu.

Dia menilai sulit untuk menghentikan orang membuat dan menyebarkan berita bohong. Ini tidak bisa dicegah. Tapi cara

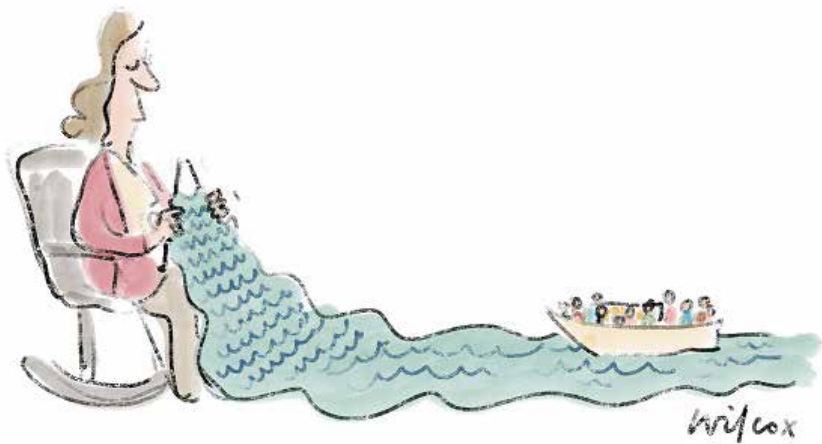
terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan program pendidikan untuk masyarakat.

Di Kamboja, pemerintah mengakui banyak berita bohong yang diunggah di media daring. Upaya menghadang masalah ini agar tidak berkembang adalah dengan menggodok UU kejahatan di dunia maya. Sehingga orang yang membuat berita bohong dapat dipidana. Tapi itu bisa mengancam kebebasan berekspresi, bahaya bagi kebebasan berpendapat.

Jadi jauh lebih baik untuk mendidik masyarakat, pemirsa, pendengar, pengguna informasi. Sehingga mereka suatu saat bisa berkomitmen untuk tidak lagi menyebarkan berita bohong.

BAB IV

MEMUPUK KESETARAAN GENDER DAN INKLUSIVITAS MELALUI INOVASI MEDIA



Cathy Wilcox/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Media massa mengalami perubahan pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Ia telah berinovasi lewat perangkat media, layanan berita, dan *platform* yang baru. Media massa juga menghadapi perubahan pola audiens yang semula pasif menjadi aktif berinteraksi dengan media.

Segala bentuk perubahan media massa tersebut dapat digunakan untuk membangun pemahaman sosial, solidaritas manusia, dan inovasi sosial. Ini juga terkait dengan upaya untuk memupuk inklusivitas dan kesetaraan gender oleh wartawan secara individual maupun media secara kelembagaan.

Dalam sambutannya yang bertajuk “*Pikiran Kritis untuk Masa Kritis*” di World Press Freedom Day di Jakarta, Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova mengatakan bahwa pikiran kritis menekankan pentingnya kebebasan berekspresi untuk inklusi, untuk kesetaraan gender, dan untuk melindungi planet ini.

Perlu pula usaha untuk mengedepankan Agenda untuk Pembangunan yang Berkelanjutan 2030—khususnya Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan 16—membangun masyarakat adil, damai dan inklusif. Media hendaknya tidak menjadi sumber terpercaya saja, tetapi juga menjadi panggung bagi aneka suara dan memobilisasi kekuatan bagi toleransi dan dialog.

GENDER DAN MEDIA

Ketua Harian Namibia Media Trust, Gwen Lister, mengatakan inovasi itu dapat digunakan untuk menyeimbangkan pemberitaan di media tentang perempuan dan kelompok marginal lain di dunia yang saat ini cenderung didominasi oleh laki-laki dan kelompok elit.

Menurut Lister, baik media konvensional maupun media baru harus menjunjung tinggi inklusivitas dan memberikan ruang kepada kaum marginal dan kelompok minoritas untuk menyampaikan suara mereka. Karena jika tidak, media akan kehilangan kredibilitas. Kenyataan di lapangan memang menunjukkan perempuan dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan menghadapi banyak tantangan.

Direktur Program dan Pengembangan International Federation of Journalists (IFJ) Asia Pasifik, Jane Worthington, mengatakan semakin banyak perempuan yang memasuki bidang media (redaksi) dan biasanya mereka yang memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sejawat laki-laki. Namun jumlah mereka masih lebih sedikit dengan perbandingan 3:10.

Bahkan di level manajerial dan posisi senior komposisinya adalah 1:10. Artinya, perempuan memang masuk ke bidang media namun sulit bagi mereka bersaing untuk meraih jabatan yang lebih tinggi karena banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk tekanan sosial dan budaya (dominasi laki-laki).

Faktor lainnya adalah kontrak kerja yang tidak fleksibel bagi perempuan dan berpengaruh terhadap kehidupan berkeluarga. Misalnya ada *shift* malam yang mungkin dirasakan kurang nyaman bagi perempuan.

Faktor selanjutnya adalah pelecehan seksual. Survei IFJ terhadap perempuan, laki-laki dan transgender di dalam media, menemukan sepertiga dari mereka pernah mengalami pelecehan seksual. Khusus perempuan, 18% dari mereka mengalami tindakan pelecehan seksual secara personal.

Isu pelecehan seksual menjadi hal yang sangat penting bagi IFJ di bidang advokasi. Kampanye soal itu telah dilakukan menyusul penyelenggaraan Hari Perempuan Internasional. Masalah pelecehan seksual bukan hanya terjadi di satu lokasi saja seperti di Asia. Ini merupakan fenomena global.

Dan di era internet saat ini pelecehan terhadap perempuan terjadi di sana, yang dilakukan sekelompok orang untuk membatasi kerja dan bahkan membuat perempuan diam. Di India, perempuan menghadapi masalah yang cukup luar biasa terkait dengan pelecehan di dunia maya.

Kolumnis dan feminis asal Inggris, Laurie Penny, pernah menyampaikan hal itu melalui tulisannya yang bertajuk *A woman's opinion is the mini-skirt of the internet* di koran *The Independent* pada 4 November 2011. Di sini perempuan diibaratkan seperti memakai rok pendek di dunia maya ketika menyuarakan pendapat mereka.

Perempuan diancam diperkosa bahkan dibunuh jika mereka berani menyampaikan pendapat. Dan ini terjadi di India, di mana perempuan menderita seperti habis disengat oleh lebah. Betapa sangat luar biasa ganas dan perlu strategi yang lebih baik untuk menangani hal tersebut.

Perempuan, kata Worthington, memang harus berusaha tegar atau mengabaikan saja tapi terkadang ancaman ini memang menjadi hal yang nyata, sehingga IFJ merasa perlu melakukan diskusi tentang cara organisasi media bertindak untuk kehidupan dan kenyamanan jurnalis bekerja. Diperlukan kebijakan untuk melawan dan merespons hal tersebut.

IFJ adalah lembaga internasional yang mewakili serikat jurnalis di seluruh dunia. Ada 33 afiliasi di 23 negara. Sebanyak 52.000 jurnalis tergabung di dalamnya dengan jumlah perempuan mencapai 7.500 orang.

Hal lain yang terkait dengan kesetaraan gender adalah mengenai kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan. Jurnalis laki-laki memperoleh gaji lebih besar 16% dibandingkan dengan perempuan. Angka ini sedikit lebih rendah dari rata-rata dunia sekitar 20% jika berbicara tentang perbedaan gaji di tempat kerja.

IFJ melihat tempat kerja di beberapa negara seperti di Pakistan, India, Nepal, Vanuatu, dan Kamboja belum memiliki kebijakan gender dan kesetaraan gender. Sebanyak 75% tidak memiliki kebijakan. Dan hal tersebut dapat berdampak besar dalam kehidupan di masyarakat, karena media mewakili masyarakat.

Jadi pertanyaannya, bagaimana media dapat membuahkan perubahan ketika media sendiri terikat pada tren demografis laki-laki berusia 30 tahun atau apapun yang merupakan mayoritas di suatu negara? Ketika media menyajikan hal yang lebih mencerminkan keadaan di masyarakat, tentunya ini lebih baik.

Monir Zaarour, Koordinator IFJ Timur Tengah dan Arab, menekankan pentingnya kesetaraan gender dan upaya meningkatkan standar kehidupan perempuan seperti di Tunisia. Menurut Zaarour, di Tunisia jumlah jurnalis perempuan lebih banyak dari pada jurnalis laki-laki pada 2015. Tetapi di satu sisi, gaji mereka lebih rendah dibandingkan dengan gaji laki-laki. Kesetaraan upah penting ditekankan di sini.

Direktur Eksekutif Media Diversity Institute, Milica Pesic mengatakan jika tidak ada kebijakan, tidak ada strategi, tidak ada program, sangat sulit berbicara saja dengan para jurnalis dan mewujudkan perbaikan karena harus mengubah budaya secara keseluruhan. Pesic melihat solidaritas sebagai faktor yang penting dalam menghadapi persoalan di Tunisia dan negara lain ketika perempuan mulai mendominasi ruang berita, tapi terhalang oleh latar belakang suku, agama, dan lain-lain.

Adapun Direktur Courseline Media International Services di Filipina, Elizabeth Sonto-Mendoza mengatakan timnya didominasi oleh kaum perempuan yang bisa melakukan banyak hal. Dengan demikian dia tidak menemukan isu yang terkait dengan persoalan gender di organisasinya.

Selanjutnya dia menekankan tentang perlunya undang-undang yang mengatur standar gaji yang sama untuk wartawan di daerah dan kota. Jadi ini tidak melihat apakah seseorang perempuan atau laki-laki. Sepanjang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, mereka berhak mendapatkan gaji yang setara yang sesuai dengan standar nasional.

Namun sering kali perusahaan tidak terbuka dengan catatan pembukuan mereka. Di sini Worthington menyerukan pelaksanaan audit jika pihak terkait memang serius menerapkan kesetaraan gender dan keragaman. Dia mengambil contoh BuzzFeed sebagai perusahaan dengan transparansi yang lebih baik. Kesetaraan gender di perusahaan media digital AS itu melebihi 50%. Lebih banyak perempuan yang bekerja di perusahaan itu dan para manajer seniornya di seluruh dunia adalah perempuan. Mungkin keragaman yang belum diterapkan sepenuhnya di sana. Tapi paling tidak kondisi ini bisa dipandang sebagai langkah pertama menuju perubahan.

KISAH POSITIF KESETARAAN GENDER

Worthington mengatakan IFJ juga melihat kisah yang memberi harapan. Misalnya di Kamboja, di mana perempuan masih berjuang keras untuk bisa bekerja di perusahaan media. Namun mereka menemukan celah di dunia maya untuk menjadi *blogger*. Mereka menyebut dirinya *clogger*.

Adapun di Indonesia, IFJ bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam menjalankan program pemantauan liputan media terkait dengan gender dan komunitas marginal. Tujuannya agar memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan dan lainnya termasuk pengalaman LGBT.

Di banyak negara, stasiun radio memberikan ruang yang besar kepada perempuan. Di Nepal ada tujuh stasiun radio AM perempuan. Di Afganistan juga ada stasiun radio yang mendidik perempuan soal kekerasan di dalam rumah tangga dan kesadaran terhadap hak mereka.

Dan satu contoh bagus lainnya terkait dengan inovasi adalah program *mentoring*. Di Sri Lanka *Sunday Observer* dan *Salon Today* menyajikan program *mentoring* secara aktif melalui ruang berita untuk membantu pemberdayaan perempuan. Perlu pula upaya untuk mengubah pola pikir yang menganggap perempuan tidak perlu berada di posisi pembuat keputusan dan ironisnya sebagian perempuan masih mempertahankan pola pikir seperti itu.

Artinya IFJ masih perlu berusaha untuk mewujudkan kesetaraan gender. Ini bukan sesuatu yang diharapkan terjadi di dunia yang ideal. Ia bukan sesuatu yang perlu dilatih. Tetapi kenyataannya IFJ harus terus melakukan ini untuk membuka pikiran mereka dan melihat apa yang mereka alami.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi IFJ. Dan ketika kegiatan tersebut melibatkan laki-laki serta mendengarkan suara baik dari laki-laki maupun perempuan tentunya memberikan hasil yang lebih baik tentang kesetaraan di antara keduanya.

Ketua dan Pendiri Aliansi Laki-Laki Baru di Indonesia, Nur Hasyim, sependapat bahwa kesetaraan gender perlu melibatkan laki-laki. Ini berdasarkan pada pandangan bahwa ketidaksetaraan dalam hubungan gender sebagian disebabkan oleh konsep patriarki, nilai, and norma maskulinitas. Di sini laki-laki dengan karakter maskulin dikenal kuat secara fisik, unggul, dominan, dan sampai pada taraf tertentu menggunakan kekerasan, dan media ikut serta mempertahankan dan bahkan memperkuat citra tersebut.

Transformasi laki-laki merupakan suatu hal yang krusial, bersifat komplementer terhadap upaya kelompok feminis Indonesia untuk memberdayakan perempuan dengan meningkatkan akses dan penguasaan mereka atas sumber daya termasuk media. Di samping memberdayakan perempuan, upaya ini juga diharapkan bisa menghentikan kekerasan terhadap mereka.

Yang dilakukan oleh Hasyim adalah menciptakan ruang, di mana laki-laki dapat berdiskusi dan mengkritik konsep tradisional tentang laki-laki dan maskulinitas, dan pada saat yang bersamaan, juga memperkenalkan dan mempromosikan keragaman praktik dan kehidupan laki-laki.

Kadang-kadang laki-laki harus menekan perasaan untuk menunjukkan bahwa mereka kuat secara emosional, dan juga pandangan yang menyatakan laki-laki cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko tinggi atau berbahaya misalnya konsumsi alkohol secara berlebihan atau penyalahgunaan obat-obatan.

Aliansi ini juga memberitahu laki-laki mengenai manfaat dari menjadi orang yang lebih setara, misalnya keterlibatan mereka dalam membesarkan anak. Ini mempengaruhi hubungan mereka dengan anak di rumah. Keterlibatan itu atau upaya berbagi tanggung jawab dengan perempuan di dalam rumah tangga atau ruang publik mengurangi beban sosial, budaya, serta ekonomi bagi laki-laki.

Satu hal penting lainnya di ruang ini adalah berusaha mendidik laki-laki mengenai emosi, dan juga keterampilan sosial misalnya bagaimana cara menangani atau mengelola amarah. Mereka diharapkan bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan perlu menunjukkan perilaku dan sikap anti-kekerasan.

Laki-laki yang secara aktif terlibat dalam gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan diharapkan berhenti berkelakuan kasar atau berhenti menyalahgunakan alkohol. Sikap ini selanjutnya diturunkan kepada anak laki-laki untuk lebih memandang kesetaraan gender.

Namun media tidak sepenuhnya merespons secara positif beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Aliansi Laki-Laki Baru. Ada juga yang merespon negatif, di antaranya tabloid di Jawa Timur yang mengatakan bahwa Aliansi Laki-laki Baru merupakan musuh Islam karena mempromosikan kesetaraan gender. Ini adalah salah satu tantangan saat memperkenalkan isu gender dan kesetaraan gender di ruang publik.

KELOMPOK MARGINAL, MASYARAKAT ADAT, DAN PEREMPUAN

Sonto-Mendoza menyampaikan pandangan gender yang dikaitkan dengan inklusivitas. Dia berinteraksi dan tinggal bersama masyarakat adat di Filipina, bekerja sama dengan komisi masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lain seperti Asia Pacific Broadcasting Union.

Courseline Media International Services yang dipimpin Sonto-Mendoza adalah anggota Asia Pacific Broadcasting Union—organisasi media *broadcasting* se-Asia Pasifik yang usianya kini sudah 54 tahun. Courseline Media International Services menyelenggarakan pelatihan, forum, simposium, dan lokakarya untuk praktisi media dan layanan jaringan serta pihak non-media, khususnya kelompok marginal.

Sonto-Mendoza melakukan upaya partisipatif dengan tinggal di rumah penduduk dan mengikuti cara hidup mereka untuk waktu tertentu. Dia mengatakan timnya sudah membuat film dokumenter tentang kehidupan kaum perempuan suku Mangyan, di Mindoro, Filipina.

Kaum perempuan di Mindoro sebelumnya hanya mengikuti laki-laki. Bisa dibayangkan ketika laki-laki berjalan di depan maka perempuan harus berjalan mengikuti di belakang mereka. Situasinya mirip perbudakan.

Tapi sebelum mendokumentasikan hal tersebut, tim Sonto-Mendoza melakukan kunjungan ke tempat tinggal mereka di gunung. Di sana mereka berdialog dengan kaum perempuan dan laki-laki. Hingga akhirnya mereka mau menyuarakan pendapat dan kisah sendiri, yang kemudian mendapatkan perhatian dari aktivis HAM.

Courseline Media International Services berinteraksi dan melatih mereka serta merangkul masyarakat adat (tetua dan kepala suku) di sana. Film dokumenter direkam sendiri oleh perempuan suku Mangyan setelah diberikan pelatihan yang menyuarakan pendapat dan kisah mereka dengan bahasa ibu mereka.

Jadi bukan pihak *broadcaster* saja yang membuat tulisan artikel, atau *feature* tetapi juga masyarakat adat itu sendiri. Mereka sendirilah

yang benar-benar memperkenalkan kehidupan yang mereka alami di daerah mereka. Orang dari kalangan masyarakat sendiri yang menceritakan kehidupan mereka. Tidak ada rekayasa tapi mungkin ada bagian yang disunting, tapi tidak sampai mengubah kisah hidup mereka yang sebenarnya.

Adapun di Filipina terdapat lebih dari 100 bahasa daerah, dengan 23 bahasa ibu mayoritas. Biasanya di pagi hari, stasiun radio menyiarkan siaran dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke bahasa lokal mayoritas tersebut.

Jadi sulit dibayangkan bahwa suara masyarakat marginal dapat dipahami, jika tidak ada yang mengerti bahasa mereka atau jika media tidak datang untuk meliput kehidupan mereka.

Kelompok marginal bukan hanya masyarakat adat, perempuan dan anak gadis, penyandang disabilitas, tetapi juga nelayan, petani, LGBT, dan tahanan. Dan bisa dibayangkan Filipina sendiri terdiri dari 7.100 pulau dan mereka akan berbicara hal yang seseorang tidak bisa memahaminya kecuali dengan pergi ke sana.

Ketika berbicara soal perempuan yang hidup di pegunungan, mereka hidup dari batu yang kemudian mereka pecahkan. Mereka bekerja dari satu gunung ke gunung lain. Lalu bagaimana media menyikapinya? Bisakah mereka dibantu?

Pada Juni, Juli, dan Agustus banjir dan tanah longsor sering terjadi di wilayah itu. Semua penduduk yang tinggal di sana, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, terpaksa pergi ke daerah yang lebih tinggi ketika bencana melanda.

Kisah suram tidak berakhir di sini. Filipina adalah salah satu negara yang rentan bencana alam yang terkait dengan topan dan Courseline International Media Services tidak ingin media terus menerus membahas bencana tersebut. Lebih baik mengangkat kisah bagaimana penduduk yang tinggal di daerah yang rentan bencana tetapi mampu bertahan hidup dan bagaimana memberdayakan mereka.

Di daerah itu juga dapat digambarkan tentang pemberdayaan laki-laki. Bisa saja seorang laki-laki tinggal di rumah dan merawat bayi sedangkan istrinya bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

Setiap komunitas ada pemimpinnya. Jika ada tiga komunitas, dan lokasi mereka dipisahkan oleh pegunungan, maka tim Courseline International Media Services harus mendaki gunung untuk menemui semua tetua adat/kepala suku dan melihat dari dekat kehidupan mereka.

Tim kemudian mencatat semuanya. Jika ada 18 wilayah yang dikunjungi maka seharusnya ada 18 arsip dokumentasi yang dihasilkan. Ini dilakukan lewat kerja sama dengan jejaring nasional dan daerah serta pemangku kepentingan lain seperti Asia Pacific Broadcasting Union (ABU).

ABU dan UNESCO melalui divisi teknologinya mengembangkan sistem radio berbiaya murah dan bisa dibawa kemanapun dengan mudah sebagai alat untuk menggelar diskusi dengan kelompok marginal di Filipina. Salah satu perangkatnya pernah dicoba di dua area di kota Tuguegarao yang kemudian dihantam oleh Topan Lawin.

Selain itu, Courseline International Media Services juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk melatih para guru selama

7 tahun. Total sudah 15 kelompok yang mendapatkan pelatihan. Jumlah peserta tercatat sekitar 157 orang, 10 di antaranya laki-laki. Tutor menghabiskan waktu selama 2-3 bulan hidup bersama masyarakat setempat. Kemampuan berbahasa Inggris termasuk dalam materi pelatihan

Isu lainnya adalah tentang industri media di Filipina. Mungkin Filipina adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mempunyai Undang-Undang (UU) Republik, yang mengharuskan pemberian pendidikan jurnalisme dan penyiaran kepada anak-anak mulai usia 9 tahun.

UU itu mendorong orang termasuk anak-anak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lebih bebas, terlepas dari fakta bahwa pembatasan yang wajar masih ada.

Untuk menyuarakan pendapat diperlukan bahasa. Sedangkan bahasa, menurut Pesic, menunjukkan identitas. Di beberapa negara seringkali terjadi kekeliruan karena suara minoritas tidak dapat didengar hanya karena tidak bisa menangkap pesan yang disuarakan dalam bahasa setempat.

Di samping itu diperlukan juga solidaritas yang melibatkan kelompok marginal atau minoritas. Masyarakat lokal, termasuk kelompok agama tertentu saat berada di wilayah yang didominasi oleh suku atau agama lain, juga perlu dilibatkan. Pesic mengambil contoh laporan keragaman etnis di Hungaria, di mana masyarakat Gypsy dilibatkan dalam proyek tersebut.

Pada saat yang bersamaan, Australia, menurut Worthington, memiliki kebijakan untuk mempekerjakan masyarakat Aborigin dan sebagai bentuk promosi keragaman di negara itu disajikan

pula laporan media soal mereka. Masyarakat Aborigin di Australia mencapai 3% dari total populasi negara itu.

Masalah yang ada di Australia selama bertahun-tahun kehidupan penduduk asli Australia diceritakan oleh masyarakat kulit putih, dan kisahnya sangat negatif dan memakai kaca mata kuda.

Kantor berita *ABC* pernah mencatat porsi tenaga kerjanya sebesar 2,6% untuk masyarakat asli dan mungkin sekarang angka itu sudah lebih besar. Masyarakat Australia juga mulai terbiasa menonton selera humor, acara memasak Aborigin, dan keragaman pengalaman mereka di layar kaca. Banyak hal lain yang dipelajari oleh masyarakat Australia dari kebijakan itu yang dimulai dari dalam.

Adapun di *BBC* Inggris, ada beberapa manajer program yang gajinya dikurangi jika mereka tidak mencapai sasaran atau target keragaman pegawai. Jadi hal seperti ini memang bisa mengubah mentalitas penyelenggara media.

Pesic menyinggung cara media Uni Eropa, dengan kondisi masyarakat yang sangat demokratis, dalam melaporkan persoalan agama dan etnisitas. Dia menemukan tidak ada perbedaan kesimpulan yang signifikan dengan apa yang ditemukan di Afrika Utara.

Media membahas soal kelompok masyarakat tertentu tanpa mewawancarai seseorang pun dari kelompok itu. Ini kejadian yang cukup umum. Bahkan sebagian editor di negara Uni Eropa masih percaya bahwa Eropa identik dengan kulit putih dan Kristen, padahal tidak demikian. Upaya untuk mengubah cara pandang seperti ini harus dimulai dari tingkat nasional.

Harus ada pemahaman bahwa inklusivitas merupakan salah satu prinsip dasar dari demokrasi, dan tanpa inklusivitas untuk semua suara, tidak akan ada debat publik yang inklusif untuk seluruh anggota masyarakat. Jadi harus dimulai di sini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, industri media, masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan seterusnya.

Pesic, yang telah bekerja di 70 negara, mengatakan inklusivitas berkaitan erat dengan keragaman. Kelompok atau individu tertentu berbeda dari kelompok atau individu yang lain. Bisa saja perbedaan itu dilihat dari segi gender, iman, keyakinan, orientasi seksual, dan lainnya. Apa yang membuat sekelompok orang berbeda satu sama lainnya tidak bisa dijadikan acuan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Ini menunjukkan bahwa orang memiliki identitas yang berbeda-beda.

Tidak ada masyarakat yang berasal dari latar belakang yang sama, satu agama, satu keyakinan. Semua masyarakat itu heterogen. Contohnya saat Barack Obama melakukan kampanye untuk menjadi Presiden AS. Saat itu banyak orang menyerang Obama karena memiliki ayah Muslim dan menghabiskan masa kecil di Indonesia. Tapi kemudian ketika dia menjadi presiden, banyak orang yang kaget karena seseorang dengan latar belakang yang tidak mayoritas bisa menang.

Jurnalis harus memanfaatkan kemampuan teknis penulisan mereka, termasuk untuk melaporkan isu keragaman. Editor dan/atau pemimpin media dianggap mengetahui bahwa kemerdekaan pers merupakan hal yang fundamental, tapi dalam prakteknya tidak selalu seperti itu. Untuk itu editor perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari berbagai belahan dunia dan belajar sesuatu dari mereka. Singkat kata, laporan media harus mencerminkan keragaman.

Organisasi yang mewakili masyarakat semakin banyak. Mereka menyampaikan suara komunitas tapi sebagian besar terdiskualifikasi karena mungkin berasal dari negara berkembang, jadi dipandang sebelah mata. Organisasi tersebut bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat madani (CSO).

Media publik nirlaba merupakan sarana yang tepat untuk menyampaikan pesan keragaman di tengah maraknya penyebaran berita bohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sejenisnya.

Masa depan media tergantung pada anak muda. Namun sayang tidak cukup banyak pemuda yang menanggapi kejadian di dunia sekarang ini. Anak muda perlu melakukan hal yang revolusioner yang gagal dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Tetapi generasi sekarang beruntung karena memiliki media digital yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Ada banyak *platform* yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak dan untuk tujuan itu mereka tidak perlu berkolaborasi dengan media utama.

LGBT

Untuk isu LGBT, Worthington merasa perjalanan yang harus ditempuh masih jauh untuk media agar dapat mengubah narasi dan mengungkapkan kehidupan mereka. Perubahan representasi media harus dimulai dari organisasi media sendiri dan baru kemudian mereka bisa menyampaikan laporan tentang isu ini. Berbeda dari negara tertentu di Asia Tenggara, *transgender* bukan isu yang bisa memicu kegaduhan di Filipina dan sebagian Asia Selatan.

Sonto-Mendoza menyatakan siapa pun harus siap menerima dan menghargai kelompok LGBT. Media seharusnya menerima mereka seperti mereka diterima di Filipina. Sebaliknya di Indonesia, di mana fundamentalisme agama menguat, LGBT sebagai kelompok minoritas menghadapi banyak tantangan termasuk homofobia. Sebagian masyarakat Indonesia belum bisa menerima keberadaan kelompok minoritas seperti LGBT dan mereka juga menggunakan isu homoseksualitas untuk menstigmatisasi gerakan anti-kekerasan seksual.

Menurut Pesic, dibandingkan dengan jurnalis, kelompok minoritas lebih mengenal diri, sudut pandang mereka serta segala hal soal mereka dibandingkan dengan jurnalis. Ini yang selalu dilupakan oleh jurnalis. Jadi jangan datang kepada mereka saat hanya ingin membicarakan isu tertentu saja karena seperti orang lain, mereka juga tertarik dengan isu perubahan dan kebijakan pajak, pendidikan, dan hal lain.

Jadi inilah yang disebut inklusi nyata ketika orang berbicara tentang konten media. Diversifikasi *newsroom* merupakan keharusan, tapi tidak berarti seorang jurnalis buta hanya melaporkan isu orang buta atau LGBT. Kehadiran seseorang dari kelompok yang berbeda dari kelompok sendiri di *newsroom* akan membuat seseorang menjadi lebih sensitif.

Jurnalis harus melihat bagaimana kontak di antara kelompok masyarakat terjadi. Sekarang ada istilah baru di media sosial yaitu *homophily* yang merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama berkumpul di jaringan media sosial. Jadi ini adalah tentang orang yang mempunyai pendapat, pandangan, dan prasangka yang sama, dan lainnya. Ini adalah bentuk baru ghettoisasi.

Namun bahaya *homophily* mengintai siapapun yang ingin membangun komunitas. Dan jangan lupa orang memiliki prasangka dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika seseorang menyadari prasangka, dia dapat mengelolanya untuk meminimalkan dampaknya.

Pesic tidak secara langsung mengatakan bahwa keragaman adalah sesuatu yang lebih baik karena sifatnya juga lebih kompleks tergantung pada masyarakat. Jika media melaporkan pengalaman kaum LGBT di negara di mana LGBT belum bisa diterima, maka media akan kehilangan audiens, pendukung, dan pembaca.

Jadi ini jauh lebih rumit. Ini bisa terjadi di sejumlah media yang melibatkan, misalnya, anggota komunitas yang sebenarnya bagus dari sisi komersial. Misalnya koran Inggris *Leicester Mercury* yang menjadi koran regional terbesar ketiga. Hari-hari di media ini diisi dengan program tentang cara menghadapi isu keragaman di Leicester karena warga kulit putih akan menjadi minoritas di daerah ini menjelang 2030.

Jadi mereka memperkenalkan program itu dan mulai berbicara dengan pemimpin masyarakat setempat. Mereka mulai mengiklankan bisnis mereka. Kemudian pemimpin setempat memberikan rekomendasi, mengangkat sejumlah topik yang tidak disadari orang.

Agenda Pembangunan 2030 berusaha mewujudkan “pembuatan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkat” yang bisa dilakukan secara konsisten setelah ada akses universal ke informasi.

Hanya masyarakat yang berpengetahuan baik dan inklusif yang bisa menentukan nasibnya, berpartisipasi dalam fungsi demokratis

lembaganya, dan bekerja untuk mencapai perdamaian yang abadi dan masa depan yang lebih baik.

Melalui pemberdayaan warga, kebebasan informasi menjadi bagian terpenting dari demokrasi partisipatif. Ia juga memainkan peran yang penting dalam mempromosikan lembaga yang efektif dan akuntabel yang mendukung aturan hukum.

Warga dapat mempertahankan akuntabilitas lembaga publik lewat pengawasan publik. Arus informasi yang lebih baik juga bisa meningkatkan efisiensi dan daya respons lembaga, sembari memperkuat kepercayaan warga terhadap pihak yang mengendalikannya.

Memastikan inklusivitas juga terkait dengan pemberdayaan pihak yang biasanya terpinggirkan atau dikecualikan dari kegiatan partisipasi dalam pembentukan wacana publik. Kemajuan dalam pencapaian SDG baru terpenuhi bila peluang yang setara tersedia bagi semua orang, tanpa melihat umur, gender, ras, suku, orientasi seksual, disabilitas, budaya, bahasa, atau latar belakang ekonomi atau sosial.

Semua orang sebaiknya diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh di seluruh aspek kehidupan. Media merupakan aktor penting dalam memajukan inklusi sosial. Potensinya dalam memajukan dialog yang mencerminkan keragaman pendapat dan perspektif di dalam masyarakat, dan menantang kesalahan persepsi berdasarkan prasangka (*stereotype*) dan pemberian informasi yang bisa memicu kesalahan kesan (*misrepresentation*), perlu mendapatkan dukungan.

Mendukung pluralisme dan kesetaraan gender di media merupakan inti dalam proses ini. Perempuan tetap kurang terwakili secara signifikan di media di banyak negara, baik soal kehadiran mereka di organisasi media maupun tentang keterlibatan mereka dalam konten media. Peluang yang lebih besar hendaknya juga disediakan untuk keterlibatan kaum muda, kaum minoritas secara etnis dan bahasa, penyandang disabilitas, dan kelompok yang rentan.

Peningkatan akses warga ke informasi kadang kala dibarengi dengan upaya untuk menghalangi dan membatasi hak publik untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Wartawan dan *blogger* di seluruh dunia senantiasa menghadapi rangkaian tantangan ketika mengungkapkan sebuah berita dan sering harus membayar dengan nyawa mereka agar informasi sampai ke publik.

Kebebasan bersuara dan kebebasan informasi berlaku sebagai syarat untuk demokrasi yang berfungsi dengan baik dan kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Komunikasi dan informasi adalah pendorong perubahan positif dan jurnalis merupakan penjelmaan hidup dari kebebasan tersebut.

BAB V

INDEPENDENSI MEDIA DAN UPAYA MELAWAN EKSTREMISME BERKEKERASAN



Iwan Mangopang/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Media yang bebas dan independen dapat bertindak sebagai mercusuar dalam badai perdebatan yang agresif dan kacau, dengan menyajikan standar yang solid dan tepercaya dalam berita dan diskusi, baik di dunia maya maupun nyata. Berbagai pendekatan dapat dilakukan media untuk melawan ekstremisme berkekerasan yang bergantung pada media dan audiens utamanya.

Penelitian UNESCO akhir-akhir ini mengenai media sosial dan radikalisasi pemuda menunjukkan bahwa media sosial menjadi tempat untuk memfasilitasi radikalisasi, tapi tidak ada bukti jelas adanya hubungan langsung sebab-akibat antara propaganda dalam jaringan dan radikalisasi.

Media yang profesional dan kritis dapat merawat akal sehat dan rasa tenang dalam penyebaran rasa takut dari berbagai pihak. Isu ini dibedah dalam produk terbitan terbaru UNESCO bertajuk *Terrorism and the Media: A Handbook for Journalists* dan *Social Media and Radicalization of Youth in the Digital Age* yang diluncurkan di peringatan Hari Kemerdekaan Pers di Jakarta, 2017.

Concept paper Hari Kemerdekaan Pers 2017 yang bertajuk *Critical Minds for Critical Times: Media's Role in Advancing Peaceful, Just, and Inclusive Societies* menyebutkan bahwa di samping perang, meluasnya ekstremisme berkekerasan yang diusung oleh kelompok teroris dan ekstremis seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram menjadi ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan, HAM, dan keadilan. Kelompok ini telah mendayagunakan media sosial sebagai perangkat untuk mengkomunikasikan pesan intoleransi, baik yang menyangkut agama, kebudayaan, maupun sosial secara global dan *real-time*.

Melawan ujaran kebencian dan ekstremisme berkekerasan secara *online* memerlukan lebih daripada sekedar langkah represif seperti pelarangan atau pemblokiran konten. Ia memerlukan pendekatan menyeluruh yang menyentuh akar masalah ketegangan dan perpecahan di masyarakat. Ini sejalan dengan Rencana Aksi Rabat mengenai larangan mengadvokasi kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau agama yang menjadi pemicu diskriminasi, permusuhan atau kekerasan yang diadopsi pada Oktober 2012 oleh UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Ia juga memberikan rekomendasi kepada negara anggota terkait dengan permasalahan undang-undang, yurisprudensi, dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan terbuka yang mendukung inklusivitas dan menghormati keragaman. Media juga memiliki peran yang penting di sini.

Media dapat menyediakan panggung bagi aneka suara dan perspektif yang dapat membantu memantapkan toleransi, dialog, dan pemikiran kritis. Mereka dapat juga menawarkan narasi tandingan untuk menantang gagasan yang diajukan dalam narasi ekstrem berkekerasan

Strategi apapun yang diarahkan untuk melawan ekstremisme berkekerasan harus juga menangani langsung masalah serangan dan pelecehan daring berbasis gender yang sering dialamatkan kepada wartawan, politisi, dan tokoh perempuan.

Pada akhirnya, upaya melawan narasi ekstremisme hendaknya berjalan seiring dengan pemberdayaan pengguna media dengan keterampilan yang diperlukan untuk berselancar di internet dan menafsirkan, menolak, dan menanggapi pesan yang menghujat dan menghasut. Pemantapan melek media dan informasi di masyarakat selayaknya menjadi satu tujuan semua negara dalam usaha mencapai Agenda Pembangunan 2030.

Direktur Kebijakan dan Pelatihan *BBC Media Action*, James Deane melihat ada kesuksesan yang nyata dari narasi ekstremisme, terutama yang berkaitan dengan agama dan warna kulit di dunia maya dan dunia nyata. Kesuksesan itu telah mendorong pengucuran anggaran secara signifikan untuk menandingi narasi, pesan, dan kadang-kadang propaganda untuk melawan narasi ekstrem baik di dunia maya maupun dunia nyata.

ISLAM DI INDONESIA DAN KONDISI SITUS BERBASIS AGAMA

Savic Ali, Penanggung Jawab NUTIZEN Digital Indonesia-- portal resmi Nahdlatul Ulama—organisasi Muslim terbesar di Indonesia, menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang sedang menghadapi tantangan yang besar dalam sejarah Islam seiring dengan peningkatan tendensi konservatisme keagamaan.

Sejak reformasi 1998, ada banyak kelompok dan komunitas baru yang berkembang di Indonesia: di kampus, di kota, di desa yang memiliki tendensi konservatif terhadap Islam bahkan yang sifatnya ultra-konservatif, seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan juga Majelis Mujahidin.

Walaupun masih dipandang kecil dibandingkan dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, ketiga kelompok itu terlihat semakin kuat dari tahun ke tahun. Kalau melihat proses pemilihan gubernur Jakarta yang terakhir, terlihat ratusan ribu orang mengadopsi perspektif yang sempit terhadap Islam. Mereka melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, salah satu kandidat gubernur Jakarta, merupakan tindakan pelecehan terhadap agama.

Hal tersebut secara spesifik terjadi di kota besar seperti di Jakarta, di mana kelompok ekstrem memiliki banyak anggota. Situasi yang lebih damai terlihat di desa dan kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera di mana jumlah anggota mereka sedikit.

Menurut Ali, kelompok ekstrem menasar masyarakat kelas menengah di kampus sebagai pendukung fanatik mereka. Basis mereka sangat kuat di dunia maya. Kelompok ultra-konservatif dan radikal mempromosikan kekerasan dan mengelu-elukan teroris, seperti Osama bin Laden dan Abu Bakar al-Baghdadi. Sedangkan untuk kelompok konservatif, meski menahan diri untuk tidak mempromosikan kekerasan atau terorisme, mereka memiliki pemikiran yang sempit dalam ajaran agama dan ini berdampak terhadap toleransi.

Kelompok ultra-konservatif dan radikal tersebut cukup sukses dalam menjalankan misi karena mereka memiliki banyak pembaca Muslim yang tinggal di kota besar. Mereka sangat aktif dan memiliki tim yang teroganisir baik dengan jumlah kontributor yang direkrut tidak kurang dari 100 orang. Situs radikal selalu membarui informasi dengan jumlah artikel yang dipublikasikan setiap hari sekitar 20. Makanya mereka bisa merangkul lebih banyak anggota dan pengikut di situs dan sosial media mereka.

Sebaliknya, situs yang dikelola NU, *nutizen.com* hanya didukung oleh tim yang kecil, terdiri dari tujuh orang. Setiap kontributor menulis sekitar dua atau tiga artikel setiap bulan. Tapi perkembangannya cukup baik dalam 5 tahun terakhir karena jumlah pembacanya selalu bertambah. Sangat disayangkan jika kehadiran situs ini tidak cukup untuk menarik perhatian kelompok radikal. Jumlah anggota NU yang bisa mengakses internet juga sedikit tapi jumlahnya terus bertambah. NU memiliki 33 juta anggota di Indonesia dan diklaim sebagai organisasi Islam terbesar di negara ini.

Menurut Ali, tidak ada faktor tunggal yang mempengaruhi fenomena baru Islam di Indonesia. Sebagian dari faktor itu termasuk konflik di Timur Tengah dan bertumbuhnya organisasi yang baru dan kemunculan partai yang mengusung agama sebagai *platform*-nya.

Anggota NU biasanya tersebar di desa, sedangkan anggota Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, biasanya berbasis di kampus terutama di sejumlah kampus negeri terkemuka di Indonesia.

Jadi, Muslim moderat di Indonesia itu lebih banyak ketimbang kelompok radikal, tapi dari sisi internet, situs radikal itu lebih proaktif dalam mendekati audiens. Dan mungkin banyak orang yang mulai menyadari apa yang akan terjadi kalau kelompok radikal memenangkan dukungan orang di Indonesia.

Ali mengatakan membuat konten yang menarik adalah salah satu tantangan. Situs yang berkonsep konservatif memuat konten yang sederhana dari ajaran Islam, misalnya bagaimana melakukan wudhu, bagaimana melakukan shalat. Bagi anggota baru, ini adalah pengetahuan baru. Tapi bagi NU, hal seperti itu tidak perlu lagi dituliskan karena sudah menjadi pengetahuan umum.

Kemudian website radikal membuat artikel yang memprovokasi, bahkan beberapa di antaranya tidak berdasarkan pada fakta, tidak mengikuti aturan jurnalistik. Namun masalahnya pembaca menyukai artikel yang kontroversial. Sementara situs yang dikelola NU mengikuti aturan atau berdasarkan pada nilai-nilai Islam dan harus dicek kebenarannya.

EKSTREMISME DI KOLOMBIA

Ricardo Corredor dari Gabriel Marquez Foundation, Kolombia, menjelaskan sebuah format ekstremisme yang berbeda dibandingkan dengan apa yang dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa setelah 52 tahun konflik berlangsung secara intensif, pemerintah Kolombia dan kelompok gerilyawan FARC menandatangani perjanjian damai. Proses negosiasi berlangsung selama 5 tahun dan merupakan proses yang membuat negara Kolombia menjadi terpecah, antara mereka yang setuju dan menentang negosiasi tersebut.

Pada dasarnya, FARC adalah kelompok gerilya yang tidak terlalu populer di Kolombia karena selama bertahun-tahun terlibat penculikan dan juga menjual narkoba agar bisa bertahan hidup. Gambaran ini yang dilihat oleh masyarakat negara itu. Estimasi popularitas kelompok ini cuma sekitar 4-5%. Jadi, ini bukan kelompok gerilyawan yang dianggap signifikan di negara ini.

Konflik tersebut berlangsung lama. Ada sekitar 200.000 orang yang terbunuh, sekitar 20.000-30.000 orang hilang. Memang angkanya berbeda-beda tergantung dari sumber datanya. Secara resmi orang yang telah mendaftarkan diri sebagai korban mencapai delapan juta. Jadi ini adalah sesuatu yang mengancam dan tersebar luas di Kolombia.

Jadi, saat Presiden Juan Manuel Santos menginisiasi perundingan damai topik ini sudah memicu kontroversi, terutama karena Presiden Alvaro Uribe yang waktu itu berkuasa dua periode 2002-2010 sangat menentang ide perundingan damai ini. Dan, dia menggunakan semua kekuasaannya untuk menentang proses negosiasi dengan gerilyawan.

Negosiasi yang seharusnya menjadi kabar baik untuk mengakhiri konflik ternyata tidak dilihat sebagai sesuatu yang positif oleh semua orang. Banyak orang yang secara terbuka menentang ide ini. Setelah kesepakatan damai tercapai kemudian diikuti oleh referendum, di mana sebagian pemilih menyatakan tidak setuju. Kubu yang menentang menang dengan marjin yang sangat tipis. Pemerintah kalah. Jadi media memainkan peranan yang sangat penting dalam proses seperti ini.

Kolombia memiliki dua jaringan televisi swasta yang salah satunya menentang keras proses perdamaian. Stasiun satunya lagi cenderung netral.

Ini bukan sepenuhnya tentang jaringan televisi swasta yang independen sepenuhnya. Kedua jaringan televisi utama ini dimiliki oleh dua kelompok bisnis besar. Ini lebih bersifat politis dalam konteks konflik yang telah berlangsung lama, yang telah memberikan dampak selama bertahun-tahun dan banyak orang yang benar-benar melawan ide untuk berunding dengan kelompok pemberontak.

Perguruan tinggi swasta terkemuka di Kolombia, Universitas Javeriana, menunjukkan analisis perbandingan konten di antara kedua stasiun televisi tersebut. Ada liputan yang sangat emosional dan sangat personal, sangat didasarkan pada pandangan politis antara Santos dan Uribe.

Universitas itu juga melakukan riset terhadap dua surat kabar yang berbasis di Bogota: *El-Tiempo* dan *El-Espectador*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 41% memuat laporan terkait dengan negosiasi tersebut. Tim peneliti menganalisa hampir sekitar 11.000 tulisan selama 4 tahun berlangsungnya negosiasi tersebut.

Sebanyak 40% dari artikel yang terkait dengan negosiasi disajikan dalam bentuk opini di surat kabar tersebut, sedangkan 60% dalam bentuk informasi biasa. Hal ini menarik, karena bicara mengenai opini atau pendapat bisa radikal, sangat menentang atau sangat mendukung. Tidak ada yang di tengah-tengah atau netral.

Tetapi kemudian ada penelitian lainnya yang menganalisis media sosial, terutama Twitter, yang dilakukan oleh Clemencia Rodriquez, warga negara Kolombia di Universitas Oklahoma. Dia mengambil cuitan dari akun Santos dan kemudian dianalisis. Hal yang sama juga dilakukan terhadap akun Uribe.

Peneliti menemukan akun Uribe meningkatkan polarisasi dan memicu reaksi yang keras terhadap negosiasi damai. Dari semua cuitan, 31,5% menggambarkan proses damai dengan cara yang sangat negatif, dengan narasi yang berlebihan, hiperbola, menang atau kalah, hal yang seperti ini.

Uribe sangat aktif menggunakan Twitter. Peneliti menemukan fakta dia mengirimkan cuitan-nya 200 kali dalam seminggu. Jadi 28 kali dalam sehari. Dia memiliki 4,7 juta pengikut. Jumlah pengikut Santos kurang lebih sama. Uribe menulis secara sangat radikal dengan opini yang sangat menentang proses perdamaian dan semua pendukungnya berada di belakangnya. Peneliti membahas prosesnya, mereka tidak benar-benar mempelajarinya secara mendalam, tidak banyak analisis soal ini sehingga dianggap aneh.

Secara pribadi, Corredor mengatakan bahwa Uribe sangat menunjukkan bahwa dia menentang negosiasi. Dan itu adalah pandangan politisnya. Santos juga menggunakan Twitter tetapi secara lebih moderat. Uribe tidak mengendalikan Twitter-nya sama sekali terlepas dari fakta dia adalah mantan presiden yang populer.

Corredor percaya bahwa jurnalis berperan memperkuat demokrasi. Jurnalis harus menulis laporan dengan cara yang baik dan selalu mengacu pada standar etika. Dia terlibat dalam banyak pelatihan jurnalistik. Selama setahun pertama proses damai, jurnalis Kolombia mengikuti serangkaian lokakarya untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam meliput isu dengan cara yang lebih terkontrol.

Mungkin saja seorang jurnalis datang ke sebuah perusahaan media dan terlibat dalam kebijakan editorial yang radikal, yang sebenarnya merupakan sikap pribadinya. Pengamat mungkin sedikit skeptis terhadap ide peliputan yang berimbang dan konteks yang lebih luas dengan analisis yang lebih dalam.

Rasa skeptis ini muncul ketika peneliti mencoba sebaik mungkin, bekerja dengan jurnalis di seluruh penjuru negeri, tapi mereka langsung menyadari bahwa polarisasi politik begitu kuat. Bahkan ketika jurnalis yang mencoba melakukan peliputan akan menghadapi kesulitan yang lebih besar karena mereka benar-benar berada di pusaran pertikaian politik, dan sangat sulit bagi mereka untuk menghindarinya.

EKSTREMISME DI AFRIKA BARAT

Ekstremisme juga terlihat di Afrika Barat. Direktur Jenderal Panos Institute West Africa, Diana Senghor, mengatakan negara di Afrika Barat, khususnya di Sahara, yang berada di bagian utara Afrika, adalah negara yang paling terdampak oleh kelompok teroris dalam beberapa tahun terakhir. Ada 257 serangan teroris tercatat di kawasan itu pada 2016.

Fenomena ini meluas di kawasan itu, dimulai dengan Boko Haram di Nigeria pada 2003, di mana tiga negara tetangga terkena dampaknya 10 tahun kemudian. Sebenarnya, ada lima negara yang menjadi sasaran serangan teroris dan delapan negara lainnya menghadapi risiko serangan teroris.

Pada kuartal terakhir 2017 sekelompok teroris ditahan di Senegal. Sebagian dari mereka bergabung dengan kelompok utara AQIM, yang terkait dengan Al Qaeda, dan Mujiau, kelompok lainnya. Kedua kelompok ini membentuk aliansi untuk mendirikan negara Islam di kawasan Sahara Raya.

Kedua kelompok diprediksi membentuk koneksi utara-selatan sebelum membangun aliansi dengan Boko Haram. Ini merupakan puncak gunung es karena yang berkembang sekarang bukan semata ekstremisme berkekerasan tapi sudah berubah menjadi ekstremisme keagamaan dengan dampak kekerasan yang ditimbulkannya.

Ekstremisme keagamaan tumbuh subur di ruang pribadi, tapi perkembangannya yang cepat dapat dilihat terutama di lembaga yang memiliki lobi keagamaan yang kuat.

Misalnya, beberapa tahun lalu, pemerintah Mali mencoba mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen negara itu supaya perempuan bisa mendapatkan hak di dalam keluarganya. Upaya ini mendapatkan reaksi keras dari kelompok keagamaan dan anggota parlemen dengan latar belakang serupa yang memutuskan untuk tidak meloloskan RUU itu.

Beberapa tahun kemudian di Niger, kelompok garis keras di negara itu menolak ide untuk mencegah perempuan di bawah 18 tahun menikah dan pada April 2017 Menteri Kehakiman Mali bertekad

untuk mengupayakan adanya UU untuk mencegah sunat perempuan menjelang akhir tahun. Seperti biasa, kelompok garis keras bereaksi seolah-olah dunia mau kiamat jika hal itu menjadi kenyataan.

Kajian tentang opini soal ekstremisme keagamaan tidak banyak, tapi ada satu yang dipublikasikan oleh Timbuktu Institute, Senegal, pada Oktober 2016. Usia respondennya berada dalam rentang 18-35 tahun, terdiri dari 300 orang yang tinggal di daerah pinggiran Dakar.

Kajian itu menemukan bahwa delapan responden menyatakan siap bergabung dengan kelompok yang mempertahankan radikalisme keagamaan. Jika kita membandingkan ini dengan total populasi anak muda yang 500.000 di daerah pinggiran kota maka delapan responden itu bisa mewakili 5.000 kandidat potensial yang akan terlibat dalam gerakan radikal keagamaan. Ini baru di daerah pinggiran Dakar.

Ketika ditanya tentang apa yang mereka pikirkan soal serangan teroris di Paris, 90% dari mereka mengatakan serangan di Paris itu bisa dibenarkan karena nabi mengajarkan hal itu. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang perlu diperangi pertama kali, ekstremisme berkekerasan atau ekstremisme keagamaan yang bermuara pada kekerasan?

Pertanyaan berikutnya adalah peran apa yang dimainkan media di tengah perkembangan ekstremisme dan media mana yang terlibat? Mungkin, situasi tidak akan menjawab pertanyaan bagaimana ia ditempatkan dalam debat global tanpa ada bukti misalnya bahwa media sosial adalah tersangka utama yang membentuk opini atau mendorong jihadis untuk bertindak.

Tidak masuk akal karena sebagian besar kandidat jihadis dalam kajian itu berasal dari wilayah atau kawasan yang terpinggirkan seperti Mali Utara, Niger Utara, Kamerun Utara, Niger Tenggara, dan kawasan ini sangat terisolir dengan mayoritas anak mudanya buta huruf.

Kandidat jihadis lainnya tinggal di daerah perkotaan. Sekitar 90% dari mereka cukup terpelajar dan koneksi internet di Dakar bagus ketika kajian ini dilakukan. Namun, hanya 3% dari mereka yang menyatakan akan dan telah bergabung dalam 'jihad' melalui internet. Sepertinya media tradisional menjadi lebih berpengaruh dibandingkan dengan media yang baru yakni media sosial.

Temuan ini cocok dengan apa yang dilihat Senghor bahwa media tradisional lebih menjangkau audiens dibandingkan dengan media sosial. Jadi media tradisional harus dipertimbangkan sebagai kendaraan utama untuk setiap wacana, apakah itu untuk yang memihak jihad atau yang melawan jihad. Sebagian pengamat melihat media tradisional sama sekali tidak memainkan perannya.

Mari lihat gerai media. Ada banyak gerai media, yang dari sisi aturan sah mengklaim diri sebagai media keagamaan. Di beberapa negara seperti Mali, media keagamaan dibolehkan beroperasi. Di negara lain seperti Niger, Aljazair, dan bahkan Nigeria, kehadiran media seperti ini dilarang. Kenyataannya, media pada umumnya didanai oleh lembaga keagamaan dari Turki dan negara Teluk.

Gerai media, terutama yang keagamaan, semakin marak. Mali mempunyai lima media keagamaan beberapa waktu lalu. Tapi ada 43 media lain yang beroperasi secara ilegal tanpa mengantungi izin dari pihak berwenang. Sebagian besar media itu didirikan oleh pemimpin agama dan sebagian dari padanya sangat berpengaruh. Salah satu media itu bahkan memiliki sekitar satu juta anggota.

Pernah ketika otoritas Mali berencana akan menutup media ilegal tersebut, para pemimpin agama menantang dengan mengatakan: "Silahkan, silahkan, silahkan saja, kita akan lihat." Semakin banyak program agama yang disiarkan oleh stasiun televisi dan radio,

terutama untuk *slot* acara malam hari dan selama bulan Ramadan ketika banyak waktu dialokasikan untuk pembacaan ayat suci Al Quran dan ceramah agama. Bagaimana ceramah itu diproduksi adalah hal yang menarik untuk dicermati.

Peran jurnalis pada umumnya sepertinya tidak terlihat di sini. Editor mungkin menjalin hubungan dengan para pemimpin agama. Ada sebagian jurnalis yang mengklaim bahwa mereka adalah anggota Taliban sebelum bekerja di perusahaan media. Situasi menjadi semakin buruk karena regulator media sering kali tidak menampakkan diri. Di Mali, misalnya, organisasi perusahaan penyiaran mendukung pemimpin agama dalam menentukan nasib televisi regional.

Sebagian negara mempunyai regulator yang cukup berani. Di Niger, regulator negara ini menutup sebuah stasiun televisi keagamaan karena mengkritik dan menyerukan penutupan sebuah stasiun televisi sekuler yang menyiarkan perayaan Natal.

Pada 1990-an media diliberalisasi. Jadi wacana keagamaan sangat dibatasi. Tapi dalam hal kuantitas, media mulai memonopoli di mana jurnalis ikut dalam debat publik keagamaan. Permintaan yang besar muncul setelah pendirian stasiun radio komunitas, stasiun televisi swasta, dan stasiun radio swasta. Semuanya mulai berkompetisi untuk menciptakan ruang untuk wacana keagamaan di media masing-masing. Jadi ini adalah dampak dari liberalisasi. Tidak ada lagi yang diatur.

EKSTREMISME DAN KEBIJAKAN MEDIA DI UKRAINA

Direktur Eksekutif Asosiasi Independen Lembaga Penyiaran Ukraina, Kateryna Miasnikova, membuka ceritanya soal

ekstremisme dan kebijakan media di Ukraina dengan informasi bahwa kampanye anti-terorisme di negara itu dimulai sejak 2014.

Ukraina menghadapi kelompok bersenjata yang menamakan diri Republik Rakyat yang mendukung Federasi Rusia di bagian timur negara tersebut. Ukraina mengaitkan kelompok ini dengan ekstremisme. Kelompok ini menguasai kawasan itu lebih dari 2 tahun dan menolak menyerahkannya kepada Ukraina, dan bahkan merekrut orang di Ukraina dan Rusia untuk menjadi bagiannya.

Anggota kelompok ini menculik orang dan sejauh ini lebih dari 10.000 orang, termasuk warga sipil, tewas selama konflik itu. Kelompok bersenjata ini terutama beranggotakan anak muda yang kurang terpelajar. Mereka memiliki pandangan yang sangat spesifik tentang masa depan pasca keruntuhan Soviet. Mereka sangat terobesesi dengan mitos bahwa kalau masa kejayaan Soviet kembali maka kehidupan mereka akan menjadi lebih baik dan bahagia dan mereka siap berjuang untuk mencapainya.

Melihat situasi ini, cukup wajar untuk mengatakan bahwa sampai pada taraf tertentu kualitas pendidikan dan keterampilan komunikasi di Ukraina masih rendah. Orang di wilayah konflik tidak mempercayai media tradisional dan mereka hanya menonton sedikit saluran acara. Mereka menonton siaran televisi Rusia dan Ukraina tapi tingkat kepercayaan terhadap siarannya sangat rendah.

Ukraina memiliki 32 *channel* nasional, yang sebagian besar dimiliki oleh pengusaha kakap atau oligarki dan masing-masing *channel* menyajikan narasi yang berbeda. Akibatnya, pemirsa tidak dapat melihat gambaran Ukraina secara utuh.

Channel ini dikontrol oleh kelompok mereka dan stasiun Rusia melakukan apa saja untuk menampilkan seburuk mungkin potret

Ukraina. Dengan demikian orang menjadi bingung. Pada mulanya, tingkat kepercayaan terhadap stasiun Rusia relatif tinggi, sementara tingkat kepercayaan terhadap stasiun Ukraina rendah. Tapi sekarang semua media tradisional menghadapi masalah tingkat kepercayaan yang sangat rendah. Sekarang mereka mencoba mencari celah melalui media sosial.

Ukraina menghadapi banyak tantangan dalam penyampaian informasi terutama kepada orang yang tinggal di wilayah pendudukan. Ini terutama terkait dengan masalah kebebasan internet. Pemerintah Ukraina telah menggodok regulasi tentang situs internet yang dipandang sangat berbahaya dan dapat bermuara pada penyensoran. Pada Januari 2016 regulasi tentang kebebasan internet di wilayah konflik bersenjata diperkenalkan, sehingga memicu kekhawatiran bahwa hal ini bisa mendorong pemblokiran konten, tekanan terhadap penyedia jasa internet, dan langkah hukum.

Pemerintah Ukraina sepertinya telah mencoba mencegah informasi tertentu sampai ke masyarakat sejak 2014. Tapi pada Maret 2017, Menteri Kebijakan Informasi mengumumkan bahwa pihaknya akan menyusun daftar *website* yang “merongrong kedaulatan Ukraina “. Daftar ini akan diperiksa dan disetujui oleh pihak keamanan Ukraina dan ini sekarang mendapatkan perhatian khusus dari pengembang media dan pelindung kebebasan berbicara.

GOOGLE DAN UPAYA MEMERANGI EKSTREMISME DI INTERNET

Kepala Divisi Keselamatan, Konten, dan Dampak Sosial *Online* Google Asia Pasifik, Jake Lucchi, mengatakan dunia berada dalam situasi di mana perhatian terpusat pada radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di internet. Ini dapat menjadi pembenaran bagi upaya

seperti penyensoran dan upaya untuk tidak mendukung kebebasan berbicara.

Google mendukung kebebasan berbicara. Tapi ada juga nilai utama lainnya yakni kebebasan seperti apa yang membuat orang merasa aman ketika berita tentang mereka dipublikasikan di sana. Makanya, dua nilai utama ini kadang-kadang dapat saling berlawanan.

Google ingin orang memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat sendiri, tapi tidak dengan cara yang membuat mereka merasa menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan sebagainya. Tapi pada waktu yang bersamaan, sebagian besar penelitian menemukan bahwa orang tidak menjadi radikal secara *online*, biasanya ini dimulai secara *offline*, terutama karena fakta bahwa sebagian besar faktor mencuat dari dunia nyata dan baru kemudian muncul di dunia maya.

Untuk menghadapi persoalan ini, narasi tanding diperlukan untuk menghubungkan dunia maya dan dunia nyata, dan perasaan tidak memiliki komunitas, tidak memiliki suara, ini yang sedang dipikirkan oleh Google, bagaimana menghubungkan narasi tanding *online* dengan kelompok yang bekerja untuk membantu orang yang terpapar risiko dalam menemukan rasa memiliki komunitas baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Menyangkut narasi tanding, suara yang masuk perlu disaring dulu. Google memiliki program bernama YouTube Creator for Change. Program ini dioperasikan di sembilan negara di seluruh dunia. Ia memiliki 11 duta, yang juga menjadi kreator di YouTube dengan audiens yang luas dan banyak dari mereka yang berasal dari komunitas yang berisiko teradikalisasi. Mereka mencoba mengatasi isu 'orang dalam dan orang luar', termasuk isu lain seperti bagaimana membuat sesuatu menyenangkan dan merasa dilibatkan.

Di Indonesia, Google memiliki satu duta yakni Cameo Project yang memproduksi konten isu sosial yang lucu dan menyenangkan. Google bermitra dengan Maarif Institute, lembaga *think tank* lokal yang berjuang melawan ektremisme. Jadi Cameo masuk ke sekolah, bekerja sama dengan Maarif Institute untuk mengingatkan siswa Indonesia tentang nilai terbaik dari pluralisme dan keragaman di negara di mana Muslim menjadi mayoritas.

Melalui kerja sama itu, ia diharapkan dapat mendorong percakapan dengan siswa dan memberikan ide tentang konten video yang dapat dibuat oleh Cameo atau oleh siswa sendiri. Ini kemudian didorong ke komunitas sehingga siswa bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi ini adalah satu cara untuk *linkage*.

Dimensi lain yang perlu ditekankan di sini adalah memastikan bahwa YouTube tidak dipakai sebagai *platform* untuk mempromosikan kebencian, terorisme, dan kekerasan. Konten yang memantik kekerasan dan terorisme dilarang. Tidak ada ekstremisme. Komunitas yang mendapatkan tugas akan menandai konten itu dan kemudian pemerhati yang bekerja selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu akan mengurusnya. Konten itu harus ditarik secepatnya terlepas dari prasangka umum kebebasan menyampaikan pendapat.

Yang lebih penting di sini adalah Google memiliki panduan tertentu untuk memastikan ia memiliki lingkungan yang aman bagi pengguna. Dengan demikian, ada dua pendekatan yang berbeda di sini, ketersediaan ruang yang aman dan sekaligus mempromosikan narasi tandingan yang lebih positif untuk menekankan isu utama yang menjadi perhatian.

BAB VI

KEMERDEKAAN PERS DI ASIA TENGGARA: ARAH GERAK MAJU



Agustina Kadiani/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Hak kebebasan berekspresi itu bersifat universal dan mencakup hak menyebarkan informasi kepada publik (kebebasan pers) dan hak mencari dan menerima informasi (hak memperoleh informasi). Di beberapa negara Asia Tenggara, perdebatan kadang-kadang diwarnai oleh isu penggunaan hak individu yang posisinya dinilai ada di bawah kepentingan publik. Pada waktu yang bersamaan, ada pihak yang berpendapat bahwa situasi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang memiliki kepentingan pribadi untuk melakukan pembatasan masif terhadap hak individu atas nama budaya dan kelompok mayoritas.

Debat lanjutan di tingkat global menyinggung penetapan batas hak tersebut ketika diterapkan di dunia maya. Isu ini dianalisis dalam materi terbitan UNESCO soal ‘privasi’ kebebasan berekspresi dan transparansi. Redefinisi batas baru pada era digital akhirnya dilakukan.

Mekanisme promosi hak asasi manusia (HAM), termasuk hak untuk privasi dan keragaman ekspresi budaya, telah diterima secara global melalui penunjukan *Special Rapporteur* Dewan HAM PBB dan dicantumkan dalam Konvensi PBB tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya 2005. Mekanisme regional untuk *Special Rapporteur* dan peradilan HAM sudah ada di sebagian kawasan, begitu juga Komisi Nasional HAM.

Inisiatif ini belum diadopsi di sebagian kawasan Asia Tenggara. Aktivitas pemantauan dan pelaporan tentang pelanggaran kemerdekaan pers dilakukan lewat organisasi komunitas dan aktivis media. Perlu dilihat bagaimana kemerdekaan pers diimplementasikan di Asia Tenggara, bagaimana proses formulasi inisiatif regional dan Asia Tenggara, dan kelanjutan pembicaraan

tingkat tinggi tentang mekanisme khusus untuk independensi media di Asia Tenggara. *Rapporteur* dan perwakilan internasional yang mengajukan ide untuk memperkuat kemerdekaan pers di kawasan diharapkan hadir di forum tersebut.

Kemerdekaan pers di Asia Tenggara masih menghadapi tantangan yang besar dan tidak mudah untuk menerapkannya secara penuh. Sebagian faktor seperti kebijakan, situasi politik, dan penegakan hukum untuk kekerasan terhadap pers—dalam hal ini media dan jurnalis—masih belum mendukung untuk kemerdekaan yang sudah lama ditunggu di kawasan ini. Berikut adalah kondisi media di sejumlah negara.

TANTANGAN KEMERDEKAAN PERS DI THAILAND

Di kawasan Asia Tenggara, kebebasan menyampaikan pendapat—sebagai prakondisi bagi wartawan dalam menjalankan tugas—belum sepenuhnya tercapai. Redaktur *Voice TV* Thailand, Pinpaka Ngamson, mengungkapkan dalam diskusi panel bertajuk *Press Freedom in Southeast Asia: the Way Forward* pada 2017 bahwa kemerdekaan pers di Thailand masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan itu termasuk gejolak politik, serta undang-undang dan regulasi yang berdampak pada pers.

Otoritas dan publik Thailand sering menggunakan UU Kejahatan Komputer, khususnya Bab 14, Bab 15, dan Seksi 112 atas nama UU Lese-Majeste dalam beberapa tahun terakhir. Kasus terakhir adalah ketika seorang laki-laki dipenjara karena menghina seorang ratu yang meninggal dunia ratusan tahun lalu. Seksi 112 dielaborasi dalam Bab 116 dan Bab 127. Isu seperti ini mungkin tidak diketahui oleh pembaca karena penyensoran. Menurut Ngamsom, redaktur di ruang redaksi harus berhati-hati ketika melaporkan kasus yang diajukan ke dan diproses oleh pengadilan Thailand.

Selain UU yang disebutkan di atas, ada pula RUU Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC) dan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) yang mengontrol dan memberikan peringatan kepada media jika ada yang melakukan pelanggaran. Ada juga RUU media, yang jika disahkan oleh parlemen mengharuskan orang yang bekerja di media untuk mendaftar kepada pemerintah. Tanpa izin dari pemerintah, mereka tidak bisa bekerja sebagai jurnalis di perusahaan media. Tantangan lain juga muncul dari lembaga pemerintah dan lembaga pendukung pemerintah. Untuk lembaga pemerintah, ada unit pemantauan media militer yang sangat aktif. Ada juga unit pemantauan yang dioperasikan oleh polisi dan lembaga pendukung pemerintah. Lembaga pendukung pemerintah terdiri dari relawan yang mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk memantau pemakai *online platform* atau media sosial.

Media kritis seperti *Voice TV* sering menerima peringatan, penundaan siaran, dan ancaman penghentian operasi sementara, dan bahkan penutupan. Ini tentu saja tidak hanya berdampak pada kemerdekaan pers tapi juga bisnis media secara keseluruhan. Sebelum kudeta, ada sekitar 3.000 stasiun radio komunitas yang beroperasi di Thailand. Sayangnya, setelah kudeta, ribuan dari radio itu ditutup. Stasiun radio komunitas ini didukung oleh organisasi media dan LSM di negara itu yang mengakui peran pentingnya sebagai *platform* komunikasi di antara anggota komunitas dan menjadi *channel* aktif yang bisa digunakan oleh komunitas di pedalaman. Radio komunitas juga mempermudah komunikasi dengan penggunaan bahasa lokal yang mudah dipahami masyarakat awam.

PERS FILIPINA: HANTAMAN KERAS IMPUNITAS

Seperti di negara lain, kemerdekaan pers di Filipina juga menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah masalah impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Ketua Serikat Nasional Jurnalis Filipina, Ryan Rosauro, mengatakan bahwa dalam 30 tahun terakhir, sejak 1987, ada 153 jurnalis yang terbunuh di negara itu. Dari jumlah itu, 151 orang menjadi target pembunuhan. Hanya 15 kasus atau 10% dari total kasus yang berhasil diproses secara hukum. Pelaku pada umumnya sudah didakwa dan dihukum. Salah satu terdakwa adalah seorang walikota. Sebanyak dua otak di balik serangan sedang berjuang di pengadilan dan menjadi *whistleblower*.

Ada 26 kasus yang belum terselesaikan di Filipina dalam 23 tahun terakhir. Hanya tiga kasus yang berhasil di diproses di pengadilan. Ini sangat signifikan karena berdasarkan UU kejahatan Filipina, kasus kriminal harus diproses di pengadilan sebelum dinyatakan tidak berlaku lagi demi hukum. Jadi, ada potensi untuk penanganan kasus yang tertunda itu atau keadilan akan hilang begitu saja. Dalam 10 tahun terakhir tercatat ada 127 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan sebanyak 30 jurnalis terbunuh.

Tidak termasuk pembunuhan 32 jurnalis dalam kasus Maguindanao yang terjadi pada 2009, sedikitnya sembilan sampai 10 jurnalis terbunuh di Filipina selama periode itu. Umumnya mereka adalah jurnalis media penyiaran yang bertugas di provinsi atau daerah. Mereka tewas saat mencoba mengungkap kasus yang berkaitan dengan korupsi di daerah. Selain masalah korupsi, mereka juga terbunuh karena berurusan dengan aparat penegak hukum terkait dengan judi ilegal dan narkoba.

Tantangan lain dari impunitas dan hukuman bagi pelaku adalah pembebasan bersyarat dengan jaminan yang bisa diberikan oleh

pengadilan kepada terhukum. Misalnya dalam kasus yang sudah berjalan selama 7 tahun yang melibatkan salah satu keturunan Andal Ampatuan Senior yang didakwa terlibat dalam pembunuhan jurnalis pada 2009. Tapi Pengadilan Banding meneguhkan keputusan hakim di pengadilan di bawahnya sehingga dia mendapatkan pembebasan bersyarat, yang sekaligus mengindikasikan bahwa kasus yang menjerat pelaku memiliki kelemahan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah membentuk sebuah gugus tugas untuk menangani keamanan media secara keseluruhan, tidak hanya terbatas pada pembunuhan jurnalis. Namun, belum ada rencana kerja yang disusun untuk menangani kasus pembunuhan setelah pembentukan gugus tugas itu beberapa waktu yang lalu. Presiden Filipina bahkan menyerang media karena memberitakan soal narkoba, serta kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan kekayaannya. Jika jurnalis atau media menanyakan isu itu, mereka akan dihina oleh Duterte dan jutaan pendukungnya di media sosial.

KONDISI PERS DI INDONESIA

Di Indonesia, Dewan Pers juga menghadapi tantangan terkait dengan isu impunitas. Indonesia mendapatkan kemerdekaan pers dari momentum Reformasi Politik 1998 dan pemberlakuan UU 40/1999 tentang Pers yang melindungi media dari intervensi, penyensoran, dan penutupan.

Anggota Dewan Pers, Ratna Komala, mengatakan isu impunitas yang dihadapi jurnalis tetap menjadi sebuah ancaman dalam 20 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis Polri, sejak 1996 sampai sekarang ada delapan kasus pembunuhan jurnalis. Kejahatan dan kekerasan terhadap jurnalis juga meningkat dari sisi jumlah. Pada 2015 ada 47 kasus, kemudian meningkat menjadi 83 kasus pada 2016.

Jika ada kasus yang berkaitan dengan militer sebagai pelaku dan ini dilaporkan secara terbuka kepada publik, maka cukup sering korban ditawari kompromi dan kompensasi. Korban juga mendapatkan ancaman dan intimidasi supaya mancabut tuntutan hukum mereka. Aparat penegak hukum juga sering menemukan jalan buntu karena tekanan politik dan kesulitan membawa bukti ke pengadilan.

Menghadapi kasus impunitas seperti itu, Dewan Pers dan Polri telah meneken nota kesepahaman (MoU) yang menyatakan bahwa keluhan publik akan ditangani oleh Dewan Pers, sedangkan kasus kejahatan akan ditangani oleh polisi. MoU sejenis juga ditandatangani dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kasus kekerasan yang melibatkan personel militer.

Tapi ada beberapa poin yang belum ada kejelasannya seperti akses jurnalis ke fasilitas militer. Misalnya ada kecelakaan militer dan jurnalis juga dilarang meliput di daerah itu. Tapi sekarang dengan MoU itu, jurnalis bisa mendapatkan akses ke wilayah dimaksud dan diharapkan Dewan Pers dapat menangani kasus kekerasan secara lebih baik sehingga dapat maju ke tahap penuntutan di pengadilan.

MoU dengan Polri terlaksana dengan baik tapi masih ada masalah dengan pihak militer karena mereka memiliki pengadilan tersendiri dan dalam berbagai kasus militer tidak begitu terbuka untuk melaporkan hasil penyelidikan kepada publik. Ini adalah tantangan untuk membuatnya menjadi transparan.

Riset Dewan Pers di Papua menemukan Indeks Kemerdekaan Pers di provinsi itu masih belum memuaskan. Provinsi ini belum menikmati kemerdekaan pers seperti daerah lain di Indonesia.

Sebagian kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi dan masih ada masalah akses bagi jurnalis asing di sana.

Dewan Pers tidak dapat berbuat banyak dengan kebijakan pemerintah terhadap pers di Papua. Namun Dewan Pers dapat membantu jurnalis dengan perlindungan, mendesak pembebasan pekerja media dan jurnalis dari tahanan polisi. Berdasarkan Indeks Kemerdekaan Pers, ada beberapa rencana yang akan digodok, termasuk untuk provinsi yang mendapatkan nilai indeks yang rendah.

Upaya Dewan Pers ini mendapatkan dukungan dari perwakilan SEAPA. Apa yang terjadi di Papua, menurut dia, adalah diskriminasi terhadap jurnalis lokal dan asing. Lebih banyak upaya dibutuhkan untuk memastikan independensi pers di Papua. Juga perlu untuk melihat perubahan dalam sikap militer di Papua dan Papua Barat demi kemerdekaan pers. Indonesia tidak memiliki kemerdekaan pers jika kedua provinsi itu belum menikmatinya.

Dewan Pers dan media di Indonesia dapat mengambil sejumlah contoh berdasarkan pada kejadian di Filipina. Seperti yang dikatakan Rosauro, media di Filipina juga memiliki pengalaman serupa dengan Indonesia ketika tentara negara itu harus berperang melawan pemberontak bersenjata Moro di Filipina selatan. Waktu itu militer Filipina juga membuat pembatasan. Tapi organisasi media menyiasatinya dengan mengatur peliputan bersama media nasional dan lokal.

Tidak kurang dari 60 jurnalis meliput pos pemeriksaan yang dibuka oleh militer Filipina pada 2009 dan mereka juga melakukan kunjungan secara mendadak ke pos pemeriksaan lain tanpa mengabaikan perlindungan dan keamanan. Aturan yang berlaku

mengharuskan militer Filipina memberikan perlindungan kepada wartawan yang sedang melaksanakan tugas. Dengan kehadiran banyak kolega di lokasi peliputan, jurnalis merasa aman dan karena kerja sama ini jurnalis bisa pergi ke medan pertempuran dan memberikan bantuan kemanusiaan jika diperlukan.

UU No. 40/1999 tidak ditunjang oleh aturan pendukung pemerintah, jadi pengaturan sendiri menjadi satu-satunya opsi yang ada seperti diisyaratkan oleh sistem hukum di Indonesia. Dewan Pers memfasilitasi dan mengumpulkan aturan yang dirancang oleh komunitas pers Indonesia selama 6 tahun. Ini termasuk soal kode etik jurnalistik, prosedur pengajuan pengaduan, panduan penulisan sanggahan, standar perlindungan jurnalis, standar organisasi jurnalis, standar pengujian kompetensi, serta panduan distribusi untuk media, dan panduan peliputan terorisme. Upaya pengaturan sendiri dirancang secara aktif tanpa campur tangan pemerintah.

KEMERDEKAAN PERS DI ASIA TENGGARA: TANTANGAN DAN UPAYA MENGATASINYA

Tantangan impunitas dan kejahatan di Asia Tenggara masih sangat besar. Direktur Eksekutif SEAPA, Edgardo Legaspi, mengatakan restriksi di beberapa negara di Asia Tenggara seperti membelenggu kawasan ini. Kecuali Timor Leste (yang bukan anggota ASEAN), Asia Tenggara berada di peringkat tiga terbawah untuk indeks kemerdekaan pers seperti dilaporkan oleh Reporters Without Borders.

Menurut Legaspi, tidak ada jaminan untuk kemerdekaan pers dapat bertahan selama periode tertentu. Kemerdekaan pers bisa hilang tiba-tiba karena kondisi politik yang berubah seperti

yang terlihat di Thailand selama kudeta. Militer berusaha untuk membatasi atau menghapus kemerdekaan pers secara permanen atau menekan media. Tekanan itu akan memicu tingkat stres yang tinggi di antara pekerja media.

Beberapa diskusi yang digelar untuk membahas mekanisme kemerdekaan pers di Asia Tenggara menyimpulkan bahwa hal itu tidak mudah jika tidak bisa dikatakan cukup sulit untuk menciptakannya. Ada lembaga di Asia Tenggara yang disebut dengan Komisi HAM Antar-Pemerintah Asean (AICHR). Ini merupakan lembaga antarpemerintah yang sampai sekarang tidak bekerja secara optimal karena tidak memiliki fungsi untuk mengakomodasi keberatan dan keluhan.

Ada harapan mencuat selama pembentukan lembaga ini bahwa ia diharapkan dapat menindaklanjuti laporan kasus Maguindanao di pengadilan. Sayangnya, institusi ini tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki mandat untuk itu. AICHR kemudian menjadi sebuah institusi di mana anggotanya mencoba untuk merangkul komunitas dalam kegiatan tertentu. Institusi ini belum sempurna dan harus didorong supaya menjadi lebih baik.

Peserta diskusi membahas kebebasan berekspresi sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights. AICHR telah menghapus frasa “lintas batas” dalam Deklarasi HAM ASEAN.

Sangat sulit untuk membangun sebuah institusi yang tidak dapat menerima laporan yang pada akhirnya diserahkan kepada *Special Rapporteur*. Untuk sementara waktu itu dapat dilakukan, tapi sebagai sebuah institusi AICHR mungkin tidak akan dapat melakukannya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Ada tiga garis

besar ide yang muncul dalam diskusi itu. Ada bidang yang menjadi ranah kelompok masyarakat madani, termasuk organisasi HAM. Ada bidang untuk kelompok media, dan ada pula bidang untuk lembaga resmi dan setengah resmi seperti Dewan Pers.

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk menciptakan mekanisme tersebut adalah mempersiapkan kondisi, memastikan AICHR menyadari kebebasan berekspresi itu penting dan menjadi isu utama di kawasan ini. Dan ini harus dibuktikan dengan argumentasinya ketika meminta dan menyerahkan laporan. Juga perlu untuk mengkonsolidasikan dokumentasi di masing-masing negara dengan membangun *database* yang kuat dengan bukti yang valid. Jadi ini bukan hanya soal menghitung kasus tapi juga melihat konteksnya sehingga dapat menjadi petunjuk bagi AICHR untuk segera memulainya. Bidang kedua terkait dengan kolaborasi.

KOLABORASI KELOMPOK DI TINGKAT NASIONAL

Tidak ada negara yang dapat mengklaim diri sebagai wakil kawasan dan membawa agendanya ke forum diskusi regional jika ada negara lain yang menyampaikan pesan yang berbeda. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kerja sama regional. Ada kebutuhan untuk mengembangkan proyek regional yang bisa mendukung tujuan ini, misalnya dengan menggunakan *universal periodic review* (UPR), tidak hanya dari kelompok HAM di masing-masing negara tapi juga di kawasan sehingga tercapai pemahaman bersama.

Upaya lain untuk mencapai kemerdekaan pers dapat dilakukan melalui, antara lain kerja sama di antara Dewan Pers. Di Asia Tenggara ada lima negara yang memiliki Dewan Pers, tiga diantaranya dimandatkan oleh negara masing-masing yakni Indonesia, Myanmar, dan Timor Leste. Myanmar belum lama

memiliki Dewan Pers, baru 2 tahun, sedangkan Timor Leste bakal memiliki Dewan Pers dalam waktu dekat.

Di Filipina, Dewan Pers didirikan secara sukarela, terdiri dari sebagian besar adalah asosiasi penerbit. Dewan Pers perlu bekerja sama untuk menangani kelemahan dalam sistem yang ada sekarang sementara pada waktu yang bersamaan juga harus membandingkannya. Mungkin mereka tidak dapat menerima atau menangani keluhan tapi paling tidak mereka dapat menemukan mekanisme yang efektif untuk menanganinya dengan cara yang tidak melanggar kebijakan non-intervensi ASEAN.

Tentu saja ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti Thailand yang memiliki beberapa institusi dan organisasi media yang memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang cukup untuk pekerja media. Tapi untuk melindungi kemerdekaan pers, organisasi media ini terjebak di tengah pusaran polarisasi politik. Dewan Pers Thailand tidak mampu melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya dan sepertinya telah kehilangan kepercayaan masyarakat.

Jika seseorang menyampaikan keluhan, Dewan Pers seharusnya melakukan penyelidikan, tapi media anggota yang terlibat di dalam kasus itu akan menarik diri dari keanggotaannya. Dewan Pers dan asosiasi jurnalis di negara itu juga tidak sanggup melindungi jurnalis yang sedang bertugas dari ancaman dan kekerasan, terlepas dari status mereka apakah menjadi anggota asosiasi itu atau tidak.

Sebelum diloloskan menjadi UU, RUU Pers Thailand digodok dengan mengundang asosiasi dan organisasi media lokal yang memberikan masukan demi terciptanya kerangka hukum yang dapat memberikan mandat untuk mengontrol atau mengawasi

media. Tapi ketika RUU itu diserahkan kepada pemerintah untuk dikaji, banyak hal yang berubah. Misalnya, usulan struktur komisi yang nantinya akan memantau media dikondisikan dipimpin oleh pejabat militer atau tokoh politik. Akibatnya, media menjadi korban politik. Organisasi media masih berusaha menemukan jalan terbaik untuk mendekati mereka ketika hubungan atasan-bawahan di antara mereka masih ada.

Melihat situasi di Asia Tenggara yang belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan pers, ada baiknya pemangku kepentingan menghadirkan sebuah rencana aksi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kemerdekaan pers. Juga penting untuk memiliki sistem hukum dengan UU yang demokratis. Sepanjang UU otoritarian yang memungkinkan penutupan media atau program siaran masih ada maka tidak banyak yang bisa dilakukan.

Komala mengusulkan agar aktivitas organisasi pers di kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program melek media, pelatihan, sehingga organisasi pers bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang apa yang dapat dilakukan bersama, apa yang dapat dilakukan masyarakat dan media untuk mendukung independensi pers.

Sementara itu Rosauro menyampaikan sejumlah gagasan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya membantu mempromosikan kemerdekaan pers di Filipina, yakni melalui mekanisme eksternal ASEAN dan proses UPR dengan memperhatikan situasi politik di Filipina yang masih belum kondusif. Tentang kemerdekaan pers, posisi Presiden Rodrigo Duterte, yang sangat sensitif terhadap opini dunia, tidak jelas.

Juga perlu untuk memperkuat mekanisme yang ada untuk memberdayakan Komisi Nasional HAM karena sekarang institusi ini tidak memiliki otoritas untuk melakukan penuntutan tapi dapat melakukan penyelidikan kasus dan menyerahkannya sebagai laporan kepada Kementerian Kehakiman. Komisi ini sedang mengupayakan mandat penuntutan.

Selain tidak memiliki kewenangan penuntutan, komisi ini tidak memiliki posisi yang kuat karena Kementerian Kehakiman masih tunduk pada tekanan politik. Dia menunjuk tekanan politik khususnya dalam penuntutan kasus Maguindanao. Jadi, perlu memperkuat mandat komisi ini untuk memastikan akuntabilitas lembaga negara yang diduga membahayakan kemerdekaan pers.

Proses penuntutan juga terkait dengan perlindungan saksi. Melihat kasus yang mangkrak, banyak saksi yang enggan berdiri di depan hakim, terpaksa dipindahkan ke tempat lain, keluar dari *safe house*. Jika mereka keluar dari program perlindungan maka sangat mungkin mereka menjadi sasaran kekerasan. Misalnya kasus di General Santos City, kota kelahiran juara tinju Manny Pacquiao, di mana tujuh sampai delapan jurnalis dibunuh dalam 10 tahun terakhir.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah reformasi sistem hukum, terutama yang berkaitan dengan pengawasan proses peradilan. Ada banyak tuntutan untuk reformasi, terutama untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Juga penting untuk menggarisbawahi perlunya membangun sebuah mekanisme baru sementara pada waktu yang bersamaan juga memperkuat mekanisme yang ada beserta aneka tantangan yang mengitarinya. Pihak terkait perlu diundang untuk menciptakan

sinergi. Gagasan kongkret diperlukan untuk menentukan arah ke depan kemerdekaan pers di kawasan.

Kerja sama regional juga penting di sini untuk mandat di tiga bidang yakni, *pertama* adalah dialog. Ini bisa dilakukan melalui serangkaian konsultasi untuk menemukan cara memperkuat mekanisme yang ada. Kemudian perlu juga untuk melihat konteks kerja sama dan menemukan cara yang tepat untuk melindungi kemerdekaan pers.

Kedua, perlu untuk memulai misi pencarian fakta untuk melihat negara mana saja yang menghadapi masalah kemerdekaan pers. Misi pencarian fakta ini diharapkan mencerminkan solidaritas negara di kawasan. *Ketiga* adalah tentang pemberdayaan, pengembangan kapasitas jurnalis supaya dapat menjadi profesional, menghormati etika, dan independensi melalui pelatihan, dan program pertukaran atau fellowship. Kemudian hal yang juga perlu dilakukan adalah pemantauan, riset, dan advokasi.

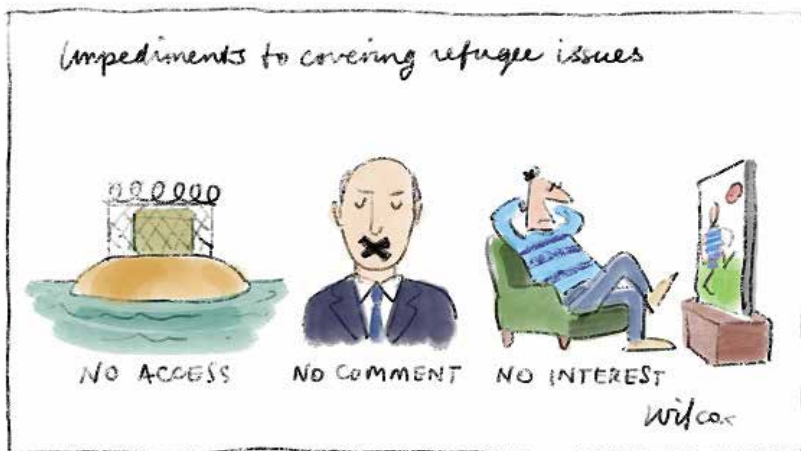
Akan lebih baik lagi jika ada upaya untuk menciptakan portal berita regional yang dapat menyampaikan informasi tentang situasi kemerdekaan pers, UU yang berlaku di kawasan, dan aturan yang dapat menghalangi atau mempengaruhi independensi pers. Laporan untuk portal berita itu bisa dialihdayakan dan dipakai sebagai bahan riset untuk membuat indek kemerdekaan pers di kawasan seperti yang sudah dilakukan oleh Reporters Without Borders atau Freedom House dengan analisis regional untuk menangkap gambaran situasi yang lebih jelas. Advokasi berbasis bukti dapat menjadi alat lobi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Satu hal lain yang mungkin bisa diperhatikan adalah perlunya solidaritas di antara jurnalis. Korupsi dan pelanggaran etika masih

terjadi di luar sana dan sering dipakai untuk mengadu domba jurnalis satu sama lainnya. Perlu menjaga kekompakan dalam bekerja dengan acuan prinsip yang sama dan menyingkirkan segala perbedaan pandangan politik. Ada ungkapan yang menyatakan jika Anda seorang jurnalis yang korup maka Anda layak mati. Jurnalis dihadang kesulitan seperti sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Makanya, kerja sama dengan prinsip yang sama diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut. Jurnalis juga harus berbenah untuk mencegah pemerintah melangkah lebih jauh untuk meregulasi media dan menetapkan restriksi secara permanen.

BAB VII

LIPUTAN MEDIA DAN PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENGUNGSI DAN KAUM MIGRAN



Cathy Wilcox/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Media massa sudah seharusnya berperan sebagai katalisator terciptanya perdamaian dan saling pengertian di masyarakat. Perdamaian, stabilitas, penghormatan pada hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan berdasarkan penegakan hukum merupakan wahana penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Konflik bersenjata, kekerasan, dan gangguan terhadap keamanan mengacaukan secara serius upaya banyak negara dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sulit melakukan peletakan dasar perdamaian maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah konflik.

Menurut Bank Dunia, dua miliar penduduk dunia kini tinggal di negara yang hasil pembangunannya dipengaruhi oleh kerentanan, konflik, dan kekerasan. Jumlah konflik berkekerasan di dunia kian melonjak. Konflik bersenjata mengarah ke pengrusakan prasarana, pengacauan kegiatan ekonomi, masalah dalam distribusi pangan dan sumber daya lain, pelemahan lembaga sosial, politik dan ekonomi, serta ketidakpastian. Sebagai akibat konflik dan penganiayaan, pada akhir 2016 United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) memperkirakan 65,6 juta orang telah meninggalkan tempat tinggal mereka, baik sebagai pengungsi (22,5 juta), orang yang kehilangan tempat tinggal (40,3 juta), maupun sebagai pencari suaka.

Dalam hal ini, media kerap memainkan peran sentral dalam situasi konflik dan krisis. Media yang independen, objektif, netral dapat membantu mematikan api penyulut ketegangan, memajukan dialog dan meredakan konflik. Sebaliknya, peliputan berpihak dan tidak benar dapat membangkitkan kekerasan. Bilamana disalahgunakan untuk tujuan propaganda, media dapat mengipasi kebencian dan menyebarkan rumor.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya usaha memajukan standar etika dan profesional jurnalis, khususnya dalam situasi konflik. UNESCO telah sekian lama fokus pada peliputan rawan konflik, yang memerlukan kedalaman dan ketrampilan analisis lebih besar untuk mengidentifikasi akar suatu konflik, membongkar mitos yang mungkin membakarnya, menghapuskan salah persepsi antarpihak yang berlawanan, menjelaskan keprihatinan masing-masing pihak, dan memajukan saling pengertian yang dapat membantu terciptanya rekonsiliasi.

Lebih jauh, dalam situasi konflik dan krisis, risiko yang dihadapi jurnalis berlipat secara berarti. Banyak jurnalis terjebak dalam kejadian baku tembak dan bahkan mereka sengaja dijadikan sasaran tembak. UNESCO telah mengecam terjadinya pembunuhan 827 wartawan selama satu dasawarsa terakhir. Hampir 60% wartawan yang tewas dalam kurun waktu 2014-2015 meninggal di wilayah konflik bersenjata.

Mengatasi risiko besar yang dihadapi jurnalis dalam situasi konflik merupakan salah satu tujuan yang tertuang dalam Rencana Aksi PBB untuk Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas (UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity) pada 2012. Hal ini penting untuk melindungi wartawan, memastikan adanya akses masyarakat ke informasi terpercaya, dan perlindungan kemerdekaan manusia sebagai kondisi yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain peperangan, meluasnya ekstremisme dengan kekerasan yang dikembangkan kelompok teroris dan ekstremis seperti ISIL/ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram menjadi ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan, HAM, dan keadilan. Kelompok ini telah mendayagunakan media sosial sebagai perangkat untuk

komunikasi global, menyampaikan pesan-pesan intoleransi, baik yang menyangkut agama, kebudayaan maupun sosial.

Era digital telah meningkatkan peluang atas akses informasi, kreasi, berbagi pengetahuan, memfasilitasi pertukaran, dan juga dialog antarbudaya. Tetapi, meluapnya ujaran kebencian secara daring memperlihatkan teknologi digital juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menyeimbangkan dengan tepat kebebasan berpendapat secara *online* dengan penghormatan pada kesetaraan dan martabat manusia.

Melawan ujaran kebencian dan ekstremisme berkekerasan dalam jaringan internet memerlukan lebih daripada sekedar langkah represif seperti pelarangan atau pemblokiran konten. Ia memerlukan pendekatan menyeluruh guna menemukan akar penyebab ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat. Ini sejalan dengan Rencana Aksi Rabat dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) mengenai larangan mengadvokasi kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, dan agama yang berwujud menjadi tindak menghasut untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Media memiliki peran kunci dalam hal ini.

Media dapat menyediakan panggung bagi berbagai pendapat dan perspektif yang dapat membantu memantapkan toleransi, dialog, dan pemikiran kritis. Ia juga dapat menawarkan narasi tanding untuk menantang gagasan yang dimajukan oleh paham ekstrem berkekerasan. Strategi apapun yang diarahkan untuk melawan ekstremisme dengan kekerasan berarti harus juga menangani langsung masalah serangan dan pelecehan secara *online* yang sering dialami jurnalis, politisi, dan tokoh perempuan.

LIPUTAN MEDIA

Pembahasan dalam forum World Press Freedom Day 2017 dengan tema “Liputan Media dan Persepsi Publik terhadap Pengungsi dan Kaum Migran” diawali dengan kesamaan pendapat. Semua panelis menganggap pemberitaan mengenai pengungsi dan migran di media massa masih jauh dari sempurna. Seluruh panelis memberikan nilai berkisar 4-5 pada skala 1-10. Sebuah angka yang tidak cukup membanggakan.

Salah satu pembicara, Sawssan Abou-Zahr, jurnalis independen dan pakar dari Peace Direct, mengemukakan bahwa dalam konteks Lebanon, negara tempat dia tinggal, nilai untuk peliputan atas pengungsi dan migran berkisar 4,4-5.

Sementara itu, Margie Mason, jurnalis pemenang Pulitzer, melihat ada liputan yang sangat bagus, tetapi di sisi lain juga ada liputan yang kualitasnya sangat buruk. Jadi, dia merasa kesulitan dalam memberi penilaian. Namun, dia sepakat dengan nilai berkisar 5. Andi Muhyiddin, jurnalis dari Indonesia, juga sepakat memberikan skor 5 untuk kualitas rata-rata peliputan mengenai pengungsi dan migran.

Secara umum, mereka yang berkecimpung di dunia pers sepakat bahwa kualitas peliputan media untuk isu pengungsi dan migran saat ini masih dalam kualitas rata-rata. Belum menggembirakan, tetapi juga tidak buruk sekali. Salah satu kritik utama atas liputan media adalah umumnya media cenderung melakukan stereotip. Padahal, faktanya, isu yang terkait dengan pengungsi dan migran itu sangat kompleks.

Abou-Zahr menggambarkan fakta bahwa Lebanon termasuk negara yang paling banyak populasi pengungsinya. Di negara Timur Tengah

ini terdapat populasi pengungsi dari Suriah kurang lebih 1,5 juta orang, pengungsi dari Palestina sekitar 450.000 orang, pengungsi dari Irak 40.000 orang, dan sejumlah pengungsi dari Sudan serta dari negara lain. Total jumlah pengungsi di Lebanon adalah 2 juta, sementara jumlah penduduk Lebanon sendiri sekitar 4 juta orang. Dia mengibaratkan kondisi itu seperti jumlah seluruh penduduk Polandia dan Jerman dipindahkan ke AS.

Dengan kondisi semacam itu, tingkat prasangka negatif atas pengungsi Suriah di kalangan penduduk dan media di Lebanon dapat dipahami. Meskipun demikian, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk pembenaran. Prasangka buruk di masyarakat menimbulkan semacam slogan “kami *versus* mereka”.

Pengungsi Suriah sering dipersalahkan atas hal negatif yang terjadi. Umumnya mereka dipersalahkan oleh masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pemberitaan di media. Kebetulan, media di Lebanon dimiliki oleh pengusaha yang punya afiliasi politik tertentu atau terkait dengan partai politik.

Terlebih lagi masyarakat Lebanon pun sudah mengalami segregasi antara komunitas Kristen dan Muslim. Tentu saja, hal ini berimbas pada kualitas peliputan berita. Sebagai contoh, pengungsi Suriah sering dipersalahkan atas apapun yang terjadi di Lebanon, apakah itu terkait krisis sampah ataupun terkait polusi udara. Mereka dipersalahkan hanya karena mereka ada di Lebanon. Mereka juga dipersalahkan atas tingginya tingkat pengangguran.

Belum lagi soal istilah yang dipakai oleh media besar. Contohnya ketika sejumlah tentara Angkatan Darat Lebanon diculik oleh ISIS di Lembah Bekaa di perbatasan Suriah beberapa waktu lalu. Istilah “pembunuh tentara” digunakan secara luas untuk menyebut

pengungsi, bukan cuma untuk menyebut kelompok ekstremis fundamentalis Suriah yang menculik para tentara itu. Dari sini nampak jurnalis di Lebanon sangat kesulitan untuk memperoleh pijakan yang independen bagi mereka. Apalagi bisa dibayangkan betapa sulitnya pengungsi Suriah berusaha agar suara mereka didengar.

Abou-Zahr mengakui dirinya pun kesulitan untuk menjadi jurnalis yang benar-benar independen saat bekerja di sebuah media besar. Namun, sekarang ini dia bekerja secara lepas (*freelance*) dan dia merasa dapat lebih independen. Dia merasa lebih bebas menuliskan apa yang dia lihat dan saksikan di lapangan.

Lebanon bukanlah satu-satunya negara di mana liputan media atas pengungsi dan migran menghadapi persoalan yang kompleks. Indonesia, negara yang relatif lebih aman dibandingkan dengan Lebanon, pun menghadapi kendala yang mirip. Dalam hal ini, Indonesia kedatangan orang Rohingya yang terusir dari Myanmar.

Menurut Muhyiddin, masalah utama terkait pendatang Rohingya di Indonesia adalah status mereka. Awalnya mereka tiba di Aceh, ujung barat Indonesia. Sejak Desember 2016, mereka dipindahkan ke Medan, Sumatra Utara. Selama itu status mereka belum jelas, sebagai pengungsi atau pencari suaka. Mereka menunggu kepastian dari lembaga PBB yang menangani pengungsi (UNHCR). Oleh karena belum adanya status yang jelas dari PBB, selama ini pendatang Rohingya dilihat secara negatif dan memperoleh label “imigran ilegal”. Tentunya ini merupakan sebuah masalah yang besar.

Jadi, menurut Muhyiddin, masalahnya lebih pada legalitas para pendatang Rohingya, yang jumlahnya mencapai 14.000 orang.

Kabar baiknya adalah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan presiden yang dimaksudkan untuk membantu pendatang Rohingya semaksimal mungkin. Dengan keputusan presiden itu, pendatang Rohingya dianggap sebagai pengungsi dan tidak lagi dilihat sebagai imigran gelap. Akan tetapi, menurut Muhyiddin, media di Indonesia tidak menjadikan Rohingya sebagai isu utama. Sebagian bahkan mulai melupakan isu tersebut.

Mason, jurnalis *Associated Press* (AP) yang beberapa kali membuat laporan mengenai pengungsi, sepakat dengan hal itu. Menurut dia, ada kecenderungan media internasional akan meliput pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia, khususnya pada saat krisis. Situasi krisis ini adalah saat kapal yang membawa pendatang Rohingya berada di tengah laut dan negara ini menolak menerima mereka. Pada saat krisis semacam itu, setiap orang melaporkannya. Akan tetapi, pada saat situasi sudah mulai tenang, media tidak lagi melihat pengungsi Rohingya sebagaimana mereka melihatnya pada saat krisis. Media cenderung hanya memiliki perhatian terhadap sebuah kasus dalam jangka pendek. Media akan mencari kasus atau cerita yang lain. Seringkali media tidak menulis kelanjutan berita tersebut.

Selain minimnya pemberitaan media, ada beberapa permasalahan lain yang dialami pendatang Rohingya, misalnya terkait pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Anak-anak pendatang Rohingya itu kesulitan mengikuti pendidikan. Walaupun mereka diperbolehkan mengikuti pelajaran di sekolah negeri, anak-anak tersebut tidak akan memperoleh sertifikat. Jadi tidak akan ada bukti bahwa mereka telah mengikuti pendidikan di Indonesia. Masalah lain terkait dengan kesehatan. Jika ada perempuan Rohingya yang hendak melahirkan, mereka tidak dapat leluasa dipindah dari satu klinik atau rumah sakit ke rumah sakit lainnya karena masalah perizinan. Selain itu juga ada masalah pekerjaan. Karena status sebagai

pengungsi, mereka tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia. Oleh sebab itu mereka tidak memiliki penghasilan.

Di Lebanon pun, pengungsi Suriah harus membayar US\$200 per tahun untuk memperoleh status *legal resident*. Perlu diingat, mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja, kecuali di bidang pertanian dan konstruksi yang menawarkan bayaran yang rendah. Orang-orang Lebanon tidak mau mengambil pekerjaan semacam itu.

Kemudian, pengungsi itu diharuskan membayar US\$50 per bulan untuk sewa tenda di penampungan tidak resmi. Padahal mereka cuma memperoleh penghasilan US\$150. Cerita semacam ini tidak didapatkan di media massa sebab jurnalis tidak memberikan tempat bagi pengungsi dan tidak menyuarakan kepentingan mereka.

Dalam hal ini media Lebanon menyuarakan kepentingan para politisi yang mengontrol surat kabar dan stasiun televisi. Bahkan barangkali media juga menyuarakan opini pembaca yang menunjukkan sentimen rasisme terhadap pengungsi Suriah dan pengungsi secara umum di Lebanon. Sementara itu, pengungsi tidak memiliki instrumen untuk mengungkapkan kepentingan mereka.

Baru-baru ini Ethical Journalism Network, sebuah lembaga pegiat jurnalisme berbasis di Inggris, melakukan penelitian tentang bagaimana media melakukan peliputan atas isu migrasi dalam 2 tahun terakhir. Hasilnya mirip dengan apa yang dikemukakan oleh para panelis World Press Freedom Day 2017.

Temuan hasil studi tersebut menunjukkan bahwa media terkadang, baik sengaja maupun tidak, menggunakan istilah yang keliru. Mereka secara serampangan menggunakan istilah pengungsi, pencari suaka, dan migran. Perlu upaya untuk memastikan bahwa

jurnalis memahami perbedaan arti dari istilah tersebut dan kemudian menerangkan artinya ke publik.

Media juga perlu memastikan untuk tidak menggunakan istilah tersebut untuk memberikan stigma kepada kelompok tertentu. Penelitian tersebut juga menganjurkan agar melibatkan pakar migrasi dalam memproduksi pemberitaan. Migrasi adalah isu yang besar karenanya perlu sering diliput dan dilaporkan atau diperlukan bagian khusus di redaksi untuk menangani isu tersebut.

Redaksi atau *newsroom* perlu semacam *code of conduct* khusus mengenai migrasi. Termasuk juga penyediaan glosari atau istilah terkait migrasi. Yang dimaksud glosari di sini bukanlah daftar kata yang harus digunakan atau dihindari tapi daftar kata yang perlu perhatian lebih sebelum menggunakannya. Jurnalis harus paham benar arti kata tersebut sebelum menggunakannya.

Tom Law, Direktur Kampanye dan Komunikasi Ethical Journalism Network, menyebutkan contoh penggunaan kata yang perlu pertimbangan matang. Jurnalis seharusnya dianjurkan untuk tidak menyebut sekelompok orang sebagai “ilegal”. Status mereka mungkin ilegal atau mereka mungkin memang masuk ke sebuah wilayah negara secara ilegal. Namun, tetap saja tidak bijak untuk menyebut sekelompok orang sebagai ilegal.

Contoh lain adalah penggunaan foto atau video. Di Italia, Operasi Mare Nostrum oleh Angkatan Laut Italia ketika menyelamatkan para pengungsi saat kapal mereka kandas di laut Mediterania menyajikan situasi dramatis yang sangat berharga bagi media untuk dipublikasikan. Akan tetapi, situasi tersebut juga menampilkan individu sebagai korban dan kisah kemanusiaan. Hal ini justru mengaburkan akar permasalahan, mengapa mereka pindah ke

negara lain dan juga tentang strategi di negara Eropa dalam hal pengamanan perbatasan.

Foto bocah Aylan Kurdi yang tersebar dan bagaimana foto itu dipakai adalah sebuah contoh. Foto itu di Senat Amerika Serikat digunakan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan Presiden Obama tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Foto tersebut ditampilkan pada sebuah kegiatan yang dihadiri ayah Aylan Kurdi dan ini menjadi kurang patut. Hadir dalam sebuah kegiatan yang menampilkan foto jenazah anaknya di dinding adalah sebuah pengalaman yang penuh trauma.

Hal lain yang perlu dicatat adalah bagaimana media membuat pilihan atas beberapa foto yang tersedia. Ada tiga pilihan foto Aylan Kurdi: tengkurap di pantai, dirinya bersama seorang polisi atau pejabat yang sedang mencatat dan polisi yang menggendongnya. Masing-masing foto memiliki ceritanya sendiri. Media, tergantung narasi masing-masing, memilih foto yang berbeda.

Jika media memilih foto pejabat yang sedang mencatat, tentunya ini hal yang sangat resmi. Itu menunjukkan bagaimana penegak hukum berinteraksi dengan kisah migrasi. Jika media memilih foto Aylan Kurdi dibopong seorang polisi, hal itu menggambarkan Eropa sebagai tuan rumah yang menerima kedatangan orang-orang yang lari dari wilayah konflik.

Adalah penting untuk memikirkan hal seperti ini. Ada beberapa inisiatif terkait masalah kaum migran seperti Piagam Roma di Italia dan Piagam Idomeni di Yunani. Dengan piagam itu, media bersamasama menyepakati *code of conduct* dan kode etik dalam meliput migrasi. Media menyepakati antara lain bagaimana menggunakan istilah untuk mengedukasi publik. Kegiatan semacam itu juga

harus diselenggarakan di lain tempat. Sebab, meskipun ada Piagam Roma, namun karena beberapa media tidak hadir di sana, hal itu menjadi tidak berarti apa-apa bagi mereka. Untuk itu, media, serikat media, redaktur, dan masyarakat madani mestinya bekerja sama meningkatkan kualitas penulisan tentang migrasi.

Terdapat banyak contoh bagus tentang hal itu. Ada sebuah proyek di London yakni Refugee Journalism Project yang bertujuan membantu pencari suaka dan pengungsi untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan media di London. Memang sangat susah bekerja di media di sebuah negara baru.

Namun, banyak jurnalis yang benar-benar bagus dari Suriah dan dari tempat lain yang melalui skema itu dapat memperoleh pekerjaan di perusahaan media. Adalah penting bagi media untuk merekrut pengungsi yang terpaksa melintas batas. Sebab mereka memiliki informasi dan pengetahuan tentang negaranya. Sementara itu reporter di London tidak memahami bahasa dan tidak memiliki pengetahuan serta pengalaman bagaimana rasanya pergi dari tempat tinggal mereka.

Dianjurkan juga pekerja media, terutama pada saat sulit seperti ini, untuk bicara dengan kolega di negara lain untuk melakukan kolaborasi lintas-batas, kolaborasi liputan, dan kolaborasi proyek. Saat ini organisasi Ethical Journalism Network bekerja sama dengan ILO menggagas sebuah proyek *fellowship* untuk jurnalis di Timur Tengah dan Asia Selatan. Para jurnalis diberikan kesempatan untuk berkunjung ke kawasan Teluk, di mana pekerja migran menjadi masalah besar dan jarang diliput secara utuh. Kolaborasi semacam itu mesti didorong untuk menghasilkan jurnalisme yang menyeluruh.

Masalahnya adalah ketersediaan dana untuk penyelenggaraan pelatihan jurnalis semacam itu. Adakah tren untuk mengeluarkan uang agar kualitas jurnalis bisa ditingkatkan?

Faktanya, dana untuk penyelenggaraan pelatihan semacam itu tersedia. Materinya tersedia, terbukti bahwa lembaga semacam Ethical Journalism Network sudah menghasilkan dua laporan mengenai migrasi. Lembaga tersebut juga menerbitkan laporan lain soal pemanfaatan foto dan video pengungsi melalui kerja sama jurnalis dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Jadi, sumberdaya untuk meningkatkan kualitas jurnalis dan pemberitaan sebenarnya ada. Jika pengajar di sekolah jurnalistik, editor, dan lembaga ombudsman memiliki keinginan untuk itu, tentunya lembaga seperti Ethical Journalism Network siap sedia membantu. Masalahnya tinggal ada kemauan atau tidak.

Tentunya, modal untuk kegiatan semacam ini tidak harus dalam bentuk uang, melainkan kemauan dan kolaborasi dengan sekelompok orang yang memiliki kepedulian yang sama dan memiliki nilai etika jurnalistik di hati mereka. Banyak yang dapat dilakukan jika kolaborasi itu terjadi.

Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas jurnalis memang sangat penting. Bahkan di negara maju seperti AS, pelatihan jurnalistik tetap diperlukan untuk menghasilkan laporan yang bagus.

Paul Dillon, *media officer* IOM, menyajikan contoh nyata betapa surat kabar di AS pun masih menyajikan berita yang terkesan tidak elok. Dillon menceritakan dia pernah mendampingi dua pengungsi remaja ke Amerika Serikat untuk direlokasi ke Plains, kota kecil

yang dihuni sekitar 120.000 penduduk dan hampir 98% dari mereka berkulit putih.

Kedua remaja 16 tahun ini ingin menjadi dokter atau pengacara dan insinyur. Mereka mempunyai harapan dan impian. Ini sangat menginspirasi. Keduanya melangkah keluar pesawat dan mereka diserahkan kepada lembaga yang akan mengurus relokasi mereka dan merawat mereka beberapa tahun ke depan.

Keesokan harinya Dillon pergi ke jalanan dan melihat kotak surat kabar. Serta merta, dia membukanya dan mengambil surat kabar. Foto utama surat kabar itu berupa foto badai dan awan beserta kilat. Di bagian kanan ada sebuah foto wajah yang terpotong bagian hidungnya. Sebuah gambar yang mengerikan. Berita utamanya adalah kedatangan pertama sebuah keluarga pengungsi dari Suriah di North Dakota. Dillon jadi tidak punya selera minum kopi. Dia terus memikirkan dampak foto semacam itu terhadap orang kebanyakan di sebuah kota sekecil itu di negara bagian AS tersebut.

Dillon terus memikirkan bahasa dan bagaimana hal semacam itu disajikan. Dia mempertanyakan bagaimana proses yang berlangsung di ruang redaksi sehingga keputusan pada akhirnya diambil. Dia percaya keputusan itu sudah diambil melalui proses dalam redaksi. Tentunya redaksi juga sudah memikirkan bahasa yang digunakan. Mereka tidak menyebut soal geng, penjahat, pemerkosa, jihadis, atau yang sejenisnya.

Penggunaan bahasa adalah tanggungjawab editor, jurnalis, dan institusi media. Mereka perlu menemukan cara untuk menuliskan kisah dengan cara yang lain. Dan itu sangat sulit. Kekuatan pasar sangat menentukan di sini. Hal penting lainnya adalah akurasi dalam pemilihan bahasa untuk menggambarkan orang. Pengungsi,

pencari suaka, dan migran adalah istilah-istilah teknis. Jadi bekerja sama dengan orang seperti Tom Law dan organisasinya, Ethical Journalist Network, akan membantu jurnalis memahami nuansa dari maksud istilah tersebut.

Proses liputan dengan persiapan yang matang akan menghasilkan laporan investigasi yang berdampak positif. Salah satu contohnya adalah liputan *Associated Press* mengenai perbudakan di kapal penangkap ikan Thailand. Liputan investigasi itu melibatkan beberapa jurnalis AP, termasuk Margie Mason dan Martha Mendoza. Mason menceritakan bagaimana liputan itu dilakukan. Peliputan dengan topik yang bagus tidak selalu berlangsung sesuai rencana. Cerita yang menarik dapat terealisasi dari pengembangan liputan.

Dia pernah bekerja sama dengan koleganya Robin McDowell yang bertugas di Myanmar. Keduanya fokus pada kehidupan orang Rohingya, termasuk anak-anak yang melarikan diri dari Rakhine State seperti perjalanan seorang gadis Rohingya berusia 10 tahun yang berakhir di Indonesia. Lalu mereka mencari tahu informasi tentang Rohingya dari IOM. Lalu pada saat menemui sumber IOM, Mason ditanya apakah ingin melihat nelayan migran yang berasal dari beberapa tempat di Asia Tenggara dan berakhir terdampar di Indonesia.

Oleh karena Margie sudah lama melakukan peliputan di Asia Tenggara, dirinya kurang lebih tahu atau pernah mendengar tentang perdagangan manusia, bagaimana manusia diperdagangkan dari Myanmar, Kamboja, Thailand dan Laos untuk dipekerjakan di kapal penangkap ikan. Mereka tidak pernah kembali.

Dia menyatakan persetujuannya sekaligus menyampaikan dua keinginan yang sangat ambisius. *Pertama*, dia ingin melakukan

sesuatu yang belum dilakukan oleh jurnalis lain dan dia ingin mencoba untuk menjumpai orang yang masih ditahan di luar kemauan mereka. *Kedua*, jika berhasil menjumpai mereka, dia ingin melacak ikan dan *seafood* sampai Eropa dan AS dan mengidentifikasi nama perusahaan karena hanya dengan cara ini dia dapat menekan industri ini secara efektif.

Maka, pada 2014, Mason dan rekannya menghabiskan waktu setahun menggali dan mewawancari setiap orang yang bisa ditemui. Mereka melakukannya sambil menjalankan tugas sehari-hari sebagai jurnalis, meliput kecelakaan pesawat, gempa bumi, dan kejadian lainnya. Pada akhirnya, mereka mendengar keberadaan sebuah pulau di lokasi terpencil di bagian timur Indonesia yang bernama Benjina. Mereka juga mendengar keberadaan korban di sana. Lalu mereka pergi ke sana.

Mereka menemukan orang yang dikurung. Mereka juga menemukan kuburan dipenuhi mayat dan diberi tanda yang bukan nama mereka. Bahkan saat mereka mati, mereka tidak diberikan penghargaan yang layak. Mereka juga menemukan orang-orang di kapal menangis memohon agar dibantu pulang ke rumah.

Beberapa lelaki berlari menuju McDowell dan Esther Tucson yang pada saat itu mengunjungi Benjina. Para lelaki itu memberikan foto diri mereka dan sobekan kertas sembari memohon agar McDowell menyampaikan ke orangtua mereka bahwa mereka masih hidup, tetapi tidak dapat kembali ke rumah.

Mereka dipaksa bekerja selama 22 jam sehari dan terkadang 24 jam. Mereka dipukul menggunakan batang besi atau ekor ikan pari.

Mereka dikurung hanya karena mereka memohon agar dibolehkan pulang. Mereka juga tidak dibayar. Mereka ini berasal dari daerah miskin di Asia Tenggara yang mencoba mengubah hidupnya. Mereka miskin dan mereka diberitahu bahwa ada pekerjaan di Thailand. Beberapa diantaranya ditipu atau dicekoki dengan obat. Mereka bangun sudah berada di kapal dan tidak dapat keluar dari penjara terapung itu.

Pada akhirnya mereka mendapatkan berita. Bisa saja mereka menerbitkannya setelah menemukan pulau itu. Ini merupakan kisah yang dramatis dan mereka semua di *AP* terlibat dalam produksi berita ini. Namun, mereka memutuskan untuk melacak distribusi *seafood*-nya. Kemana *seafood* itu dikirim.

McDowell dan Tucson sempat menyaksikan *seafood* diangkut ke kapal. Mereka menggunakan satelit untuk melacak kapal tersebut. Saat di Thailand, mereka menginap 4 hari untuk memastikan tujuan *seafood* itu akan dikirim. Ternyata *seafood* itu dikirim ke hampir semua toko eceran, Walmart, Whole Foods, Albertsons, Kroger dan bahkan sampai ke toko makanan hewan Fancy Feast dan Ames. Kesimpulannya, *seafood* itu didistribusikan kemana saja. Saat kisah itu diterbitkan, *AP* secara terbuka menyebut identitas perusahaan.

Dengan pemberitaan itu, dampaknya sangat luar biasa. Dalam waktu kurang dari seminggu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dari Indonesia, yang amat sedih mengetahui fakta itu, membentuk Satgas dan mengecek lokasi untuk melihat apakah laporan *AP* itu sesuai fakta atau tidak. Pada akhirnya, Satgas mengevakuasi lebih dari 2.000 orang dari sejumlah pulau di sana, sebagai dampak dari, diantaranya, liputan *AP*.

Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah media dan jurnalis dapat membantu mengubah situasi. Oleh karena itu, adalah penting untuk memiliki rencana ambisius dan menindaklanjutinya secara serius.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah ada tindak lanjut setelah ada pemberitaan mengenai perdagangan manusia dan perbudakan tersebut. Apakah perusahaan tersebut kemudian melakukan audit atau koreksi?

Menurut Mason, beberapa perusahaan itu telah mencoba menekan perusahaan pemasok (*supplier*) dan pemerintah Thailand. Dengan itu semua bukan berarti semua masalah sudah diselesaikan. Praktik semacam ini terus berlangsung. Ini sudah berjalan selama beberapa generasi. Paling tidak, sekarang orang tidak mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu mengenai permasalahan di industri senilai US\$7 miliar tersebut. Yang terpenting bagi jurnalis adalah bagaimana membantu mengungkap suatu kasus dan membuka jalan bagi jurnalis lain untuk melanjutkan peliputan.

Dalam contoh kasus perbudakan Benjina, dampak dari liputan tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan besar yang kemudian melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pemasok. Dampak lain adalah pembentukan Satgas 115 oleh pemerintah Indonesia, sebuah langkah tepat untuk menangani sebuah industri perikanan yang sangat besar.

Hal lain yang terjadi akibat investigasi terhadap kasus tersebut selain pembebasan 2.000 nelayan yang diperbudak adalah upaya pemerintah untuk mewajibkan setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia untuk memenuhi audit HAM. Hak asasi itu meliputi kepastian bahwa pekerja kapal didata secara layak,

mereka tinggal dengan fasilitas yang layak, mereka dibayar dan mereka diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Hal tersebut merupakan langkah positif sebagai konsekuensi dari pemberitaan *AP*.

PERSEPSI PUBLIK

Terkait penggunaan bahasa, media dan masyarakat Prancis menyebut Calais, sebuah daerah di bagian utara Prancis, sebagai Calais Jungle. Daerah itu merupakan semacam tempat transit bagi pengungsi sebelum menyeberang ke Inggris. Media di Inggris pun mulai menyebut daerah itu sebagai Calais Jungle. Apa sebab? Kehadiran pengungsi dianggap sebagai ancaman. Mereka disamakan dengan hewan buas yang berbahaya yang siap menerkam. Ini sebuah contoh bagaimana bahasa dipakai untuk menggambarkan pengungsi.

Seperti umum diketahui, bahasa juga bisa dipakai sebagai alat untuk membenarkan tindakan genosida. Hitler pun menggunakan itu. Dia menyebut Yahudi sebagai ular. Di Rwanda, suku Hutu menyebut suku Tutsi sebagai kecoa dan sebagainya. Diharapkan hal ini tidak terjadi lagi di Eropa maupun tempat lain di dunia.

Terkait pilihan bahasa ini, *Al Jazeera* memiliki pengalaman berbeda. Saat terjadi gelombang kedatangan pengungsi dari Suriah, Irak, Afghanistan dan Iran, stasiun televisi yang berbasis di Doha, Qatar, ini secara sadar menyebut mereka sebagai pengungsi, bukan migran. Bahkan, *Al Jazeera* menyebutkannya dalam laporan opininya. Media ini konsisten menyebut mereka sebagai pengungsi. Penyebutan ini memiliki konsekuensi yang jelas.

Pengungsi adalah orang yang menyelamatkan diri dari perang dan tuan rumah wajib memberikan bantuan kemanusiaan sebab hal

itulah yang wajib dilakukan dalam situasi perang. Namun, migran cenderung dilihat oleh sejumlah negara dan masyarakat tertentu sebagai beban ekonomi dan ancaman bagi kehidupan sosial masyarakat. Terlihat perbedaan yang jelas antara pengungsi dan migran. *Al Jazeera* telah mengambil sikap dan memilih menyebut mereka sebagai pengungsi. Penggunaan kata migran terkesan tidak manusiawi.

Al Jazeera juga memiliki program acara film dokumenter yang membahas pengalaman masyarakat umum, tak terkecuali pengungsi. Acara tersebut berjudul “*Witness*” dengan durasi setengah jam dan ditayangkan setiap minggu. Acara ini tanpa presenter dan tanpa reporter. Orang yang menjadi fokus bahasan dalam film dokumenter ini tampil menceritakan pengalamannya sendiri. Acara ini terfokus pada karakter yang bersangkutan.

Setiap minggu acara ini menyajikan cerita yang berbeda. Namun demikian, banyak yang terfokus pada situasi pengungsi. Artinya *Al Jazeera* menyajikan cerita di mana karakternya merupakan sentral dari cerita itu. Mereka menceritakan pengalamannya langsung tanpa kehadiran pembawa acara. Acara semacam ini menjadikan pengungsi, yang adalah korban, memperoleh kedudukan yang layak dan lebih manusiawi.

Bahkan *Al Jazeera* juga menampilkan acara “*Refugees Got Talent*”, semacam *Asia’s Got Talent*. Acara ini tentang pengungsi Suriah di sebuah tempat pengungsian di Yunani. Mereka mengadakan kompetisi versi mereka sendiri. Mereka mengundang pengungsi untuk tampil berkompetisi dalam menyanyi, menari, membaca puisi, dan melawak. Beberapa pengungsi meminta kegiatan tersebut dihentikan.

Akan tetapi sesudah dilakukan pengambilan suara, mayoritas pengungsi mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan semacam ini menunjukkan bahwa di tengah bencana dan derita yang mereka alami di sana masih terdapat sisi kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan. Melalui kegiatan semacam ini, sebagian orang menyuarkan suara mereka yang selama ini dibungkam.

Bagi Abou-Zahr, yang berasal dari Lebanon, yang terpenting adalah membantu menyuarkan keinginan pengungsi. Banyak contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu pengungsi. Antara lain pemberian kamera foto kepada pengungsi agar mereka dapat mendokumentasikan kegiatan di pengungsian dan di sekolah yang terbuat dari kontainer. Foto itu kemudian dipamerkan dan dibukukan dan hasilnya dipakai untuk membantu pengungsi.

Prinsipnya, pengungsi Suriah dan Palestina harus disebut sebagai pengungsi. Mereka bukan *internally-displaced people* atau orang yang terusir dari tempat tinggalnya, tetapi tetap di negara yang sama.

Sementara itu pengalaman di Kairo, Mesir, agak berbeda. Ethical Journalism Network bekerja sama dengan American University di Kairo menyusun glosari tentang ujaran kebencian di media Mesir. Ujaran kebencian itu banyak yang ditujukan untuk migran dan pengungsi. Tentunya temuan ini cukup menarik.

Liputan mengenai isu migrasi, sebagaimana liputan isu lain, akan berlangsung dengan baik sepanjang jurnalis yang terlibat bekerja dalam lingkungan yang baik. Tidak hanya terkait dengan kontrak kerja maupun hubungan mereka dengan manajemen di kantor masing-masing. Melainkan juga tekanan dari pemerintah dan masyarakat yang seringkali mengurangi semangat jurnalis untuk bekerja secara baik dan menyeluruh.

Salah satu contoh, sebuah laporan International Center for Migration Policy Development menyebutkan di Afrika Utara, jurnalis mulai menggeser liputan tentang pengungsi untuk mengungkap sisi kemanusiaan dari tragedi tersebut, tidak semata terkait dengan sisi keamanan. Ada kesadaran bahwa pengungsi ini akan tinggal sementara di negara mereka. Mereka singgah di sana tidak cuma transit sebelum menuju Eropa, melainkan akan tinggal untuk beberapa waktu.

Namun kesadaran jurnalis itu dihadapkan pada tekanan dari pemerintah. Mereka dipaksa melakukan *self-censorship*. Tindakan semacam ini semestinya tidak dilakukan. Jurnalis seharusnya diberi ruang untuk melakukan tugasnya dengan baik. Ini harus menjadi kesadaran bersama di masyarakat dan di antara pejabat negara. Sensor terkait isu migrasi adalah masalah besar yang terjadi di banyak negara.

Menjelang 2005 belum banyak yang memikirkan agar isu migrasi ditangani oleh *desk* khusus di media massa. Namun, saat ini telah ada kantor berita yang mendedikasikan sumberdayanya untuk meliput isu migrasi. Pertumbuhan jumlah jurnalis yang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang isu migrasi juga mulai kelihatan. Sekarang ini adalah titik balik munculnya kesadaran untuk lebih serius mendalami isu migrasi beserta dampak ikutannya.

Harapannya, perubahan ini juga terjadi di Indonesia. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia. Dari jumlah itu, hanya separuhnya yang terdaftar secara resmi. Ribuan orang Indonesia bekerja di tempat lain. Beberapa dari mereka terdaftar secara legal. Mereka menghasilkan *remittance* dalam jumlah yang besar.

Beberapa media yang menggunakan istilah imigran gelap mendapatkan sorotan. Penggunaan istilah tersebut akan langsung membuat pembaca memandang imigran secara negatif. Ada baiknya penggunaan istilah tersebut dihentikan.

Perlindungan terhadap jurnalis sering didengungkan. Namun, tidak kalah penting adalah perlindungan atas informasi dan kisah yang menarik. Seringkali media tidak mau menindaklanjuti kisah yang menarik padahal pembaca sangat menginginkannya. Ada baiknya kalau hal seperti ini terjadi, editor yang bersangkutan menyampaikannya di komunitas jurnalis investigasi agar dapat ditindaklanjuti. Tidak selalu jurnalis investigasi adalah jurnalis dari negara Barat. Seringkali jurnalis yang handal berasal dari komunitas jurnalis lokal.

Di sini peran Dewan Pers menjadi amat penting. Dewan Pers terbuka untuk mendiskusikan peran apa yang bisa dilakukan untuk membantu memperbaiki kualitas peliputan isu pengungsi dan migran. Isu lain yang tidak kalah penting adalah penyebaran berita bohong, khususnya mengenai pengungsi, yang dimaksudkan untuk memicu rasa permusuhan atau dirancang untuk mengganggu stabilitas pemerintah. Terkait berita bohong ini memang agak dilematis. Jika semakin banyak media yang membahas hal ini, maka akan semakin banyak perhatian tercurah pada berita bohong. Ini sebuah permasalahan yang kompleks.

Ada cara mengatasi berita bohong seperti yang dilakukan BuzzFeed. Situs ini membuat sebuah laman yang didedikasikan untuk berita yang sudah dijamin kebenarannya. Fakta yang disajikan sudah melalui proses verifikasi dan dicek kebenarannya. Situs ini juga menyajikan sebuah halaman yang memuat berita yang meragukan. Pembaca bisa mengakses berita bohong itu agar mereka juga

waspada. Ini salah satu cara untuk mengatasi penyebaran berita bohong.

Berita bohong yang dimuat secara *online* akan dengan mudah dibagikan melalui media sosial dan dampaknya sangat besar. Hal penting untuk mengatasi fenomena ini adalah perlunya meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Masyarakat pengguna *smartphone* perlu diberi pemahaman perlunya mereka berpikir dua kali sebelum menyebarkan informasi melalui media sosial. Mereka juga perlu didorong untuk memikirkan maksud orang yang mengirimkan informasi semacam itu.

Seberapapun banyak berita bohong yang dibuat, sepanjang orang mau berpikir dan kemudian tidak membagikan (*share*) berita semacam itu, berita itu cuma akan tersimpan di dalam *smartphone* dan tidak menimbulkan dampak luas. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk mau memikirkan apa yang mereka bagikan secara *online*. Masyarakat juga harus diajari untuk lebih mengkritisi diri sendiri mengenai apa yang mereka lihat dan seberapa cepat mereka menyebarkan informasi yang mereka dapatkan secara *online*.

Masyarakat pengguna media sosial pun perlu diberi tahu konsekuensi hukumnya apabila mereka menyebarkan berita bohong. Di AS, apabila seseorang mem-*posting tweet* yang mengandung pencemaran nama baik dan mem-*posting ulang (retweet)*, berdasarkan First Amendment, dia pun dapat dituntut karena melakukan pencemaran nama baik. Karenanya, berpikirlah dahulu sebelum mem-*posting ulang*.

Ada beberapa definisi berita bohong. Salah satu definisi yang cukup bernas adalah definisi dari Ethical Journalism Network. Berita

bohong adalah informasi yang secara sengaja dimanipulasi dan disebarakan dengan maksud untuk mengelabui dan membuat orang mempercayai kepalsuan atau meragukan fakta yang ada.

Menurut Plt Direktur Pelaksana dan Direktur Program Berbahasa Inggris *Al Jazeera*, Giles Trendle, salah satu cara untuk mengatasi berita bohong adalah integritas redaksi dan kualitas redaksi. Redaksi media harus dilihat secara optimistis. Perubahan di industri media pun harus dilihat secara optimistis.

Revolusi digital juga melahirkan berita bohong. Namun, harus ada kepercayaan bahwa kualitas redaksi akan mampu mengatasi hal itu. Mungkin akan perlu waktu. Pada akhirnya akurasi, objektivitas, keseimbangan, dan *fairness* merupakan modal untuk menentukan kualitas media.

Terkait penyebaran berita bohong ini, pengguna Facebook dan media sosial di Indonesia dengan mudah akan mendapati berita bohong terkait Rohingya. Hampir setiap orang juga menyebarkan berita bohong terkait Rohingya melalui grup WhatsApp. Hal ini sangat ironis dan sangat berbahaya bagi kelompok Rohingya. Satu hal penting adalah bagaimana media utama seharusnya memiliki tim untuk memeriksa kebenaran foto dan video sebelum mereka ikut menyebarkannya.

Azer Hasret dari Central Asian and Southern Caucasian Freedom of Expression Network (CASC-FEN) yang berasal dari Azerbaijan, telah menyaksikan betapa banyak pengungsi datang dari luar maupun dalam sebuah kawasan. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang wartawan Hungaria menendang seorang pengungsi dari Suriah dan bagaimana mungkin media di Jerman memberitakan berita bohong terkait pengungsi yang melakukan pelecehan terhadap

perempuan di Jerman. Tak satupun dari media itu meminta maaf atas penyebaran berita bohong tersebut.

Mengomentari hal itu, Trendle juga menilai perbuatan semacam itu sangat layak dikedam. Bagaimana mungkin pekerja pers melakukan hal semacam itu. Hal itu merupakan bukti adanya media yang kualitasnya masih amat buruk. Kejadian semacam itu amat disesalkan.

Abou-Zahr memberikan contoh lain terkait perilaku jurnalis yang tidak pantas saat menjalankan tugas di lapangan. Suatu ketika terjadi perselisihan antara seorang lelaki dan pedagang kaki lima yang menjual kopi. Lelaki itu memesan kopi dan si penjual menanyakan apakah ada permintaan khusus untuk kopi itu. Karena masalah sepele itu, mereka terlibat adu mulut yang berakhir dengan penembakan si penjual kopi oleh si pemesan kopi. Kejadian itu tentu merupakan sebuah kejahatan yang mengerikan.

Kemudian datang seorang reporter TV yang tidak menyukai pengungsi Suriah. Reporter perempuan ini pergi ke lokasi penembakan di perbatasan Suriah. Dia seperti tidak memikirkan ucapannya yang disiarkan secara langsung dengan mengatakan bahwa korban memiliki aksen dari negara tertentu. Reporter tersebut seolah tidak mempersoalkan pembunuhan itu hanya karena perselisihan soal kopi dan korban berasal dari negara tertentu. Bahkan setelah diprotes, manajemen stasiun TV tempat dia bekerja tidak merasa perlu menjatuhkan sanksi terhadap reporter tersebut. Bahkan, tidak ada permintaan maaf dari stasiun TV atas bahasa yang digunakan reporter tersebut.

BAB VIII

JURNALISME INVESTIGASI: PERSPEKTIF ASIA TENGGARA



Agustina Kadiani/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Jurnalisme investigasi dipandang sebagai perwujudan dari jurnalisme berkualitas. Ia menggali lebih banyak informasi dan mengungkapkan kebenaran yang membuat banyak orang menjadi tidak nyaman. Walaupun sudah menjadi praktik yang biasa di negara lain, jurnalisme investigasi adalah tradisi yang baru di Asia Tenggara.

Kemunculan media sosial dan revolusi media digital membuat orang sulit untuk menyembunyikan informasi dari publik. Institusi atau entitas lainnya baik di sektor publik maupun swasta dapat diperiksa dengan mudah dengan bertambahnya ketersediaan arsip publik dan pengungkapan fakta oleh narasumber. Adalah hal yang relevan bagi jurnalis untuk selalu memberikan perhatian terhadap upaya menjaga kerahasiaan narasumber dan penggunaan enkripsi dalam berkomunikasi.

Topik yang menarik dalam jurnalisme investigasi berkisar dari korupsi, ketahanan pangan, keamanan produk, dan ketidakadilan di dunia ketenagakerjaan, sampai kerusakan lingkungan. Pada umumnya sejumlah tantangan tetap mengancam di Asia Tenggara dan seluruh benua. Tantangan itu termasuk UU yang bersifat restriktif, konsentrasi kepemilikan media, kurangnya pelatihan dan sumber data pelaporan yang komprehensif, serta serangan fisik terhadap jurnalis yang bermuara pada kematian.

Tantangan ini tidak selalu melemahkan semangat jurnalisme investigasi di Asia Tenggara. Ada langkah awal yang cukup menjanjikan dan ini diharapkan dapat berlanjut untuk mendapatkan momentum. Jurnalisme seperti ini memakan biaya yang besar dan menuntut keberanian praktisi dan pemilik media.

JURNALISME INVESTIGASI DI MEKSIKO

Oscar A Cantú Murguía, advokat dan penerbit *Norte*, koran di kota perbatasan Juarez, Meksiko, mengenang pembunuhan tragis terhadap jurnalis Miroslava Breach pada 23 Maret 2017 di negara bagian Chihuahua akibat tulisannya tentang korupsi dan kejahatan terorganisir.

Dia mengatakan *Norte* telah menyaksikan korupsi di situasi yang berbeda, tidak hanya di ruang publik tapi juga di ranah politik. Ini menimbulkan pelanggaran HAM seperti ancaman, penculikan, dan yang terburuk adalah pembunuhan.

Pembunuhan Breach adalah bagian dari sejarah panjang jurnalisme di mana dia menjadi korban kejahatan terorganisir akibat penerbitan laporannya. Sebagai jurnalis profesional, Breach juga adalah seorang ibu di keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat.

Cantú mengenang masa silam bagaimana dia pada satu malam berbicara dengan Breach melalui telepon, tapi pagi keesokan harinya Breach menghembuskan nafas terakhir setelah ditembak delapan kali di depan rumahnya. Pembunuhan adalah risiko yang dihadapi oleh mereka yang berusaha menerbitkan laporan yang menimbulkan dampak yang besar.

Bagi Cantú, ini membuat dia malu karena pemilik media—termasuk dirinya—tidak menuntut keadilan bagi jurnalis yang dibunuh dalam beberapa tahun terakhir.

Pemilik media bertanggung jawab atas keselamatan jurnalis. Dia berpikir ada sesuatu yang salah karena sinergi antara korupsi, narkoba, dan imunitas tetap menunjukkan taringnya sejak pendirian *Norte* sampai sekarang. Akhirnya, dia menutup koran

itu sebagai bagian dari protes dan jeritan publik akibat rendahnya penghormatan terhadap jurnalisme.

Hari ini jurnalisme menghadapi situasi yang sangat buruk di Meksiko. Ketiadaan penegakan hukum dan kepemimpinan yang kuat dapat menyeret pekerjaan jurnalistik ke dalam bahaya. Asosiasi jurnalis dan Reporters Without Borders menyebut Meksiko sebagai salah satu negara dengan risiko tertinggi untuk jurnalis di Amerika Latin. Sebagai informasi tambahan, selama 15 tahun terakhir bahaya dan risiko yang dihadapi jurnalis di Meksiko bertambah dua kali lipat.

Banyak jurnalis dibunuh namun tidak ada kejelasan mengenai penanganan kasus kejahatan yang menimpa mereka. Selama 15 tahun kekuasaan Enrique Peña Nieto' sebagai Presiden, tercatat lebih dari 2.000 kematian yang tidak alamiah di negara itu. Dan Meksiko diketahui adalah surga bagi impunitas dan tidak ada perlindungan yang layak bagi jurnalis.

Cantú melanjutkan ceritanya bahwa pemerintah Meksiko tidak mampu mengatasi organisasi penyelundup narkoba. Meksiko tidak dalam suasana perang tapi dianggap sebagai negara gagal. Korupsi mewabah, dan praktik ini bisa melanggengkan impunitas. Di beberapa negara bagian, jurnalis menjadi buronan atau dijebloskan ke dalam penjara.

Penutupan *Norte* merupakan bentuk undangan kepada publik untuk berpartisipasi mendukung profesi jurnalistik dan memastikan sistem demokratis pemerintah tetap berjalan. Pers bebas adalah pilar pembangunan di negara manapun karena kebebasan berekspresi adalah norma dan hak warga negara. Strategi baru diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dan jurnalisme yang dipraktikkan di seluruh penjuru dunia akan membuka jalan bagi pers yang bebas untuk membantu menghadirkan pemerintah yang lebih kuat dan demokratis.

Cantú mengatakan jika melihat Program Penilaian Siswa Internasional (PISA), rata-rata tingkat pendidikan Meksiko setara dengan kelas dua sekolah menengah pertama. Bagaimana mengharapkan orang dengan tingkat pendidikan seperti itu bisa membela demokrasi dan keadilan.

Dia menekankan perlunya kebijakan publik internasional untuk memperkenalkan aturan hukum di tingkat pendidikan dasar. Mekanisme pendanaan juga dibutuhkan untuk jurnalisme investigasi, jurnalisme kritis yang bebas dari manipulasi dan kontrol pemerintah. Media independen lokal di Meksiko tidak berdaya, dan jurnalisme kritis juga terancam punah karena kejahatan dan campur tangan pemerintah.

Breach berhak mendapatkan keadilan, begitu juga semua jurnalis yang dibunuh. Seruan jurnalis kepada warga Meksiko adalah jangan sampai membiarkan jurnalis berjuang sendirian, tapi juga ikut menjaga perdamaian, kebebasan, dan demokrasi, katanya.

JURNALISME INVESTIGASI DI NEGARA LAIN

Redaktur *Tempo*, Wahyu Dhyatmika, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang jurnalisme investigasi di Indonesia yang berubah dalam 3 tahun terakhir karena semakin tingginya minat jurnalis muda terhadap jurnalisme investigasi.

Setelah *Tempo* menerbitkan laporan tentang Panama Papers, ada banyak pertanyaan yang muncul sekaligus juga tawaran untuk melakukan kolaborasi, dan sejumlah proyek sedang berjalan di mana *Tempo* dan banyak media lainnya mencoba untuk mencari bentuk *platform* bersama untuk jurnalisme investigasi.

Menurut dia, ini merupakan perkembangan yang menjanjikan, walaupun pada kenyataannya, ketika merujuk pada model bisnis yang ada dengan iklan dan trafik, perjalanan jurnalisme investigasi masih jauh dari sempurna karena ia bukan merupakan lanskap yang bisa mengakomodasi kemajuannya.

Dia menyarankan perlunya sebuah model bisnis baru untuk menanganinya dan dia diberitahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir sejumlah *startup* media telah mencoba mencari cara baru untuk pendanaan jurnalisme investigasi.

Dhyatmika cukup optimistis dengan jurnalisme investigasi, di mana periode krusial dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan perjalanan jurnalisme investigasi. *Startup* baru itu harus mampu membuktikan bahwa model bisnis yang mereka pakai bekerja sesuai harapan dan kualitas berita yang dihasilkan sesuai dengan standar, ujarnya.

Redaktur Eksekutif *Rappler*, Maria Ressa, menjelaskan jurnalisme investigasi dalam konteks Filipina. Menurut dia, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, termasuk pemilihan pemimpin otoriter yang populer akibat kemarahan rakyat terhadap demokrasi yang gagal menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjanji untuk memerangi narkoba dengan perang anti-narkoba. Dari Juli 2016 sampai akhir Januari 2017, sedikitnya 7.000 orang terbunuh dalam 3.000 kali operasi yang tidak memiliki dasar hukum.

Investigasi *Rappler* menemukan mesin propaganda besar yang memproduksi berita bohong, yang sumbernya dikutip dari mana saja untuk membenarkan agenda tertentu, dan menerbitkan laporan dengan konten yang dipertanyakan.

Jurnalis melakukan bukan hanya pelaporan investigasi dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik, tapi juga meyakinkan pembaca bahwa mereka membuat laporan yang benar, tuturnya.

Anas Aremeyaw Anas, wartawan investigasi Ghana, menunjukkan optimisme yang sama dengan Dhyatmika terkait dengan perkembangan jurnalisme investigasi. Dan apa yang diperlukan disini adalah ketekunan dan tekad yang kuat untuk memperjuangkannya. Menurut dia, jurnalisme investigasi, terutama di Afrika, harus dilihat dari konteks bahwa ia merawat demokrasi. Perlu juga untuk disadari bahwa demokrasi di Afrika yang baru berumur 50 tahun dan di Barat yang sudah berusia 200 tahun memiliki banyak perbedaan.

Dia juga menyoroti perilaku patronase yang terlihat ketika orang datang ke Afrika selama 2 sampai 3 hari, dan kemudian menjelaskan situasi kawasan itu seperti mereka mengetahui segalanya. Bukan seperti ini caranya karena ini adalah bagian dari jurnalisme masa lalu yang tidak perlu lagi dipraktikkan karena orang di kawasan itu bisa membuat sendiri laporan mereka. Menurut dia, masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk membuat laporan sendiri lebih baik dibandingkan dengan pendatang. Mereka menyadari ada masalah di sekitar mereka dan perlu ada sejenis *platform* untuk mengupas isu yang ada di Afrika. Media mungkin telah mengubah kebijakan pengiriman awaknya untuk membuat laporan yang mengupas isu lokal.

Direktur Eksekutif Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), Rana Sabbagh, mengungkapkan perspektif jurnalistik Timur Tengah sebagai salah satu kawasan paling berbahaya di dunia. Dia mengatakan bahwa ada tugas untuk mempromosikan jurnalisme yang baik, guna memastikan pertanggungjawaban publik dan kemerdekaan pers, apalagi jika merujuk pada Indeks Kemerdekaan Pers Dunia 2017 yang menunjukkan gambaran suram tentang perlakuan terhadap pers.

Mesir, misalnya, adalah salah satu penjara terbesar di dunia untuk insan pers. Sabbagh mengatakan timnya bekerja sama dengan *BBC Arabic* menyelidiki kematian seorang tentara Pasukan Keamanan Pusat Mesir. Dari hasil investigasi diketahui anggota timnya dituduh bekerja sebagai mata-mata CIA yang mencari sesuatu untuk melemahkan Mesir.

BBC dituding mamata-matai Mesir dan jurnalisnya pun dipecat. Tunisia, salah satu negara dengan kemerdekaan pers yang relatif lebih baik, menyaksikan indeks kemerdekaan persnya turun satu poin. Karena itu, jurnalis ARIJ melakukan investigasi dengan *Aljazeera English* tentang kekerasan atau penyiksaan di negara itu. Namun, banyak orang Tunisia tidak menyukai *Al-Jazeera* yang dituding bias dalam liputan beritanya soal revolusi. Tapi, setahun kemudian para jurnalis itu memenangkan penghargaan dan orang mulai menghargai mereka. Tunisia juga telah membentuk semacam komisi pendidikan yang terkait dengan pers.

Sabbagh selanjutnya mengatakan bahwa situasi di negaranya Yordania tidak lebih baik dari negara yang disebutkan sebelumnya. Memang tidak ada jurnalis yang hilang tapi indeks kemerdekaan pers negara itu juga turun. Jurnalis mendapat tekanan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari kelompok ISIS Iran, Irak, Suriah, dan Yaman. Tapi organisasi yang telah dipimpinnya selama 11 tahun itu sudah bekerja di Semenanjung Arab selama beberapa tahun untuk membuka bab baru sejarah jurnalistik di kawasan tersebut. Sabbagh akan terus mendorong semaksimal mungkin, sementara itu dia juga harus bekerja sama dengan sejumlah organisasi jurnalis, termasuk International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan Institute for Cultural Relations Policy (ICRP).

Jurnalis investigasi AS, Scilla Alecci, menyambut baik pendapat positif Dhyatmika dengan catatan masih ada sejumlah serangan

terhadap media dan maraknya penyebaran berita bohong dalam beberapa tahun terakhir.

Alecci mengklaim banyak perusahaan media di AS merekrut jurnalis investigasi, dan sejak pergi dari Asia pada 2014 dia melihat aktivitas investigasi yang semakin besar di kawasan ini.

Situasi di masing-masing negara berbeda dan sangat sulit untuk menyamaratakan segalanya. Di Italia, misalnya, jumlah jurnalis investigasi meningkat. Generasi muda dan tua merespons dengan sangat positif pendirian fasilitas jurnalisisme investigasi di sana.

JURNALISME INVESTIGASI: TANTANGAN DAN RISIKO

Ressa mengatakan jurnalisisme investigasi memiliki banyak tantangan dan risiko seperti yang dialami oleh reporternya yang bernama Alicia dan seorang fotografer yang pergi ke *ground zero* di Delpan, lokasi pembunuhan pertama dalam perang melawan narkoba di Filipina yang dimulai pada Juli 2016. Intinya ketika kasus ini diinvestigasi dengan mengumpulkan data dari internet, Facebook, Ardia, beberapa komentar, dan juga *tag*, ditemukan bahwa sekelompok kecil penjahat memiliki sampai 26 akun palsu. Akun palsu itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tiga juta akun lain termasuk, misalnya, halaman kampanye yang ada pada waktu itu dan halaman kampanye mantan calon wakil presiden Bongbong Marcos, putra mendiang diktator Ferdinand Marcos. Jadi, menurut dia, pertanyaannya adalah bagaimana segelintir orang ini hadir dan mempengaruhi masyarakat dengan propaganda? Dan bagaimana mereka bisa mempengaruhi audiens dari perusahaan media yang sudah lama beroperasi di Filipina?

Selanjutnya, Ressa mengemukakan ancaman juga mengintai jurnalis investigasi. Misalnya, dia dan beberapa jurnalis yang mengikuti

Presiden Rodrigo Duterte diserang secara agresif di media sosial dalam bentuk berita palsu yang dapat mempengaruhi orang dengan ujaran bernada seksis atau objektifikasi seksual perempuan.

Hal seperti ini terjadi dan menjadi bagian dari hidupnya sejak Oktober 2016. Menurut Ressa, ketika risiko dan tantangan itu mulai muncul, data yang masuk tidak cukup, seseorang harus berpikir tentang kehati-hatian ketika memverifikasi data. Akun palsu ini bisa *repost* satu postingan sampai ribuan kali dalam semenit, jadi bisa disimpulkan bahwa postingan yang disebarluaskan sampai ribuan kali dalam semenit itu tidak riil.

Di sini perlu dialog dengan Facebook dan Google untuk meminta bantuan mereka, karena faktanya mereka adalah pengawas dunia *online*. Para panelis di konferensi World Press Freedom Day 2017 gagal mengangkat isu ini. Filipina dan Indonesia sangat terpengaruh oleh Facebook and Google, jadi bantuan kedua raksasa ini sangat diharapkan.

Pada waktu yang bersamaan, Anas menyampaikan pandangan yang lebih provokatif dalam melihat tantangan dan risiko yang dihadapi oleh jurnalis investigasi. Dia memakai masker di sesi pleno World Press Freedom Day 2017 di Jakarta sebagai penegasan betapa berbahayanya risiko yang dihadapi jurnalis. Tapi, menurut dia, laporan apapun tidak sebanding dengan nyawa seseorang.

Pada 2016 Anas memproduksi sebuah film bertema keadilan dan meliput korupsi tingkat tinggi, di mana 34 hakim dan 146 pegawai ditahan karena terlibat praktik itu atau menerima pelicin. Faktanya, mereka adalah pembuat keputusan akhir bagi masyarakat dan jika ada kasus suap maka biasanya akan ada perlakuan yang tidak adil di depan hakim. Seandainya saja, misalnya, hakim yang mengadili suku Tutsi dan suku yang berlawanan di Rwanda adil maka perang mungkin sudah berhenti, ujarnya.

Anas berpendapat sebaiknya karya jurnalistik dan bukti yang ada dibawa saja ke pengadilan, dan dia pun bersedia tampil di pengadilan untuk membeberkan bukti yang dimilikinya. Jika liputan jurnalis tidak sinkron dengan penegakan hukum dan sistem peradilan maka hasil liputan yang bagus sekalipun akan mudah dilupakan orang. Upaya tersebut memang kurang menyenangkan, menyita banyak waktu dan energi, tapi hasilnya sangat memuaskan.

Dia mengatakan bahwa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada publik tidak harus dengan cara menerbitkan berita dan kemudian jurnalisnya bisa tidur dalam senyuman, tapi harus ada konvergensi antara jurnalisme dan penegakan hukum. Dengan begitu, jurnalisme dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

Sabbagh mengemukakan pandangannya bahwa dalam melaksanakan tugas, jurnalis investigasi berharap dapat menjadi populer dan pada akhirnya menjadi politisi. Harapan seperti ini menghina banyak orang atau membuat mereka tersinggung, jadi jurnalis harus tahu apa yang akan dilakukan.

Beberapa tahun lalu, sejumlah jurnalis di Suriah mengalami hal yang buruk ketika tim Sabbagh melakukan investigasi terhadap kurikulum yang didukung oleh ISIS. Mereka bekerja dengan seorang fotografer lepas yang pergi ke sebuah fasilitas percetakan dan mengambil gambar di sana dengan kamera tersembunyi. Dia akhirnya ditahan dan seminggu kemudian ISIS memenggal kepalanya. Dua jurnalis yang masih hidup terpaksa keluar Suriah dan sekarang menetap di Eropa dan Turki demi keselamatan diri mereka.

Pada sisi lain, Sabbagh mengungkapkan bahwa jurnalis di Yaman juga terpaksa hengkang dari negara itu setelah menerima ancaman, dan ada lima jurnalis Suriah yang terpaksa pergi karena tidak

diterima lagi di negara mereka. Dokumentasi ini harus dikumpulkan dan dipresentasikan di pengadilan karena ini adalah bagian dari tugas jurnalis. Harus ada data dan fakta yang tersedia untuk menghadapi argumen lawan.

Sabbagh mengenang ketika banyak orang menertawai dirinya dan timnya, sebagai retrospeksi, ada 410 investigasi yang telah dilakukan oleh Sabbagh dan timnya dalam 10 tahun dan sebanyak 1.300 jurnalis dipenjara dalam kurun waktu itu. Dia bertekad untuk terus mendorong timnya untuk menggunakan prinsip seperti mengikuti aliran uang dan pemakaian pemindai digital. Dan kalau ada orang yang berniat mengembangkan jurnalisme investigasi 10 tahun dari sekarang, “Saya rasa nanti kami akan meraih penghargaan untuk sistem yang kami kembangkan ini,” ujarnya.

Jurnalis berkualitas harus tetap ada untuk menghadapi informasi palsu yang sekarang berkembang pesat. Dia setuju bahwa Google dan Facebook memiliki tanggung jawab moral untuk menarik konten yang berisi berita negatif dan ini adalah bagian dari praktik jurnalistik yang baik.

AKSES UNTUK JURNALISME INVESTIGASI

Terkait dengan akses, Alecci mengatakan dia biasanya bekerja dalam sebuah konsorsium bersama pihak lokal. Dia sering kali bergantung pada jurnalis lokal dengan pengetahuan tentang negara mereka untuk mengakses dokumen dan informasi lainnya. Dia mengatakan dirinya selalu mengingatkan mereka untuk tidak melanggar hukum. Misalnya, untuk investigasi tertentu, stasiun televisi ingin melakukan peliputan *undercover*. Pertanyaan umumnya adalah: Apakah peliputan *undercover* benar-benar diperlukan, apakah jika tidak dilakukan maka tidak ada informasi yang diperoleh? Pertanyaannya

dapat juga seperti ini: Dapatkan jurnalis memperoleh informasi dengan cara selain melakukan penyamaran?. Jurnalis dapat meminta informan atau seseorang dari negara lain melakukan sesuatu untuk mereka. Mungkin saja orang dari negara tertentu memiliki akses yang lebih mudah ke lokasi tertentu yang diinginkan oleh jurnalis.

Alecci cukup menyadari bahwa dia bergantung pada pengetahuan jurnalis lokal dan dia bukan tipe jurnalis yang mendapatkan informasi dengan cara melanggar hukum.

Pada akhirnya saat jurnalis melakukan reportase investigasi, dampaknya terlihat jelas. Tidak ada masalah sama sekali, bahkan jika peliputan memiliki muatan yang berbeda, kecuali untuk situasi dengan sumber yang ilegal maka itu dipertanyakan.

Dhyatmika menyinggung situasi di Papua dan Papua Barat yang mencerminkan kasus yang sangat spesifik dalam hal kebebasan akses. Dibandingkan dengan sejawat asing, jurnalis Indonesia tidak memiliki masalah untuk terbang ke sana dan melaporkan kasus yang terjadi di suatu tempat di kedua provinsi itu. Aparat keamanan yang didukung oleh militer ada di mana-mana ketika *Tempo* mengirim reporternya beberapa waktu yang lalu untuk meliput isu transportasi di sana. Ada satu-dua polisi yang membuntuti untuk memastikan sang jurnalis tidak menemukan atau melakukan sesuatu yang dianggap tidak perlu.

Ini adalah tantangan yang dihadapi semua jurnalis yang berusaha meliput isu besar untuk kepentingan publik. Sekarang realitasnya seperti ini dan jurnalis harus berusaha menerimanya dan mereka harus memberikan advokasi tentang hal ini, ujarnya.

Sekarang sudah ada transparansi yang lebih besar di Papua, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sedang mencoba mendorong

pemerintah untuk menjadikan Papua lebih terbuka untuk jurnalis. Tapi sekarang sepertinya ada kesenjangan pemahaman. Kadang-kadang jurnalis di Jakarta tidak mengetahui situasi terkini di Papua dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat Papua.

Di samping itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kapabilitas jurnalis lokal di Papua. Kenyataannya, jumlah media di Papua sudah mencukupi dalam beberapa tahun terakhir namun mereka masih memerlukan dukungan. Dan jika kawasan ini memiliki media yang sehat dalam keuangan, solid, dan kuat maka dimungkinkan untuk melakukan serangkaian diskusi untuk membahas isu Papua.

Kembali ke konteks Afrika, Anas mengatakan batasannya cukup jelas di sini, ada UU yang harus dipatuhi. Ghana, misalnya, mengadopsi Common Law model Inggris. Cakupan UU ini cukup jelas.

Jika ada isu yang bermuatan kepentingan publik di sana, pertanyaannya adalah: Bagaimana jurnalis mendapatkan rincian isu itu. Mereka dapat memperolehnya dari *whistleblowers* atau dari pengamatannya di masyarakat itu sendiri.

Dan ketika ceritanya ada di meja jurnalis dan mereka melihat harus dilakukan penyamaran, maka boleh saja dilakukan tapi ini adalah cara terakhir yang bisa ditempuh jika cara lain tidak berhasil. Yang jelas jurnalis tidak mengambil semua cerita begitu saja karena dia harus memilah mana yang relevan dan mana yang tidak. Dalam penyamaran kadang-kadang memang harus dilakukan semacam manipulasi untuk mendapatkan informasi, tapi yang jelas semuanya adalah untuk kepentingan publik.

Anas selanjutnya mengaku dia pernah menyamar sebagai pasien di satu rumah sakit jiwa, pernah pula menyaru sebagai narapidana

misalnya dan dalam semua situasi itu dia sesungguhnya berada di sana, di institusi publik. Sebagian orang mengatakan dia tidak seharusnya melakukan hal itu, tapi pada akhirnya yang menjadi intinya adalah dia sedang berjuang untuk kepentingan publik.

Menurut dia, ada peraturan tertentu yang harus dihormati, tapi kepentingan publik adalah segala-galanya. Dan ada hal yang juga harus dilihat ketika meliput, misalnya ada orang yang sudah ditangkap karena melakukan korupsi. Sebetulnya orang itu sudah melakukan praktik itu berkali-kali sehingga harus dilaporkan apa adanya dengan dukungan bukti, bukti bahwa hal ini sudah dilakukan berkali-kali dan untuk mendapatkan bukti itu kadang-kadang jurnalis harus melakukan penyamaran.

Anas setuju jika ada jurnalis yang terpaksa melakukan tipuan demi kepentingan publik maka tindakan itu dibenarkan, dan memang semuanya harus dilihat secara berhati-hati sekali sebelum memutuskan melakukan penyamaran

Ressa tidak setuju dengan Anas. Menurut dia, hasil bukan hal yang terpenting sehingga jurnalis membenarkan segala cara. Jurnalis perlu melihat pendekatannya karena pasti ada UU yang mengaturnya. Jika tidak ada peraturan maka tidak ada yang dapat dipertahankan. Jika seseorang, misalnya, memiliki akuntabilitas terhadap kepentingan publik maka dia seharusnya menghormati UU.

Anas merespons pernyataan Ressa dengan mengatakan bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak dapat dilakukan di lapangan. Ada cerita yang tidak bisa diungkap kecuali mereka melakukan penyamaran. Cerita seperti ini sangat banyak di dunia dan jika digali dengan cara biasa maka tidak akan terungkap.

Menghormati hukum itu penting, tapi ada kasus tertentu yang tidak akan terungkap jika tidak ada usaha yang berbeda. Kadang-kadang dari sudut pandang ini, jurnalis melawan atau melanggar hukum.

Mengenai kerahasiaan pelapor, Sabbagh mengatakan bahwa UU di banyak negara Arab melindungi narasumber, namun kadang-kadang praktiknya dapat berbeda di lapangan. Pelapor atau *whistleblower* di Yordania dilindungi oleh UU, tapi tidak ada yang melindungi kebebasan untuk mengakses informasi. Saat memberikan pelatihan kepada jurnalis, tetap harus diberikan semacam pemahaman bahwa mereka harus berhati-hati sekali kalau berbicara dengan orang yang menyimpan banyak rahasia.

Sabbagh mendorong untuk selalu bertemu tatap muka dan menggunakan teknologi *mobile* dan juga meminta mereka tidak menyebut nama sendiri atau nama informan ketika menyimpan data di komputer. Kalau misalnya mereka harus memakai kamera tersembunyi, Sabbagh menyarankan mengikuti panduan dari *BBC* dan pengambilan gambar secara tersembunyi dibolehkan sebagai cara terakhir yang bisa dilakukan sepanjang untuk kepentingan publik.

Strategi penyamaran ini diterapkan di tempat penampungan anak yang memiliki masalah kejiwaan di Yordania. Data yang diambil selama 3 minggu secara diam-diam menunjukkan mereka disiksa dan dilecehkan secara seksual. Disimpulkan ini tidak terjadi secara insidental. Sabbagh dan tim melakukan hal yang sama di Tunisia.

Terkait dengan akses terhadap informasi yang sulit soal perdagangan narkoba, Ressa mengatakan ada kesamaan situasi di Indonesia dan Filipina. Narkoba menjadi masalah utama di Filipina. Masalahnya ada di peliputan. Ini tidak hanya masalah cara berbicara dengan orang tapi juga untuk mendapatkan data. Jadi misalnya otoritas

terkait mengatakan bahwa ada 1,8 juta pengguna narkoba di Filipina tapi Presiden mengklaim ada 4 juta. Jadi siapa yang benar? Dan lebih sulit lagi untuk memilah informasi seperti itu.

Jadi memang ada kebebasan berekspresi di negara tersebut, tapi untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tetap saja sulit. Dalam konteks Filipina, ada pertanyaan mengapa Rodrigo Duterte bisa terpilih menjadi presiden. Sebelum kampanye kepresidenan, narkoba menjadi isu nomor 8, tapi selepas kampanye menjadi isu nomor satu.

Waktu itu Duterte berjanji memberikan solusinya. Mungkin dulu ada rasa takut untuk menabuh genderang perang terhadap narkoba. Jadi persoalannya bukan saja soal kiat mendapatkan informasi dari pemerintah tapi juga cara menentukan akurasi informasi pasca pergantian kepemimpinan nasional. Proses verifikasi dengan orang yang ada di lapangan juga menjadi masalah tersendiri.

Dalam hal negara tidak menjamin hak atas informasi, Dhyatmika mengemukakan bahwa jurnalis akan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka. Pelapor atau informan bisa diandalkan untuk mendapatkan informasi. Kemudian ada *platform* yang terbukti efektif di Belanda dan dicoba diterapkan di Indonesia.

Anas menambahkan walaupun negara tidak menjamin hak untuk mendapatkan informasi seperti di Afrika, ada banyak cara untuk mendapatkannya. Banyak sekali *platform* yang bisa dipakai untuk itu dan kerja sama dengan organisasi internasional juga dapat membantu. Media internasional dapat membantu mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Faktanya bahwa UU saja tidak cukup untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi. Informasinya ada tapi ada saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membatasinya.

Jurnalis yang negaranya sudah punya UU terkait tetap saja tidak mendapatkan akses yang utuh ke informasi. Hanya bergantung pada UU saja tidak cukup. Jurnalis harus cerdas dan selalu berpedoman bahwa tidak ada satupun aparat pemerintah yang rela memberikan informasi yang ada di tangan mereka kepada jurnalis, tidak akan pernah terjadi.

Jadi jurnalis harus melakukan berbagai cara untuk membuat laporan. Entah ada UU atau tidak itu tergantung kepada jurnalis untuk memastikan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan dunia di luar sana sehingga mereka dapat menghasilkan laporan.

Tentang teknologi sebagai alat jurnalisme investigasi, Alecci menyatakan timnya memiliki *programmer* dan *engineer* untuk misalnya mengirimkan informasi yang aman, menggunakan enkripsi untuk berbicara dan berkomunikasi dengan kolega. Jadi teknologi itu penting sebagai *development tools* dan bisa digunakan untuk melindungi narasumber dan sejawat.

Menyangkut program pelatihan, Anas mengatakan hal tersebut sudah dilakukan bersama tim dengan peluncuran Africa Investigates. Dalam program ini Anas dan tim pergi ke beberapa negara Afrika untuk melatih jurnalis. Peserta diberi tugas membuat laporan. Mereka tidak sekedar membuat laporan, tapi juga harus dapat mengidentifikasi isu yang berdampak luas terhadap masyarakat. Selesai pelatihan, peserta diharapkan mampu melakukan liputan dengan cara yang benar.

BAB IX

DAMPAK BERITA PALSU DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP JURNALISME



Agustina Kadiani/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Berita palsu (*fake news*) demikian marak menghiasi linimasa media sosial beberapa waktu terakhir. Bahkan perkembangan *fake news* sudah masuk tahap serius karena tidak lagi dilakukan oleh perorangan melainkan juga difabrikasi secara masal. Posisi media arus utama mulai terancam akibat maraknya berita bohong.

Frane Maroevic, Direktur OSCE Representative on Freedom of the Media, dalam acara World Press Freedom Day di Jakarta, Mei 2017 menyatakan *fake news* sebetulnya merupakan terminologi baru. Namun aktivitas terkait hal itu misalnya menggunakan berita palsu di dalam media bukanlah hal baru.

Di masa lalu, berita palsu disebut sebagai kebohongan. Sekarang disebut sebagai *fake news* atau ada juga yang menyebut sebagai fakta alternatif. Meski begitu, *fake news* berbeda dengan propaganda yang buruk meskipun keduanya didasarkan pada kebohongan dan informasi yang salah.

Tantangan terbesar adalah bagaimana pemerintah menghadapi *fake news*. Beberapa di antaranya membuat regulasi atau UU tertentu yang bertujuan agar fenomena *fake news* bisa dikurangi. Namun ada semacam standar yang disepakati di dunia internasional, terkait persoalan hukum, HAM, dan larangan propaganda.

Larangan propaganda diatur dalam Pasal 20 Perjanjian Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, sementara larangan pelanggaran HAM diatur dalam Pasal 17 Konvensi Eropa Tentang Hak Asasi Manusia.

BATASAN *FAKE NEWS*

Maroevic menyatakan *fake news* adalah terminologi yang cukup besar dan bisa disalahgunakan karena setiap orang bisa memiliki pemahaman dan definisinya masing-masing. Misalnya ketika ditanya kepada 10 orang, apa itu *fake news*, maka akan didapatkan 7,8 atau bahkan 10 jawaban yang berbeda. Kondisi ini menjadi masalah dalam proses pembuatan regulasi yang membatasi *fake news*.

Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, menyatakan *fake news* di Indonesia dimaknai sebagai informasi bohong, baik itu informasi yang dari awal sudah difabrikasi atau memang sengaja dipelintir dan kemudian disebarluaskan melalui kanal informasi. *Fake news* juga memiliki rentang sangat lebar, dari mulai sekedar satir hingga isu yang difabrikasi.

Dalam konteks ini, sesungguhnya Indonesia berada dalam situasi sangat serius. Sebab jika dilihat perkembangannya, pembahasan soal *fake news* bukan lagi di kalangan media atau masyarakat, tetapi juga sampai ke Presiden yang dalam berbagai kesempatan selalu menyinggung soal *fake news* ini.

Pada awalnya, *fake news* dilihat sebagai soal kompetisi kebenaran yang kemudian tersaji di *platform* media sosial versus media *mainstream*. Sehingga kemudian, orang masih percaya bahwa untuk mencari kebenaran tentang apakah itu *fake news* atau bukan, dapat dilakukan melalui media *mainstream*. Akan tetapi kemudian, *fake news* ini menemukan dimensi lain pada saat memasuki kontestasi politik.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki wilayah yang sangat besar, ada 34 provinsi, 514 daerah tingkat II yang secara bertahap melakukan pemilu presiden, pemilu parlemen, dan pemilihan kepala daerah. Pada

saat terjadi hajatan demokrasi inilah *fake news* menemukan dimensi baru, dimensi politik yang membuatnya berkembang, dan tumbuh dengan sangat cepat sehingga menjadi ancaman serius bagi Indonesia.

Pada 2017, Indonesia menggelar 101 pemilu lokal, tujuh di antaranya di tingkat provinsi dan sisanya adalah tingkat kabupaten/kota. Pada 2018, ada 171 pemilu lokal, dan pada 2019 akan ada pemilu presiden dan juga pemilu parlemen. Hal ini akan membuat Indonesia dari tahun ke tahun akan berhadapan dengan persoalan *fake news*. Kondisi ini menjadi persoalan besar, karena *fake news* tidak hanya dikaitkan dengan isu politik, namun juga isu lain seperti sentimen agama, ras, golongan, dan lain sebagainya.

Di sinilah *fake news* bukan hanya mendapatkan konteksnya dalam ranah politik, tetapi sudah mulai mengancam eksistensi pers sebagai pilar ke-4 demokrasi. Tidak heran jika banyak *fake news* yang awalnya hanya berkembang di media sosial, kemudian diadopsi begitu saja, masuk ke media *mainstream* tanpa proses verifikasi. Dengan begitu muncul anggapan masyarakat bahwa media sudah tidak dapat dipercaya lagi. Media tidak lagi menjadi sebuah alternatif kebenaran tentang *fake news*, justru media telah berpartisipasi dalam penyebarannya. Inilah fase terjadinya delegitimasi media.

FAKE NEWS DAN MEDIA SOSIAL

Fake news dan media sosial sebetulnya telah banyak dikaji oleh berbagai kalangan. Misalnya Áine Kerr, Kepala Bidang Journalism Partnership Facebook, telah banyak melakukan verifikasi tentang konten yang berisi kebenaran dan juga *fake news*. Mantan redaktur pelaksana *Storyful* itu, menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukannya untuk membangun kemitraan jurnalisme di seluruh dunia.

Selama hampir 7 tahun Kerr menghabiskan waktunya untuk melakukan reportase di parlemen Irlandia, Kerr berlatar belakang jurnalisme tradisional. Namun di sana dia berusaha melakukan verifikasi tentang berita dengan konten yang berisi kebenaran. Kini di Facebook hal tersebut juga menjadi perhatiannya. Bersama Facebook dia benar-benar serius menanggapi isu ini dan sangat bertanggung jawab dengan isi dari berita yang dipublikasikan.

Mark Zuckerberg sendiri, menurut Kerr, sangat berkomitmen menangani isu *fake news*. Hal tersebut dibuktikan dengan peluncuran Journalism Project oleh Facebook. Proyek ini diluncurkan karena Facebook memiliki komitmen yang kuat untuk menjauhkan *fake news* dari *platform*-nya. Sebab *fake news* dianggap dapat merusak, menyesatkan, dan menimbulkan ketidakpercayaan. Kerr mengemukakan bahwa Facebook benar-benar peduli dengan kebenaran dalam *platform*-nya. Hal ini untuk menghindari daya rusak yang kuat akibat *fake news* terhadap kehidupan publik.

Dia mengklaim Facebook merasa mempunyai tanggung jawab yang tinggi, sebab setiap harinya banyak orang yang menggunakan *platform*-nya. Makanya jauh-jauh hari perusahaan itu mulai menggodok rencana tentang misi utamanya untuk menanggulangi *fake news* dengan melibatkan masyarakat luas. Dengan melibatkan publik secara aktif perusahaan ini berharap dapat menurunkan jumlah *fake news* secara signifikan. Namun demikian, pihaknya menyadari bahwa *fake news* juga adalah gejala dari masyarakat luas. Karenanya, solusinya memerlukan kolaborasi dengan semua orang, baik jurnalis, edukator, akademisi, periset maupun yang lainnya.

Pada dasarnya, menurut Kerr, *fake news* adalah hal yang berkaitan dengan kepercayaan. Karenanya Facebook telah melakukan beberapa hal. *Pertama*, ia memberikan insentif keuangan sebagai

kompensasi untuk keinginan menyebarkan *fake news*. Kedua, pihaknya ingin memastikan bahwa publik bisa memonetisasi konten di Facebook. Hal ini dilakukan Facebook dengan mengembangkan produk yang dapat memastikan bahwa *fake news* akan lebih berkurang jumlahnya.

Ketiga, Facebook membantu masyarakat untuk lebih peduli mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak. Dalam hal ini Facebook mendorong publik untuk bisa memilih kebenaran ketimbang *fake news*. Pihaknya juga bekerja sama dengan kalangan industri untuk mencari solusi terbaik dan berinisiatif melakukan integrasi jurnalistik, melalui kolaborasi dengan penerbit, universitas, dan organisasi pihak ketiga di seluruh dunia. Bahkan Facebook juga mengupayakan penyediaan pendanaan sekitar US\$40 juta untuk menangani masalah *fake news*. Inilah yang disebutnya solusi tingkat tinggi yang coba diupayakan oleh Facebook.

KEBIJAKAN DI SEJUMLAH NEGARA

Terkait persoalan kebijakan publik/*public policy* tentang *fake news*, Sophie Busson, Penasehat Advokasi, Reporters Without Borders, menyatakan bahwa hal tersebut bergantung pada definisi yang disematkan kepada *fake news* oleh pemerintah di setiap negara. Namun demikian, satu hal yang sangat penting yaitu isu *fake news* harus ditangani dengan hati-hati dan dilakukan dengan pendekatan proteksi terhadap kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.

Menurut Busson, di beberapa negara ada semacam pemangsa atau *predator* kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu hal ini harus diperhatikan secara khusus dalam penggodokan setiap kebijakan. Contohnya pemerintah Afrika Selatan mencoba untuk mengembangkan kontrol *online* terhadap media guna menanggulangi

fake news. Namun upaya kontrol informasi tersebut justru sangat berisiko, karena pemerintah dapat dituduh memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu.

Di Mesir, jurnalis juga sering dituduh menyebarluaskan *fake news* pada saat ada kritik untuk pemerintah, atau saat ada laporan mengenai isu yang sensitif. Konsep meredam *fake news* juga digunakan pemerintah untuk bisa mengontrol media. Hal ini mengakibatkan banyak sekali sensor di perusahaan media. Jadi di Mesir banyak sekali jurnalis yang dipenjara.

Di Bahrain, adanya jurnalis warga telah mendorong terjadinya kampanye Nazir Hajam. Dia dituduh sudah mempublikasikan *fake news* tentang suatu kasus yang melibatkan pemerintah. Hajam akhirnya dipenjara karena menyuarakan masalah HAM pada 2015. Jadi ada banyak sekali *predator* untuk kemerdekaan pers yang menggunakan konsep ini untuk bisa membungkam media dan jurnalis.

Oleh sebab itu, negara Barat berkeinginan untuk meregulasi hal tersebut. Di Jerman, ada RUU untuk mengatasi *fake news* di media sosial. Di Italia, parlemen negara itu juga menggodok RUU sejenis untuk mengantisipasi penyebaran *fake news*. Prancis juga tengah mengupayakan hal serupa. Para legislator di negara itu mulai membahas RUU tersebut setelah melihat dampak *fake news* yang sangat luas. Hal ini mereka lakukan bersama pemerintah setelah didesak oleh masyarakat madani untuk bertindak.

FREEDOM OF EXPRESSION DAN PERLINDUNGAN HAM

Maroevic mengemukakan bahwa fokus dari deklarasi bersama 2017 dari *Special Rapporteur* tentang kebebasan berekspresi adalah mengimbuai semua pemerintahan, pemimpin politik, dan juga media,

serta *platform* media sosial agar tidak membuka ruang untuk *fake news*. Jadi ketimbang menjadi sumber *fake news*, mereka harus menjadi sumber yang bisa dipercaya dari tata kelola yang baik (*good governance*) dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Semua orang dan terutama pemerintah dapat memberikan semacam ide pelarangan terhadap *fake news*, karena hal ini sudah menjadi masalah sosial hari ini. Setiap individu tidak serta-merta menuduh penggunaan informasi sebagai *fake news* dan menyalahkan kebebasan berekspresi.

Justru mereka bisa secara positif mempromosikan kemerdekaan pers dan juga keragaman media. Dengan kata lain, masyarakat punya banyak sekali sumber daya untuk bisa melihat darimana asal berita tersebut, karena promosi melek digital merupakan bagian dari edukasi dan *awareness* yang diupayakan bersama. Bagi semua orang yang hidup pada era rezim totalitarian, sudah jelas bahwa apa yang didengar dari media, apa pun yang dilihat di TV, ataupun dibaca di koran, semua itu adalah informasi yang bersifat propaganda.

Meski begitu, informasi ini tidak bisa disebut sebagai *fake news*. Pendekatan yang skeptis atau sinis ketika mencari sumber informasi alternatif tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan semacam lingkungan untuk kebebasan berekspresi agar bisa berkembang, dan tidak kalah penting adalah mendorong peran media dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam konteks Eropa, media layanan publik harus menjadi *provider* yang independen dan memberikan contoh standar jurnalisme yang baik. Hal tersebut dapat dicapai dengan independensi dan kebebasan untuk menerbitkan berita. Selain hal tersebut, elemen lain yang diperlukan adalah pemerintah harus memastikan bahwa ada UU untuk melawan *fake news*.

UU tersebut harus kuat untuk bisa memproteksi reputasi orang yang rusak akibat *fake news*, misalnya dengan pemberlakuan UU pencemaran nama baik. UU pencemaran nama baik ini harus diciptakan dan harus digunakan secara efektif.

Jurnalis perlu dilibatkan, misalnya, dalam menentukan siapa yang mendefinisikan apa yang akan diunggah di *platform*, dan apa yang akan ditarik atau bahkan dihapus dari *platform* terkait *fake news* tersebut. Dengan begitu, memang harus didefinisikan dulu, apa yang benar dan apa yang tidak. Apa yang boleh di satu negara boleh jadi menjadi masalah di negara lain. Jadi, segala kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa untuk memperkuat standar kemerdekaan pers dan kebebasan berespresi.

Memang peran media itu sendiri sangat penting dalam memperlihatkan perbedaan antara *fake news* dan jurnalisme. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoreksi *fake news*-nya. Dengan kata lain, jika berita biasa dapat dikoreksi, mungkinkah terhadap *fake news* media terkait juga menyediakan sistem koreksi? Jika hal tersebut bisa dilakukan, apakah dapat dilakukan dengan lebih cepat atau tidak. Hal ini juga harus dipikirkan bersama, sehingga publik dapat pula mengoreksi fakta dari suatu berita, ketimbang mempromosikan *fake news*, ideologi atau propaganda.

Inisiatif untuk memastikan akurasi berita dan memberikan hak untuk menyampaikan tanggapan kepada publik merupakan hal yang positif. Upaya ini tentu lebih mudah jika dibandingkan dengan upaya untuk membuat UU. Dengan begitu semua orang dapat mengambil peran pentingnya, karena ini bersifat *self-regulation* yaitu regulasi yang dibuat sendiri oleh media dan dapat digunakan untuk melawan *fake news*.

TRUSTWORTHY CONTENT DAN SOSIAL MEDIA

Platform Facebook telah digunakan oleh sekitar dua miliar pengguna. Hal ini fenomenal sekali. Inilah tempat orang mengunggah video dan gambar, menambahkan *text link*, dan menyampaikan pendapat. Dan tidak kalah luar biasa, ada dinamika yang berkembang di dalamnya. Apa yang ada dalam *newsfeed* setiap harinya mencerminkan sistem nilai yang dimiliki oleh Facebook, yang sudah dipikirkan secara mendalam.

Facebook adalah tempat di mana orang terlibat atau berhubungan dengan teman atau *follower*. Tetapi sebagaimana diketahui di sana juga ada *news freedom* dan *value*-nya. Pengguna Facebook harus tahu bahwa dirinya dapat menerima percakapan, dan juga memperoleh informasi terkait konten tertentu. Dengan begitu terbangunlah masyarakat yang memiliki informasi yang cukup.

Ada industri informasi yang kuat di sana. Jurnalisme yang dipercaya terbangun di dalamnya, dan ini adalah suatu proses yang terjadi setiap harinya. Setiap memikirkan dan membangun masyarakat seperti itu, Facebook perlu bekerja sama dengan industri berita dan membuat proyek untuk mencapai target informasi tersebut.

Pertanyaannya kemudian adalah konten yang dipercaya itu seperti apa? Bagaimana meningkatkan kualitas konten tersebut? Bagi Facebook sendiri, tidak cukup dengan menggunakan pendekatan holistik dengan hanya mengatakan bahwa “OK, kita akan berbicara mengenai organisasi pihak ketiga”, misalnya.

Terkait dengan produk yang dapat mengontrol *fake news* di *platform*-nya, perusahaan yang berbasis di Menlo Park, California, itu telah berpikir dan mengambil beberapa langkah di antaranya melakukan pengujian. Misalnya sebagaimana yang dapat dilihat

pada *newsfeed*, di sana dibangun sistem yang memungkinkan publik untuk terlibat langsung dengan memberikan opini yang mengatakan bahwa itu *spam* atau *fake news*. Publik dapat langsung memberikan opini tersebut kepada tim yang bekerja 24 jam sehari.

Di AS, hal tersebut dapat dilakukan publik dengan memberikan tanda bendera peringatan bahwa hal terkait adalah konten *fake news*. Kemudian tanda peringatan tersebut akan diolah oleh satu sistem *filter*, di mana peneliti akan menganalisis tentang betul atau tidaknya peringatan tersebut.

Menurut Kerr, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Misalnya saja, apakah peringatan itu masuk dari *website* yang tidak tepercaya atau ada orang yang tidak terlalu tahu bahwa hal itu disebar oleh orang yang memiliki tujuan tertentu? Namun semua itu nantinya akan masuk ke dalam satu sistem/organisasi yang dapat mengecek fakta.

Di sinilah terdapat protokol yang kuat, ketat, yang akan menentukan apakah hal terkait adalah *hoax* yang buruk. Kalau misalnya, benar *hoax*, maka akan ada bendera atau *flag* yang menandainya. Ini biasanya setelah ditentukan atau diputuskan oleh organisasi. Jadi ada posisi faktual untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya, konten terkait akan diputuskan dapat diunggah atau disingkirkan. Demikian cara Facebook melakukan proses verifikasi di AS.

Hal lain yang dikerjakan Facebook dengan melibatkan masyarakat adalah pemberitahuan tentang *sharing*. Di sini Facebook juga telah melakukan beberapa penelitian, yaitu pada saat publik mengklik satu artikel dan tidak membaginya atau men-*share*.

Beberapa orang sebetulnya saling membagikan apa yang mereka baca, tapi sebagian lainnya tidak membagikan apa mereka lihat di Facebook. Setiap kali ini terjadi, maka Facebook akan menginterpretasikan sinyal itu apakah ini dilakukan karena ada orang yang mengklik begitu saja atau ada orang yang mencoba untuk melihat *line* tertentu tapi ada *headline* yang tidak cocok dengan isinya. Facebook sedang mencari sinyal provokasi. Ini merupakan isu kompleks yang membutuhkan pemikiran holistik.

Facebook juga tidak ragu-ragu berbagi cerita atau memperkenalkan perspektif yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan topik tertentu. Di sini dilakukan pengujian. Misalnya, sebelum publik mengklik artikel maka akan ada saran untuk membaca artikel lain. Saat ada orang yang tertarik membaca terkait pemilu misalnya, ada artikel alternatif yang ditawarkan untuk diklik juga. Di sinilah Facebook bekerja untuk mendukung hal yang bersifat holistik, dan mencoba menghentikan *spam* seraya meningkatkan kualitas konten.

Memang setiap *platform* memiliki cara yang berbeda untuk memasok konten. Namun Facebook, seperti dijelaskan Kerr, tidak mau menjadi organisasi yang mendiktekan konten yang benar dan konten yang salah. Tetapi bersama-sama ia ingin melihat peluang kolaborasi antara industri dan media dan melakukan pengecekan, serta memperkuat masyarakat dan sisi *demand*.

Inilah konsep yang sedang dibangun oleh Facebook. *Platform* media sosial ini ada di tujuh kota dengan berbagai klasifikasi pendidikan yang beragam. Terkait dengan materi yang ditampilkan di Facebook, pengguna perlu memikirkan beberapa hal, seperti apa saja yang diperlukan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap konten. Facebook melihat kolaborasi dan kerja sama bisa membantu masyarakat luas mencapai kemajuan dalam hal ini.

SIKAP DEWAN PERS INDONESIA

Wahyudi menjelaskan bahwa Dewan Pers dan masyarakat pers di Indonesia berada dalam posisi tidak ingin membuat peraturan baru mengenai *fake news*. Tentang cara menjaga kehormatan individu yang dirugikan oleh *fake news*, misalnya, di Indonesia sudah ada UU yang melindungi, terutama UU mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. UU tersebut sudah cukup menjamin adanya perlindungan terhadap hak individu dari serangan *fake news*.

Lalu bagaimana dengan Dewan Pers dan masyarakat pers dalam menyikapi dan menghadapi serangan *fake news* ini? Pada dasarnya perlu melihat aktornya. Di sini yang diperlukan sekali adalah promosi melek media yang sudah dilakukan Dewan Pers bersama masyarakat pers Indonesia. Untuk selanjutnya Dewan Pers berharap Facebook dapat berpartisipasi betul dalam mempromosikan kampanye melek digital di Indonesia.

Facebook memiliki perhatian yang besar terhadap *fake news*. Ditambah lagi masyarakat Indonesia menempati peringkat lima besar sebagai pengguna Facebook. Akan sangat positif sekali jika Facebook juga berpartisipasi dalam program melek digital sekaligus membantu mengembangkan media komunikasi di Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, Dewan Pers bersama masyarakat pers juga telah berperan dalam memerangi *fake news*. Ini dilakukan melalui kerja jurnalistik dan jaringan anti-*hoax* yang diciptakan oleh masyarakat media. Mereka bekerja sama dengan inisiatif masyarakat madani di mana mereka membentuk jaringan untuk menyaring informasi yang dicurigai sebagai *hoax*. Di Indonesia ada *turnbackhoax.id*, sebuah *website* untuk mengatasi masalah penyebaran *fake news*. Kemudian ada juga “bukan *hoax*” dan jaringan wartawan yang secara sukarela menginformasikan kalau ada *hoax* yang beredar di masyarakat.

Memang tampaknya kemerdekaan pers di Indonesia diwarnai oleh penyimpangan yang muncul dari media yang gagap menjalankan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya, mereka tidak mampu mengamankan pendapatan dari operasi mereka. Yang terjadi kemudian, mereka melakukan fabrikasi *hoax*. Dan parahnya hal ini nampak sudah mulai menjalar ke media *mainstream*.

Dari anggaran belanja iklan sebesar Rp120 triliun, hanya 10% yang masuk ke media digital *mainstream*. Untuk bertahan hidup sebagian dari media mengejar klik dan tanpa sadar juga memproduksi *hoax* untuk meningkatkan klik. Inilah yang menjadi masalah besar media di Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Pers membuat pelatihan yang tujuannya mendorong media untuk memikirkan ulang model bisnis yang mereka jalankan. Dan Facebook mungkin dapat menjadi bagian dari solusi ini. Mengecilnya peluang untuk mendapatkan iklan yang cukup diharapkan jangan sampai memicu pemerkosaan jurnalisisme secara masif hanya untuk menyelamatkan perusahaan media dalam jangka pendek. Ini adalah persoalan utama lainnya yang dihadapi oleh industri media di Indonesia.

Dewan Pers bersama masyarakat pers Indonesia sangat berharap adanya gagasan dan inisiatif yang memungkinkan untuk memikirkan ulang tentang model bisnis ini, dan bagaimana menjadi *revenue stream* yang baru di luar iklan dan sebagainya sehingga bisnis media dan juga jurnalisisme terselamatkan.

ANCAMAN DAN BAHAYA

Busson mengingatkan kembali bahwa semua yang berkaitan dengan *fake news* benar-benar membahayakan masyarakat dan jurnalisisme.

Ancaman yang disebabkan oleh *fake news* ini benar-benar penting untuk diperhatikan. Misalnya, berita Donald Trump berusaha menyerang independensi jurnalisme. Hal seperti inilah yang patut untuk dicarikan jalan keluar.

Media telah memiliki model ekonomi dari *social platform* yang digerakkan oleh algoritma, klik, dan kualitas konten. Berbagai inisiatif yang berkembang juga telah banyak bermunculan, mulai dari pengecekan kembali informasi untuk melawan *fake news*; sampai pada inisiatif yang sifatnya *interconnecting*, semua itu adalah daftar yang panjang. Ada *platform*, inisiatif, dan konsorsium jurnalis profesional. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana caranya menggarap proyek *fake news* ini? Bagaimana mengetahui yang mana yang kebenaran dan yang mana yang lebih akurat dibandingkan dengan yang lain. Inilah proyek yang harus digarap saat ini.

Busson memang tidak menyebut satu per satu inisiatif yang ada karena jumlahnya banyak sekali. Dan inisiatif itu sudah ada sejak 2008 ketika AS menggelar pemilu presiden dan proyek yang terkait dengan inisiatif itu dimulai. Di Ukraina juga ada yang namanya *platform* pengecekan fakta untuk mencegah propaganda *fake news*. Juga ada inisiatif yang digagas oleh universitas, konsorsium jurnalisme yang dibentuk LSM, yang menciptakan semacam redaksi nirlaba di mana publik dapat mengecek fakta.

Organisasi regional ini bersama beberapa universitas mengembangkan algoritma yang memverifikasi informasi secara otomatis dan semua dapat melihat jika hal tersebut berjalan. Di sana juga ada *platform* internet seperti Facebook, dan ia sudah mulai masuk ke dalam penanggulangan masalah *fake news*.

Jadi kolaborasi dan kerja sama dari semua unsur diperlukan oleh redaksi dan organisasi pengecek fakta. Selanjutnya akan mudah sekali bagi mereka untuk menemukan *fake news*. Tapi memang akan ada banyak sekali *platform* yang harus dibersihkan. Selain itu, inisiatif adanya jejaring pengecekan fakta secara internasional juga sudah dikerjakan. Bahkan pendiri Wikipedia mengatakan bahwa untuk mempublikasikan artikel, mereka akan melakukan *double check* yang dikerjakan oleh jurnalis profesional.

Kampanye melek media juga dilakukan melalui penerbitan buku untuk konsumen media. Banyak usaha yang sudah dilakukan dan ini harus disambut dengan baik karena mudah sekali untuk mengkritisi daripada bertindak. Semua pihak harus memikirkan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk memerangi *fake news*.

Tentang pengecek fakta juga demikian. Ada situs *fact checking* dan ada juga *website* tentang kebenaran lain dari yang lain. sehingga publik bisa mengakses fasilitas pengecekan fakta dan mempercayainya. Inilah yang disebut validasi dari informasi, dan pengecekan fakta ini adalah bagian integral dari jurnalisme. Hal ini harus terus dilakukan, meskipun menjadi isu yang sulit juga.

Saat-saat seperti ini memang butuh kehati-hatian semua pihak untuk tidak terjebak dalam upaya mempromosikan regulasi yang baru. Apalagi sampai mempromosikan privatisasi dari penyensoran. Hal ini jangan sampai terjadi. Namun saat ini yang terpenting adalah semua pihak perlu mendukung program melek media (*media literacy*). Selain itu memang diperlukan *platform* teknologi yang mumpuni untuk mengatasi berbagai persoalan seputar isu ini.

BAB X

PELIPUTAN RAWAN KONFLIK



Agustina Kadiani/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Konflik berkekerasan menarik perhatian media secara luas. Hal ini dapat menjadi papan loncatan untuk misinformasi, manipulasi, atau penindasan oleh kalangan berkepentingan untuk memperoleh manfaat dari konflik tersebut. Jadi, apa itu konflik dan jurnalisme yang peka terhadap konflik?

Menurut konsultan pengembangan media, Michelle Betz, konflik adalah satu kejadian biasa yang terjadi setiap harinya serta suatu situasi di mana ada dua atau lebih individu atau sekelompok orang yang berusaha mengejar ambisi dan tujuan yang tidak dapat mereka lakukan secara bersama-sama. Itu terjadi setiap hari antara individu dan juga antar kelompok.

Betz berada di lapangan selama 15 tahun dan telah melihat begitu banyak wilayah konflik. Dia kerap bekerja sama dengan jurnalis dari berbagai negara seperti Ukraina, Sudan, Rwanda, dan Kongo. Sementara itu jurnalisme yang peka terhadap konflik, menurut Betz, adalah praktik jurnalisme yang baik dan bertanggung jawab. Ia bersifat akurat, tidak memihak, transparan, profesional, dan independen.

Selain jurnalisme yang peka terhadap konflik juga ada yang disebut jurnalisme damai. Jurnalisme damai itu lebih kepada apa yang disebut sebagai jurnalisme advokasi dimana jurnalis benar-benar secara sadar mengetahui dan sengaja memainkan peran untuk mempromosikan atau mengadvokasi perdamaian.

Namun Betz mengatakan sebenarnya itu bukan tugas jurnalis. Tugas jurnalis adalah menceritakan kejadian penting dan menarik di masyarakat. Apakah situasinya konflik ataupun tidak, jurnalis harus melakukannya secara akurat, transparan, profesional, aktif, dan independen. Jadi, ada sedikit perbedaan antara jurnalisme yang peka terhadap konflik dan jurnalisme damai.

ADVOKASI JURNALIS DALAM SITUASI KONFLIK

Lalu, apakah jurnalis harus atau tidak perlu mengadvokasi di dalam situasi konflik?

Koresponden veteran perang, Rauli Virtanen mengatakan jurnalis seharusnya jangan menyakiti siapapun ataupun mengganggu proses perdamaian yang sedang berjalan. Di sini ada yang namanya jurnalisme advokasi, yang menjadi bagian dari jurnalisme dan ada tujuannya. Jurnalisme advokasi memang sesuatu hal yang baru. Ini merupakan konsep baru dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep yang ada pada 1970-an. Virtanen memulai karirnya sebagai seorang jurnalis sehingga dia sudah melihat berbagai macam kejadian dari sisi yang berlainan di dunia ini.

Virtanen mengingat seorang rekannya bernama Martin Bell dari *BBC* saat bertugas di Suriah pada 1992. Bell memperkenalkan istilah *Journalism of Attachment* untuk peliputan yang terkait dengan konflik. Menurut Bell, jurnalis harus mempertimbangkan situasi korban konflik dan membuatnya jelas di dalam liputan soal siapa yang jahat dan siapa yang baik tanpa mengesampingkan objektivitas. Tapi pandangan seperti ini selalu memicu kontroversi.

Terkait situasi di Suriah, Virtanen menceritakan bahwa ketika berada di lokasi peliputan, dia kadang merasa dekat dengan orang yang ditawan oleh kelompok lain. Dia berempati pada nasib mereka. Virtanen tidak setuju kalau ada yang mengatakan seperti: “Kita hanya punya segmen 2 menit, 1 menit untuk korban dan 1 menit untuk Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic untuk menjelaskan alasan mereka menembaki orang-orang tersebut. Virtanen merasa itu buang-buang waktu.

Di dalam peliputan konflik, yang memutuskan mana orang yang baik dan mana yang jahat adalah pembaca atau pemirsa. Biarlah mereka yang membuat keputusan. Tugas jurnalis hanya menyampaikannya secara objektif. Misalnya ada orang yang menembak warga sipil dan seterusnya maka jurnalis tidak perlu mengatakan bahwa ini orang baiknya karena biasanya pembaca akan mengetahuinya dari laporan yang disampaikan.

Tapi masalahnya adalah protokol di mana jurnalis hanya mengikuti pihak militer saja yang kadang-kadang terlihat sebagai orang baik. Pada waktu yang bersamaan, jurnalis tidak punya akses kepada korban atau target, misalnya target pengeboman dan lainnya. Itu terjadi di banyak negara, jadi jurnalis meliput hanya dari sisi militernya saja di dalam situasi konflik.

Hal yang paling penting bagi jurnalis untuk diketahui dan harus dilakukan dalam meliput korban konflik adalah jangan menyakiti mereka. Itulah pesan yang diungkapkan Wojciech Tochman, jurnalis yang juga penulis nonfiksi. Tochman sering menulis mengenai trauma korban konflik. Dia sudah melihat berbagai lokasi menarik dalam pekerjaannya termasuk Bosnia-Herzegovina, Rwanda, dan Suriah.

Saat di Sarajevo, ibukota Bosnia-Herzegovina yang pada saat itu terjadi penawanan, Tochman mencontohkan, apabila jurnalis berada di satu sisi dan tidak bisa menghubungi ataupun berbicara dengan sisi berlawanan maka biasanya sulit bagi mereka untuk tidak memihak karena hanya berada di satu sisi saja. Dan sudah sangat jelas mana yang jahat dan mana yang tidak jahat. Tetapi mengenai korban, biasanya Tochman berbicara dengan mereka setelahnya, setelah konflik atau perang.

Menurut Tochman, yang harus diingat mengenai liputan dan jurnalisme yang peka terhadap konflik adalah jurnalis harus mengetahui definisi dan teori jurnalistik. Dia setuju bahwa liputan atau jurnalisme yang peka terhadap konflik juga merupakan jurnalisme yang baik dan profesional. Dia berbicara dengan korban setelah konflik karena yang perlu diingat jurnalis adalah perang tidak pernah berakhir meskipun dinyatakan usai. Itu yang kadang dilupakan jurnalis. Jadi, perang itu hanya *show*-nya saja. Tetapi, pasca perang pada kenyataannya mungkin banyak hal yang luput dari pemantauan media. Seringkali jurnalis melihat adanya korban yang masih hidup, yang masih bertahan hidup, termasuk termasuk juga pelaku.

Tochman tahu bagaimana melakukan peliputan pasca perang dengan baik meskipun tidak ada orang yang mengajarnya. Dia tahu bagaimana saat berbicara dengan korban, dengan orang yang bertahan hidup, meskipun dia mengakui bahwa itu adalah wawancara yang sangat sulit. Pertanyaan yang sulit adalah yang diajukan kepada korban pemerkosaan etnis. Jadi bagi Tochman sebagai jurnalis jangan langsung bertanya mengenai kejahatannya. Inilah hal yang diwanti-wantinya jika jurnalis bertemu dengan korban.

Pertama, mungkin jurnalis bertanya kepada korban tentang dirinya sebanyak mungkin. Itulah usaha yang kerap dilakukan Tochman. Dia hanya mendengar saja dari sisi korban. Dan ini sangat sensitif. Masa pasca konflik ini adalah kesempatan bagi jurnalis untuk memahami lebih mendalam mengenai konflik atau kekerasan. Pada masa konflik, jurnalis melaporkan setiap hari mengenai situasi di lapangan. Setelah ketegangan pasca perang tidak terlalu tinggi namun masih terasa konfliknya, jurnalis dapat terus melakukan riset dan merasakan bagaimana orang-orang itu terlibat dalam konflik satu sama lain.

PEREMPUAN DAN ANAK PADA SITUASI KONFLIK

Dalam peliputan rawan konflik, terkadang jurnalis tidak cukup peka terhadap isu mengenai bagaimana melakukan peliputan kekerasan terhadap perempuan. Padahal perempuan sering kali menjadi korban di dalam perang dan sering terlupakan.

Jurnalis Nikaragua Monique Blanco mengakui hal tersebut kerap terjadi kalau tinggal di dalam sebuah sistem yang menyulitkan perempuan. Tidak hanya bagi perempuan tapi bagi semua orang. Dia berbagi cerita tentang situasi di Nikaragua. Menurut dia, masyarakat di negaranya sedang tidak dalam masa perang tetapi situasinya tetap menyulitkan.

Situasi di Nikaragua adalah hidup di dalam kediktatoran. Menjadi sangat sulit karena dalam pemerintahan yang penuh kediktatoran ini, rezim yang berkuasa tidak hanya mempengaruhi perempuan tapi juga laki-laki, anak-anak, dan remaja. Ibu Negara Nikaragua juga menjabat sebagai wakil presiden di negara itu dan banyak anak penguasa memegang jabatan publik. Mereka juga mengontrol media sehingga situasinya sangat sulit bagi jurnalis.

Jurnalis di negara yang dipimpin oleh diktator ini harus memahami situasi yang ada, harus tahu proyek yang ada, dan perubahan yang terjadi di negara itu. Di antara perubahan itu, misalnya, adalah pelaksanaan proyek yang mempengaruhi perempuan dan keluarga mereka. Ada dari proyek itu yang sampai mengusur tempat tinggal sehingga memantik protes masyarakat terdampak.

Di negara seperti ini, media memiliki peran yang sangat penting karena tidak dapat mengharapkan penguasa membantu masyarakat. Karena media dikontrol pemerintah, hanya media kecil yang independen yang bisa mengekspresikan diri di Nikaragua.

Hanya sedikit stasiun radio yang relatif bebas dalam menyajikan pemberitaan, sedangkan sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah.

Sangat sulit bagi jurnalis untuk meliput secara akurat di Nikaragua karena mereka tidak memiliki akses ke informasi politik. Jika untuk mendapatkan informasi sulit maka tentu akan sulit juga bagi jurnalis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi sangat sulit bagi media di Nikaragua untuk bertahan hidup. Jurnalis berusaha menggunakan ruang digital seperti media sosial. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi identitas korban.

Terkait dengan jurnalisme yang peka terhadap konflik, Betz mengatakan jurnalis juga perlu memahami apa itu konflik, apa itu siklus konflik dan apa saja proses yang terjadi di dalam sebuah konflik. Jurnalis perlu memahami semua ini karena konflik akan tetap ada di muka bumi.

Konflik itu seperti sebuah siklus. Ada waktunya kelihatan reda di atas permukaan karena terjadi de-eskalasi kemudian berubah lagi menjadi konflik berkekerasan.

Perlu diketahui bahwa wilayah pasca konflik sangat mudah untuk diprovokasi sehingga dapat memantik kembali konflik baru yang dapat berekskalasi ke arah kekerasan. Karena itu jurnalis harus berhati-hati melihat situasi pasca konflik. Jurnalis harus fokus pada upaya untuk mendorong rekonsiliasi dan proses perdamaian secara umum di wilayah pasca konflik. Perlu juga diingat bahwa pemilu dapat menjadi sumber konflik.

Konflik yang tidak ditangani dengan kiat yang cerdas dan bijaksana biasanya akan berkembang di luar kendali dan menjadi lebih

sensitif. Memang tidak semua konflik itu bersifat penuh kekerasan. Menurut Betz, yang terlihat di Nikaragua mungkin bukan konflik yang penuh kekerasan, meski mungkin di masa lalu diwarnai oleh kekerasan. Tetapi diktator, kediktatoran pasca konflik itu mungkin saja dapat berubah. Jadi, jurnalis juga harus memahami bahwa konflik tidak selalu penuh kekerasan.

Penting bagi jurnalis untuk memahami tipologi konflik namun semuanya tergantung pada peran media dalam melakukan peliputan. Dalam proses peliputan konflik harus ada pemahaman akan peran dari masing-masing pihak yang terlibat. Peran jurnalis adalah sebagai *gatekeeper* informasi, sebagai motivator.

Terkadang media digunakan sebagai jalur komunikasi antara dua pihak yang bertikai. Jadi jurnalis harus memahami berbagai jenis peran yang bisa dimainkan oleh media, seperti analisis konflik, terutama ketika mereka punya waktu dan kesempatan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang mungkin tidak terlalu banyak kesempatan bagi jurnalis untuk menjadi analisis konflik mengingat sifat dari peliputan berita saat ini. Tapi media masih dapat berperan sebagai pendidik, edukator, yang hampir sama dengan peran sebagai analisis.

JURNALIS SEBAGAI PELAYAN PUBLIK

Jurnalis perlu memainkan peran sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat dan memang jurnalis harus kembali ke peran awal tersebut. Mengingat peran tersebut maka mereka harus mengetahui aneka persoalan yang menjadi keprihatinan masyarakat, misalnya saja konflik atau masalah lain yang mengganggu kehidupan normal mereka. Ada banyak peran yang dapat dimainkan oleh media dan itu harus menjadi bagian dari jurnalisme yang peka terhadap

konflik. Saat ini yang banyak terjadi adalah banyak jurnalis dan sifat berita yang cenderung menyederhanakan segala persoalan. Mudah bagi jurnalis mengatakan orang ini menentang hal ini, kelompok ini menentang itu. Mereka kesulitan memahami seluruh kompleksitas dari konflik yang ada.

Konflik itu kompleks. Konflik bukanlah sesuatu yang sederhana dan tidak akan pernah sederhana. Tapi kalau jurnalis tidak mencoba memahami kompleksitas sebuah konflik, artinya mereka telah gagal melakukan tugas. Tugas jurnalis adalah untuk memahami, mengenal pemerannya, siapa yang terlibat. Tidak hanya A dan B, tapi dari A sampai Z. Mereka harus mengenal siapa yang baik, siapa yang jahat dalam konflik ini. Tapi tidak hanya itu saja, jurnalis harus memahami kompleksitas pemicu konflik, yang boleh jadi tidak bersifat tunggal.

Betz mengambil contoh kasus Lebanon. Dulu, pada saat perang saudara berkecamuk, banyak orang yang mengatakan bahwa perang di negara itu karena ada gesekan kepentingan di antara faksi di dalam masyarakat. Ada juga analisis yang mengaitkannya dengan konflik agama, sedangkan analisis lain menunjuk masalah ekonomi sebagai penyebabnya. Tapi sesungguhnya, kalau jurnalis mendalami, mengkritisi, menganalisis, dan memahami kompleksitasnya, sebenarnya penyebabnya ada banyak selain dari sebab yang disebutkan di atas.

Ketika berada di lapangan baik itu dalam kondisi perang atau konflik, terkadang jurnalis ikut rombongan salah satu pihak. Apakah jurnalis dalam kondisi seperti itu masih memiliki kesempatan untuk melakukan analisis mendalam, masih bisa menjaga peliputan yang seimbang?

Menurut Virtanen, kantor berita yang memiliki sumber daya besar tidak hanya menugaskan satu orang jurnalis. Biasanya mereka menugaskan dua jurnalis untuk ditempatkan di dua kelompok yang bertikai. Seperti misalnya di Suriah, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan setiap saat. Sulit untuk melakukan peliputan yang seimbang dari sudut pandang pihak yang bertikai. Jadi, peliputan satu sisi tidak baik.

Virtanen ingat ketika ada jurnalis Finlandia yang ditempatkan di pasukan AS yang tidak dapat melihat, meliput kondisi yang terjadi di sana dengan lengkap, dan hanya ada pelaporan satu sisi saja. Tidak ada pelaporan dari sudut pandang yang berlawanan. Demikian juga di Balkan dan Lebanon. Hal terburuk yang pernah dilakukan oleh media adalah menutup mata terhadap berbagai aspek yang perlu dialami. Misalnya, di konflik Rwanda, ketika ada genosida di sana, Virtanen melihat dengan jelas. Kondisi yang sama terjadi di Yugoslavia.

Konflik menjadi semakin kompleks jika bersinggungan dengan isu agama, ekonomi, dan kesukuan. Misalnya, ketika bekas Yugoslavia dikoyak konflik berdarah berhembus kabar di Beograd bahwa Muslim melemparkan orang Serbia ke kandang singa. Berita ini sangat dipercaya di Serbia saat itu.

PELIPUTAN YANG SEIMBANG

Itu sebabnya, mengapa jurnalis harus bisa mengusahakan pelaporan yang seimbang. Tapi seringkali mereka tidak dapat melakukan peliputan yang lengkap atau komprehensif karena begitu perang selesai, semua orang keluar dari wilayah tersebut, jadi tidak ada peliputan lanjutan.

Tidak ada peliputan tentang anak muda di sana yang masih berupaya merehabilitasi kondisi. Seringkali tidak ada liputan mengenai generasi yang hilang seperti di Suriah di mana anak-anak tidak dapat bersekolah. Seringkali ketika jurnalis berada di lapangan, mereka tidak memahami hal seperti itu karena mereka memfokuskan perhatian terlalu banyak kepada satu hal misalnya tentang radikalismenya saja.

Tochman juga menceritakan hal yang sama seperti yang terjadi di negaranya Polandia. Di sana, sebagian masyarakat masih meyakini sekarang ada krisis pengungsi yang sangat besar di Eropa, dan masih belum tahu nanti akhirnya seperti apa. Krisis pengungsi sebenarnya adalah sebuah konflik. Jurnalis sangat terlibat dalam isu ini.

Sebagian jurnalis melayani rezim sayap kanan di sejumlah negara Eropa, seperti Bulgaria dan Polandia. Setiap hari stasiun televisi yang dikelola oleh pemerintah, menyiarkan berita buruk tentang bagaimana pengungsi melakukan tindak kejahatan di berbagai negara Eropa Barat dan negara itu tidak dapat melakukan apa pun untuk mengatasi hal tersebut.

Jadi ini menjadi tantangan besar bagi jurnalis untuk memahami permasalahan yang sesungguhnya. Setiap hari, setiap saat di Facebook, di surat kabar, di stasiun televisi, di radio, tidak ada peliputan yang seimbang karena semuanya dikelola pemerintah. Jadi tidak ada jurnalisme yang bebas di negara ini.

Menurut Tochman, krisis pengungsi di Eropa sebenarnya sudah diliput dengan baik oleh jurnalis Polandia. Untuk memahami permasalahan ini, mereka berangkat mempelajari situasi pengungsi di kepulauan Yunani atau di pedalaman daerah Calais di Prancis. Mereka ada di mana-mana karena berusaha untuk menyampaikan

kepada pembaca, pemirsa, bahwa pertama dan terutama jurnalis harus membantu orang tersebut. Jurnalis harus mencari cara terbaik untuk membantu mereka.

Tapi tidak semua orang memiliki sikap yang sama dalam memandang pengungsi. Contohnya ketika Tochman mengadakan pertemuan dengan sejumlah guru di Polandia. Dia bertanya kepada mereka: “Kalau Bapak Ibu melihat orang yang tenggelam di laut, apakah Bapak Ibu akan membantu orang tersebut? Jawaban dari pahlawan tanpa jasa itu cukup mengagetkan. “Tergantung,” kata mereka. Ini menjadi tantangan besar bagi jurnalis.

Sementara itu menurut Betz, konflik itu normal ketika terjadi perubahan. Jadi yang terjadi di Eropa, dengan krisis pengungsi saat ini, merupakan akibat dari sejumlah perubahan. Dan itu artinya konflik. Kalau konflik tidak dikelola dengan baik akan menjadi tindak kekerasan. Itu sebabnya kenapa media dapat menjadi sistem peringatan dini bagi kemungkinan terjadinya konflik berkekerasan. Jurnalis harus mewaspadaikan konflik sebelum berkembang menjadi tindak kekerasan.

Mengenai jurnalis lokal, Betz selalu berusaha bekerja sama dengan mereka ketika meliput di sebuah negara atau wilayah pasca konflik. Dia juga berusaha melibatkan perempuan di beberapa negara di Amerika Latin. Banyak dari perempuan di sana kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka hancur. Mereka tinggal di tenda pengungsian.

Tidak hanya terpaksa menghadapi realitas seperti itu mereka tetap harus melakukan tugas sebagai jurnalis. Jadi, mereka berhadapan tidak hanya dengan lingkungan pribadi, tapi juga lingkungan sosial dan politik di tengah situasi konflik. Banyak faktor yang

bisa mempengaruhi pelaporan atau peliputan yang dilakukan oleh seorang jurnalis di tempat tersebut.

Sebagai jurnalis lokal yang meliput konflik di negaranya sendiri, mereka harus lebih menyadari faktor tadi yakni realitas yang mereka hadapi setiap saat. Koresponden internasional biasanya berusaha menggandeng jurnalis lokal, seperti yang terlihat di Suriah saat ini.

Perlu dipikirkan lingkungan struktural di mana jurnalis tersebut bekerja. Seringkali jurnalis lokal tidak memiliki sumber daya yang dimiliki oleh jurnalis asing. Kalau bicara masalah keamanan, mereka tidak punya fasilitas keamanan sama sekali, tidak punya helm, tidak punya jaket antipeluru, tidak punya peralatan apa pun yang dapat melindungi mereka atau menjamin keamanan mereka ketika melakukan peliputan di lapangan. Akses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti dari pihak militer dan pihak berwenang lainnya perlu mendapatkan perhatian karena laporan mereka menjadi tidak bernilai jika hanya berdasarkan pada informasi yang terbatas.

Diakui memang masih banyak keterbatasan baik dari sudut pandang peraturan, legislasi, dan pihak yang bertanggung jawab mengelola dan menangani perusahaan media yang menjadi tempat kerja jurnalis tersebut. Siapa yang menjadi *gatekeeper*. Siapa yang menentukan bagaimana konflik A dan konflik B itu diliput. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi.

Blanco setuju dengan apa yang disampaikan Betz. Jurnalis harus mengklarifikasi karena ada banyak jenis konflik. Nikaragua memang tidak mengalami konflik berkekerasan tapi kalau jurnalis tidak melakukan apa pun, dia yakin tidak lama lagi negara tersebut akan terseret ke pusaran konflik berkekerasan. Tidak ada satu orang pun yang ingin hidup dalam kekerasan.

Jadi saat ini, ada banyak permasalahan dalam sistem hukum, ada banyak penindasan media, dan kegagalan melindungi media dari kondisi seperti ini, itu artinya sama saja membiarkan pemerintah untuk terus menekan media seperti yang terjadi di Nikaragua. Kemudian apa yang akan terjadi dengan masyarakat di sana? Siapa yang akan membantu menyuarakan kepentingan publik?

Negara Amerika Latin menyimpan sejarah kekerasan dan cara masyarakat di sana untuk menyelesaikan masalah dan melakukan perubahan adalah dengan konfrontasi. Perubahan itu hanya dapat terwujud dengan kekerasan. Ini cara berpikir banyak orang di sana. Jadi, jurnalis memiliki tugas yang sangat berat untuk dapat mengubah cara berpikir tersebut. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara menawarkan langkah alternatif demi mewujudkan perubahan secara damai.

Meliput di Nikaragua tidak mudah karena kadang jurnalis menulis laporan hanya dari satu sisi. Pemerintah mengeluarkan laporan yang sama tapi dari sudut yang berbeda. Jurnalis harus melindungi korban karena pemerintah di negara itu menguasai media massa yang menyajikan laporan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ada satu posisi dipertentangkan dengan posisi lain. Jika jurnalis yang dapat dipercaya menampilkan statistik tertentu maka pemerintah akan menampilkan statistik tandingan.

Untuk pelaporan, media digital memang ada peluang besar tanpa menggunakan outlet media *mainstream* yaitu menggunakan media sosial dan *website*. Permasalahannya, tidak semua orang di Nikaragua punya akses internet. Jadi, penetrasi informasi belum efektif karena pembacanya terbatas.

Di negara seperti Nikaragua jurnalis perlu memberikan informasi kepada masyarakat, tapi kalau hanya ada sedikit media yang independen dan hanya sedikit akses internet maka sangat sulit bagi jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada semua orang mengenai situasi yang sesungguhnya di Nikaragua.

Seusai konflik atau masa traumatis, seringkali jurnalis merasa korban, penyintas, tidak ingin berbicara dengan mereka. Sebetulnya tidak demikian. Mereka hanya perlu waktu untuk menenangkan diri. Hidup terus berlanjut. Mereka kemudian siap untuk bersaksi.

Menurut Tochman, seringkali jurnalis adalah orang pertama dalam hidup korban setelah masa trauma yang diajak bicara oleh korban. Misalnya di Rwanda, 15 tahun setelah genosida terjadi di sana, dia berbicara dengan perempuan korban pemerkosaan. Beberapa dari mereka berbicara dengannya setelah sebelumnya diam begitu saja karena mereka benar-benar tidak siap untuk membuka kisah kelam dalam hidup mereka kepada orang lain.

Jurnalis harus melakukan penelitian, menganalisis terlebih dahulu latar belakang supaya tidak terus menerus mengulang peliputan hal yang sama. Namun yang jelas peliputan demi keadilan tetap harus dilakukan. Di sini mereka memainkan peran yang sangat penting dalam proses pemulihan trauma yang dialami korban tersebut.

Jurnalis perlu bersikap jujur untuk mengingat apa yang telah terjadi. Kalau jurnalis sampai melupakannya itu artinya mereka menyetujui tujuan atau kepentingan pelaku kekerasan, pelaku kejahatan, pelaku genosida. Kalau jurnalis melupakan semua kekejaman itu berarti mereka membiarkan korban hidup dalam keadaan tertekan dan pelaku dapat hidup bebas.

Virtanen mengatakan bahwa dunia telah memasuki era amnesia. Hampir semua negara mengalami hal yang sama. Tantangan bagi jurnalis adalah bagaimana melindungi orang yang terlalu bersemangat menyampaikan cerita dan tidak menyadari bahwa dengan bercerita seperti itu, mereka menempatkan diri dalam kondisi yang berbahaya.

Kemudian jurnalis harus sangat waspada, bijaksana melihat informasi yang dapat membahayakan korban, dan mereka perlu memastikan kembali kepada korban apakah benar mereka ingin menyampaikan tragedi yang pernah mereka alami.

Terkait dengan isu ini, Tochman meminta jurnalis untuk tidak mencampuradukkan rekonsiliasi dengan pemberian maaf. Kalau jurnalis berbicara dengan korban atau penyintas, jangan langsung membicarakan pemberian maaf dengan mereka. Kalau itu sampai dilakukan maka jurnalis sebenarnya tidak memahami inti dari kekerasan dan kejahatan yang terjadi. Rekonsiliasi penting tapi isu itu ada di domain publik.

BAB XI

MENANGKAP KETIDAKADILAN MELALUI LENZA



Agustina Kadiani/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Gambar (*image*), termasuk di dalamnya foto dan video, selalu merupakan objek diskusi menarik, khususnya bagi para pegiat fotografi. Belakangan ini, isu tersebut kian marak diperbincangkan terutama terkait dengan penyebarannya melalui berbagai *platform*, di antaranya media sosial. Publik memiliki banyak *platform* untuk mempublikasikan foto dan materi visual lainnya.

Foto jurnalistik dan foto dokumenter sudah sejak lama menjadi konsumsi publik. Namun, seiring dengan hadirnya *smartphone*, maka situasi mulai berubah. Ketika seseorang menyaksikan kejadian tertentu dan dia melihat ada ketidakadilan atau melihat penegak hukum berbuat tidak semestinya dalam kejadian itu, maka mereka bisa segera mengambil foto atau merekamnya dalam format video.

Dengan demikian, pengguna media sosial dapat langsung melihat rekaman berisi ketidakadilan atau kekerasan itu dan tidak jarang kejadian tersebut kemudian diviralkan. Interpretasi ketidakadilan itu mendapat tanggapan dari media. Dalam ekosistem pemberitaan (*news ecosystem*) seperti ini banyak sekali pertanyaan disampaikan tentang gambar yang ditampilkan, juga bagaimana gambar itu dapat membantu membuat masyarakat menjadi lebih kritis.

Saat ini semakin banyak berita atau kabar bohong (*hoax*) dan masyarakat diminta untuk peka. Mereka harus tahu betapa pentingnya untuk bersikap hati-hati.

Di sinilah pentingnya peran jurnalis untuk memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Untuk merespon fenomena baru di bidang fotografi ini, beberapa praktisi fotografi profesional mengungkapkan pandangannya. Salah seorang dari mereka

adalah Kemal Jufri, fotografer yang sudah berkecimpung di dunia fotografi selama 22 tahun.

Menurut dia, selalu ada perbedaan antara foto yang diambil oleh masing-masing juru foto, apalagi jika mereka berasal dari negara yang berbeda. Mereka tidak begitu paham tentang sisi budaya, mereka juga mempunyai hambatan bahasa, dan juga ada tantangan lain yang mereka hadapi. Kemudian ada keterbatasan informasi yang mereka miliki sebelum datang ke lokasi di negara lain.

Fotografer lokal dalam hal ini mempunyai keuntungan. Mereka memahami lebih baik tentang aspek budaya di wilayah tersebut. Sudut pandang mereka juga berbeda sehingga ketika mengambil foto atau merekam situasi tertentu, mereka dapat menangkap sisi yang berbeda dari foto tersebut dibandingkan dengan fotografer asing, kendati ada beberapa fotografer asing yang melakukannya dengan lebih baik.

Dari segi pendekatan visual, menurut Jufri, antara fotografer lokal dengan asing semakin mirip karena mereka mempunyai standar yang sama ketika menangkap satu objek. Menurut dia, dibandingkan dengan sejawat asing mereka, juru foto lokal lebih peka ketika akan mengambil gambar. Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan terhadap budaya setempat.

Pertanyaannya, apakah kualitas foto yang dihasilkan juga didorong keberadaan audiens yang makin banyak? Sebagai catatan, ada sekitar 150 juta penduduk Indonesia yang aktif menggunakan Facebook. Apakah ini mempengaruhi juga bagaimana fotografer lokal menangkap situasi yang ada di keseharian mereka? Apa ini mempengaruhi pekerjaan juru foto?

Bagi Jufri hal itu tidak terlalu mempengaruhinya. Namun, dirinya mengakui bahwa fenomena tersebut membuatnya menjadi lebih paham. Hal tersebut membuatnya semakin sadar bahwa jurnalisme foto ini lebih menekankan pada konten, bukan estetika.

Setiap orang bisa menjadi fotografer dengan *smartphone* mereka. Dan mereka pun bisa menggunakan telepon genggam mereka untuk mendapatkan informasi atau berita terkini dan jika mengandalkan *citizen journalism*, maka ada kalanya materi yang di-*posting* oleh mereka di media sosial itu belum disaring.

Tentunya, hal itu berbeda dengan apa yang dilakukan para profesional. Para fotografer yang ahli biasanya mempertimbangkan beberapa hal, bukan dalam arti *censorship*. Tetapi, mereka lebih peka dari segi etika misalnya sebelum menampilkan hasil karya mereka secara daring (*online*).

Mereka akan memeriksa dulu faktanya. Inilah yang dilakukan fotografer profesional. Mereka harus meneliti lebih dalam, menggali informasi yang lebih dalam, bukan sekedar meliput peristiwa yang muncul di permukaan.

Oleh karena itu, *citizen journalism* bagi Jufri bukan ancaman bagi media *mainstream*. Malahan mereka dapat saling melengkapi. Ia berpotensi memberikan nilai tambah juga. Ia tidak akan mengambil alih apa yang dilakukan fotografer profesional yang tidak mungkin berada di semua tempat pada waktu yang bersamaan. Jadi jika audiens ingin mengabadikan peristiwa tertentu secara lebih detail maka mereka membutuhkan jasa fotografer profesional.

Fotografer profesional dituntut untuk selalu menjaga kualitas hasil karya mereka sekaligus melakukan verifikasi atas gambar atau foto

yang beredar di media sosial. Untuk meningkatkan keterampilan, mereka membutuhkan pelatihan.

Ng Swan Ti, fotografer sekaligus pelatih fotografi, mengungkapkan bahwa pelatihan tidak cuma ditujukan supaya fotografer dapat meningkatkan kualitas karya mereka. Lebih jauh lagi, pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu fotografer lokal untuk mendapatkan kesempatan berkarya di luar negeri.

Selama ini banyak fotografer asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan reportase atau liputan. Melalui pelatihan fotografi, diharapkan jumlah fotografer lokal yang berkarya di luar negeri akan meningkat.

PELATIHAN UNTUK JURNALIS

Banyak jurnalis melakukan liputan di Afghanistan dan Indonesia. Masalahnya bukan jurnalis asing di sini, tetapi bagaimana ketika semakin banyak individu yang menjadi jurnalis, mereka harus lebih peka. Di sinilah fungsi pelatihan, yakni untuk mengedukasi peserta tentang hal teknis jurnalistik, termasuk kepatuhan terhadap *code of conduct*.

Pelatihan juga menekankan tentang *critical thinking* supaya mereka lebih peka terhadap fenomena sosial yang ada di sekeliling mereka. Menurut Swan Ti, banyak fotografer yang masih belum optimal ketika ingin menggali cerita atau liputan yang lebih dalam lagi. Inilah fungsi pendidikan atau pelatihan supaya membuatnya menjadi lebih optimal.

Tidak menjadi masalah apabila pengguna internet dan fotografer menampilkan karya mereka di internet dan siapapun boleh

mengunduhnya. Tapi, yang penting adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan kredibilitas dan menampilkan foto yang menjunjung tinggi etika.

Apakah dengan demikian berarti pendidikan jurnalisme lebih difokuskan pada etika? Apakah pelatihan ditekankan untuk hal itu? *Citizen journalism* tidak selalu mengedepankan hal ini. Untuk *visual journalists*, bagaimana mereka tetap dapat mengingat ini? Ketika menampilkan karya mereka, sangat disarankan untuk tidak menampilkan konteks negatif saja. Sisi positifnya juga perlu diperlihatkan.

Swan Ti mengatakan bahwa ketika berbicara tentang *visual photographer* atau *visual journalist*, dia menganjurkan untuk memikirkan apa yang mereka ingin tampilkan sebelum mengunggah atau mempublikasikan karya mereka. Kalau melihat *citizen journalists*. Mereka seringkali langsung mengunggah tanpa berpikir panjang tentang kemungkinan dampak yang ditimbulkannya nanti.

Contohnya adalah peristiwa yang terjadi di Jakarta. Ketika ada seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserang dengan air keras, ada seseorang yang mengambil foto korban di rumah sakit dan langsung *memposting*-nya di media sosial. Swan Ti mengaku melihat foto itu pertama kali di Facebook sebelum media *mainstream* mempublikasikannya.

Kemudian muncul perdebatan tentang etika, apakah hal semacam itu dibenarkan atau tidak. Hal tersebut sama sekali tidak memperhitungkan perasaan anggota keluarga dari penyidik KPK tersebut. Kalau melihat etika di masa lalu, ada hal yang perlu dipertimbangkan. Swan Ti menilai tidak etis menampilkan foto seperti itu di Facebook.

Namun, media daring juga menampilkan foto yang kurang lebih sama. Pertanyaannya, apakah komunitas fotografi perlu mendefinisikan pakem etika? Adakah peraturan yang harus ditaati oleh jurnalis? Karena ini tidak sekedar hitam putih, tidak semudah itu. Mungkin jurnalis harus memperbanyak dialog untuk mencari solusi yang lebih tepat.

Memang saat pekerja media berbicara tentang kemerdekaan pers, mereka harus benar-benar mempertimbangkan semua aspek sebelum mempublikasikan hasil karya mereka. Bagaimana dengan *citizen journalists*, apakah mereka sadar akan hal ini?

Menurut Swan Ti, yang terjadi sekarang adalah masyarakat merespon dengan segera. Seperti apa yang diungkapkan oleh Jufri, masyarakat ada di saat tertentu ketika jurnalis fotografer tidak ada di sana. Dari pengamatan Swan Ti, ketika berbicara tentang etika terkait dengan karya tersebut, masyarakat seringkali melupakan substansi dari foto yang ditampilkan.

Laura Boushnaq, fotografer yang berbasis di Bosnia, menekankan perlunya memberikan pengetahuan atau informasi yang tepat tentang foto. Itu adalah sikapnya ketika dirinya bekerja. Bosnia adalah satu wilayah yang mungkin menjadi objek yang banyak diliput media. Dalam kasus Arab mungkin ada kesalahpahaman terutama tentang perempuan Arab.

Terkait dengan pekerjaannya, Boushnaq membaginya menjadi dua. Ketika dia mulai melakukan pendekatan terhadap suatu subjek, dirinya harus menyadari bahwa ketika ditugaskan di Arab Saudi situasi yang dihadapinya berbeda dengan ketika bekerja di Gaza.

Pertama-tama, Boushnak harus mendapatkan kepercayaan orang yang akan diambil fotonya dan dia akan menunjukkan foto itu untuk mendapatkan izin. Pada saat Boushnak mengajukan foto tersebut ke majalah misalnya, dirinya berdiskusi dengan mereka untuk memperhatikan pilihan kata untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang subjek foto ini. Ini bukan persoalan dirinya takut kepada pihak berwenang. Namun ini lebih disebabkan dia berusaha menghargai subjek foto yang sudah mempercayai dirinya.

Untuk pekerjaan di Arab Saudi, Boushnak dan tim redaksi melakukan diskusi bersama. Mereka pernah menyepakati kata yang akan digunakan untuk sebuah laporan terkait dengan isu gender. Dia tidak terlalu memperhatikan judul laporan itu yakni "*Perempuan yang Melawan Patriarki*". Ternyata perempuan yang namanya ada dalam tulisan itu sama sekali tidak menyetujui judul laporan tersebut.

Mereka mengaku sebenarnya tidak menentang patriarki. Judul semacam itu akan memicu kontroversi di media sosial. Lantas mereka mencoba menghubungi pihak redaksi agar judul artikel tersebut diperbaiki. Jadi sebenarnya, juru foto juga memiliki tanggung jawab dalam hal ini.

Sebelumnya, ada persoalan mengenai pemisahan pihak asing dan pihak lokal. Fotografer memang harus berhati-hati melihat subjek yang berurusan dengan mereka karena apa yang dilakukan fotografer dapat membahayakan objek di dalam foto. Inilah alasan fotografer dituntut harus lebih sensitif dan juga untuk melakukan riset sebelum berkunjung ke suatu negara.

Mereka harus meyakini bahwa memang ada banyak orang lain yang mungkin lebih tahu mengenai persoalan tersebut daripada

mereka. Walaupun mereka berasal dari negara yang sama, masih saja bisa terjadi seperti itu. Ini memang pekerjaan fotografer dan mereka harus melakukannya dengan benar.

Kedengarannya hal itu seperti proses panjang dan lambat demi sebuah hasil yang tepat dan baik. Tapi banyak orang di luar yang mampu melakukannya secara cepat dan instan. Apa ini sebuah tantangan atautah ini memang tugas seorang jurnalis untuk lebih mendalami hal tersebut?

Boushnak mengatakan banyak informasi tersedia di media daring. Akan tetapi, tetap saja jurnalis dituntut untuk mendalami informasi. Fotografer harus lebih mendalami isu tersebut. Contoh yang bagus tentang pemanfaatan media sosial untuk fotografi adalah apa yang dilakukan oleh *National Geographic*. Media ini menampilkan foto di Instagram yang dilengkapi dengan informasi yang cukup banyak, termasuk *caption* yang menarik. Dan ternyata, orang memang membaca *caption* dan informasi yang disajikan, dan kemudian melakukan interaksi.

Memang banyak sekali gambar yang indah. Memang baik jika ada audiens atau pengikut yang menyukainya, tetapi fotografer juga harus melibatkan mereka. Jangan hanya dipengaruhi oleh gambar tetapi mereka juga diharapkan untuk bereaksi. Oleh karena itu, fotografer harus memberikan informasi yang benar.

Terkait dengan isu kemerdekaan pers, Boushnak menyatakan karena kondisi negara tempat dirinya meliput, dia harus melakukan sensor sendiri karena dia tidak ingin terlibat dalam propaganda. Seringkali fotografer memang ingin menyampaikan suatu pesan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan mereka dapat

menyerempet urusan yang bersifat politis. Jadi mereka harus berhati-hati mengenai pesan yang ingin disampaikan.

Jadi dalam pekerjaannya, Boushnak berusaha berfokus pada kisah yang lebih positif. Makanya, dia penasaran tentang masalah di balik sebuah cerita ini. Beginilah cara perempuan bekerja melawan ketidaktahuan di negara tertentu. Dia mengajukan pertanyaan berikutnya: “Jadi apa yang terjadi, bagaimana ceritanya?” Fotografer harus berhati-hati mengenai hal yang mungkin dianggap tabu. Misalnya di Gaza, perempuan tidak terlalu peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain. Mereka berbicara sangat lantang. Tapi di Arab Saudi dirinya harus berhati-hati jika ingin membicarakan sesuatu atau mengangkat persoalan tertentu.

Sementara itu, Nana Kofi Acquah, fotografer lepas dari Ghana, menegaskan dirinya tidak menentang orang asing yang datang dan melakukan pekerjaan sebagai juru foto di wilayah atau tempat tinggalnya. Dia merasa terkadang dirinya memang tidak menyadari ada sesuatu yang bernilai berita di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, orang asing memang perlu datang karena penduduk sekitar sudah terbiasa misalnya dengan sebuah peristiwa dan menganggap bahwa itu lazim.

Untuk Afrika sendiri, terutama dengan adanya juru foto dari negara maju sebagian besar datang ke benua ini dengan klaim sepihak bahwa mereka adalah yang profesional, ahli, dan pakar. Mungkin mereka menghabiskan waktu 1-2 tahun dan mengatakan bahwa mereka adalah pakar untuk wilayah ini dan mereka mendapatkan gelar tertentu.

Mereka merasa lebih superior. Jadi mereka sudah datang dengan sebuah perspektif tentang apa yang sedang terjadi di Afrika dan

mereka menemukan bukti untuk memperkuat klaim sepihak mereka tersebut. Tapi terkadang mereka mengabaikan hal yang jelas nyata di depan mata. Tapi jika seseorang datang ke Afrika, dan benar-benar datang dengan rasa ingin tahu, dengan rasa menghargai Afrika, sebenarnya Afrika dapat mengajarkan banyak hal.

Acquah mengatakan dirinya penduduk asli Afrika, tapi untuk menganggap bahwa dirinya, sebagai orang Afrika, memahami semua hal di Afrika, itu sangat tidak tepat.

Bisa saja dirinya datang ke suatu tempat yang mungkin berdekatan dengan rumahnya. Tetapi ketika mendekati kelompok masyarakat di sana, mungkin dirinya tidak memahami bahasa yang mereka gunakan. Jika seseorang tidak memahami suatu bahasa tidak mungkin dia memahami budayanya. Di Ghana sendiri ada 60 bahasa, Acquah mengakui dirinya menguasai empat bahasa dengan fasih dan tidak pernah mengklaim sebagai ahli Ghana.

Di mana dia memahami bahasanya sendiri, hal ini biasanya sangat membantu karena cara berkomunikasi dapat saja berbeda-beda.

Sebenarnya banyak komunikasi itu dilakukan dengan cara simbolis. Ada banyak juga pepatah atau peribahasa. Seseorang dari negara lain dapat datang ke sini dan boleh jadi dia mengerti kata-katanya, tapi sebenarnya dia tidak memahami bahasa dari orang-orang ini.

Ada banyak tempat yang menjadi rumah bagi dirinya, tapi Acquah tetap bertanya dan menjaga rasa ingin tahu dan penghargaannya terhadap orang lain. Kadang-kadang dengan menunjukkan sikap rendah hati dan menghormati apa pun yang ditemui, dan tidak

pernah berpikir untuk menjadi hakim atau seseorang yang lebih mengetahui, dapat membuka kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan baru.

Perkembangan teknologi di Afrika mungkin belum secepat di benua lain, tetapi jika seseorang ingin hidup sebagai manusia yang merupakan bagian dari dunia yang luas, dia dapat mempelajari banyak hal dari Afrika.

Oleh karena itu Acquah menyukai konsep “Everyday Africa”. Dulu ada jurnalis AS yang dikirim ke Afrika, oleh kantor mereka di New York. Mereka tinggal di Ghana dan ditugaskan untuk memotret situasi pasca perang di kawasan itu. Mereka agak frustrasi karena paham foto seperti apa yang diharapkan oleh redaksi mereka. Karena frustrasi, mereka mengambil foto kegiatan sehari-hari. Dari situlah “Everyday Africa” dimulai.

Konsep “Everyday Africa” dinilai berdampak besar karena membuka mata dunia tentang Afrika. Menurut Acquah, konsep ini penting juga untuk membuka mata orang keturunan Afrika yang tinggal di Eropa atau AS. Mereka mungkin lahir di sana, tapi orang tuanya berasal dari Afrika. Boleh jadi orang tua mereka mungkin agak malu tentang masa lalu mereka karena gambaran tentang Afrika adalah tempat yang penuh kekerasan, terbelakang, dan sangat negatif.

Mungkin banyak orang yang kaget mengetahui banyak orang Afrika berbahasa Inggris dan kemampuan berbahasa Inggris mereka begitu fasih. Ini terjadi karena apa yang diketahui tentang Afrika itu sangat terbatas. Acquah mengatakan, dirinya mengenyam pendidikan di Ghana, dari pra TK hingga universitas. Dirinya tidak pernah bersekolah di Eropa atau di mana pun. Banyak yang kaget

Acquah mampu berbahasa Inggris dan Bahasa Inggrisnya begitu baik dan fasih. Faktanya memang banyak sekali yang berbahasa Inggris sangat fasih di Ghana.

Jadi, tantangan bagi jurnalis adalah bagaimana mereka dapat menemukan cerita yang menarik tentang Afrika. Menurut Acquah, harus dilihat dulu bagaimana sejarah jurnalisme yang bisa dilihat di Afrika. Sebagian wartawan asing yang berkunjung ke Afrika tertarik dengan singa, zebra, jerapah, dan segala yang berhubungan dengan hewan. Mereka merupakan bagian dari kolonialisme.

Mereka percaya bahwa mereka lebih baik dari orang Afrika dan mereka berusaha meyakinkan orang Afrika tentang keyakinan mereka tersebut. Untuk menyampaikan pesan itu, mereka harus berusaha membuat orang Afrika mempercayai bahwa yang mereka miliki *inferior*, berkualitas rendah. Sebaliknya, semua yang mereka miliki superior atau lebih baik. Selama beberapa generasi banyak sekali orang Afrika muda yang mempercayai kebohongan ini.

Jadi, kegiatan pelatihan jurnalis juga berfungsi mengatakan kepada pemuda Afrika bahwa Anda tidak *inferior*, berkualitas rendah. Ini semua hanya konstruksi dari kolonialisme.

How Hwee Young, fotografer yang bekerja untuk European Pressphoto Agency (EPA), mengatakan fotografer yang profesional harus tunduk pada standar peraturan yang diterapkan EPA dan salah satu *code of conduct* yang tercantum di sana adalah fotografer harus akurat, foto mereka harus mewakili keadaan di sana, foto mereka tidak dimanipulasi dan harus sesuai dengan konteksnya.

Fotografer juga harus menghindari *stereotyping* individual atau kelompok dan menghindari agenda pihak tertentu. Mereka

harus menjunjung tinggi HAM dan harus selalu menghormati lingkungan. Fotografer harus selalu menjalin komunikasi dengan sejawat mereka. Seluruh anggota EPA diharapkan memahami dan mentaatinya. Jadi ketika fotografer membuat *caption*, mereka harus mengikuti dan tunduk kepada hal tersebut.

Memang ada aturan yang jelas dan jurnalis wajib mematuhi. Tetapi, ketika fotografer harus bersaing dengan *citizen journalist*, yang relatif memiliki kebebasan mempublikasikan foto yang mereka ambil, apa yang harus dilakukan? Ketika seorang fotografer meliput suatu topik, lalu ternyata kisah tersebut mempunyai banyak sisi dan ternyata ada banyak orang lain yang melakukan hal yang sama, apa yang harus dilakukan?

Hwee Young mengakui semua orang mempunyai *smartphone*, punya kamera, dan mereka memiliki pandangan masing-masing. Mereka bebas untuk mengunggahnya di sosial media masing-masing. Masyarakat menjulukinya *citizen journalism*, di mana mereka dapat menampilkan foto dari sudut pandang mereka. Dalam jurnalisme foto, fotografer harus memberikan pandangan, foto yang objektif, memberikan konteks yang sesuai, menyampaikan bahwa foto tersebut mewakili situasi yang ada.

Fotografer tidak bersaing dengan *citizen journalist*, dan tidak mengatakan bahwa *citizen journalism* itu salah. Tetapi, sebagai jurnalis, setiap fotografer dituntut untuk melakukan pekerjaannya yang lebih keras lagi dalam verifikasi.

Pertanyaannya adalah saat fotografer melakukan verifikasi, apakah dia juga menggunakan media sosial dan gambar yang ada di sana? Ini untuk membantu memastikan bahwa sampel materi dan hasil karya yang dikirimkan ke EPA sudah tepat, sudah benar atau belum.

Menurut Hwee Young, fotografer juga menggunakan media sosial untuk melihat foto yang sudah ada, yang dipublikasikan oleh *citizen journalist*. Memang kenyataannya tidak berbeda jauh. Ada persamaan dan kemiripan. Hwee Young setuju bahwa *citizen journalism* dapat menangkap subjek dan situasi di mana saat itu tidak ada kehadiran fotografer profesional.

Ketika mereka menampilkannya di media sosial, fotografer profesional juga dapat melihatnya. Jadi ini menguntungkan bagi kedua belah pihak karena dapat saling melengkapi satu sama lain.

Tetapi sebagai pekerja profesional, fotografer harus berhati-hati, memastikan keaslian foto supaya tidak ada manipulasi di sana. Dan, jika fotografer ingin menggunakan foto tersebut sebagai referensi, maka mereka sedapat mungkin harus mencari tahu siapa sumbernya, memverifikasi hasil karya tersebut kepada pemilik gambar tersebut, dan meminta izin mereka apabila mereka ingin menampilkannya.

Hwee Young mengakui hal itu tidak mudah karena seringkali gambar yang diterima itu adalah hasil dari tampilan yang sudah diteruskan ke berbagai banyak tangan, jadi tidak ada orang yang tahu sumbernya.

EPA pernah menggunakan atau menampilkan foto peristiwa untuk mendukung artikel yang menyebutkan bahwa pelantikan Presiden AS, Donald Trump, dihadiri sedikit orang dibandingkan dengan misalnya, pelantikan Presiden Barack Obama. Dalam hal ini, foto atau gambar yang ditampilkan dimaksudkan untuk mendukung artikel yang diterbitkan. Sebab pada saat itu ada keraguan bahwa jumlah orang yang menghadiri pelantikan Donald Trump sedikit.

MEDIA SOSIAL UNTUK PUBLIKASI

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial yang tinggi dan paling aktif. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Facebook. Namun, hal ini tidak berarti setiap fotografer juga aktif menggunakan media sosial. Jufri, mengaku dirinya salah satu pengguna media sosial yang pasif. Menurut dia, ada keuntungan dan kerugian bagi jurnalis foto ketika mereka menggunakan media sosial.

Keuntungan menggunakan media sosial adalah pada saat ada isu tertentu, foto yang di-*posting* di media sosial menjadi *viral* meluas dengan cepat. Ketika fotografer mempunyai gambar yang begitu kuat lalu ditampilkan di media sosial dan kemudian gambar tersebut menjadi *viral* maka itu dapat meningkatkan popularitas dan memberikan dampak luar biasa.

Penyajian gambar di media sosial juga dapat menimbulkan perubahan yang positif. Ini memang pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa kejadian di mana foto menjadi *viral* dan menimbulkan dampak.

Akan tetapi, mem-*posting* foto di media sosial juga dapat menimbulkan kerugian. Ada kalanya foto tersebut sifatnya *out of context*. Begitu foto tersebut ditampilkan dan ternyata *out of context*, maka dampaknya adalah kesalahpahaman dan konflik, serta dapat memicu masalah dari segi etika. Hal itu dapat dihindari kalau fotografer memilih menggunakan *channel* yang lebih konvensional.

Posting foto di media sosial memang lebih cepat disampaikan ke publik. Namun, publik akan selalu mempertanyakan apakah foto tersebut benar atau tidak. Jufri pun merasakan hal yang sama. Menurut dia, adalah hal yang baik jika seseorang ingin

memperlihatkan foto di media sosial. Masalahnya, publik tidak akan serta merta mempercayainya dan meragukan kebenaran foto yang di-*posting*. “Setiap kali saya melihat foto, rekaman atau video, saya harus bertanya-tanya apakah ini sudah dimanipulasi atau diedit? Bagaimana saya bisa memverifikasinya kalau saya melihatnya di media sosial?” tanya Jufri.

Seharusnya, masyarakat memilah-milah dan membandingkan foto atau rekaman yang didapat dengan sumber yang terpercaya saja, dari media independen yang memiliki rekam jejak bagus dan berintegritas. Meskipun itu bukan jaminan, setidaknya narasumber yang terpercaya itu tunduk pada standar etika.

Banyak sekali orang menggunakan Instagram dan memang banyak keuntungan dari hal ini. Menurut Jufri, yang jarang membuka Facebook maupun Instagram, ini faktor kebiasaan. Dia sendiri bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang menghabiskan waktu untuk Facebook. Ke depan Jufri berencana untuk lebih aktif menggunakan media sosial.

Seperti halnya Jufri, sebagai fotografer, Swan Ti mengaku dirinya juga pengguna media sosial yang pasif. Namun, sebagai manajer program di Panna India, dia tidak punya pilihan selain aktif di media sosial karena memang mudah untuk mempublikasikan kegiatan, peristiwa atau keprihatinannya atas sebuah isu langsung melalui media sosial kepada mahasiswa dan komunitas fotografi.

Mereka juga dapat berkomunikasi melalui Instagram maupun Twitter. Akan tetapi, Swan Ti skeptis tentang dampak positif yang dapat diperoleh dari penggunaan media sosial.

Namun, dia sadar bahwa media sosial juga memberikan dampak baik, karena dapat menyatukan berbagai pihak. Mereka bisa menjadi interaktif. Mereka dapat saling berinteraksi dengan mudah. Mereka dapat memprotes suatu hal yang tidak mereka setujui dan bisa menggalang kekuatan juga di sana.

Menurut dia, jurnalis juga bertanggung jawab untuk menyeimbangkan apa yang ditampilkan di media sosial. Mereka harus mampu memberikan perbandingan yang baik ketika masyarakat mengunggah foto atau rekaman tanpa mempertimbangkan hal penting di belakangnya.

Jadi jurnalis juga perlu mengedukasi pengguna media sosial. Kesimpulannya, menurut Swan Ti, media sosial memang memiliki fungsi penting. Tetapi dia merasa belum mendapatkan bukti pendukung. Sering kali perdebatan di media sosial didasari oleh keyakinan tertentu yang dinilainya tidak memberikan manfaat.

Melihat pengakuan fotografer seperti Jufri dan Swan Ti, bahwa mereka bukan pengguna media sosial yang aktif, apakah ini menunjukkan bahwa jurnalis terlalu lamban dalam mengikuti perkembangan media sosial?

Dalam peristiwa Arab Spring, misalnya, jurnalis dapat mengikuti perkembangan dan mencari tahu siapa yang berada di belakang demonstrasi anti-pemerintah tersebut melalui media sosial. Akan tetapi, *platform* itu pun dapat disalahgunakan.

Acquah menegaskan bahwa dirinya adalah seorang jurnalis aktif dan memiliki kartu pers. Dirinya aktif mengunggah foto hasil karyanya melalui Instagram. *Platform* lain yang biasa dipakai adalah Everyday Africa, yang mempekerjakan 30 orang kontributor.

Platform ini memberikan kesempatan luas kepada kontributor untuk menampilkan hasil karya mereka. Perlu diingat, di sana ada *gatekeeper* yang menjaga kualitas foto atau rekaman yang di *posting*. Jadi, *platform* ini dikelola secara profesional.

Kontributor dan jurnalis yang profesional pun juga akan selalu berhati-hati dalam memilih gambar untuk ditampilkan. Media sosial hadir dan akan berkembang pesat. Audiens akan memperoleh berita dan bereaksi terhadap berita itu. Di situlah perubahan akan terjadi.

Acquah menegaskan pentingnya media sosial dalam membantu masyarakat untuk berkembang maju. Dia mengkritik pendapat yang menilai bahwa media sosial menjadi penyebab kekacauan di masyarakat. Secara ekstrem, Acquah menanyakan jika media sosial berperan sebagai penyebab Perang Dunia I atau Perang Dunia II. Atau media sosial justru berperan dalam kampanye untuk memajukan HAM?

Jadi masyarakat hendaknya tidak menganggap media sosial sebagai *platform* yang menciptakan kekacauan maupun keributan. Masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan baik. Media sosial memang memberikan kekuatan kepada seseorang yang akan menentukan dan menggunakannya untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Dia lah yang akan memutuskan *platform* yang dipakai, apakah akan menebarkan manfaat atau justru memicu kemarahan, pertikaian, konflik. Pilihan itu ada di tangannya.

Ada yang mengatakan seseorang lebih baik mempunyai akun media sosial. Ini memang sebuah *platform* yang baik. Mungkin, untuk sementara orang tersebut tidak menggunakannya. Suatu saat, jika dia membutuhkan, dia bisa memanfaatkannya. Ini lebih baik daripada tidak memiliki *platform* sama sekali.

Di Afrika, masyarakat merasa bahwa kalau mereka memiliki akun Everyday Africa mereka dapat mengaksesnya kapan saja.

Tentu saja, hal seperti itu tidak akan menjadi masalah kalau dibandingkan dengan seseorang yang mungkin memiliki aplikasi tapi tidak pernah menggunakannya sama sekali. Jadi fotografer harus berhati-hati, ini dipahami oleh fotografer konvensional. Setelah mengambil foto, foto tersebut sepertinya mengikuti mereka, terus membayangi mereka. Untuk media sosial, mereka tahu ia memiliki ancaman tertentu. Makanya mereka harus mengontrolnya, bukan sebaliknya. Juga akan bijaksana untuk tidak sampai membiarkan para amatir, misalnya, untuk mengontrol media sosial.

Sementara itu, Boushnaq melihat bahwa media sosial di dunia Arab memang memainkan peran yang sangat penting pada proses Arab Spring. Orang yang memicu proses ini tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab. Tetapi, mereka tidak menyangka akan ada reaksi yang begitu besar dari para demonstran. Jadi, untuk dunia di mana orang tidak bebas menyuarakan pendapat, ini merupakan landasan atau *platform* yang bermanfaat di mana orang dapat memperoleh atau memberikan informasi, apakah itu *citizen journalist* atau aktivis.

Boushnaq sendiri mengaku menggunakan media sosial sebagai bagian dari pekerjaannya. Dia merasa media sosial merupakan sarana yang sangat penting untuk berbagi cerita. Sebagai jurnalis foto, dia juga mengikuti jurnalis lain dan belajar menggunakan media sosial dengan cara yang lebih cerdas dengan sedikit menjaga jarak.

Boushnaq mengikuti kelas atau kuliah tentang *post traumatic stress disorder* (PTSD), dan orang yang memberikan kuliah tersebut mengatakan bahwa seseorang harus memperhatikan kekerasan

yang dialaminya sehari-hari. Sering kali, ketika membuka Facebook atau Instagram, orang tidak memiliki pilihan gambar apa saja yang diinginkan. Bisa saja ada gambar yang menampilkan kekerasan dari Suriah.

Memang itu gambar yang penting untuk diperhatikan dan dilihat. Tetapi sebagai jurnalis, mereka dituntut dapat menarik perhatian orang mengenai sebuah peristiwa atau cerita tanpa membuat orang merasa tidak nyaman dengan gambar seperti itu. Sering kali, orang berpikir mengapa ada orang seperti Kim Kardashian memiliki pengikut yang begitu banyak, tetapi di satu *platform* lain yang membahas hal yang lebih penting justru memiliki jumlah pengikut yang jauh lebih sedikit.

Untuk isu kekerasan, jurnalis profesional harus menjaga jarak, mempelajari cara menggunakan media sosial dan juga mencari cara yang lebih inovatif agar audiens dapat berinteraksi dengan baik.

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah selain menjalankan tugasnya melakukan liputan, jurnalis juga merasa bertanggungjawab untuk mewujudkan perubahan di masyarakat?

Bagi Jufri, tugas seorang jurnalis tidak cukup berhenti melakukan liputan. Tugas jurnalis juga mewujudkan perubahan di masyarakat. Dia juga merasa keberadaan *citizen journalism* tidak bisa dihindari. Yang lebih penting adalah bagaimana jurnalis, pendidik, pemerintah, dan LSM mengambil peran dalam mendidik *citizen journalist* agar mereka dapat melakukan reportase secara bertanggung jawab dengan etika yang diterapkan, sebagaimana yang harus diikuti oleh jurnalis profesional.

Isunya di sini bukan apakah *citizen journalist* itu bersaing melawan jurnalis profesional. Mereka sebenarnya adalah mitra. Jadi, mereka dapat bekerja sama untuk mewujudkan perubahan. Jurnalis juga harus mendidik pemirsa dan pembaca mengenai cara mereka memproses apa yang mereka baca. Intinya di sini adalah pendidikan.

Sementara itu, Hwee Young merasa bahwa kegiatan jurnalistik yang baik itu sangat penting dan ini juga merupakan pembuktian bahwa jurnalisme yang baik memang penting untuk mengubah dunia.

Dalam jurnalisme, gambar atau visual amat penting karena sering kali gambar merupakan hal pertama yang diperhatikan orang. Gambar dilihat orang dan dapat menciptakan gagasan dan alur pemikiran. Hwee Young merasa kegiatan jurnalistik foto itu memiliki peran penting dalam mengubah dunia dengan cara tersebut. Harus diakui juga bahwa masyarakat terlalu banyak menerima gambar sebenarnya. Jurnalis harus mencari cara baru untuk memotivasi orang untuk mewujudkan perubahan.

Menurut Acquah, perubahan dapat dimulai dengan menggunakan gambar yang sangat sederhana. Perumpamaannya adalah makanan. Untuk makanan, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Jika seseorang ingin memakan makanan sehat, dia akan pergi ke restoran yang baik dengan makanan yang sehat. Jika dia sibuk tentunya dia akan pergi ke restoran makanan cepat saji.

Boushnaq juga merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan perubahan. Karena itulah dia melakukan pekerjaannya. Dia menggunakan fotografi untuk menyampaikan gagasan dan pesan dari latar belakang hidup dan lingkungannya. Jurnalis memang

memiliki peranan penting. Boushnak melihat fotografi sebagai alat yang kuat untuk mewujudkan perubahan.

Masyarakat membicarakan pengungsi Suriah, pekerja migran, dan sebagainya. Lalu, ada LSM yang mengkritisi bahwa jurnalis menyebarkan gambar yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Lantas, pertanyaannya adalah bagaimana jurnalis dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka dapat menyajikan laporan yang lebih positif.

Terkait persoalan etika jurnalistik, Acquah menyatakan bahwa persoalan ini terkait dengan motif awal dari jurnalis itu sendiri. Apa motivasi jurnalis untuk menampilkan foto tertentu? Faktanya memang ada fotografer yang membuat dan mempublikasikan foto tertentu untuk memenangi penghargaan. Namun jika motivasi seorang jurnalis adalah ingin berdampak terhadap masyarakat, untuk memajukan masyarakat, tentunya dia tidak akan terkena masalah etika.

Acquah menduga mungkin jurnalis bersangkutan melakukan sesuatu yang kurang pantas misalnya, mengambil foto seseorang dan kemudian meminta maaf kepadanya. Jika jurnalis tersebut meminta izin terlebih dahulu mungkin dia akan menolak. Jadi, si fotografer memotret dulu, baru meminta maaf dan berharap bahwa foto ini dapat diterbitkan.

Masalah etika sebenarnya muncul pada saat orang berusaha memasuki kompetisi dan memenangkan penghargaan. Jadi, jurnalis yang seperti ini seharusnya ditanya dulu alasan mereka misalnya dengan mengajukan pertanyaan: “Soal orang yang Anda foto itu, apa yang terjadi dengan mereka? Di mana mereka sekarang? Apakah Anda punya nomor telepon mereka?”

Jadi, mereka dapat menindaklanjuti foto ini dan ketika ada proses seperti ini, maka mungkin fotografer akan lebih bertanggung jawab. Acquah berharap mereka berpartisipasi di sini karena ingin mengubah kehidupan orang, bukan hanya mereka mengejar penghargaan. Jika foto negatif ditampilkan, mengapa yang positif tidak.

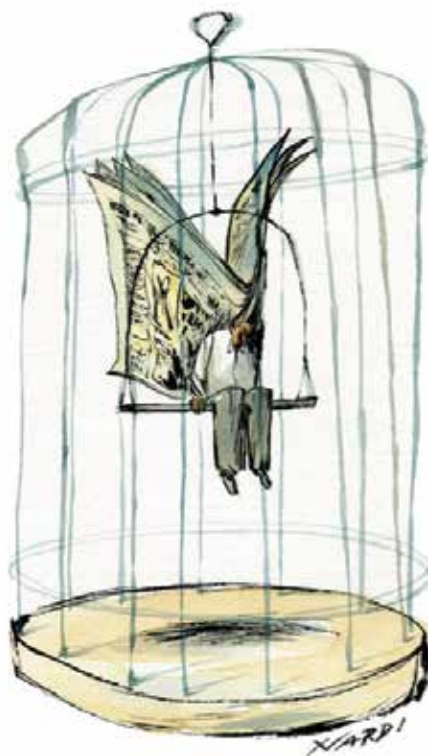
Sementara itu, Boushnaq mengatakan dia memahami sudut pandang LSM mengenai foto negatif dan ketidakinginan mereka untuk melihat foto tersebut. Tapi, ada foto tertentu yang setidaknya perlu didokumentasikan karena akan digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan kejadian yang sebenarnya.

Terkadang, foto yang jelek dan tidak menyenangkan dapat mengubah atau menggeser opini publik. Oleh karena itulah, pada saat militer AS mengizinkan jurnalis foto ikut dalam misi, mereka sangat berhati-hati. Ini perlu mendapatkan perhatian karena mungkin saja foto yang diambil selama misi terkesan mengerikan bagi sebagian orang.

Boushnaq bekerja di redaksi kantor berita Prancis dan memang ada klien dari AS yang mundur karena melihat banyak sekali foto yang mengerikan. Klien ini memutuskan tidak berlangganan lagi.

BAB XII

MEMASTIKAN KEBEBASAN ARTISTIK: TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK



Nardi/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Karya cipta artistik itu bebas, demikian bunyi Pasal 1 legislasi baru Prancis mengenai kebebasan artistik, arsitektur, dan pusaka. Pasal 2 berbunyi penyebaran karya cipta itu bebas. Undang-undang ini baru disahkan pada Juli 2016. Kebebasan adalah bagian dari demokrasi partisipatoris. Dengan UU ini pemerintah Prancis berharap mempromosikan ekosistem yang dinamis untuk seniman dan kreativitas, memantapkan kerangka label musik, dan membangun *observatory* untuk keragaman budaya dan kreativitas.

Namun, sungguh pun dukungan global bagi seniman meningkat, beberapa tahun ini masih banyak tantangan yang dihadapi. Implementasi Rekomendasi 1980 mengenai Status Seniman dan Konvensi 2005 tentang Perlindungan, dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya memberi efek terhadap isu terkini seperti kebebasan berekspresi dan akses terhadap kehidupan budaya, teknologi digital, dan internet, serta kemudahan melakukan perjalanan bagi seniman dan perlindungan sosial.

Kelanjutan atau peningkatan dukungan diperlukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat modern dan demokratis. Ini mencakup pengesahan peraturan yang diarahkan untuk memperbaiki status ekonomi dan sosial seniman, mengembangkan perundang-undangan secara menyeluruh untuk memfasilitasi mobilitas seniman dari belahan selatan bumi, dan mengembangkan kebijakan serta langkah yang menguntungkan kolaborasi seniman dan asosiasi mereka. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat yang relevan juga diperlukan.

Tak hanya Prancis yang telah memastikan kebebasan artistik, kebijakan sejenis juga tengah diupayakan oleh Selandia Baru yang berusaha menghilangkan hambatan bagi kebebasan artistik. Negara itu menawarkan solusi untuk seniman, penampil, musisi dunia, dan

kru pendukungnya. Mereka menjamin visa mereka dengan biaya yang lebih murah dan lebih sedikit persyaratan dokumen.

Seniman perlu mengikuti sejumlah festival seni yang ternama atau dipromosikan oleh promotor musik. Pemerintah Selandia, dalam hal ini dinas imigrasinya, memberikan izin penyelenggaraan kegiatan seni kepada sekitar 41 promotor musik dan untuk 40 festival. Pemerintah negara itu berharap dapat menghadirkan kesempatan kepada seniman lokal untuk mempelajari keahlian baru melalui interaksi dengan seniman dunia, sejalan dengan upaya peningkatan akses terhadap keragaman ekspresi budaya untuk penonton lokal.

KEPASTIAN HUKUM UNTUK KEBEBASAN ARTISTIK

Farida Shaheed, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Budaya, menjelaskan budaya sebagai suatu proses yang selalu berubah, bukan statis.

Sebelumnya ada ilmuwan sosial, ekonom, jurnalis, penyair, pelukis, musisi yang selain berkarya juga menantang norma karena mereka ingin berkreasi. Salah satu yang menarik dari kreativitas seni adalah ia mampu menggerakkan sisi emosi dan intelektualitas masyarakat. Namun kreativitas seni pun kadang dilihat sebagai hal yang membahayakan dari perspektif tertentu. Namun dari aktivitas menulis laporan selama bertahun-tahun terbukti bahwa pemahaman dan ekspresi artistik tersebut penting dan harus menjadi bagian dari sisi manusia yang berekspresi tentang kemanusiaan.

Jadi, ketika kreativitas dibatasi, dikontrol, dan dikekang, sebetulnya orang tidak hanya membunuh kreativitas saja tapi juga membunuh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan ada di tengah-tengah

masyarakat. Perlu ditekankan, hak budaya dan kebebasan artistik sudah termuat dalam berbagai instrumen HAM.

Ini bukan hanya masalah seniman saja, tetapi juga masalah kebebasan berekspresi. Kadang orang hanya memikirkan kebebasan berekspresi secara umum. Tetapi ada isu lain yang lebih luas dari sekadar itu seperti isu mobilitas terkait, misalnya, izin kerja, visa, pendidikan seni, dan pembiayaan.

Kalau ini adalah soal HAM dan kebebasan artistik, maka harus ada peluang untuk mendapatkan pendidikan di sekolah artistik. Dan ini juga berhubungan dengan mata pencaharian. Jadi perlu UU ketenagakerjaan dan lain-lain. Tapi tentu saja ada isu tentang pelaku seni sendiri.

Isu lain yang menarik perhatian adalah kerentanan pekerja seni terhadap berbagai risiko. Mereka harus berbagi informasi dengan publik seperti insan media. Seniman berada di bagian depan dan membuat mereka menjadi rentan. Isu ini terkait dengan hak lain seperti hak berserikat, beropini dengan bebas, memiliki keyakinan sendiri, dan seterusnya. Perlindungan terhadap pekerja seni perlu ditelaah, tapi harus diketahui dulu siapa seniman atau pekerja seninya, siapa yang menghadapi risiko.

Peraturan yang ada seringkali hanya terfokus pada apa yang disebut kebebasan artistik, hanya bicara soal penyensoran dengan bumbu politisnya. Ada banyak hal yang sebenarnya menekan kebebasan berkreasi, kebebasan artistik ini. Beberapa hal yang belum dilihat orang adalah seniman merupakan bagian dari spektrum politik dan sosial. Banyak seniman berbicara tentang penyensoran.

Pada saat publik mengakui pekerja seni sebagai kelompok yang rentan dan perlu dilindungi, publik juga harus melihat industri kreatif itu sendiri. Seandainya ada monopoli atau oligarki maka tidak

akan pernah ada publikasi karya seni dan publik tidak akan pernah mengenal mereka. Penulis independen misalnya adalah pihak yang juga harus mendapatkan perhatian.

Shaheed mencontohkan ada banyak sekali kontroversi, misalnya iklan komersial diperbolehkan, tapi sering pula ada perbedaan yang sangat besar ketika seniman tertentu mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Ada juga negara yang biasa menangkap dan memenjarakan seniman, sementara yang memberikan iklan tidak diperlakukan sama. Di sini kebebasan artistik seperti dikungkung.

Masalah lain yang sering luput dari perhatian dan tidak dihormati adalah masalah hak cipta. Jadi pada saat seniman berkreasi maka hak cipta menjadi sesuatu yang penting. Kadang-kadang pekerja seni ini tidak memiliki pilihan tidak dapat memiliki hak cipta untuk ciptaannya sendiri karena sudah dikontrakkan ke pihak lain. Jadi publik harus melindungi pekerja seni dan memastikan bahwa mereka memiliki hak material sekaligus hak moral, tapi ini sering dilupakan orang. Masyarakat luas harus melihat perkecualian sehingga nantinya kondisi mereka dapat menjadi lebih baik.

Meskipun ide kebebasan artistik sudah ada sejak 1980, namun cukup mengejutkan bahwa pemantauan dan advokasi untuk ekspresi artistik merupakan hal yang masih baru. Mantan Direktur PEN International, Sara Whyatt, mengatakan *monitoring* baru dilakukan 2-3 tahun secara teratur dan terinci untuk mengetahui siapa saja yang menghadapi risiko. Lembaga ini juga masih dalam fase awal mempelajari sistem *monitoring*. Whyatt membeberkan data dari laporan Shaheed. Pada 2016 terdapat sejumlah pelanggaran terhadap kebebasan artistik.

Data Shaheed tentang pelanggaran kebebasan artistik ini memperlihatkan ada 840 penyensoran dari beragam jenis seni (terbanyak di bidang film), 43 kasus penuntutan, 84 kasus pemenjaraan, 40 kasus ancaman atau persekusi, 16 kasus penyerangan, dua kasus penculikan, dan tiga kasus pembunuhan. Pelaku pelanggaran cukup beragam mulai dari pemerintah, kelompok militan, tokoh atau kelompok politik, perusahaan, sampai kelompok agama atau kelompok masyarakat lainnya. Umumnya ancaman semacam ini dimulai dari komentar politisi dan konflik, isu minoritas, LGBT, perempuan, agama, dan tradisi. Data itu juga menunjukkan situasi di sejumlah negara terutama negara Nordik yang memperkenalkan kota yang aman, tempat yang aman dari konflik, dan juga 'surga' untuk seniman.

Whyatt juga mengemukakan beberapa jenis legislasi yang sudah diberlakukan seperti UU pencemaran nama baik. Fakta yang ditemukan adalah seniman sendiri juga tidak banyak tahu soal hak mereka dan jika hak ini diakui secara internasional. Demikian pula pemerintah justru tidak mengetahui hak seniman. Banyak hal yang harus dilakukan karena audiens dan konsumen artistik juga tidak mengetahui tentang kebebasan artistik.

KEBEBASAN ARTISTIK DI AFRIKA

Konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan krisis pengungsian akhirnya membuat sebagian seniman menjadi aktivis masyarakat madani, kata Direktur Seni dan Penasehat Budaya Art Move Africa, Khadija El Bennaoui.

Krisis yang terjadi ini juga ikut mempengaruhi seniman di Suriah dan Afghanistan. Ada beberapa contoh dari solidaritas terutama dari masyarakat madani dan organisasinya. Masyarakat madani yang responsif, kreatif, dan inventif berusaha menciptakan mekanisme

penyelesaian masalah seperti kurangnya pendanaan atau peralatan pendukung. Seperti kasus di Suriah, seniman tidak punya akses yang besar untuk berkreasi. Ada pekerjaan seni dari beberapa kota di Eropa seperti Paris dan Berlin untuk orang Suriah. Sayangnya, mereka tidak dapat bergerak dan mendapatkan akses ke pendanaan.

Seperti contoh ada pekerjaan di Prancis yang menuntut kualitas seniman pada tingkat *state of the art*. Ada juga program dari Center Institute di New York yang seharusnya mengembangkan program di Afrika Utara dan Timur Tengah. Namun masalah menghadang, lagi-lagi soal visa. Juga ada penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya di Berlin. Tapi kembali lagi ada improvisasi dan kreativitas yang terus menerus harus direspons dengan instrumen dan dukungan negara. Ini masih menjadi tantangan bagi seniman.

Masalah yang dihadapi seniman bukan hanya visa saja, tapi juga akses ke pendanaan. Masalah tempat tinggal saja bagi seniman sudah menjadi masalah kemudian juga kemampuan organisasi yang belum memadai. Sistem pembiayaan di bumi belahan utara menyulitkan seniman dari bumi belahan selatan. Tantangan lainnya terkait dengan kemampuan berbahasa asing mengingat banyak agensi pendanaan yang meminta proposal dalam bahasa negara donor. Kompleksitas kebebasan artistik itu meliputi sejumlah isu mulai kebebasan berkreasi sampai pada pendanaan.

KEBEBASAN ARTISTIK DI INDONESIA

Upaya mendukung kebebasan artistik juga sangat membutuhkan peran legislasi baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Otoritas harus memiliki perangkat untuk dapat memberlakukan legislasi seperti *copyright* yang bermanfaat bagi seniman atau peraturan untuk mendukung kebebasan artistik. Upaya legislasi juga dilakukan

pemerintah Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid.

Farid menjelaskan dua dimensi yang berbeda soal kebebasan artistik di Indonesia. Contohnya dapat diambil dari kasus penyair Wiji Thukul yang hilang sekitar 1997-1998. Pertama kebebasan dari represi, tekanan, dan ketakutan. Kedua adalah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seni termasuk kemudahan untuk mengakses bantuan keuangan. Untuk memastikan pekerja seni memiliki akses yang besar ke sumber pembiayaan dan mendapatkan hak mereka, pemerintah meluncurkan UU yang menjamin kebebasan artistik dan kesejahteraan pekerja seni. Sebelumnya Indonesia telah mempunyai UU No. 9/ 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang Undang No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Diakui Farid masih ada masalah dan tantangan saat berhadapan dengan represi yang dilakukan oleh aktor di luar negara. Menurut dia, hal ini tidak saja terjadi di Indonesia tetapi sudah menjadi tren di dunia. Seperti yang terjadi di Jakarta yang baru saja menggelar pemilihan kepala daerah yang memperburuk situasi di Daerah Khusus Ibukota ini. Pemerintah Indonesia, menurut Farid, masih menangani hal ini, mendokumentasikan semua pelanggaran dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah merasa senang dapat bekerja sama dengan Komisi HAM Dunia dan organisasi HAM di Indonesia. Undang-undang yang baru ini disebut UU Pemajuan Kebudayaan, konsep yang diambil dari UUD 1945. UU tersebut menjamin kebebasan artistik dan hak pekerja seni dalam menyampaikan aspirasi secara lebih baik. Ia memuat empat konsep tentang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya.

Salah satu fitur yang paling penting di dalam UU itu adalah soal pengarsipan. Hal ini sangat terkait dengan hak cipta. Ini bukan hanya untuk seniman kontemporer karena mereka memiliki UU Hak Cipta sendiri terkait dengan hal itu, tapi masalahnya adalah tidak setiap pekerja seni menyimpan catatan semua karya mereka. Jadi pemerintah juga memberikan bantuan untuk hal tersebut.

Demikian pula untuk seni tradisional yang masih terabaikan. Masih banyak kekurangan dalam pencatatan padahal ada lebih dari 90.000 jenis makanan atau tarian yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Masih sedikit yang baru dilakukan untuk memastikan pemanfaatan ekspresi artistik ini agar bisa dilindungi. Contoh lainnya adalah soal jamu yang menjadi warisan tradisional yang berkaitan erat dengan cara hidup dan nilai yang berkembang di masyarakat. Ekspresi artistik tidak berdiri sendiri tetapi selalu terkait dengan kehidupan yang lain. Pengarsipan untuk memastikan tentang hak cipta adalah satu fitur dari UU yang baru diluncurkan ini.

Ada pula kebutuhan akan edukasi dan literasi supaya orang dapat memahami pentingnya kebebasan artistik. Memang masih ada masalah dan tantangan dari sisi birokrasi. Tapi pemerintah memahami bahwa kebebasan artistik sudah menjadi suatu kebutuhan sehingga masyarakat mengetahui cara menjalani kehidupan yang baik di masa depan.

Hal yang juga penting adalah soal pendanaan dan inisiatif untuk mendiskusikan proyek yang tidak mendapatkan pendanaan dari sumber manapun. Inisiatif kerja sama pemerintah, organisasi masyarakat madani, dan donor penting ditindaklanjuti dan harus dikembangkan lagi di masa mendatang.

Indonesia kini dianggap sebagai salah satu negara demokrasi paling besar tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan agar pekerja seni bisa mengekspresikan diri dalam kondisi yang lebih baik. Dibutuhkan masukan atau rekomendasi untuk mengembangkan kebebasan artistik bukan hanya di daerah tapi juga dalam hubungan Indonesia dengan dunia.

DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK

Direktur Departemen Budaya, Asia-Europe Foundation (ASEF), Anupama Sekhar, menilai tantangan utama sebelum sampai pada tahap *review* dan pemantauan kebijakan adalah ketiadaan sistem informasi yang handal.

Seniman dan praktisi budaya tidak mempunyai gambaran yang luas. Mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing termasuk dalam mengelola organisasi.

Informasi hukum dan sistem informasi nasional sangat diperlukan. Sebagai contohnya adalah Asia-Europe Compendium of Cultural Policies dan beberapa inisiatif PBB yang sudah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Sistem informasi nasional digunakan untuk membantu pembuat kebijakan sehingga masyarakat dapat menggunakannya termasuk untuk pemantauan. Mekanisme nasional menjadi instrumen yang penting dan tidak harus dari kelompok kerja. Dengan demikian ada kesempatan untuk mendapatkan masukan dari survei atau kuesioner.

Organisasi masyarakat madani dan seniman, menurut Sekhar, merupakan wadah yang dapat menciptakan dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat madani. Tantangan klasik yang selama

ini muncul adalah rasa kurang percaya antara pemerintah dan masyarakat madani, yang terkadang mempunyai hubungan antagonis satu sama lain.

Jadi sebelum berusaha keras mendapatkan kepercayaan satu sama lain, prosesnya dimulai dengan tahap kecil dulu yakni pengembangan jejaring formal atau dialog formal agar ada keterbukaan di antara kedua pihak. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah dapat berbagi informasi untuk mewujudkan mimpi dengan masyarakat madani sebagai *watchdog* budaya. Ada peluang untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang ada di kawasan dan belajar dari pengalaman masyarakat madani di kawasan lain untuk kemudian mengadopsinya.

Ada beragam inisiatif dan perspektif yang memperlihatkan agenda besar terkait dengan kebebasan bergerak, serta hak ekonomi dan sosial.

Shaheed mengakui sulit untuk memprioritaskan salah satu pihak, apalagi persoalan ini tidak pernah mendapatkan perhatian di masa lalu. Kebebasan artistik memang sering kali menyorot hubungan masyarakat madani dan pemerintah. Kebebasan artistik harus menjadi agenda utama di belahan bumi manapun. Dengan melihat kebijakan di kawasan lain, satu negara dapat mengambil inisiatif untuk menerapkan sistem atau kebijakan, dan ini adalah sebuah kemajuan.

Ini bukan masalah media atau seniman, tetapi masalah ekspresi dari manusia. Shaheed melihat situasi yang sama di Pakistan. Dia sendiri adalah asli warga negara Pakistan yang telah melihat bagaimana negaranya tercabik oleh agenda kelompok ekstremis yang menyerang kebebasan artistik dan budaya. Pengalaman ini dapat dijadikan pelajaran oleh masyarakat yang menolak ekstremisme. Pemerintah harus mendukung kebebasan artistik tersebut.

Ada banyak masalah yang dihadapi seniman. Mereka selalu menjadi kelompok yang terpinggirkan. Dukungan terhadap kebebasan artistik penting karena ini adalah bagian dari HAM. Dengan menyediakan ruang untuk seniman, jika dapat dilakukan maka harus diciptakan semacam keseimbangan antara dukungan publik dan swasta karena salah satu atau keduanya dapat menjadi masalah bagi kebebasan berekspresi.

Penyampaian pendapat dan penyensoran berhubungan dengan kreativitas. Ada banyak swa sensor dan hal ini menjadi lebih intensif ketika seniman berada di bawah ancaman. Ini seperti menciptakan sesuatu tetapi kemudian datang ancaman sensor negara. Pengekangan kreativitas dan kebebasan artistik oleh negara juga terjadi dalam beberapa tahun ini. Di Spanyol ada musisi yang diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara setelah dituduh membangkitkan terorisme. Sayangnya hal ini tidak terlalu diketahui masyarakat di luar Spanyol. Ada pula denda yang tinggi untuk pelanggaran yang terkait dengan foto. Ada beberapa masalah yang sama di Eropa, termasuk Inggris, dengan skala yang berbeda. Seniman di Turki juga banyak mendapat tekanan tetapi mereka tetap teguh berdiri dan menghadapinya.

Shaheed menambahkan perubahan harus bersifat berkelanjutan dan inisiatifnya sebaiknya bertunas di tingkat lokal. Perlu diketahui HAM bukan konsep Barat saja karena semangat yang diusungnya bersifat universal.

Pekerja seni di Afrika Utara yang hidup di masa rezim otoriter melihat dampak signifikan pekerjaan artistik terhadap masyarakat. Hal itu menghasilkan perubahan mental sebagai kontribusi mereka di masyarakat. Akibatnya rezim mulai menyerang pekerja seni dan itu tidak menimpa perorangan atau terjadi di satu negara saja. Contohnya di negara Afrika Utara seperti Mesir dan Maroko, rezim yang berkuasa mencermati setiap aliran dana yang masuk ke negara mereka, terutama yang masuk ke rekening organisasi masyarakat madani.

Pekerja seni di negara itu harus memiliki akses ke instrumen seperti konvensi internasional. Perlu penerjemahan dokumen ke bahasa setempat sehingga pekerja seni lokal dapat memahami apa yang diatur di tingkat dunia. Mereka juga perlu mengasah keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat memanfaatkan instrumen ini.

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI SKANDINAVIA

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Skandinavia ramah terhadap masyarakat terutama pekerja seni untuk mengekspresikan diri. Dukungan mereka terhadap apa yang dipromosikan UNESCO tercermin dalam kebijakan di kawasan itu seperti yang terlihat di Denmark, misalnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Duta Besar Denmark untuk Indonesia Casper Clynge bahwa negaranya mendukung upaya untuk menegakkan kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Denmark memberikan dukungan kepada pekerja seni, dan mekanisme UNESCO untuk menerima pengaduan dan ini disetujui oleh pihak berwenang di Denmark.

Sistem di Skandinavia, kata dia, agak berbeda dengan sistem di negara lain. Di kawasan tersebut pemerintah memberikan banyak sekali pendanaan untuk pekerja seni. Tapi pemerintah menjaga jarak dengan mereka. Pemerintah memberikan pendanaan tetapi tidak mau mengintervensi. Hal tersebut menjadi dasar dari dukungan yang diberikan pemerintah negara di kawasan Skandinavia kepada pekerja seni.

Penting juga untuk ketahui, negara sekecil Denmark memiliki Nordic Noir yang kemudian menjadi cukup populer di dunia. Negara ini memberikan kesempatan kepada pekerja seni untuk menampilkan pertunjukan apa saja di Denmark. Ini adalah salah satu contoh bentuk dukungan kepada pekerja seni.

Kadang-kadang Denmark juga menerapkan pendekatan ala Skandinavia untuk kegiatan di Indonesia. Seperti beberapa tahun lalu Denmark meluncurkan program budaya yang relevan dengan tema ini. Dia mencontohkan dukungan yang ide dasarnya adalah memberikan *support* kepada pekerja seni di daerah terpencil di Indonesia yang tidak memiliki akses atau kesulitan masuk ke pasar. Pemerintah Denmark juga bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam beberapa kegiatan.

Pemerintah memberikan ruang kepada pekerja seni lokal supaya dapat berkreasi dan hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Di Bali, contohnya, pemerintah memberikan dukungan kepada dunia pariwisata mendukung petani yang terancam oleh industri pariwisata yang menjadi sektor andalan provinsi itu. Pemerintah membantu untuk menjembatani, mencoba membuat kesepakatan antara pemerintah lokal dan pekerja seni. Sejauh ini hasil yang terlihat memang belum memuaskan, tapi paling tidak usaha ini bisa dipandang sebagai langkah awal ke arah kerja sama yang kuat antara sektor pertanian dan pariwisata. Dukungan lain diberikan kepada Yayasan Kelola melalui pengucuran hibah kepada pekerja seni muda terutama dari daerah konflik di Indonesia. Ini adalah program yang berguna dan tidak ada yang mengintervensi pekerjaan atau karya yang mereka hasilkan. Denmark merasa harus memberikan semacam dukungan dari sisi pendanaan. Aktivitas ini diharapkan dapat membantu menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia.

UNDANG-UNDANG PENISTAAN AGAMA

Undang-undang penistaan agama membuka peluang bagi aktor selain negara untuk melakukan pelanggaran hukum. Ekspresi seni dapat menjadi target dan bumerang jika ada yang memanfaatkan situasi. Diakui Whyatt, UU ini merupakan hal yang pelik dan bermasalah. Dia mengambil contoh bagaimana UU ini pertama kali diterapkan di Inggris di mana pelaku pelanggaran dijatuhi hukuman mati.

UU penistaan agama seringkali didukung oleh militer. Whyatt juga mencontohkan terbunuhnya seorang mahasiswa yang dituduh melakukan penistaan agama. Kebanyakan pelaku pembunuhan terhadap terduga penista agama menyadari adanya UU itu tapi mereka tahu lingkungan mendukung untuk impunitas. Satu hal yang juga mengemuka dalam beberapa kasus kekerasan atau pelanggaran kebebasan berekspresi atau kebebasan artistik adalah ketika pekerja artistik diseret ke pengadilan dengan UU penistaan agama. Pada satu sisi mungkin pekerja seni membuat karya namun ternyata karya itu melukai banyak pihak.

UU penistaan agama merupakan isu yang serius. UU ini diperkenalkan pada 1964. Ini merupakan salah satu masalah bagi Indonesia. Kebebasan berekspresi bukan isu yang mengganggu karena sudah ada UU yang menggaransi atau melindunginya.

Tantangannya muncul saat ada klausul yang menyatakan pihak manapun yang menerbitkan artikel yang menghina akan dihukum sesuai dengan UU yang berlaku. Masalah ini kemudian menjadi sumber perdebatan sengit sehingga akhirnya disimpan sebagai catatan saja.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kebebasan artistik dapat dikondisikan tidak bakal menimbulkan masalah. Cukup sulit untuk membayangkan begitu negara bebas dari UU yang represif maka kebebasan otomatis dijamin.

Kebebasan artistik bukan berarti melawan UU, tapi pemerintah yang tidak mengakui hak seniman. Polisi, misalnya, tidak dapat menghentikan mereka. Ini memang situasi yang pelik. Farid yang berlatar belakang masyarakat madani mempercayai kekuatan organisasi masyarakat madani. Indonesia mendukung kebebasan artistik. Beberapa hal juga dilarang oleh kaum ortodoks. Posisi kaum agamis sangat kuat di

Indonesia, tapi dalam beberapa kasus kubu pendukung kebebasan artistik menang karena ada dukungan dari masyarakat madani.

Dukungan masyarakat ini lebih esensial dibandingkan dengan UU yang memformulasikan dukungan dari masyarakat. Cukup sulit untuk mengubah UU itu dan prosesnya juga pelik. Pemerintah mencoba mewujudkan yang terbaik pada saat yang bersamaan.

Tidak jauh dari isu penistaan agama, isu terorisme juga penting untuk diperhatikan. Represi juga terjadi dalam kasus terorisme. Perlu dibicarakan kembali komunikasi dengan pemerintah mengenai mekanisme internasional yang ada. Masih ada miskomunikasi selama proses *review* konvensi, ketika pemerintah mengatakan harus ada kerja sama dengan masyarakat madani, tetapi ketika mereka datang pemerintah mempertanyakan status mereka, mewakili siapa, dan ini yang sering menjadi masalah.

Jika berbicara tentang UU terorisme, ada banyak masalah di dalamnya dan membahayakan banyak pihak, tidak hanya pekerja seni, orang kebanyakan pun dapat dipenjarakan. UU ini menjadi alasan untuk memenjarakan pekerja seni. Tidak jarang pula ada UU anti-terorisme yang terlalu luas cakupannya yang kemudian disalahgunakan ketika pekerja seni berkreasi dan tidak mengetahui mereka telah melakukan pelanggaran. Di sini diperlukan transparansi.

Kebebasan artistik di lingkungan masyarakat migran juga masih memprihatinkan. Ketika berekspresi dengan kebebasan artistiknya, mereka dihentikan oleh negara yang ironisnya mengaku demokratis. Representasi masyarakat migran yang diterima oleh pemerintah juga masih menjadi tanda tanya. Pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan keragaman dalam masyarakat.

BAB XIII

RENCANA AKSI PBB UNTUK KESELAMATAN WARTAWAN: ISU IMPUNITAS DAN DAMPAKNYA DI ASIA TENGGARA



Hani Abbas/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Rencana Aksi PBB untuk Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas (UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity) telah menyediakan kerangka dan peta jalan untuk memperkuat keselamatan wartawan dan memerangi impunitas selama 5 tahun terakhir. Rencana Aksi PBB muncul karena jurnalis perlu saling bersatu melihat isu khusus ini. Jurnalisme sedang diserang lebih agresif akhir-akhir ini.

Dalam dekade terakhir ini, paling tidak ada 823 kasus pembunuhan wartawan. Ini adalah angka laporan dari Sekjen UNESCO. Tetapi, UNESCO memastikan bahwa angkanya lebih dari ini. Ada juga kasus yang tidak dianggap sebagai pelecehan atau serangan terhadap wartawan.

Tren mengenai kekerasan terhadap wartawan masih ada dan ada elemen baru yang muncul. Menurut Asisten Direktur Jenderal UNESCO, Frank La Rue, ada fenomena terkini yang menunjukkan serangan *online* kepada jurnalis dan juga pelecehan seksual kepada wartawan perempuan semakin meningkat.

Sudah jelas bahwa upaya perlindungan keselamatan wartawan adalah elemen yang sangat krusial. Inilah yang memotivasi UNESCO bersama dengan badan PBB lainnya sekitar 5 tahun yang lalu untuk mendapatkan komitmen dari semua organ PBB, khususnya *High Commissioner for Human Rights*, melakukan koordinasi khusus untuk kebebasan ekspresi dan juga kemerdekaan pers. Idenya adalah, apa pun mandat dari badan PBB tersebut, mereka diharapkan untuk berpartisipasi dalam hal ini.

Untuk itu beberapa tahun lalu dibentuklah Rencana Aksi antar badan PBB. PBB memiliki prinsip mendukung partisipasi masyarakat madani, sehingga ini memang dirancang sebagai satu rencana antar pemangku kepentingan, termasuk dengan LSM, terutama LSM

HAM yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan privasi teknologi komunikasi informatika- dan dengan asosiasi pers serta organisasi wartawan lainnya.

Ini sangat penting karena ada keprihatinan besar terkait keselamatan jurnalis di wilayah konflik. UNESCO yakin bahwa harus ada peran dari Dewan Keamanan dan juga Sekjen PBB mengenai pencegahan kasus serangan atau kekerasan terhadap wartawan di wilayah konflik. Keselamatan jurnalis menjadi perhatian di dunia, bahkan terlepas negara tersebut sedang dalam konflik atau tidak. Di banyak negara, indeks yang paling tinggi dalam pembunuhan jurnalis tidak mesti di negara konflik. Ini fenomena yang terus terjadi dan harus dipahami bahwa profesi wartawan atau jurnalis memang sangat berbahaya.

UPAYA KESELAMATAN WARTAWAN

UNESCO meyakini bahwa keselamatan jurnalis memiliki dua poin dasar. *Pertama*, ini harus dilihat dari kerangka hukumnya dulu, apakah kerangka hukum tersebut memang mengakui atau tidak tentang kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, transparansi, privasi, dan perlindungan terhadap narasumber, serta keselamatan secara umum.

Kedua, perlu dipastikan adanya kebijakan pencegahan, termasuk pemberian pelatihan pengembangan kapasitas untuk jurnalis dan pasukan keamanan untuk jurnalis.

UNESCO telah memulainya di Amerika Latin. UNESCO telah menandatangani kesepakatan dengan Ibero-American Summit of Supreme Courts—yaitu Mahkamah Agung Amerika Latin, Karibia plus Spanyol dan Portugal. Ini penting karena keduanya berkolaborasi mengembangkan pelatihan *online* mengenai kemerdekaan

berekspresi, akses terhadap informasi, transparansi, dan keselamatan jurnalis. Kursus ini pertama kali diberikan di Brazil dan Meksiko. Tapi, sekarang telah dilakukan untuk keseluruhan Amerika Latin secara *online*, didukung oleh Universitas Texas, AS. Sudah ada 2.200 orang yang mendaftarkan diri, kebanyakan dari mereka adalah hakim dan pengacara. Ini merupakan suatu kesuksesan dan mereka dapat mengembangkan program ini lebih jauh.

UNESCO telah menyediakan materi presentasi, pengawasan, dan tutor *online* untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Badan PBB ini juga sedang merencanakan pelatihan yang sama tahap kedua di Afrika berupa pelatihan *massive open online course*. Pelatihan ini dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Prancis, tergantung pada bahasa setempat di Afrika. UNESCO juga sedang berbicara dengan negara Arab untuk melakukan pelatihan menggunakan bahasa Arab.

UNESCO juga ingin melakukan pelatihan ini di Asia Tenggara. Badan PBB itu ingin memiliki satu mekanisme keselamatan jurnalis yang memang dirancang oleh negara anggota ASEAN atau Komisi HAM ASEAN. UNESCO sudah menyampaikan saran tentang perlunya *rappporteur*/pelapor untuk kebebasan berekspresi dan juga kemerdekaan pers untuk wartawan.

Alerts Officer Southeast Asia Press Alliance (SEAPA), Kathryn Raymundo, menjelaskan sedikit tentang praktek terbaik dari pelaksanaan Rencana Aksi PBB di kawasan Asia Tenggara, terutama yang berkaitan dengan *protection*, *prevention*, dan *procuration*.

SEAPA adalah organisasi nirlaba regional yang terdiri dari 12 anggota asosiasi terkait pers dari tujuh negara di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEAPA berupaya memastikan keselamatan bagi jurnalis. Beberapa langkahnya sebagai berikut. *Pertama*, SEAPA menawarkan pemindaian

otomatis tentang perbandingan UU yang ada di Asia Tenggara. Juga dokumentasi tanggapan pemerintah terhadap berbagai macam isu.

Kedua, membuat *database* pelanggaran. *Ketiga*, menggunakan mekanisme yang ada di institusi HAM nasional atau mekanisme Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan dapat lebih aktif melibatkan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam penyelesaian kasus, sehingga penyelesaian kasus tidak hanya sekadar berupa laporan negara, melainkan dapat menghasilkan berbagai macam laporan yang dapat diserahkan kepada institusi tersebut. SEAPA juga ingin memperkuat dan menawarkan program pembelaan hukum yang lebih baik di kawasan ini.

Berkaitan dengan organisasi media, juga dapat dikembangkan program pelatihan keselamatan, program pengembangan kapasitas untuk wartawan, dan organisasi media. Topik pelatihannya bisa tentang etika, keselamatan, dan kompetensi hukum.

Upaya terakhir adalah mendirikan Dewan Pers sebagai organisasi yang dapat melakukan intervensi jika ada isu yang tidak perlu ditangani langsung oleh pemerintah seperti persoalan yang berkaitan dengan jurnalis dan organisasi media. Misalnya, di Asia Tenggara, negara yang telah memiliki Dewan Pers adalah Myanmar, Timor Leste, Thailand, Filipina, dan Indonesia.

Berkaitan dengan mekanisme nasional Dewan Pers, International Media Support (IMS) baru saja melakukan riset terhadap mekanisme nasional Dewan Pers di Asia Tenggara termasuk Filipina dan Indonesia. Riset yang sama juga dilakukan di Afganistan, Nepal, Pakistan, Irak, dan Kolombia. Semua riset dikumpulkan untuk mengidentifikasi praktik terbaik Rencana Aksi PBB dan dampaknya untuk dapat dimasukkan ke dalam program Dewan Pers.

Riset ini juga ditujukan untuk melihat beberapa program keselamatan jurnalis, mekanisme yang ada, koalisi pemangku kepentingan yang resmi dan tidak resmi, serta kemitraan kelompok individual ataupun organisasi yang mengedepankan keselamatan jurnalis.

Beberapa hal yang diidentifikasi oleh IMS, yang muncul dari laporan ini, adalah saat ini telah dijalankan praktik terbaik di masing-masing negara tersebut dan program yang dijalankan sudah menunjukkan hasil.

Akses masyarakat ke informasi juga merupakan faktor penting lain yang diidentifikasi. Diteliti di mana saja informasi dapat diakses dan dimonitor. Pengumpulan data seperti ini berguna untuk menghadirkan solusi yang lebih baik seperti informasi yang semakin kredibel dan dapat digunakan untuk advokasi dalam pengembangan program keselamatan.

Salah satu contoh negara yang diteliti dalam laporan tersebut adalah Afghanistan. Di negara ini telah dibentuk Komite Keselamatan dan Keamanan Jurnalis Afghanistan yang memiliki kantor yang tersebar di berbagai wilayah di negara itu. Selain mengumpulkan data, kantor ini juga memberikan tanggapan bila terjadi keadaan darurat. Ia juga memiliki staf perempuan yang menangani jurnalis perempuan yang berada di bawah ancaman. Komite Keselamatan dan Keamanan Jurnalis Afghanistan itu terbentuk dari hasil koalisi atau kemitraan para pemangku kepentingan di Afghanistan yang melibatkan media, pemerintah, dan LSM.

Ada beberapa faktor yang turut mensukseskan koalisi tersebut. *Pertama*, kemitraan. Jaringan kelompok pers bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pendataan dan verifikasi kasus sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif.

Kedua, kolaborasi. Dengan berkolaborasi, kemitraan yang inovatif dan kemampuan melakukan advokasi bersama dapat lebih dikembangkan. Dengan koordinasi nasional dan internasional, hal yang tidak diperlukan dapat dihindari.

Ketiga, pengaruh. Dengan adanya mekanisme atau program yang baik dan efektif, hal itu dapat memobilisasi aktor berpengaruh. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah dalam menjalankan program perlindungan jurnalis menjadi kuncinya.

Contoh yang baik terlihat di Pakistan yang sudah mengembangkan jaringan koordinasi para editor untuk keselamatan jurnalis ketika melakukan peliputan di wilayah tertentu. Misalnya, bila ada wartawan diserang, maka jaringan koordinasi itu dapat memberikan dorongan atau tekanan yang kuat kepada pemerintah untuk menyelidiki serangan tersebut. Perhatian dan partisipasi dari badan dan LSM internasional juga dapat mendukung dan membantu memperkuat advokasi terkait dengan isu keselamatan jurnalis.

Keempat, keberlanjutan. Artinya seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen jangka panjang terhadap keselamatan jurnalis. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengembangan mekanisme pemangku kepentingan dalam menjamin keselamatan jurnalis. Di sisi lain, diperlukan juga aktor berpengaruh sebagai penggerak komitmen jangka panjang tersebut.

Rencana Aksi PBB sudah dilaksanakan di Nepal. Meski demikian, Ketua Media Action Nepal, Laxman Datt Pant, mengatakan tetap harus ada investigasi yang menyeluruh berkaitan dengan pelanggaran hak media khususnya untuk kasus pembunuhan jurnalis. Dalam konflik yang telah berlangsung selama 10 tahun di Nepal, telah ada 35 wartawan yang dibunuh. Hanya dua kasus

yang masuk ke pengadilan dan banyak yang belum terselesaikan. Tidak ada informasi konkret. Tidak ada informasi detail mengenai wartawan yang dibunuh atau wartawan yang hilang.

Rencana Aksi PBB bertujuan untuk menciptakan mekanisme di mana pemangku kepentingan di Nepal dapat bekerja sama dengan badan pemerintah. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah kemitraan media internasional Nepal yang di dalamnya terdapat 13 organisasi internasional. Ada agenda yang akan dijalankan. Tapi, isu keselamatan jurnalis belum mereka bahas bersama dengan pemerintah dan parlemen.

Komisi HAM di Nepal ingin menciptakan mekanisme perlindungan keselamatan atau keamanan jurnalis di dalam strategi 5 tahunnya. Namun, belum ada badan pemerintah yang menanganinya. Belum lagi untuk penanganan masalah impunitas. Rencana Aksi PBB dapat menciptakan kesadaran, khususnya bagi aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan terhadap jurnalis.

Namun Pemerintah Nepal masih belum dapat menghasilkan laporan yang diminta UNESCO berkaitan dengan informasi atau status dari jurnalis yang dibunuh selama 10 tahun konflik. Saat ini juga belum ada mekanisme khusus untuk menangani impunitas. Namun, dengan implementasi Rencana Aksi PBB yang dibantu UNESCO dan didukung oleh PBB ataupun Dana Perdamaian PBB, maka dapat diambil cara atau langkah yang cepat untuk menginvestigasi kasus tersebut sehingga pelakunya dapat ditangkap. Di sini dukungan dari mitra internasional dan LSM di bidang pengembangan media juga sangat dibutuhkan.

PENGALAMAN DI BEBERAPA NEGARA

Isu keselamatan jurnalis juga menjadi perhatian di Sri Lanka seperti yang diceritakan mantan jurnalis media terbesar di Sri Lanka, Ranga

Kalansooriya. Saat ini dia bekerja di pemerintahan dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Informasi Sri Lanka.

Kalansooriya menuturkan bahwa dirinya telah memperjuangkan keselamatan jurnalis selama 20 tahun terakhir, dengan berbagai *platform* yang berbeda, mulai sebagai jurnalis, kemudian masuk ke dalam organisasi pendukung internasional, sebelum bergabung dengan salah satu organisasi media terbesar di Sri Lanka, Sri Lanka Press Institute. Dia telah berjuang secara pribadi selama puluhan tahun, namun dia menilai hampir tidak ada kemajuan yang terjadi dalam hal keselamatan jurnalis di Sri Lanka.

Ketika terjadi perubahan pemerintahan di Sri Lanka pada Januari 2015, Kalansooriya mendapat tawaran untuk bergabung dengan pemerintahan yang baru untuk menangani isu keselamatan jurnalis. Setelah melewati pertimbangan yang lama, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran bergabung dengan pemerintah sehingga memiliki kesempatan untuk mewujudkan Rencana Aksi PBB di Sri Lanka

Sejak awal, sejak fase percontohan, dia mengajak para pemangku kepentingan dari berbagai *platform* dan mencoba menyatukan mereka, seperti kalangan media, LSM, kelompok masyarakat madani, akademisi, dan pemerintah. Berdasarkan pengalamannya membantu implementasi Rencana Aksi PBB di Pakistan, dia berhasil menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai media, jurnalis, editor, dan aktivis media, namun tidak pemilik media. Dia belum berhasil menyatukan pemilik media untuk memiliki komitmen yang sama.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Pakistan, tetapi juga di negara lain seperti Filipina, dan negara lain yang belum berhasil menyatukan atau mendapatkan dukungan dari pemilik media. Pemilik media sebenarnya yang memiliki kepentingan terhadap keselamatan

jurnalis, tapi sayangnya mereka dinilai belum memiliki rasa bertanggung jawab seperti itu.

Tanggung jawab pemerintah pun dipertanyakan. Padahal, *pertama*, pemerintah seharusnya menciptakan lingkungan demokratis yang baik. *Kedua*, pemerintah perlu membuat kerangka hukumnya. *Ketiga*, pemerintah harus dapat menangani isu impunitas. Itulah tiga tanggung jawab pemerintah dalam hal pelaksanaan Rencana Aksi PBB ini.

Dalam konteks Sri Lanka, media cukup berhasil mendorong terbentuknya lingkungan masyarakat yang demokratis. Kemudian, dalam hal pengembangan kerangka hukum, media berhasil mendorong pengesahan UU Kebebasan Informasi yang dinyatakan sebagai tiga terbaik di dunia oleh Centre For Law and Democracy, bahkan lebih baik dari India.

Sekarang, Sri Lanka sudah mengeluarkan beberapa UU baru, termasuk Undang-Undang Independensi Media dan tengah mempelajari UU baru tentang keselamatan jurnalis yang diperkenalkan di Pakistan. Tim penggerak implementasi Rencana Aksi PBB telah membantu Pakistan merancang UU tersebut dan sekarang berusaha menerapkan hal yang sama di Sri Lanka. Pembangunan kerangka hukum di Sri Lanka tersebut dilakukan secepat mungkin karena pemerintah nasional saat ini tidak akan berkuasa selamanya.

Kemudian, tugas yang paling berat adalah mengatasi impunitas. Berdasarkan laporan, 40 pekerja media tewas dalam 2-3 dekade terakhir. Angka tertinggi terjadi pada saat perang pecah di Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka telah berinisiatif membentuk suatu sub-komisi kabinet untuk melakukan evaluasi terhadap serangan dan pembunuhan jurnalis. Kalansooriya ditunjuk sebagai sekretaris komite tersebut.

Kalansooriya dan timnya harus memulai tugasnya itu dari nol karena tidak ada catatan sama sekali. Meminta laporan dari polisi atau penegak hukum lainnya juga sulit karena mereka tidak akan punya laporan apa pun mengenai hal ini, karena pelakunya adalah negara sendiri. Jadi, untuk dapat menindak pelaku tindak kejahatan terhadap jurnalis, pemerintah Sri Lanka harus membentuk mekanismenya dari nol. Maka dibentuklah komisi penyidikan sebagai salah satu upaya untuk menangani impunitas.

Pembunuhan terhadap jurnalis juga terjadi di Filipina. Direktur Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) Malou Mahangas mengungkapkan bahwa 150 jurnalis tewas sejak 1986 di Filipina. Menurut dia, Filipina mengalami keruntuhan supremasi hukum dan lemahnya sistem peradilan. Di Filipina, konteksnya adalah tidak ada yang khawatir akan hukuman. Dalam 150 kasus, lebih dari setengah jurnalis yang tewas itu terkait dengan berita mereka mengungkapkan kejahatan lokal dan korupsi. Kurang dari 10 kasus tersebut yang diadili dan belum ada otak kejahatan yang dipidana.

Kepolisian sangat lemah dalam hal ini, pengadilan juga sangat lambat, dan tidak ada *political will* di antara penegak hukum, eksekutif, tokoh politik. Selain itu, budaya patronase dan kuatnya budaya kesukuan di Filipina terbukti menjadi sebuah hambatan. Organisasi media pun belum berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh kepada jurnalis.

Walaupun kini ada beberapa kemajuan seperti menyediakan asuransi bagi jurnalis yang bekerja di wilayah berbahaya, tetapi itu belum cukup. Lantas, apa yang dapat dilakukan? Ada dua aksi yang dapat dilakukan. *Pertama*, harus bisa melakukan misi tindak cepat untuk pengumpulan fakta. *Kedua*, mendokumentasikan semua kasus untuk mengangkat kasus tersebut agar diakui dan diketahui oleh masyarakat dan pengadilan.

Kemudian harus ada arahan untuk menentukan aksi berdasarkan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Selain itu, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. *Pertama*, perlu melatih jurnalis untuk melindungi diri mereka sendiri, memberikan pelatihan keselamatan kepada mereka, dan mendukung prinsip jurnalistik yang baik dan profesional sebagai garis depan pertahanan. Jadi jurnalisisme yang profesional itu adalah landasan untuk keselamatan jurnalis.

Kedua, melek media tidak hanya untuk warga negara atau pemirsa, tapi juga untuk pegawai negeri dan pejabat pemerintah. Ini berarti bahwa tindakan pertama bukan untuk melecehkan atau membunuh jurnalis, tetapi pergi ke pengadilan. Perlu dipahami bahwa media memiliki peran yang penting dalam masyarakat.

Ketiga, kampanye untuk membangkitkan kesadaran publik melalui dokumentasi video untuk menceritakan kisah jurnalis yang tewas, sifat spesifik dari kasus yang dihadapi, kendala dalam menyelesaikan kasus itu, termasuk misalnya ketakutan yang menyurutkan langkah saksi. Kemudian harus ada advokasi untuk UU perlindungan saksi dan UU penggalangan dana untuk perlindungan jurnalis dan keluarga mereka. Ketika seorang jurnalis tewas, keluarga yang ditinggalkan juga tetap harus mendapatkan dukungan agar anak-anak mereka bisa tetap sekolah, dan lain-lain.

Komisi Nasional HAM Filipina membantu PCIJ untuk mengambil beberapa tindakan itu, meski hingga saat ini belum ada program khusus untuk membahas keselamatan pekerja media di Filipina.

Indonesia sebagai negara demokrasi juga memiliki dan telah melalui perjalanan yang panjang dalam upayanya menciptakan

kemerdekaan pers. Ada perjalanan panjang mulai dari 1967 hingga 1998 ketika berakhirnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru, industri media sangat dikekang. Misalnya, izin operasional untuk perusahaan media dapat dibatalkan setiap saat oleh pemerintah. Posisi jurnalis pun sangat rentan pada saat itu, khususnya pada 1993-1997 karena jurnalis dapat tiba-tiba hilang diculik.

Namun, setelah reformasi pada 1998, ada banyak perubahan. Indonesia mengamandemen konstitusi untuk memastikan bahwa kemerdekaan berekspresi dan kebebasan informasi adalah bagian dari HAM yang diakui dan dijamin dalam undang-undang dasar. Demikian yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Bidang Pertahanan, Intelijen, Informasi, Komunikasi, dan Luar Negeri, Meutya Hafid, mantan jurnalis yang pernah disandera di Irak pada 2005.

Berbagai UU dikeluarkan. Jadi, sekarang media diawasi oleh Dewan Pers, tidak lagi diawasi oleh pemerintah. Akan tetapi, sekarang ada pertanyaan tentang cara pemerintah melibatkan industri media dan organisasi profesional media untuk menjamin keselamatan jurnalis. Untuk poin ini, Indonesia belum cukup memiliki kabar baik untuk disampaikan, paling tidak untuk saat ini. Eforia pasca Orde Baru yang muncul setelah pers dapat menikmati kemerdekaan yang lebih besar pada 1998 telah mendorong media untuk fokus pada kemerdekaan sampai melupakan keselamatan jurnalis.

Hafid setuju dengan Mahangas, jurnalis veteran dari Filipina yang menyampaikan bahwa para pemilik media punya peran penting untuk keselamatan jurnalis, terutama dari pengalamannya pada 2005 saat dia meliput konflik di Irak. Ini tidak ada hubungannya dengan keengganan perusahaan media, tapi karena kurangnya pemahaman dari perusahaan dan organisasi mengenai pentingnya jurnalis untuk selalu mendapatkan perlindungan saat bertugas.

Hafid dan rekannya dikirim ke lapangan saat itu dengan persiapan, perlengkapan dan dukungan yang sangat terbatas. Tidak ada pengamanan, seperti jaket antipeluru. Dia dan rekannya diterjunkan meliput di Irak. Bahkan, Hafid tidak bisa berbahasa Arab. Jadi, tentu saja tidak mengejutkan dia dan rekannya disandera selama 5 hari. Untungnya, dia dan rekannya selamat dan berhasil bebas dari penyanderaan tersebut dan kembali ke Indonesia. Sejak itu muncul tren di Indonesia untuk melakukan pelatihan dan pendidikan bagi jurnalis mengenai keselamatan saat melakukan tugas.

Irak adalah wilayah konflik. Tentu saja sangat mudah mengatakan, “Ya, itu memang tempat berbahaya”. Tapi, ada tempat lain yang juga harus diliput yang sepertinya aman tapi sebenarnya juga berbahaya. Misalnya di Indonesia, ada jurnalis yang meliput banjir dan mereka tenggelam. Atau ketika sedang meliput kebakaran, wartawan lupa bahwa mereka dapat menjadi korban dari bencana tersebut. Jadi, ketika petugas mengatakan bahwa tidak boleh memasuki wilayah tertentu, itu bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi untuk alasan keselamatan. Ini sering kali dilupakan.

Indonesia mencatat sejumlah kemajuan, tapi masih ada beberapa isu yang masih harus ditangani. Baru-baru ini, ada jurnalis dari Sumatera Utara yang sedang melaporkan perselisihan kepemilikan tanah antara masyarakat sipil dan militer. Jurnalis kemudian dipukuli dan dilecehkan. Kasus ini tidak selesai. Masih ada kasus lain seperti itu di Indonesia. Karenanya, penting bagi insan media untuk bekerja sama melibatkan juga dukungan organisasi internasional. Karena dukungan atau desakan internasional sangat berperan dalam hal ini untuk mengingatkan negara agar mematuhi UU. UUnya sudah ada, tetapi ada beberapa poin yang mungkin tidak begitu mudah untuk dipatuhi.

Sementara itu di Afghanistan, situasinya tidak jauh berbeda. Sudah 40 tahun Afghanistan mengalami peperangan. Dalam kondisi perang tersebut, artinya setiap menit ada berita baru muncul di negara tersebut. Direktur Pelaksana The Killid Group, Najiba Ayubi, berpendapat perang di Afghanistan terjadi karena masalah geopolitik. Menurut dia, perang tersebut bukanlah perang Afghanistan, melainkan orang lain datang ke negara itu dan membuat rakyatnya menjadi korban perang. Ada banyak negara yang mempunyai agenda sendiri dan menjadikan Afghanistan sebagai korban. Dia merasa tidak perlu menyebutkan nama negaranya, tetapi mereka berperang di negaranya dan menyebabkan situasi menjadi sangat berbahaya untuk semua rakyat Afghanistan, terutama jurnalis.

LAPORAN JURNALISTIK YANG IDEAL

Jurnalis harus melaporkan apa yang terjadi di negaranya. Terkadang pemerintah berharap jurnalis melaporkan berita baik saja. Tapi bagaimana jurnalis melaporkan berita baik kalau ada begitu banyak berita buruk? Begitu banyak orang yang kehilangan nyawa, tetapi pemerintah mengharapkan atau menuntut media untuk melaporkan berita baik saja. Bagaimana bisa seperti itu? Itu tidak mungkin.

Jurnalis harus melaporkan apa yang dilihatnya dan apa yang terjadi. Dalam 16 tahun terakhir, 57 jurnalis kehilangan nyawa mereka di Afghanistan, baik jurnalis asing maupun lokal. Dan, dalam 3-4 tahun terakhir kondisinya lebih berbahaya lagi bagi jurnalis Afghanistan karena di beberapa provinsi dalam 1 tahun terakhir ada peralihan kekuasaan tiga atau empat kali, mulai dari Taliban ke pemerintahan yang sah, kembali ke Taliban, kemudian kembali ke pemerintahan yang lain. Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan, mereka melakukan razia dari rumah ke rumah, mencari jurnalis.

Mereka bertanya di setiap rumah di setiap provinsi apakah ada jurnalis Afghanistan, terutama jurnalis perempuan. Untungnya, pada saat itu sebagian besar jurnalis sudah keluar dari daerah tersebut. Mereka berhasil menyelamatkan diri. Hanya sedikit yang tertangkap dari razia yang dilakukan pada saat itu.

Empat tahun terakhir adalah salah satu periode yang paling membahayakan bagi jurnalis Afghanistan. Korupsi adalah permasalahan terbesar dan paling berbahaya bagi Afghanistan pada saat ini, karena fenomena sosial ini dilakukan secara tidak terkendali oleh hampir semua aparat negara. Ketika jurnalis melapor, meliput, membuat laporan tentang kasus korupsi, muncul permasalahan besar bagi mereka. Masalah sudah muncul pada tahap penyusunan laporan, apalagi setelah laporan itu dipublikasikan. Orang yang dicurigai melakukan korupsi biasanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang yang berkuasa. Mereka akan saling menghubungi dan kemudian membuat permasalahan besar bagi jurnalis.

Masalah lain adalah para pengedar narkoba. Mereka juga menjadi permasalahan besar bagi jurnalis Afghanistan. Kemudian masalah lainnya adalah ketika Taliban dan ISIS memerintah. Mereka meminta semua media untuk menyiarkan apa pun yang mereka kirimkan kepada jurnalis. Ketika jurnalis meminta pemerintah untuk memberikan informasi yang seimbang, ISIS dan Taliban keberatan. Mereka menolak.

Jurnalis adalah salah satu profesi yang paling rentan terhadap bahaya, terutama di negara seperti Afghanistan. Profesi ini jauh lebih berbahaya untuk perempuan. Dari 10.000 jurnalis di Afghanistan, 2.000 di antaranya adalah perempuan. Setiap hari jumlah ini terus berkurang, terutama pekerja media perempuan, karena alasan ekonomi dan keselamatan. Keluarga tidak ingin mereka terus

bekerja sebagai jurnalis karena ini adalah profesi yang berbahaya. Mereka tidak mengizinkan anggota keluarga perempuan bekerja sebagai jurnalis karena apa yang didapatkan tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi.

Sebanyak 14 provinsi di Afghanistan tidak memiliki satu pun jurnalis perempuan karena alasan keselamatan. Sangat berbahaya bagi jurnalis perempuan untuk bekerja di sana. Jurnalis di negara itu terus berusaha mencari cara untuk melindungi diri dengan lebih baik, karena tidak ada perlindungan apa pun dari pemerintah. Ketika jurnalis menyusun laporan tentang korupsi, perang, atau apapun itu, mereka harus menerima konsekuensi di kemudian hari.

Jurnalis di Afghanistan kemudian menemukan beberapa cara untuk melindungi diri. Contohnya, pada 2012 jurnalis membentuk konsorsium independen The Killid Group untuk mempromosikan kerja sama dalam penyebaran informasi. Konsorsium tersebut terdiri dari 62 stasiun radio, satu stasiun televisi, satu kantor berita dan satu surat kabar terkemuka di Afghanistan. Semua bersatu mengeluarkan laporan yang sensitif bersama-sama pada hari yang sama. Selamat karena jumlah, mereka berpikir itu akan melindungi mereka.

Tidak ada media bebas yang beroperasi di masa kekuasaan Taliban. Namun, sekarang Afghanistan memiliki lebih dari 2.000 media yang terdaftar, 260 stasiun radio, 150 stasiun TV, dan sejumlah media cetak. Ini menjadi satu tanda keberhasilan yang cukup baik bagi Afganistan. Media Afganistan sekarang menjadi lebih kuat dan tidak begitu mudah untuk membungkam mereka. Tapi, media dan jurnalis di Afghanistan tetap perlu memperkuat persatuan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

EVALUASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PBB

Melihat pengalaman yang terjadi di berbagai negara tersebut, tampak jelas bahwa upaya untuk melindungi keselamatan wartawan dalam menjalankan tugasnya bukanlah merupakan hal yang mudah. Kekerasan terhadap wartawan terus bermunculan dan bahkan masih banyak terjadi kasus pembunuhan terhadap wartawan di berbagai negara. Situasi keselamatan wartawan tampak semakin memburuk.

Akibatnya, muncul pertanyaan apakah Rencana Aksi PBB untuk Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas yang telah bergulir selama lebih dari 5 tahun mengalami kegagalan? Rencana Aksi PBB tersebut disahkan oleh Dewan Eksekutif PBB pada 12 April 2012. Rencana Aksi PBB ini merupakan hasil dari sebuah proses yang diawali pada 2010 atas permintaan Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication (IPDC).

Asisten Direktur Jenderal UNESCO, Frank La Rue, mengakui bahwa situasi keselamatan wartawan di berbagai belahan dunia saat ini tampak semakin memburuk. Namun, dia membantah bahwa itu merupakan buah dari kegagalan Rencana Aksi PBB. Menurut dia, situasi keselamatan wartawan yang makin mengkhawatirkan saat ini lebih disebabkan oleh berbagai hal.

Saat ini, di kalangan masyarakat dunia justru berkembang xenofobia, rasisme, dan hal-hal yang mengarah ada pembangunan perbatasan atau dinding tembok pemisah antar masyarakat. Padahal, semestinya yang dibangun jembatan hubungan kesepahaman antar masyarakat. Suara agresif menciptakan suara diskriminatif dan ini makin meningkat hingga pada akhirnya terjadi konflik dan perang dimana-mana yang sulit diselesaikan. Hal semacam inilah yang membuat situasi keselamatan para wartawan memburuk.

Kendati demikian, La Rue sepakat bahwa implementasi Rencana Aksi PBB ini tetap perlu diperbaiki. Dia mendukung bahwa pelaksanaan Rencana Aksi PBB ini perlu dievaluasi setelah lebih dari 5 tahun berjalan.

Menurut dia, memburuknya situasi keselamatan wartawan di seluruh dunia seharusnya membuat semua pihak tertantang melakukan perbaikan dalam menerapkan Rencana Aksi PBB dan sekaligus juga melakukan koordinasi yang lebih erat lagi di antara semua pihak sehingga situasi keselamatan wartawan yang tengah memburuk sekarang ini dapat dicegah dan menuju ke arah yang lebih baik.

Rencana Aksi PBB bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan aman bagi wartawan dan pekerja media, baik dalam situasi konflik dan non-konflik, dengan maksud untuk memperkuat perdamaian, demokrasi dan pembangunan di seluruh dunia. Langkah-langkahnya antara lain mencakup pembentukan mekanisme antar-lembaga yang terkoordinasi untuk menangani masalah yang berkaitan dengan keselamatan para jurnalis serta membantu negara untuk mengembangkan undang-undang dan mekanisme yang mendukung kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, dan mendukung upaya mereka untuk menerapkan peraturan dan prinsip internasional yang ada.

Untuk lebih memperkuat pencegahan, Rencana Aksi PBB merekomendasikan kerja sama pemerintah, media, asosiasi kalangan profesional dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan kampanye peningkatan kesadaran mengenai berbagai isu seperti instrumen dan konvensi internasional yang ada, berkembangnya bahaya yang timbul dari ancaman kepada para profesional media, termasuk dari aktor non-negara, serta kampanye

mengenai berbagai panduan praktis terkait dengan keselamatan para jurnalis.

Kerjasama antar lembaga inilah yang kembali diingatkan La Rue. Belajar dari pengalaman beberapa negara, seperti Kolombia, dia mengungkapkan keberhasilan penanganan keselamatan jurnalis di sebuah negara bukanlah semata-mata karena bersandarkan pada tanggung jawab pemerintah, melainkan karena adanya inisiatif bersama dari berbagai pihak atau *multi-stakeholder initiative*, mulai dari kementerian, aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, hingga para jurnalis sendiri.

Di beberapa negara, terdapat fenomena adanya konsensus bersama agar kekerasan atau pembunuhan wartawan dihentikan, terlepas dari kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik yang ada. Jadi, tegasnya, *political will* dari semua pihak untuk menghindari kekerasan atau pembunuhan wartawan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi PBB. Oleh sebab itu, La Rue mendorong adanya dialog intensif antar berbagai pihak untuk dapat menciptakan konsensus bersama dan kemudian bersama-sama membuat mekanisme pelaksanaan konsensus bersama tersebut.

BAB XIV

MENILAI UNIVERSALITAS INTERNET



Iwan Mangopang/Dewan Pers/UNESCO/WPFD 2017

Internet telah memberi efek, memfasilitasi, dan mentransformasi hampir segala aspek kehidupan modern. Sebagai hasilnya, perlu sebuah konsep deskriptif dan preskriptif untuk mengawal perkembangan internet.

Dewasa ini, miliaran orang bersentuhan dengan internet tanpa menyadari bagaimana aspek di dalamnya saling berhubungan satu sama lain secara keseluruhan. Sementara itu, kehadiran “*Internet of things*”, perekonomian-berbagi, disintermediasi, dan model bisnis *big data* telah membuat keadaan menjadi lebih rumit.

Isu privasi, pengawasan, penutupan, penyaringan, dan keselamatan digital telah mengemuka akhir-akhir ini. Dengan latar belakang ini, Universalitas Internet merupakan konsep makro yang didukung negara anggota UNESCO. Para anggota mengusulkan untuk menyediakan kerangka menyeluruh bagi internet, melalui empat norma universal yang mendukung HAM, bersifat terbuka, dapat diakses semua orang, dan dikelola secara partisipatif oleh banyak pemangku kepentingan (ROAM).

Universalitas Internet bertujuan untuk menangkap hal penting berjangka panjang dan menyediakan kerangka yang dapat dipahami secara utuh.

Sebagai model, Universalitas Internet dapat membantu mewujudkan potensi historis internet yang menggiring dunia lebih dekat ke arah perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Ia berinterkoneksi secara dekat dengan tujuan menciptakan masyarakat berpengetahuan, di mana akses ke informasi secara universal dipandang sebagai salah satu usaha untuk membangun perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan dialog antarbudaya.

Karena alasan ini, ada nilai besar dalam mengambil langkah definitif selanjutnya dalam mengembangkan seperangkat indikator normatif yang dapat menilai perkembangan internet. Indikator Universalitas Internet ini dapat menjadi dimensi praktis bagi prinsip ROAM dan memungkinkan aktor di tingkat nasional untuk mengidentifikasi ruang untuk perbaikan kebijakan yang terkait dengan internet di negeri mereka.

KEMERDEKAAN PERS DAN INTERNET

Direktur Divisi Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media UNESCO, Guy Berger mengatakan internet menjadi sangat penting untuk bidang jurnalistik saat ini. Internet dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kemerdekaan pers karena dulu media merupakan ekosistem tersendiri tetapi kini menjadi bagian dari internet.

Untuk membantu memahami perubahan tersebut, UNESCO telah berkonsultasi dengan berbagai pihak di seluruh dunia, di antaranya dengan Association for Progressive Communications (APC). UNESCO ingin mendengar apa pandangan masyarakat tentang hal tersebut.

UNESCO menyebutnya Universalitas Internet. Kesepakatan ini terbentuk setelah diadakan konferensi bertajuk *Connecting the Dots*, dua tahun lalu. Dots bisa berarti dot.com atau dot.org. Ada ada banyak sekali persoalan tentang pengawasan privasi, perdagangan daring, perlindungan terhadap jurnalisme dll.

Ini semua adalah gagasan yang indah, tapi kemudian bagaimana memperkuat gagasan tersebut agar dapat dilaksanakan atau diterapkan di lapangan.

Namun ada pertanyaan di sini terkait dengan penghargaan terhadap universalitas itu. Hal apa saja yang dilakukan untuk memenuhi standar universalitas tersebut?

Jadi, ada indikator yang digunakan untuk membantu orang mendapatkan pemahaman ketika memetakan internet. Hal apa saja yang perlu diketahui orang bukan sebagai pengetahuan semata melainkan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk berdiskusi di Facebook dengan pemerintah, pendidik, parlemen, jurnalis, dan lain-lain.

Jika dalam proses ini ada indikator yang disetujui oleh negara anggota UNESCO maka itu akan menjadi standar internasional yang kuat. UNESCO juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi internasional untuk mengembangkan model kerangka menyeluruh bagi internet melalui empat norma universal yang disebutkan di atas (ROAM).

Sebagai contoh, ketika seseorang mengakses internet perlu dicari tahu bagaimana dia menilai kemerdekaan pers di internet. Indikator apa yang akan dilihat?

Apa saja hak yang perlu diperhatikan dan bagaimana mengukur keterbukaan informasi. Misalnya Wikipedia, yang merupakan sumber informasi terbuka bagi siapa pun. Bagaimana dengan keterbukaannya dan apa manfaatnya dibandingkan dengan sistem yang lebih tertutup?

Adapun mengenai aksesibilitas, pertanyaannya adalah apakah dapat diakses dalam berbagai bahasa. Selanjutnya terkait dengan pemangku kepentingan, bagaimana mengukur partisipasi dalam pembuatan kebijakan terkait internet. Kemudian ada pula indikator

yang lintas sektor, misalnya untuk anak-anak, orang dewasa atau pemuda, laki-laki dan perempuan, yang tentunya berbeda satu sama lain.

UNESCO ingin selalu memberikan perhatian yang besar terhadap isu gender. Untuk itu, uji coba program terkait dengan isu ini dilakukan di beberapa negara akhir 2017. Kemudian dilakukan pemilihan kelompok tertentu. Misalnya untuk orang yang tertarik dengan Indonesia, dilihat indikator Indonesia, dibuat penelitian dan dilihat apa hasilnya.

Namun tantangannya adalah universalitas dari indikator tersebut. Karena boleh jadi indikator tersebut tidak dapat diterapkan di negara lain, seperti di Bhutan atau AS. Mengingat peran UNESCO sebagai sebuah organisasi internasional maka yang diinginkan adalah internet menjadi hal yang universal. Sehingga indikatornya adalah ROAM tersebut. Sebagai tambahan, anggota UNESCO di seluruh dunia adalah 195 negara atau perekonomian.

Kemudian, ada dimensi global dan nasional. Artinya internet sendiri tidak terbatas pada tingkat nasional, melainkan mewujudkan perubahan yang mempengaruhi hal di luar ruang lingkup nasional. Jadi meskipun di daftar ada 1.000 indikator maka akan disusun ulang dan dipilah mana saja yang penting dan bermanfaat. Untuk selanjutnya hasil dari indikator tersebut akan disampaikan dalam forum yang dihadiri negara anggota UNESCO.

Mogens Blicher, anggota IPDC, menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan sebanyak mungkin ide untuk indikator Universalitas Internet. Adapun IPDC adalah program yang awalnya bertujuan untuk memajukan pengembangan media di negara berkembang yang menjadi anggota PBB dan UNESCO.

Tetapi IPDC juga menjadi lembaga yang fokus pada keselamatan jurnalis karena ide awal pembentukannya adalah untuk mempromosikan media yang bersifat pluralistik dan berkelanjutan di negara berkembang. Para anggota IPDC adalah pakar di bidang media, salah satunya adalah Blicher yang juga seorang jurnalis lepas dan sering terlibat di organisasi yang mengedepankan kemerdekaan pers. Dia adalah Ketua Federasi Jurnalis Eropa.

IPDC berkomitmen untuk memajukan program yang diluncurkan UNESCO. Pengembangan media dilakukan melalui serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan untuk proyek media yang disampaikan kepada IPDC oleh pihak mana pun.

Jika IPDC menerima kabar bahwa ada jurnalis yang tewas saat menjalankan tugas maka Direktur Jenderal akan mencatatnya dan memanggil semua anggota untuk melakukan tindakan lebih lanjut dan melaporkannya kepada UNESCO.

Lalu, sejak 2008 organisasi itu juga membantu pembuatan standar bagi media dan melihat bagaimana standar tersebut diterapkan oleh negara yang bersangkutan. Indikator lainnya adalah memetakan bagaimana media dapat melakukan kegiatannya secara profesional.

Lalu IPDC juga menjadi katalis untuk media dalam hal keselamatan jurnalis dan juga isu seperti perempuan, anak-anak, serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan di negara anggota. Pihaknya juga mencari contoh sukses bagaimana indikator ini dijalankan.

Ada kesepakatan bahwa pengembangan media itu penting sekali karena berkontribusi terhadap pencapaian tujuan UNESCO. IPDC juga berusaha membantu pencapaian Sustainable Development Goals. Di suatu program, IPDC juga sempat membandingkan cara

pandang terhadap media sosial berdasarkan kelompok usia. Anak-anak menganggap internet sebagai media tradisional, sedangkan bagi orang dewasa ini adalah sesuatu yang baru karena bagi mereka yang disebut media tradisional adalah seperti media cetak televisi, atau radio. Namun yang menjadi masalah di sini adalah belum ada kebijakan mengenai media baru tersebut dan tentu saja proses penggodokannya diperkirakan memakan waktu cukup lama karena akan menjadi sumber perdebatan di kalangan pemangku kepentingan media.

Berbagai masukan terkait dengan indikator Universalitas Internet disampaikan pada diskusi panel perayaan Hari Kemerdekaan Pers di Jakarta. Penelitian mengenai hal itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi IPDC.

INDIKATOR UNIVERSALITAS INTERNET

Joseph Cannataci, Pelapor Khusus PBB untuk Privasi mengatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan dokumen berjudul *Privacy, Expression and Transparency*. Selain itu ketika membicarakan indikator, maka ada dua kata yang perlu dipikirkan yakni keamanan dan pemulihan. Lalu ketika bicara tentang kebebasan berekspresi maka berpendapat lebih diprioritaskan daripada privasi.

Dengan demikian indikator *pertama* adalah kebebasan penuh untuk mengakses *website* di luar negara pengguna internet. Di sini perlu dilihat apa argumen resmi pemerintah untuk membenarkan pengawasan yang dilakukan terhadap pengguna internet di negara mereka. Ada kalanya pemerintah suatu negara bersikukuh bahwa langkah pengawasan itu menjadi wewenang mereka.

Indikator *kedua* berhubungan dengan polisi internet. Untuk Google, perusahaan ini mempekerjakan 4.500 orang untuk memantau berita di *platform*-nya. Lalu indikator *ketiga* adalah UU privasi yang juga berlaku dan diterapkan untuk internet. Tapi ada 120 dari 195 negara yang tergabung UNESCO yang mempunyai UU yang mirip seperti UU perlindungan privasi. Tetapi apakah privasi dijamin dalam UU tersebut, dan apakah ada otoritas yang menerima pengaduan warga negara yang merasa privasinya dilanggar? Ini perlu dipertanyakan.

Indikator *keempat* adalah pengawasan di dunia maya. Menurut Cannataci, pengawasan bersasaran lebih baik daripada pengawasan massal. Salah satunya contoh kasusnya adalah persidangan internasional HAM di Eropa ketika Roman Zakharov melawan Russia. Di sana diketahui secara jelas bahwa jika suatu negara ingin melakukan pengawasan bersasaran (*targeted surveillance*) maka harus ada alasan yang kuat.

Tapi secara umum ada 20-25 dari 195 negara yang melakukan pengawasan massal. Sisanya mungkin negara yang melakukan pengawasan sesuka mereka dan bisa saja negara tersebut mempunyai polisi internet.

Indikator *kelima* adalah apakah aparat suatu negara pernah melakukan pengawasan dan pengintaian setelah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak negara melakukan pengawasan dan pengintaian tanpa mengantungi izin dari badan pemerintah atau otoritas tertentu atau mereka melakukan pengintaian terlebih dulu, baru kemudian meminta persetujuan.

Apakah persetujuan untuk pengintaian yang diberikan oleh otoritas bersifat formalitas atau fungsional?

Misalnya hakim perlu memberikan izin terhadap suatu pengintaian, tapi apakah hakim tersebut kompeten atau mereka hakim yang baru bertugas 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun?

Indikator *keenam*, apakah negara tersebut mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan secara independen? Jadi, sebelum melakukan pengintaian, apakah petugas harus meminta izin kepada komisi atau badan independen? Apakah ada badan independen ini yang mandiri, terlepas dari pengaruh polisi atau intelijen sehingga badan itu benar-benar independen? Jadi jika ada yang ingin melakukan kegiatan pengintaian, pihak pemberi izin harus benar-benar mempertimbangkannya sebelum memberikan persetujuan.

Dia juga menambahkan perlunya indikator feminisme, seksualitas. Di beberapa negara masalah agama juga masuk ke dalam pokok pembahasan. Mungkin bagi sebagian orang, isu kebebasan berpendapat belum final dan perlu diupayakan bagaimana martabat dan reputasi dapat eksis secara bersamaan.

Pasal 12 Deklarasi HAM Internasional, dan Pasal 157 ICCPR menyatakan setiap orang memiliki hak atas privasi. Menurut penelitian, banyak sekali orang yang sebenarnya memedulikan dan melakukan kajian tentang pengawasan dan privasi tapi juga membahas bagaimana privasi mereka akhirnya dilanggar akibat apa yang dikatakan orang lain tentang mereka di internet. Ini masalah martabat dan reputasi juga. Banyak sekali yang merasa bahwa mereka tidak punya pilihan.

Blicher menambahkan satu hal lain tentang indikator yang terkait dengan kemerdekaan pers. Adalah sangat penting untuk membela hak penulis. Adalah sangat penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa ketika mereka membaca suatu laporan/ulasan

di media daring yang berbeda, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa hak penulis dihargai.

Khandhadai juga menambahkan tentang indikator lain, yakni UU hak atas informasi. Di sini ada pertanyaan tentang cakupan ruang digital dan apakah informasi yang tepat dimasukkan ke dalam ruang digital tersebut?

Ada juga proses demokratis seperti pemilu. Sejauh mana internet digunakan untuk membuat proses tersebut menjadi lebih terbuka dan dapat diakses. Dan indikator lainnya yakni apakah pemerintah/negara punya hak untuk mengambil internet dari masyarakat (menutup akses internet)?

KELOMPOK MARGINAL, MEDIA, DAN INTERNET

Aktivis dan mantan Direktur Eksekutif SEAPA, Gayathry Venkiteswaran, juga berbagi pengalaman dalam diskusi ini. Dia memulai ceritanya dengan penutupan banyak stasiun radio ketika junta militer Thailand melancarkan kudeta pada 2014.

Sejak reformasi terakhir jumlah stasiun radio mencapai 8.000, sebagian dari stasiun radio tersebut bersifat partisan.

Menurut dia, salah satu akibat dari aksi junta militer adalah pemindahan stasiun radio ke daerah perbatasan Thailand dan Myanmar. Ada banyak penduduk Myanmar yang tinggal di sana. Mereka juga terkena pengaruh.

Stasiun radio tersebut membantu memberikan informasi kesehatan bagi pengungsi, menyuarakan isu perempuan. Tapi karena situasi di Thailand, pekerja imigran dan pengungsi juga terpengaruh

oleh penduduk yang tinggal di daerah perbatasan Thailand dan Myanmar.

Stasiun radio tersebut beroperasi secara tradisional. Selain menggunakan frekuensi radio, stasiun radio itu juga mencoba menyampaikan pesan secara daring dan mengunggah percakapan dengan masyarakat. Stasiun radio tersebut juga menyampaikan berita berbasis teks dan juga mengandalkan internet.

Jadi banyak orang menganggap ini sebagai komunitas informal karena status pengungsi di sana juga masih dipertanyakan. Dan dari kisah ini dapat disimak bagaimana situasi negara mempengaruhi penduduk dan bagaimana mereka bertahan. Sementara pemerintah mengabaikan keadaan ini.

Kondisi serupa juga terjadi di Australia dan Papua Nugini. Ada kamp penampungan di sana untuk mengakomodasi pengungsi, dan di antara pengungsi terhadap seorang jurnalis keturunan Kurdi Iran yang mencari suaka, namanya Behrouz Boochani. Kondisi di kamp penampungan itu menyedihkan. Kondisi ini terungkap dari laporan media arus utama (*mainstream*).

Dan ada juga tahanan di sana yang merekam pengalaman mereka dan mengirimkannya dalam bentuk video, dokumentasi, dan foto ke sejumlah media. *New York Times* juga mendapatkannya.

Kisah yang ketiga terjadi di Papua Barat. Ada situs yang diblokir dan ini dilakukan karena alasan keamanan nasional. Hal serupa juga terjadi di India. Pemerintah India dulu pernah memblokir 22 aplikasi karena alasan keamanan nasional.

Artinya, masih ada tindakan yang sama untuk mengungkung kebebasan berekspresi oleh beberapa negara. Di sinilah perlunya memberikan perhatian terhadap aspek Universalitas Internet. Ini termasuk cara masyarakat dari berbagai lapisan menggunakan akses internet.

Masyarakat yang tahu tentang hak mereka akan memperoleh lebih banyak manfaat dibandingkan dengan masyarakat yang tidak tahu. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa media benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Mereka menggunakan *platform* ini untuk membagikan kisah mereka dari ponsel, laptop, dan di sini kebebasan tersebut harus dipertahankan. Tetapi di satu sisi, mereka hidup berpindah-pindah dan jarang sekali menetap sehingga akses terhadap internet itu tidak stabil dan sering kali mereka diawasi atau diintai. Keamanan mereka terancam dan data yang mereka unduh pun juga terbatas. Jadi, mereka harus sering kali mengganti kartu SIM ponselnya. Tetapi mereka juga berisiko kehilangan data yang dikirim karena sering kali mengganti kartu SIM.

Jadi, media dituntut untuk mengetahui strategi berkomunikasi dan keselamatan mereka juga terancam. Sering kali kewarganegaraan mereka tidak diakui dan mereka ada dalam keadaan darurat dan juga harus mengalami diskriminasi dari berbagai pihak. Jadi, ini memang situasi yang sungguh menantang.

Mereka adalah masyarakat yang menggunakan internet untuk memberikan informasi. Hal yang menarik adalah pemerintah jarang sekali mengakui keberadaan mereka dan memberikan perlindungan.

Sebenarnya ada pihak yang memanfaatkan mereka. Jadi, ada kontroversi di sini. Di satu sisi, ada pihak seperti ini tapi di sisi lain juga

ada perusahaan atau pihak yang memanfaatkan informasi yang mereka kirimkan.

Venkiteswaran menyarankan agar jurnalis bersikap kritis dan bijak menyikapinya. Mereka beroperasi di yurisdiksi yang unik. Media pun harus mengetahui siapa saja pengguna media. Dan dari pengguna tersebut, media perlu mengidentifikasi mana yang dikenal dan mana yang tidak.

Media pun juga harus bersikap terbuka tentang bagaimana cara komunitas mengakses media. Lalu juga ada aspek tentang partisipasi sehingga komunitas pengguna internet, media yang ada, perlu diketahui dan diidentifikasi. Media, menurut dia, juga harus fleksibel sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti ini.

KETERBUKAAN DAN KEPENTINGAN *MULTI-STAKEHOLDER*

Direktur Senior Kebijakan Internet Global the Internet Society, Constance Bommelaer mengatakan lembaganya, yang didirikan 25 tahun yang lalu, beroperasi di bawah Internet Engineering Task Force (IETF) yang menciptakan standar untuk internet.

Dia menyampaikan beberapa hal soal keterbukaan dan juga konsep *multi-stakeholder* dalam *governance*. Dia menyatakan perayaan Hari Kemerdekaan Pers dapat menjadi tonggak untuk pengembangan kerangka kebijakan dan untuk kajian akademis terkait dengan internet.

Kunci dari konsep keterbukaan, menurut dia, adalah untuk melihat dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan yang menggeluti dunia internet.

Masyarakat seharusnya memiliki akses terbuka terhadap berbagai gagasan dan informasi. Jadi ada beberapa keterbatasan teknis untuk alur informasi tersebut. Bommelaer baru saja membuat tulisan tentang penghentian atau penutupan internet.

Bisa saja ada penutupan oleh pemerintah. Bisa juga ada pembatasan akses yang terlihat jelas tapi ada juga yang mungkin tersembunyi, bisa saja ada teknik *screening* sehingga seseorang tidak menyadari bahwa internet dibatasi dan kebebasan untuk mengaksesnya telah dibatasi.

Dia menuturkan perlunya tolok ukur agar dapat memperkuat prinsip yang sedang dikembangkan terutama keterbukaan dan kebebasan. Dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, seharusnya ada akses yang setara bagi peluang ekonomi dengan keberadaan internet. Mungkin saja ada pembatasan pasar atau jasa yang ditawarkan kepada pengguna internet.

Dan terakhir, menurut dia, perlu arahan bagi pemangku kepentingan yang relevan, yang memiliki akses yang sama dan bernilai, untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan internet.

Menurut dia, ada juga ekosistem internet yang mulai mengundang keterlibatan pemerintah. Seiring dengan pengembangan standar teknis, penting juga untuk memastikan bahwa pemerintah mewakili warga negaranya dan ikut memberi masukan untuk perbaikan.

Jika menginginkan konsep keterbukaan lebih efektif dan bermakna bagi semua pengguna internet maka kesuksesan Universalitas Internet bergantung pada kemampuan pemangku kepentingan untuk memahami kompleksitasnya.

Berger menambahkan jika indikator Universalitas Internet ini disetujui maka negara anggota dapat mengklaim bahwa mereka

sekarang mempunyai indikatornya. UNESCO tidak dapat mendikte negara yang menyetujuinya.

Contohnya di Kamerun di Afrika yang memblokir akses internet berbahasa Inggris selama lebih dari 100 hari. Sebagian penduduk negara itu berbahasa Inggris sedangkan sebagian lainnya berbahasa Prancis. Akibat blokir itu, puluhan ribu orang tidak dapat mengakses internet berbahasa Inggris. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Jika indikator Universalitas Internet sudah disetujui maka mereka dapat mengatakan ke pemerintah, bahwa ada standar yang disetujui oleh UNESCO terkait dengan akses internet. Dengan demikian siapa pun tidak boleh memblokir akses internet. Masyarakat dapat mengingatkan pemerintah bahwa aturan ini bersifat universal.

Venkiteswaran mengatakan di negara asalnya ada rencana untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan pita lebar (*broadband*) guna memastikan bahwa setiap warga negara terhubung dengan internet.

Menurut dia, setiap orang perlu untuk terus memantau isu seperti ini. ASEAN juga memiliki rencana untuk ICT, meskipun sebagian besar penduduk kawasan ini tidak mengetahui rencana pembangunan fasilitas tersebut. Tetapi ini belum memasukkan dan memperhitungkan aspek keamanan. Artinya rencana ICT dan *broadband* ini harus dilihat secara menyeluruh.

Dia juga mengomentari soal kedaulatan wilayah. Dan yang menarik adalah ketika ada negara yang mengatakan: “Ini wilayah kami”. Contohnya Laos yang mengandalkan pita lebar dari Thailand. Kerja samanya dapat dilakukan antarnegara atau antarperusahaan. Ini

tidak mungkin terwujud kalau ada negara yang sengaja membatasi fasilitas infrastruktur untuk mereka sendiri.

Menurut Cannataci, Universalitas Internet berkaitan dengan kedaulatan. Ini seperti kejadian 20-25 tahun yang lalu ketika orang mulai dapat memperoleh akses telepon di negara manapun. Dan untuk negara di Afrika atau India, seperti diketahui ada internet yang tidak berbasis LAN yang memiliki perkembangan yang sangat luar biasa.

Internet yang dapat berpindah-pindah tersebut berkembang dengan sangat pesat. Ini mengaburkan batas kedaulatan suatu negara. Jadi ketika orang menggunakan fasilitas VPN, untuk melakukan kegiatan daring, mereka dapat mengakses dan mengirimkan data ke mana saja, membaca, menerima informasi, segala jenis informasi. Jadi ini juga sejalan dengan prinsip HAM.

Blicher mengatakan seharusnya tidak ada pihak manapun yang dapat menutup internet, seperti yang dilakukan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dia pernah memblokir Twitter atau Facebook di negaranya. Di China dan Kamerun juga pernah ada kejadian serupa. Jika 155 negara yang tergabung dalam UNESCO menyatakan bahwa seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan maka upaya untuk mewujudkan Universalitas Internet akan menjadi semakin mudah.

GENDER DAN UNIVERSALITAS INTERNET

Khandhadai menyampaikan sejumlah hal terkait gender dan Universalitas Internet, terutama terkait dengan masalah penggunaan internet dan teknologi untuk pemberdayaan perempuan.

Misalnya di Afrika, kata Khandhadai, perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman dan hak yang berbeda. Secara umum di

sana terdapat diskriminasi terhadap perempuan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Terkadang internet atau dunia maya memberikan anonimitas yang dapat melemahkan kekuatan perempuan di *platform* tersebut.

Padahal mereka seharusnya dapat menggunakan internet untuk mengekspresikan diri. Selain itu, perempuan mengalami pengawasan berdasarkan seksualitas. *Big data* juga dapat disalahgunakan untuk memarginalkan peran perempuan sekaligus mengawasi mereka secara diskriminatif. Hal itu dilakukan bukan oleh pemerintah saja, tapi lebih sering oleh keluarga dan laki-laki yang berhubungan dengan mereka.

Ada juga kekerasan berdasarkan gender di internet. Perempuan menghadapi masalah kekerasan yang luas biasa di internet, dan biasanya ini terkait dengan aktivitas mereka dalam menyuarakan pendapat politik di internet. Misalnya ada pornografi yang menyerang privasi mereka. Sayangnya tidak ada data gender yang relatif lengkap baik di tingkat nasional maupun internasional. Akibatnya analisis gender sulit dilakukan.

Sebelumnya pada 2012-2014, ditemukan bahwa perempuan yang berusia 18-30 tahun mengalami kekerasan dan diskriminasi tertinggi dan biasanya ini berujung pada kemunduran bagi mereka. Perempuan ini kemudian menarik diri dari internet.

Khandhadai menuturkan seharusnya internet menjadi *platform* atau sarana di mana perempuan dapat mengambil kembali kebebasan mereka untuk menyuarakan pendapat. Tetapi jika internet ternyata merupakan forum yang penuh dengan kekerasan dan hal lain yang tidak membantu mereka maka hal itu memberikan tekanan baru.

Sehingga akhirnya perempuan menarik diri dari ruang tersebut. Akibatnya kesenjangan yang muncul di dunia nyata akan semakin besar. Dia kembali menekankan bahwa ketika membicarakan Universalitas Internet, masalah gender perlu diperhatikan dan diintegrasikan. Ini sama sekali bukan soal jumlah, misalnya berapa perempuan yang berinteraksi di internet atau berapa konten yang ditujukan untuk mereka, tapi ini adalah tentang konteks yang lebih luas.

Juga terkait dengan ekonomi, perempuan biasanya menghadapi kesenjangan atau tantangan ekonomi yang tidak dimiliki lawan jenis mereka. Masalah *mysogeny* dan budaya akhirnya membuat perempuan terisolasi dan ini membatasi mereka dalam mengakses internet secara bebas.

Terkait dengan kekerasan yang dialami jurnalis perempuan, Blicher menekankan perlunya masalah itu untuk segera disikapi dan ditangani. Diperlukan indikator untuk melihat bentuk pengamanan dan panduan seperti yang terlihat di Swedia. Dan tentunya perlu juga dilihat indikator tentang hal tersebut di media, ini berhubungan dengan data dan cara mengukurnya.

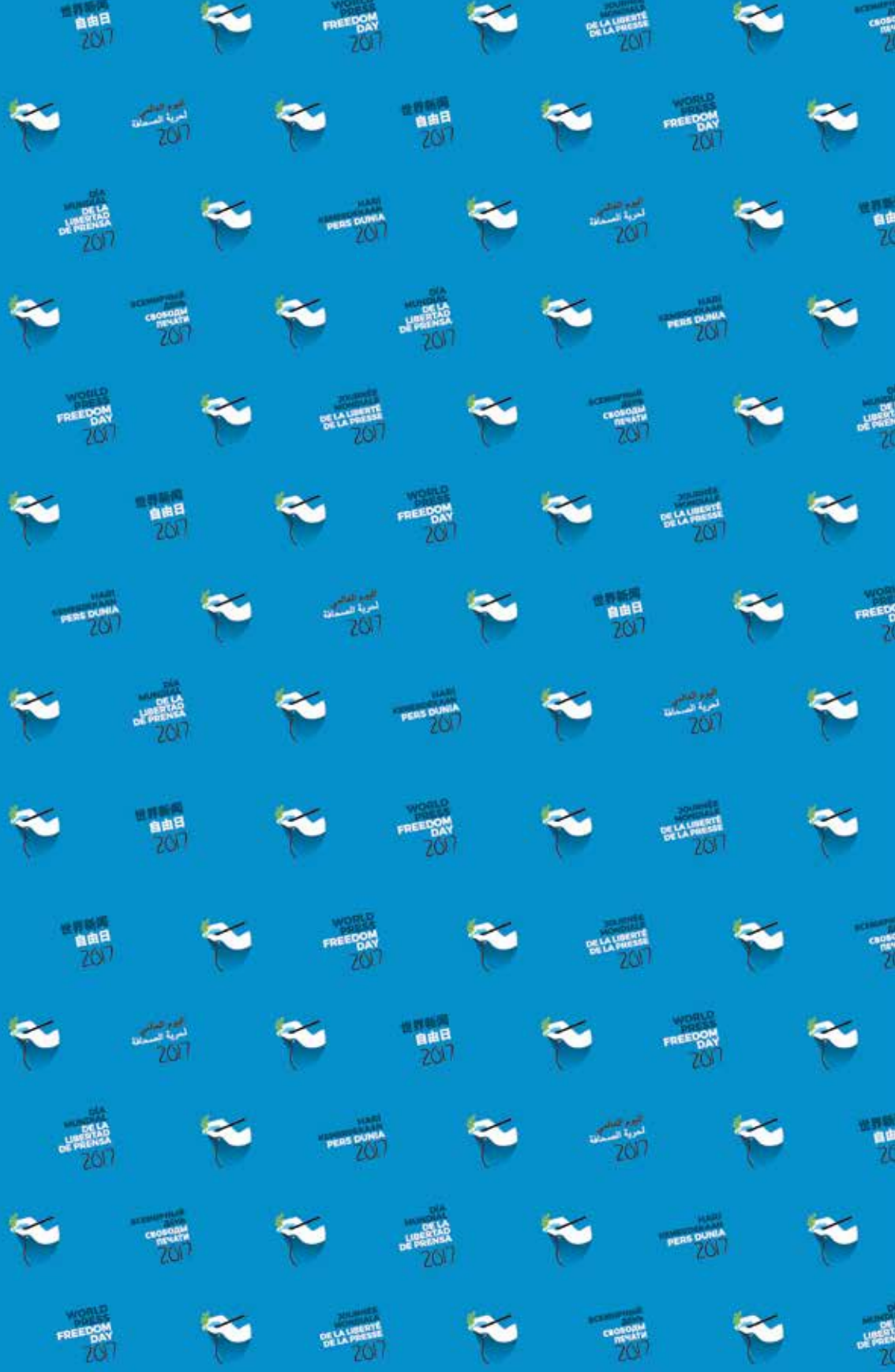
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan menghadapi kendala budaya, misalkan di bidang infrastruktur. Ini sebenarnya belum tentu menjadi bagian dari budaya setempat melainkan praktik yang sudah lama berjalan. Jadi hal ini dapat juga dijadikan bahan diksusi untuk Universalitas Internet.

Bommelaer menambahkan bahwa budaya mempengaruhi penduduk di wilayah tertentu termasuk dalam hal akses internet karena internet memungkinkan seseorang untuk berhubungan dengan orang di wilayah lain.

Internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lokal suatu negara. Ada contoh konkret yang terjadi beberapa tahun terakhir, dan ini dapat menjadi sarana untuk memajukan budaya tertentu.

Jadi seseorang dapat mengetik nama situs dengan menggunakan bahasanya sendiri, dalam bahasa Jepang atau Tiongkok misalnya, untuk pencarian data yang dibutuhkan.

Berdasarkan riset OECD dan UNESCO, semakin banyak konten lokal yang diunggah maka biaya untuk mengakses internet di wilayah tersebut bisa semakin murah. Ini merupakan salah satu cara agar konten lokal semakin banyak diangkat, diunduh, dan dipublikasikan di internet.



LAMPIRAN



Peraturan Dewan Pers
Nomor 1 /Peraturan-DP/I11/20 13
Tentang
PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
WARTAWAN

I. Pendahuluan

Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi.

Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar "mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen." Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap

wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.

II. Latar Belakang

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadai. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999.

III. Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.

IV. Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintang wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.

5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

V. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.
6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.

VI. Langkah Penanganan

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
2. Verifikasi untuk menentukan:
 - a) Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak.
 - b) Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.
3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya.
4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:
 - a) Langkah litigasi.
 - b) Langkah nonlitigasi.
5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan. Proses evakuasi korban atau keluarganya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian.

VII. Tanggung Jawab Perusahaan Pers

1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi:

2. a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta;
3. b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum;
4. c) memberikan pendampingan hukum.
5. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.
6. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
7. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.
8. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

VIII. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan

1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini.
2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak

tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

IX. Tanggung Jawab Dewan Pers

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.
5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

X. Ketentuan Penutup

1. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini.
2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap

wartawan dan media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.

3. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh korban tanpa tekanan dari pihak mana pun. Penyelesaian nonlitigasi harus melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2012



UN PLAN OF ACTION ON THE SAFETY OF JOURNALISTS AND THE ISSUE OF IMPUNITY

1. Introduction

“Every journalist killed or neutralized by terror is an observer less of the human condition. Every attack distorts reality by creating a climate of fear and self-censorship”¹

1.1. In recent years, there has been disquieting evidence of the scale and number of attacks against the physical safety of journalists and media workers as well as of incidents affecting their ability to exercise freedom of expression by threats of prosecution, arrest, imprisonment, denial of journalistic access, and failures to investigate and prosecute crimes against them. This evidence has been repeatedly brought to the attention of the international community by inter-governmental organizations, professional associations, non-governmental organizations (NGOs) and other stakeholders.

1.2. Statistics gathered by UNESCO, as well as by other organizations such as the Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Sans Frontières (RSF), the International News Safety Institute (INSI), the International Freedom of Expression Exchange (IFEX) and the Inter American Press Association (IAPA) all testify to the staggering number of journalists and media workers killed while performing their professional duties.

1.3. Furthermore, according to IFEX, in nine out of ten cases, the

¹Barry James in Press Freedom: Safety of Journalists and Impunity. UNESCO Publications: 2002

perpetrators of these crimes are never prosecuted. Impunity, which may be understood as the failure to bring perpetrators of human rights violations to justice, perpetuates the cycle of violence against journalists and must be addressed.

- 1.4. The safety of journalists and the struggle against impunity for their killers are essential to preserve the fundamental right to freedom of expression, guaranteed by Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. Freedom of expression is an individual right, for which no one should be killed, but it is also a collective right, which empowers populations through facilitating dialogue, participation and democracy, and thereby makes autonomous and sustainable development possible.
- 1.5. Without freedom of expression, and particularly freedom of the press, an informed, active and engaged citizenry is impossible. In a climate where journalists are safe, citizens find it easier to access quality information and many objectives become possible as a result: democratic governance and poverty reduction; conservation of the environment; gender equality and the empowerment of women; justice and a culture of human rights, to name a few. Hence, while the problem of impunity is not restricted to the failure to investigate the murders of journalists and media workers, the curtailment of their expression deprives society as a whole of their journalistic contribution and results in a wider impact on press freedom where a climate of intimidation and violence leads to self censorship. In such a climate societies suffer because they lack the information needed to fully realize their potential. Efforts to end impunity with respect to crimes against journalists must be associated with the defence and protection of human rights defenders, more generally. In addition, the protection of journalists should not be limited to those formally recognised as journalists, but should cover others, including community media workers and citizen journalists and others who may be using new

media as a means of reaching their audiences.

- 1.6. Promoting the safety of journalists and fighting impunity must not be constrained to after-the-fact action. Instead, it requires prevention mechanisms and actions to address some of the root causes of violence against journalists and of impunity. This implies the need to deal with issues such as corruption, organized crime and an effective framework for the rule of law in order to respond to negative elements. In addition, the existence of laws that curtail freedom of expression (e.g. overly restrictive defamation laws), must be addressed. The media industry also must deal with low wages and improving journalistic skills. To whatever extent possible, the public must be made aware of these challenges in the public and private spheres and the consequences from a failure to act. The protection of journalists should adapt to the local realities affecting journalists. Journalists reporting on corruption and organized crime, for example, are increasingly targeted by organized crime groups and parallel powers. Approaches that are tailored to local needs should be encouraged.
- 1.7. In light of the above, a number of measures have been adopted by the United Nations (UN) to strengthen legal frameworks and enforcement mechanisms designed to ensure the safety of journalists in both conflict and non-conflict areas. The UN's strengths and opportunities lie in the areas of building free, independent and pluralistic media as well as the legal frameworks and democratic institutions to support it.
- 1.8. At the international level, the UN Security Council adopted Resolution S/RES/1738 in 2006, which established a coherent, action-oriented approach to the safety of journalists in armed conflicts. Since then, the UN Secretary-General has presented an annual report to the General Assembly on the implementation of this Resolution.

- 1.9. Additionally, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) plays an important role in raising awareness regarding the issue, including through its reports to the Human Rights Council (HRC). It works in close cooperation with the United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Expression and Opinion and is mandated to: gather information relating to violations of freedom of expression; seek, receive and respond to relevant information from governments, NGOs and other parties; and make recommendations on how best to promote freedom of expression. A number of other Special Rapporteurs, including the Special Rapporteur on Extra-judicial, Summary or Arbitrary Execution; the Special Rapporteur on Violence Against Women; the Special Rapporteur on Torture and the Working Groups on Forced Disappearances and Arbitrary Detentions are also all relevant in this regard.
- 1.10. As the United Nations specialized agency with a mandate to ‘promote the free flow of ideas by word and image’², the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has been an important player in the defence of freedom of expression through the promotion of the safety of journalists and the fight against impunity. Often in collaboration with other organizations, UNESCO has taken a number of decisive actions in this field. For example, it has been working together with Reporters Sans Frontières (RSF) to publish a regularly updated practical guide for journalists working in conflict zones, now available in ten languages. In 2008, UNESCO co-authored a Charter for the Safety of Journalists Working in War Zones or Dangerous Areas, which includes a commitment by the media, public authorities and journalists to systematically seek ways to reduce the risks involved. It has also supported a number of organizations to

²UNESCO Constitution 1945, Article 1

provide safety and risk awareness training for journalists and media workers.

- 1.11. In addition to these practical steps, UNESCO has undertaken a number of activities designed to raise awareness about journalists' safety and the issue of impunity. Among UNESCO's flagship activities in this area are World Press Freedom Day, celebrated every year on May 3rd, and the Guillermo Cano/UNESCO World Press Freedom Prize, intended to honour the work of an individual or an organization defending or promoting freedom of expression anywhere in the world, especially in dangerous conditions. The importance of this issue was further highlighted by the *Medellin Declaration*³ of 2007, which specifically focuses on securing the safety of journalists and combating impunity in both conflict and non-conflict situations, and the Belgrade Declaration of 2004, which focused on supporting media in violent conflict-zones and countries in transition. In line with Resolution 29, of the 29th session of UNESCO's General Conference, the Director General has, since 1997, publicly condemned the killing of individual journalists and media workers, as well as massive and repetitive violations of press freedom and urged the competent authorities to discharge their duty of preventing, investigating and punishing such crimes. Finally, the International Programme for the Development of Communication (IPDC) plays a crucial role in promoting the safety of journalists and combating impunity. As well as developing projects to address this issue in the field, IPDC has, since 2008, encouraged Member States to submit information, on a voluntary basis, on the status of the judicial inquiries conducted on each of the killings condemned by UNESCO, for inclusion in a public report submitted every two years to the IPDC Council by the Director-General.

³Read Medellin Declaration at <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/medellin-declaration/>

- 1.12. International legal instruments represent one of the key tools that the international community, including the United Nations (UN), has at its disposal in the struggle for the safety of journalists and against impunity. These are internationally recognized and often legally binding. Relevant conventions, declarations and resolutions include the Universal Declaration of Human Rights; the Geneva Conventions; the International Covenant on Civil and Political Rights; UN Commission on Human Rights Resolution 2005/81; the UN Security Council Resolution 1738 (2006).
- 1.13. Regional systems in the human rights context are also essential, instituted within the framework of regional and sub-regional organisations such as the Organization of American States (OAS) and the Union of South American Nations (UNASUR); the African Union (AU); the Association of South East Asian Nations (ASEAN), the League of Arab States, the Council of Europe (CoE) and the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Whilst there are many international legal instruments addressing human rights in general, only a small number are specifically concerned with the situation of journalists and their safety.
- 1.14. Some of the regional systems are also reinforced by monitoring bodies which observe the level of state compliance with their commitments, and call attention to violations when necessary. These include the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression within the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR), the Special Rapporteur on the Freedom of Expression and Access to Information within the African Commission on Human and Peoples' Rights in Africa, and the Special Representative on Freedom of the Media in the OSCE.

- 1.15. At the national level, many agencies, funds and programmes of the UN system are also working toward an approach which promotes the safety of journalists and addresses the issue of impunity. This is relevant to the UN strategic discussions and joint programming within the Delivering As One framework.
- 1.16. While recognizing that investigating crimes against journalists remains the responsibility of Member States, the acts of violence and intimidation (including murder, abduction, hostage-taking, harassment, intimidation and illegal arrest and detention) are becoming ever more frequent in a variety of contexts. Notably, the threat posed by non-state actors such as terrorist organizations and criminal enterprises is growing. This merits a careful, context-sensitive consideration of the differing needs of journalists in conflict and non-conflict zones, as well as of the different legal instruments available to ensure their protection. It also necessitates an investigation into how the dangers faced by journalists in situations that do not qualify as armed conflicts in the strictest sense (such as sustained confrontation between organized crime groups) may be dealt with.
- 1.17. Female journalists also face increasing dangers, highlighting the need for a gender-sensitive approach. In carrying out their professional duties, they often risk sexual assault, whether in the form of a targeted sexual violation, often in reprisal for their work; mob-related sexual violence aimed against journalists covering public events; or the sexual abuse of journalists in detention or captivity. Furthermore, many of these crimes are not reported as a result of powerful cultural and professional stigmas.⁴

⁴Lauren Wolfe, *The Silencing Crime: Sexual Violence Against Journalists*. Committee to Protect Journalists: 2011,

⁵27th IPDC Decision on the Safety of Journalist and the Issue of Impunity. Available at http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ipdc2010_safety_decision_final.pdf

1.18. There is a pressing need for the various UN agencies, funds and programmes to develop a single, strategic and harmonized approach to the issue of the safety of journalists and the impunity of perpetrators of crimes against them. In light of this, in March 2010, the Intergovernmental Council of the IPDC⁵ called on the Director-General of UNESCO “to consult with Member States on the feasibility of convening an inter-agency meeting of all relevant UN agencies, funds and programmes in order to design a joint UN strategy on the Safety of Journalists and the Issue to Impunity.” On the basis of the responses received following this consultation, the UNESCO Director-General decided to organize a UN Inter-Agency Meeting on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity in September 2011. The conclusions drawn from this meeting will be articulated in a Plan of Action, which will formulate a comprehensive, coherent, and action-oriented UN-wide approach to the safety of journalists and the issue of impunity.

2. Justification

2.1. This Plan of Action is needed to uphold the fundamental right of freedom of expression and, in so doing, to ensure that citizens are well informed and actively participate in society at large. The United Nations agencies, funds and programmes are collectively well-placed to address this issue. They possess long-established platforms through which to voice concerns and propose solutions and a vital network of partner organizations and UN offices in the field. In addition, as intergovernmental organizations they can encourage Member State cooperation and sharing of best practices, as well as exercise “quiet diplomacy” with Member States when necessary.

3. Principles

The proposed Action plan is based on the following principles:

- 3.1. Joint action in the spirit of enhancing system-wide efficiency and coherence;
- 3.2. Building on the strengths of different agencies to foster synergies and to avoid duplication;
- 3.3. A results-based approach, prioritizing actions and interventions for maximum impact;
- 3.4. A human rights-based approach;
- 3.5. A gender-sensitive approach;
- 3.6. A disability-sensitive approach;
- 3.7. Incorporation of the safety of journalists and the struggle against impunity into the United Nation's broader developmental objectives;
- 3.8. Implementation of the principles of the February 2005 Paris Declaration on Aid Effectiveness (ownership, alignment, harmonisation, results and mutual accountability);
- 3.9. Strategic partnerships beyond the UN system, harnessing the initiatives of various international, regional and local organizations dedicated to the safety of journalists and media workers;
- 3.10. A context-sensitive, multi-disciplinary approach to the root causes of threats to journalists and impunity;
- 3.11. Robust mechanisms (indicators) for monitoring and evaluating the impact of interventions and strategies reflecting the UN's core values.

4. Objective

- 4.1. Working toward the creation of a free and safe environment for journalists and media workers in both conflict and non-conflict

situations, with a view to strengthening peace, democracy and development worldwide.

5. Proposed Actions

Strengthening UN Mechanisms

- 5.1. Identify the role of UN agencies, funds and programmes in combating impunity surrounding attacks against journalists and its wider causes with a view toward establishing focal points in order to strengthen the specific contribution of each relevant UN actor by creating effective forms of intervention to achieve the goals set out in the Plan of Action beginning with regular inter-agency meetings, for example;
- 5.2. In order to enhance UN system-wide coherence, establish a coordinated inter-agency mechanism for follow-up and evaluating matters of concern on the issue of the safety of journalists and impunity, including regular reviews of progress at the national and international level and continuing to address the issue by supporting a joint message on the occasion of World Press Freedom Day on the situation of media freedom around the world, for example;
- 5.3. Incorporate the issues of the safety of journalists and of the impunity of attacks against them into UN strategies at country level. This would mean, for example, encouraging the inclusion of an indicator on the safety of journalists based on the UNESCO Media Development Indicators in country analysis and taking the findings into consideration in programming;
- 5.4. More generally, promote the inclusion of freedom of expression and media development goals, in particular the safety of journalists and impunity, within the wider UN development agenda;
- 5.5. Work toward strengthening the office of the UN High Commissioner for Human Rights, as well as the mandate and

⁶Adopted by the UNESCO's General Conference on 12 November 1997.

resources of the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, and of the Special Rapporteurs on Extra-judicial Summary or Arbitrary Executions, Violence Against Women and Torture.

Cooperating with Member States

- 5.6. Assist Member States to develop legislation and mechanisms guaranteeing freedom of expression and information, including, for example, requirements that States effectively investigate and prosecute crimes against freedom of expression;
- 5.7. Assist Member States to fully implement existing international rules and principles, as well as to improve, where needed, national legislation on safeguarding journalists, media professionals and associated personnel in conflict and non-conflict situations;
- 5.8. Encourage Member States to take an active role in the prevention of attacks against journalists, and take prompt action in response to attacks by establishing national emergency mechanisms, which different stakeholders can adopt, for example;
- 5.9. Encourage Member States to comply fully with UNESCO General Conference Resolution 29⁶, entitled ‘Condemnation of Violence against Journalists,’ which calls upon Member States to adopt the principle that there should be no statute of limitations on persons guilty of crimes against freedom of expression; to refine and promote legislation in this field and to ensure that defamation becomes a civil, not a criminal action;
- 5.10. Encourage Member States to comply with the IPDC’s Decisions on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, and submit information on the actions taken to prevent impunity for killings of journalists, and on the status of the judicial inquiries conducted on each of the killings condemned by UNESCO;

- 5.11. Encourage Member States to explore ways of broadening the scope of Security Council Resolution 1738, to include the promotion of the safety of journalists and the fight against impunity in non-conflict situations as well.

Partnering with Other Organizations and Institutions

- 5.12. Reinforce collaboration between UN agencies and other intergovernmental organizations, at both international and regional levels, and encourage the incorporation of media development programmes, in particular on the safety of journalists, into their strategies;
- 5.13. Strengthen partnerships between the UN and civil society organizations and professional associations dedicated to monitoring the safety of journalists and media workers at national, regional and international levels. This could include sharing up-to-date information and best practices with partner organizations and field offices and conducting joint missions and investigations into particular cases;
- 5.14. Whereas corruption can affect all sectors of society, in line with the principles of the UN Convention against Corruption, work with journalist organisations to develop good practices on reporting on corruption and jointly participate at the International Anti-Corruption Day (9 December).

Raising Awareness

- 5.15. Sensitize Member States on the importance of freedom of expression and the dangers that impunity for crimes against media professionals represents for freedom and democracy;
- 5.16. Sensitize journalists, media owners and policy-makers on existing international instruments and conventions, as well as various existing practical guides on the safety of journalists;
- 5.17. Sensitize news organizations, media owners, editors and

- journalists on the dangers confronting their staff, particularly those faced by local journalists;
- 5.18. Sensitize all the above parties to the growing dangers posed by all actors and work against hostage-taking, sexual violence, kidnapping, wrongful arrest and other forms of punishment and other emerging threats to media professionals, including non-state actors;
 - 5.19. Sensitize the general public on the importance of the safety of journalists and the fight against impunity, through promoting global awareness campaigns, such as UNESCO's World Press Freedom Day;
 - 5.20. Encourage journalism education institutions in developing curricula, which include material relevant to the safety of journalists and impunity;
 - 5.21. Disseminate best practices on the safety of journalists and counteracting impunity;

Fostering Safety Initiatives

- 5.22. Urge all stakeholders, and in particular the media industry and its professional associations, to establish general safety provisions for journalists, including but not limited to safety training courses, health care and life insurance, access to social protection and adequate remuneration for free-lance and full-time employees;
- 5.23. Develop accessible, real-time emergency response mechanisms for groups and media organizations, including contacting and engaging available UN resources and missions and other groups working in the field;
- 5.24. Strengthen provisions for the safety of journalists in conflict zones, for example by encouraging the creation of so-called 'media corridors' in close cooperation with UN staff on the ground.

6. Follow-up Mechanisms

- 6.1. Establishment of a network of focal points on issues about the safety of journalists in all relevant UN agencies, funds and programmes in order to develop effective measures to promote the safety of journalists and combat impunity, coordinate actions and exchange information and whenever possible also to publicize it.
- 6.2. Scheduling meetings of relevant UN agencies, funds and programmes on a regular basis, at international level and also at national level in cooperation with the UN Country Teams (UNCT), with participation of relevant professional associations, NGOs and other stakeholders.
- 6.3. Entrust overall coordination of UN efforts on the safety of journalists to UNESCO, in cooperation with other UN agencies, in particular with the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the UN Secretariat in NY.
- 6.4. Present a finalised UN Plan of Action to the IPDC Council at its next session in March 2012, as well as the High Level Committee on Programmes (HLCP) and the Chief Executive Board (CEB) at their next meetings.

GALERI FOTO WPFD 2017

Hari ke-1



Kedatangan para peserta acara.



Menkominfo RI menjawab pertanyaan wartawan di Media Center.



Gun Gun Siswadi, Staf Ahli Menkominfo (*duduk keempat dari kiri*), di forum yang diorganisir Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).



Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, R. Niken Widiastuti (*ketiga dari kanan*) pembicara di forum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).



Forum tentang peran media dalam situasi konflik dan krisis yang diorganisir Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).



Workshop yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).



Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel A. Pangerapan (ketiga dari kiri) menjadi pembicara forum WPF 2017.



Professional Journalist Against Hoax diorganisir oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (JTI).



Pertemuan anggota Southeast Asia Journalist Union (SEAJU).

Hari ke-2





Pembukaan pameran foto 10 Windu ANTARA oleh Direktur Utama LKBN ANTARA Meidy-atama Suryodiningrat (*ketiga dari kiri*).



Workshop manajemen media yang diadakan Serikat Perusahaan Pers (SPS).



Forum WFPD 2017 tentang upaya menghadapi berita hoax yang diorganisir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Hari ke-3



Kedatangan Wapres RI Jusuf Kalla dan Dirjen UNESCO Irina Bokova di tempat acara WPF 2017.



Sambutan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di pembukaan WPF 2017.

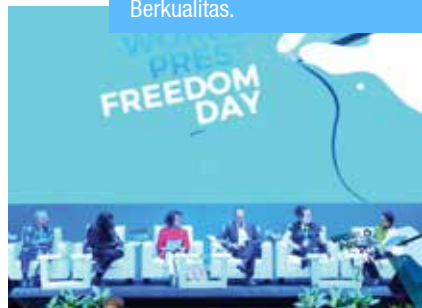


Sambutan Dirjen UNESCO Irina Bokova.



Mantan Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta sebagai pembicara di sesi pleno 1.

Kegiatan Sesi Pleno 1 yang membahas topik Jurnalisme Berkualitas.





Martha Mendoza, pemenang Pulitzer (*ketiga dari kir*), berbicara di sesi paralel 6.



Ratna Komala, Anggota Dewan Pers, membahas Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia.



Penyerahan tanda penghargaan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar kepada Richard Gingras, pembicara utama sesi pleno 1.



Pembahasan topik “Dampak Berita Bohong dan Media Sosial terhadap Jurnalisme” oleh Imam Wahyudi, Anggota Dewan Pers (*ujung kanan*).



Penandatanganan penerbitan seri perangko khusus WPFID Indonesia 2017.



PT Pos Indonesia mengabadikan Peringatan Hari Pers Dunia dalam terbitan seri perangko khusus WPFID Indonesia 2017.



Konferensi pers Wapres Jusuf Kalla didampingi Menkominfo Rudiantara (*ujung kiri*), Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (*kedua dari kiri*), Dirjen UNESCO Irina Bokova (*kedua dari kanan*) dan Jimmy Silalahi (*ujung kanan*).



Sambutan Presiden RI Joko Widodo pada acara pemberian penghargaan UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017.



Pemberian penghargaan UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017 oleh Dirjen UNESCO Irina Bokova kepada Dawit Isaak yang diwakili oleh puterinya Bethlehem Isaak.



Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menyerahkan cinderamata kepada DG UNESCO Irina Bokova.



Presiden RI Joko Widodo berfoto bersama para tamu undangan VIP dalam acara Gala Dinner.

Hari ke-4



Wahyu Djatmika, Redaktur Majalah Tempo (*ketiga dari kiri*), berbicara di sesi “Sorotan pada Jurnalisme Investigatif”.



Para pembicara sesi paralel membahas topik “Menangkap Ketidakadilan Melalui Lensa”.



Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Hilmar Farid (*ketiga dari kanan*) menjadi narasumber dalam sesi paralel WPF 2017.



Pidato penutupan WPF 2017 oleh ADG UNESCO Frank La Rue



Adopsi Deklarasi Jakarta oleh Direktur Freedom of Expression and Media Development UNESCO Guy Berger.



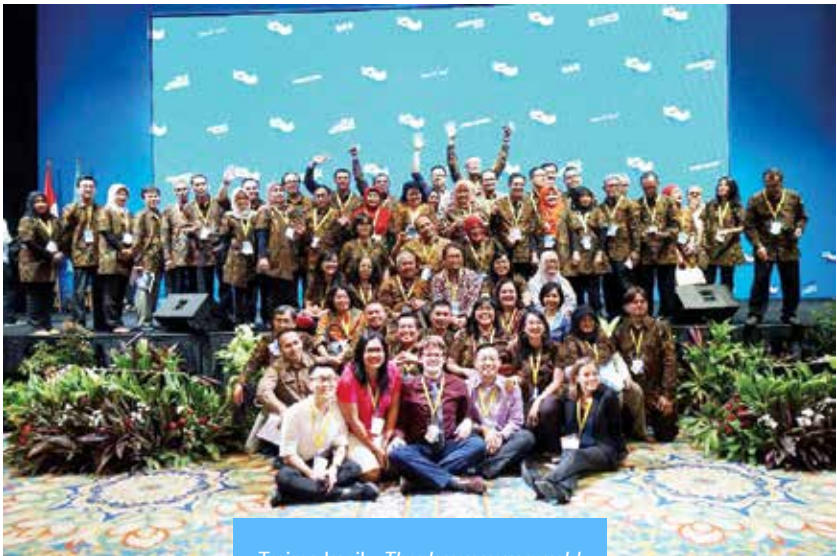
Penyerahan replika burung garuda oleh Menkominfo Rudiantara kepada Asisten Dirjen Komunikasi dan Informasi UNESCO Fank La Rue sebagai simbol penyerahan acara WPF 2017 kepada negara tuan rumah selanjutnya.



Pemukulan beduk oleh Menkominfo Rudiantara bersama para tamu undangan sebagai tanda ditutupnya WPF 2017.



Youth Newsroom WPF 2017 yang diorganisir oleh Universitas Multimedia Nusantara.



Terima kasih. *Thank you very much!*

